



Walikota Pariaman
DR. GENIUS UMAR. S.Sos, M.Si



Wakil Walikota Pariaman
Drs. MARDISON MAHYUDDIN, MM

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

BAPPEDA

TAHUN 2021

KOTA PARIAMAN



SABIDUAK SADAYUANG



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 44 TAHUN 2021

T E N T A N G
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklator Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 3);
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Pengelola Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Walikota dan Wakil Walikota Pariaman sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Kerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Pariaman untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan :

- a. bagi seluruh stakeholder pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
- b. dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022; dan
- c. dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2022 oleh Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2022 memuat :
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. program prioritas pembangunan daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *corona virus disease 19*.
- (2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

RKPD Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- g. BAB VII : PENUTUP

Pasal 5

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 5 Juli 2021



Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 5 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 44

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

Nomor : 44 Tahun 2021

Tanggal : 05 Juli 2021

Tentang :

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022**

**BAPPEDA KOTA PARIAMAN
2021**

DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		viii
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1 Latar Belakang		2
1.2 Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pariaman Tahun 2022		3
1.3 Prinsip Penyusunan RKPD		6
1.4 Dasar Hukum Penyusunan		6
1.5 Hubungan antara Dokumen		8
1.6 Maksud dan Tujuan		10
1.7 Sistematika Penulisan		10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH		15
2.1 Aspek Geografi dan Demografi		16
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat		35
2.3 Aspek Pelayanan Umum		56
2.4 Aspek Daya Saing Daerah		125
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH		129
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah		130
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah		143
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022		173
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan		174
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2022		184
4.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2022		196
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN		232





2022.....

BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	235
BAB VII	PENUTUP.....	244



DAFTAR TABEL

Tabel 2.2	Kondisi Topografi Kota Pariaman.....	18
Tabel 2.3	Jenis dan Luas Tanah di Kota Pariaman.....	20
Tabel 2.4	Ketinggian, Panjang Garis Pantai Kota Pariaman Menurut Kecamatan.....	21
Tabel 2.5	Penggunaan Lahan Kota Pariaman Tahun 2020.....	22
Tabel 2.6	Perkembangan Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kota Pariaman Tahun 2010 – 2020.....	28
Tabel 2.7	Proporsi Penduduk Kecamatan di Kota Pariaman Tahun 2020.....	29
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk berdasarkan Desa Tahun 2016-2019.....	29
Tabel 2.9	Kepadatan Penduduk Kota Pariaman tahun 2020.....	32
Tabel 2.10	Kepadatan Penduduk berdasarkan Luas Lahan Efektif Per Desa.....	32
Tabel 2.11	Penduduk Menurut 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2020.....	35
Tabel 2.12	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	37
Tabel 2.13	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha di Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	39
Tabel 2.14	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020 (Jutaan Rupiah).....	39
Tabel 2.15	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	40
Tabel 2.16	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020.....	42
Tabel 2.17	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2016 – 2020 (Jutaan Rupiah).....	44
Tabel 2.18	PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran Tahun 2015 – 2019 (Jutaan Rupiah).....	44
Tabel 2.19	Pendapatan per kapita Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	45
Tabel 2.20	Kondisi Kemiskinan Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	48
Tabel 2.21	Peringkat Angka Harapan Lama Sekolah Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.....	51
Tabel 2.22	Peringkat Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.....	53
Tabel 2.23	Peringkat Angka Usia Harapan Hidup Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020..	55
Tabel 2.24	Indikator Urusan Ketenagakerjaan.....	56
Tabel 2.25	Jumlah Angkatan Kerja dan Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2016-2020.....	56



Tabel 2.26	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Pariaman Tahun 2016-2020...	57
Tabel 2.27	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Pariaman Tahun 2016–2020.....	58
Tabel 2.28	Data Kondisi PAUD Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	59
Tabel 2.29	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	60
Tabel 2.30	Rasio Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	61
Tabel 2.31	Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	62
Tabel 2.32	Rasio Jumlah Murid terhadap Jumlah Kelas Menurut Permendikbud No.17 Tahun 2017...	63
Tabel 2.33	Angka Putus Sekolah Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	63
Tabel 2.34	Angka Kelulusan Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	64
Tabel 2.35	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Tahun 2019 – 2020.....	65
Tabel 2.36	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2016 2020.....	66
Tabel 2.37	Sarana Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	67
Tabel 2.38	Tenaga Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	68
Tabel 2.39	Rasio Posyandu dan Balita Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	69
Tabel 2.40	Rasio Kunjungan Balita ke Posyandu di Kota Pariaman Tahun 2020.....	70
Tabel 2.41	Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	72
Tabel 2.42	Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Di Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	73
Tabel 2.43	Angka Kematian dan Kelahiran Bayi di Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	73
Tabel 2.44	Angka Kematian Ibu di Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	74
Tabel 2.45	Pravelensi Kasus Stunting Balita di Kota Pariaman Tahun 2020.....	74
Tabel 2.46	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.....	77
Tabel 2.47	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Pariaman Tahun 2016– 2020.....	79
Tabel 2.48	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	80
Tabel 2.49	Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Di Kota Pariaman Tahun 2016– 2020.....	80
Tabel 2.50	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	81
Tabel 2.51	Persentase Luas Lahan Pertanian yang terairi Irigasi Di Kota Pariaman Tahun 2016-2020	81
Tabel 2.52	Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Tahun 2016- 2020.....	82
Tabel 2.53	Persentase RT Yang Memenuhi Syarat.....	83
Tabel 2.54	Persentase RT dengan SPAL yang Memenuhi Syarat.....	84
Tabel 2.55	Perkiraan Kebutuhan Air Minum di Kota Pariaman Tahun 2030.....	85
Tabel 2.56	Perkembangan Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	86



Tabel 2.57	Kawasan Pemukiman Kumuh Per kecamatan Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	87
Tabel 2.58	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	88
Tabel 2.59	Angka kriminalitas di Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	88
Tabel 2.60	Jumlah kasus bencana kebakaran di Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	89
Tabel 2.61	Data Bencana di Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	90
Tabel 2.62	Perkembangan Indikator Urusan Sosial Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	90
Tabel 2.63	Perkembangan Indikator Urusan Tenaga Kerja Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	91
Tabel 2.64	Perkembangan Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	92
Tabel 2.65	Perkembangan Indikator Urusan Pangan Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	93
Tabel 2.66	Perkembangan Indikator Urusan Pertanahan Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	94
Tabel 2.67	Perkembangan Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	95
Tabel 2.68	Data Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2020.....	96
Tabel 2.69	Data Kepemilikan KTP-Elektronik di Kota Pariaman Tahun 2020.....	96
Tabel 2.70	Data Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2020.....	97
Tabel 2.71	Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2020.....	97
Tabel 2.72	Data Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2020 Kota Pariaman.....	98
Tabel 2.73	Data Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020 Kota Pariaman.....	98
Tabel 2.74	Perkembangan Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	99
Tabel 2.75	Perkembangan Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	99
Tabel 2.76	Perkembangan Indikator Urusan Perhubungan Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	100
Tabel 2.77	Capaian Kinerja Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020.....	101
Tabel 2.78	Cakupan Sinyal Telekomunikasi di Kota Pariaman Tahun 2020.....	101
Tabel 2.78	Jenis koneksi internet yang dimanfaatkan di seluruh Desa di Kota Pariaman Tahun 2020..	103
Tabel 2.80	Perkembangan Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	105
Tabel 2.81	Perkembangan Koperasi dan Permodalan Kota Pariaman.....	106
Tabel 2.82	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kota Pariaman Tahun 2016 dan 2020 (koperasi).....	106
Tabel 2.83	Perkembangan Indikator Urusan Urusan Penanaman Modal Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	107
Tabel 2.84	Perkembangan Indikator Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	108



Tabel 2.85	Perkembangan Indikator Urusan Statistik Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	109
Tabel 2.86	Perkembangan Indikator Urusan Kebudayaan Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	110
Tabel 2.87	Perkembangan Indikator Urusan Perpustakaan Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	110
Tabel 2.88	Perkembangan Indikator Urusan Kearsipan Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	111
Tabel 2.89	Perkembangan Indikator Urusan Kelautan Dan Perikanan Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	112
Tabel 2.90	Nama Objek Wisata di Kota Pariaman Menurut Jenisnya dan Kecamatan Tahun 2020.....	113
Tabel 2.91	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2016-2020.....	114
Tabel 2.92	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2016-2020.....	115
Tabel 2.93	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2016-2020.....	116
Tabel 2.94	Perkembangan capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Perindustrian Tahun 2016-2020.....	117
Tabel 2.95	Predikat Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2016 – 2020...	118
Tabel 2.96	Penetapan Perda Tepat Waktu 5 Tahun Terakhir.....	118
Tabel 2.97	Perkembangan Indikator Urusan Perencanaan Pembangunan Kota Pariaman Tahun 2016-2020	119
Tabel 2.98	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2016-2020....	119
Tabel 2.99	Perkembangan Indikator Urusan Kepegawaian Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	120
Tabel 2.100	Perkembangan Indikator Unsur Pendidikan dan Pelatihan Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	121
Tabel 2.101	Jumlah Inovasi berdasarkan Inisiator.....	122
Tabel 2.102	Jumlah Usulan Inovasi Perangkat Daerah di Kota Pariaman tahun 2021.....	123
Tabel 2.103	Jumlah Auditor di Kota Pariaman Tahun 2018-2020.....	124
Tabel 2.104	Capaian Nilai Sakip dan Indeks RB Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	124
Tabel 2.105	Perkembangan Pengeluaran konsumsi rumah tangga Perkapita Kota Pariaman Tahun 2015-2019 (Juta/Rupiah).....	126
Tabel 2.106	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas di Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	127
Tabel 2.107	Produktivitas Total Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	128
Tabel 2.108	Perkembangan Indikator Daya Saing Daerah Bidang Perhubungan Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	130
Tabel 2.109	Perkembangan Jumlah Restoran Di Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	130
Tabel 2.110	Perkembangan Jumlah Hotel Di Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	131
Tabel 2.111	Perkembangan Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air minum bersih Kota Pariaman Tahun 2015-2019.....	131
Tabel 2.112	Perkembangan Indikator Fokus Iklim Berinvestasi Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	131



Tabel 2.113	Perkembangan Indikator Fokus Sumber Daya Manusia Kota Pariaman Tahun 2016-2020.	132
Tabel 2.114	Perkembangan Indikator Fokus Sumber Daya Manusia.....	133
Tabel 3.1	Pemulihan Ekonomi Global.....	109
Tabel 3.2	Komponen Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penggunaan.....	111
Tabel 3.3	Komponen Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha.....	112
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Nasional.....	112
Tabel 3.5	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2015 – 2019 (Jutaan Rupiah).....	115
Tabel 3.6	PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran Tahun 2015 – 2019 (Jutaan Rupiah).....	115
Tabel 3.7	Pendapatan per kapita Kota Pariaman Tahun 2015 – 2019.....	116
Tabel 3.8	Proyeksi Indikator Ekonomi Kota Pariaman 2022.....	121
Tabel 3.9	Realisasi Pendapatan Kota Pariaman Tahun 2017 s/d 2020 dan Target Pendapatan Tahun 2022.....	123
Tabel 3.10	Persentase Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun 2017- 2020 dan Proyeksi Tahun 2020 (RKPD dan RPJMD).....	125
Tabel 3.11	Proyeksi Penerimaan Pendapatan Kota Pariaman Tahun 2022	127
Tabel 3.12	Realisasi Belanja Tahun 2017 s/d 2022 dan Target Belanja 2020 serta Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022.....	130
Tabel 3.13	Prosentase Kontribusi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung daerah Tahun 2017 s/d 2019 dan Proporsi Belanja Tahun 2020-2022 Berdasarkan PP 12 Tahun 2019.....	133
Tabel 3.14	Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 s/d 2020 dan Target Pembiayaan Tahun 2021 serta Proyeksi Pembiayaan Tahun 2022.....	137
Tabel 3.15	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Pariaman Tahun 2022.....	139
Tabel 3.16	Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Kota Pariaman Tahun 2021.....	140
Tabel 3.17	Perhitungan Kebutuhan Belanja & Pengeluaran Pembiayaan Daerah Yang Mengikat Pada RKPD Kota Pariaman Tahun 2022.....	141
Tabel 3.18	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2022.....	141
Tabel 3.19	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah (Pengeluaran Wajib Tidak Mengikat) Kota Pariaman Tahun 2022.....	142
Tabel 3.20	Proyeksi Struktur Keuangan Daerah Tahun 2022.....	143
Tabel 4.1	Matriks Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	152
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pariaman Tahun 2022.....	155
Tabel 4.3	Agenda Untuk Fokus Pembangunan Nasional.....	162
Tabel 4.4	Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Kota Pariaman Tahun 2022.....	167
Tabel 4.5	Visi. Misi. Tujuan Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	162





Tabel 6.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 Pemerintah Kota Pariaman..	202
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2022.....	203



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Proses Penyusunan RKPD Kota Pariaman Tahun 2022.....	5
Gambar 1.2	Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	9
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Pariaman.....	17
Gambar 2.2	Peta Jumlah Penduduk Menurut Desa Pada Kota Pariaman Tahun 2020.....	30
Gambar 2.3	Kepadatan Penduduk berdasarkan Kepadatan Netto Per Kelurahan/Desa.....	34
Gambar 2.4	Piramida Penduduk Kota Pariaman Tahun 2020.....	35
Gambar 2.5	Perkembangan PDRB ADHK Kota Pariaman Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Rp. Juta).....	37
Gambar 2.6	Perkembangan PDRB ADHB Kota Pariaman Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Rp. Juta)	40
Gambar 2.7	Perkembangan Kontribusi 3 Kategori Terbesar PDRB ADHB Kota Pariaman Tahun 2016-2020 (%).....	41
Gambar 2.8	Persandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumbar dan Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	42
Gambar 2.9	Perkembangan Pendapatan Perkapita Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	44
Gambar 2.10	Perkembangan Indeks Gini Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	45
Gambar 2.11	Persandingan Angka Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	47
Gambar 2.12	Persandingan Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	48
Gambar 2.13	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	49
Gambar 2.14	Angka Rata-rata Lama Sekolah (AHLS) Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	50
Gambar 2.15	Usia Harapan Hidup Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020.....	53
Gambar 2.16	Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	93
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pariaman di Bandingkan Dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020.....	114
Gambar 3.2	Perkembangan Pendapatan Perkapita Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	116
Gambar 3.3	Perkembangan Indeks Gini Kota Pariaman Tahun 2016-2020.....	117
Gambar 4.1	Kerangka Logis Pencapaian Visi RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023.....	148
Gambar 4.2	Kerangka Pikir RKPD Kota Pariaman Tahun 2022.....	158





Gambar 4.3	Agenda/Tema Pembangunan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023.....	160
Gambar 4.4	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional Dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pariaman.....	161
Matrix	Rencana Program dan Kegiatan Berdasarkan OPD Tahun 2021	274



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pariaman merupakan rencana kerja pemerintah tahunan yang diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD. Penyusunan Rancangan Awal RKPD berpedoman pada RPJMD, rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Barat, RKP (Rencana Kerja Pemerintah), program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 Ayat (2) Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai penting, antara lain:

1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD;
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD;
5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Dengan diterbitkannya Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, menjadi babak baru bagi Pemerintah Kota Pariaman dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Nomenklatur yang semula hanya pada level Program dan Kegiatan, kini menjadi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Pengelolaan data perencanaan pembangunan yang semula menggunakan eplanning Kota Pariaman, kini harus berganti menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang disediakan oleh Kemendagri.



RKPD Kota Pariaman Tahun 2022 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Menurut ketentuan perundang-undangan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang disusun mengacu pada RPJMD Kota Pariaman 2018-2023, RPJMN Tahun 2020-2024, RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, Pemerintah Daerah Provinsi Kota Pariaman masih dihadapkan pada tantangan penanganan virus COVID-19. Seperti diketahui bersama bahwa penyebaran pandemi COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan dunia yang sampai saat ini masih terdapat indikasi penyebaran pandemi COVID-19 yang belum menurun, bahkan ada di beberapa negara timbul varian baru. Sehingga diprediksi tahun 2022 pandemi COVID-19 ini masih ada di Indonesia dan diperkirakan akan terkendali pada tahun 2022, apabila vaksin tersebut telah tersedia dan sudah terdistribusi kepada sebagian masyarakat Indonesia serta dapat memberikan hasil yang sesuai dengan harapan. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama yang mulai terlepas dari tekanan pandemi COVID-19 dan merupakan tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pariaman Tahun 2022 ini, upaya penanganan pandemi COVID-19 dilakukan secara komprehensif melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak pandemi COVID-19, serta pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial.

Dalam RKPD Kota Pariaman Tahun 2022, beberapa asumsi yang digunakan dalam pembangunan daerah, secara umum dapat disampaikan antara lain:

- 1) Masyarakat diharapkan dapat hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19 seiring dengan adanya vaksin;
- 2) Transaksi digital menjadi preferensi masyarakat dalam bertransaksi jual beli dan sebagainya;
- 3) Pemanfaatan program relaksasi kredit berjalan optimal tetapi memerlukan dukungan stimulus modal;
- 4) Aktivitas industri manufaktur, investasi, dan pariwisata mulai bergerak (kapasitas produksi dan tenaga kerja) terkait penerapan protokol kesehatan pada lini produksi.

Dalam menjalankan proses penyusunan beberapa metode pelaksanaan dilakukan sebagai bagian dari perwujudan pendekatan pendekatan di atas yaitu:

- 1) Kolaborasi pemangku kepentingan pembangunan



- 2) Kolaborasi pendanaan pembangunan dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, dana masyarakat/umat, dan CSR
- 3) Penerapan *dynamic government* sebagai inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 4) Pendekatan spasial dan a-spasial melalui 6 (enam) wilayah pengembangan;
- 5) Sinkronisasi aplikasi dan interkoneksi data dalam:
 - a. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
 - b. Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat;
 - c. Sistem Monitoring Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran
 - d. Satu *Data* Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

1.2 Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pariaman Tahun 2022

Penyusunan RKPD Kota Pariaman Tahun 2022 dilaksanakan melalui pendekatan :

1. Top-down, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh konsistensi Penyusunan RKPD yang mengacu kepada tiga Dimensi Pembangunan yang tertulis dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
2. Bottom-up, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang Desa, Kecamatan, Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD, Forum OPD, dan Musrenbang RKPD. Dilaksanakan sejak Bulan Januari Tahun 2021, dengan hasil prioritas usulan dari setiap tahapan yang mengerucut sampai dengan Acara Puncak Musrenbang Kota Pariaman yang dilaksanakan pada bulan April 2021.
3. Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi. Hal ini ditunjukkan oleh diakomodasinya saran dan pendapat dari Akademisi dan praktisi pembangunan.
4. Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan diakomodasinya pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman.
5. Partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah.



Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, maka proses penyusunan RKPD Kota Pariaman Tahun 2022 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 dengan berpedoman kepada sasaran-sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025, Rancangan Awal RKP Tahun 2022, hasil evaluasi RPJMD 2018-2023, evaluasi RKPD Tahun 2020 dan evaluasi RKPD tahun berjalan.
2. Penyusunan Rancangan RKPD dilakukan melalui tahapan-tahapan mulai dari tahapan awal yang terdiri dari Musrenbang Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut dari hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan, hasil Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat dan Daerah, hasil pembahasan dalam Forum Perangkat Daerah. Selanjutnya draft rancangan RKPD dibahas secara intensif melalui rangkaian Pramusrenbang, Rapat Koordinasi Pembangunan Kabupaten/Kota, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD serta Musrenbang Kota.
3. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kota Pariaman Tahun 2022, melalui tahapan pembahasan Prioritas Pembangunan sampai dengan program dan kegiatan oleh Bappeda (desk trilateral meeting) pada rangkaian Musrenbang Kota, dan memperhatikan pokok-pokok pikiran dari DPRD Kota Pariaman serta pendapat dari kalangan perguruan tinggi, dunia usaha dan komunitas.
4. Penetapan dokumen RKPD Kota Pariaman Tahun 2022 yang berpijak kepada Rancangan Akhir RKPD Kota Pariaman Tahun 2022, hasil Pra Musrenbang/Musrenbang Kota serta Pra Musrenbang/Musrenbang Provinsi serta verifikasi akhir untuk program dan kegiatan prioritas untuk kemudian diterbitkan dalam Peraturan Walikota tentang RKPD Kota Pariaman Tahun 2022

Adapun dalam penyusunan dokumen RKPD Kota Pariaman, dapat dilihat gambar 1.1. Alur Proses Penyusunan RKPD Kota Pariaman Tahun 2022. Sebagaimana berikut dibawah ini:





Gambar. 1.1
Alur Proses Penyusunan RKPD Kota Pariaman Tahun 2022



Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pariaman Tahun 2022



1.3 Prinsip Penyusunan RKPD

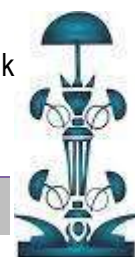
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Perencanaan pembangunan Daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
3. Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4. Perencanaan pembangunan Daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
5. Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
6. Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan dengan spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (resources availability) dan memperhatikan fungsi waktu (times), yang disingkat SMART.

1.4 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan RKPD Kota Pariaman Tahun 2022 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- g. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklator Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);



- I. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 3);
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

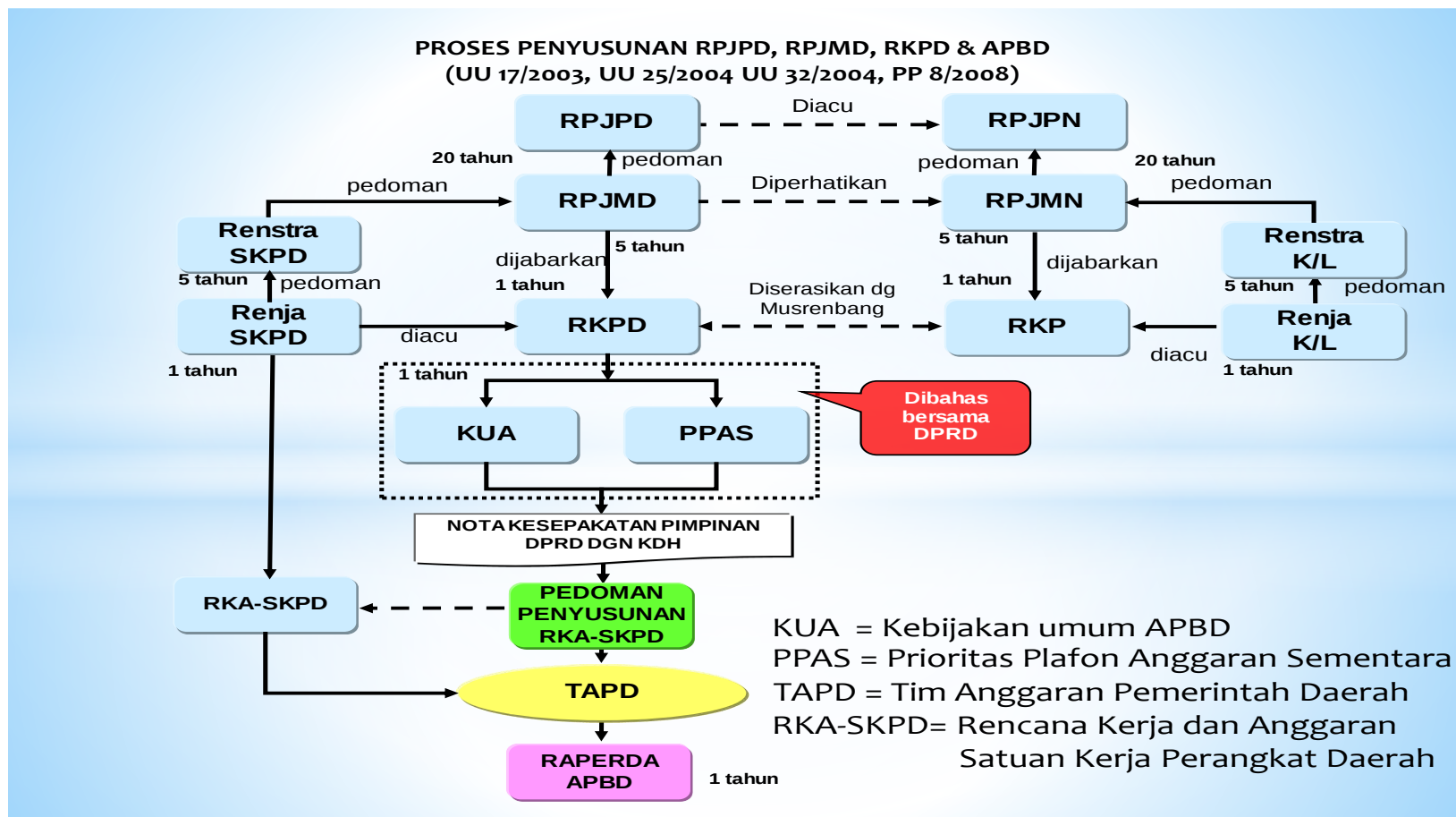
1.5 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Kota Pariaman Tahun 2022 diperlukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Hubungan antar dokumen perencanaan pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022 disajikan dalam gambar, berikut dibawah ini :



Gambar 1.4

Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



RKPD Kota Pariaman Tahun 2022 disusun dengan berpedoman kepada sasaran pokok RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025, arah kebijakan dan isu strategis RKP Tahun 2022, dan RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030 dan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023. Dokumen RKPD Kota Pariaman Tahun 2022 merupakan acuan pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022, yang terdiri atas Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang dituangkan secara detail di dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA Perangkat Daerah (PD).

1.6 Maksud dan Tujuan

Maksud dari RKPD Kota Pariaman Tahun 2022 adalah menyusun rencana pembangunan sebagai acuan/pedoman penganggaran tahunan daerah.

Adapun tujuannya adalah:

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kota Pariaman;
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika utama penulisan RKPD Kota Pariaman Tahun 2022 merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan struktur sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pariaman Tahun 2022

1.2 Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pariaman Tahun 2022

Menjelaskan tentang pendekatan yang digunakan dalam menyusun RKPD Kota



Pariaman Tahun 2022.

1.3 Prinsip Penyusunan RKPD

Menjelaskan prinsip-prinsip perencanaan sesuai dengan: (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

1.4 Landasan Hukum

Menjelaskan Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pariaman Tahun 2022

1.5 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pariaman Tahun 2022 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

1.6 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pariaman Tahun 2022

1.7 Sistematika Penulisan

Memuat sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pariaman Tahun 2022

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan gambaran umum aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum/publik dan aspek daya saing daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020 sampai dengan



RKPD Tahun berjalan dan Realisasi capaian kinerja s.d tahun 2020 RPJMD Tahun 2018-2023.

Menjelaskan realisasi pencapaian sasaran pembangunan RPJMD Tahun 2018-2023 serta pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023 dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pariaman Tahun 2020, dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2021 pada triwulan I yang dilengkapi dengan uraian permasalahan dan rekomendasi

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Menjelaskan permasalahan utama terkait aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah yang memerlukan solusi dan akselerasi pembangunan yang lebih komprehensif pada Tahun 2022.

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah

3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi Nasional dan Provinsi, dan Daerah Tahun 2022, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi Tahun 2022.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun 2022 serta pendanaan pembangunan lainnya.

BAB IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan Visi dan Misi yang mencakup tujuan dan sasaran pembangunan

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Menjelaskan prioritas pembangunan nasional, sasaran pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah serta sasaran pembangunan daerah.

BAB V Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah



Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

6.1 Penetapan Indikator dan Target Kinerja Utama

Menjelaskan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun 2022.

6.2 Penetapan Indikator dan Target Kinerja Kunci

Menjelaskan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir Tahun 2022.

BAB VII Penutup

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD Tahun 2022.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi bertujuan untuk memberikan gambaran dan hasil analisis dari aspek geografi mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu pada kota Pariaman.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Pariaman yang resmi terbentuk dengan berlakunya Undang- Undang No. 12 Tahun 2002, dimana terletak dalam posisi geografis antara 00° 33' 00 " – 00° 40' 43" Lintang Selatan dan 100° 04' 46" – 100° 10' 55" Bujur Timur. Kota Pariaman merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki wilayah pesisir dan laut. Kota Pariaman ini mempunyai luas wilayah darat keseluruhan 73,36 Km² dengan 4 buah pulau-pulau kecil: Pulau Ujung, Pulau Tengah, Pulau Angso dan Pulau Kasiak dengan panjang garis pantai 12 km. Kota Pariaman ini terdiri dari 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Pariaman Tengah, Pariaman Timur dan Pariaman Selatan dengan 71 kelurahan/desa. Luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Jumlah Kecamatan dengan desa/kelurahan di Kota Pariaman

No	Kecamatan	Ibu Kota	Kelurahan	Desa	Luas Daerah (Km ²)
1	Pariaman Utara	Naras	-	17	23.35
2	Pariaman Tengah	Pariaman	16	6	15.68
3	Pariaman Selatan	Kurai taji	-	16	16.82
4	Pariaman Timur	Sei,Pasak	-	16	17.51
Kota Pariaman			16	55	73.36

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

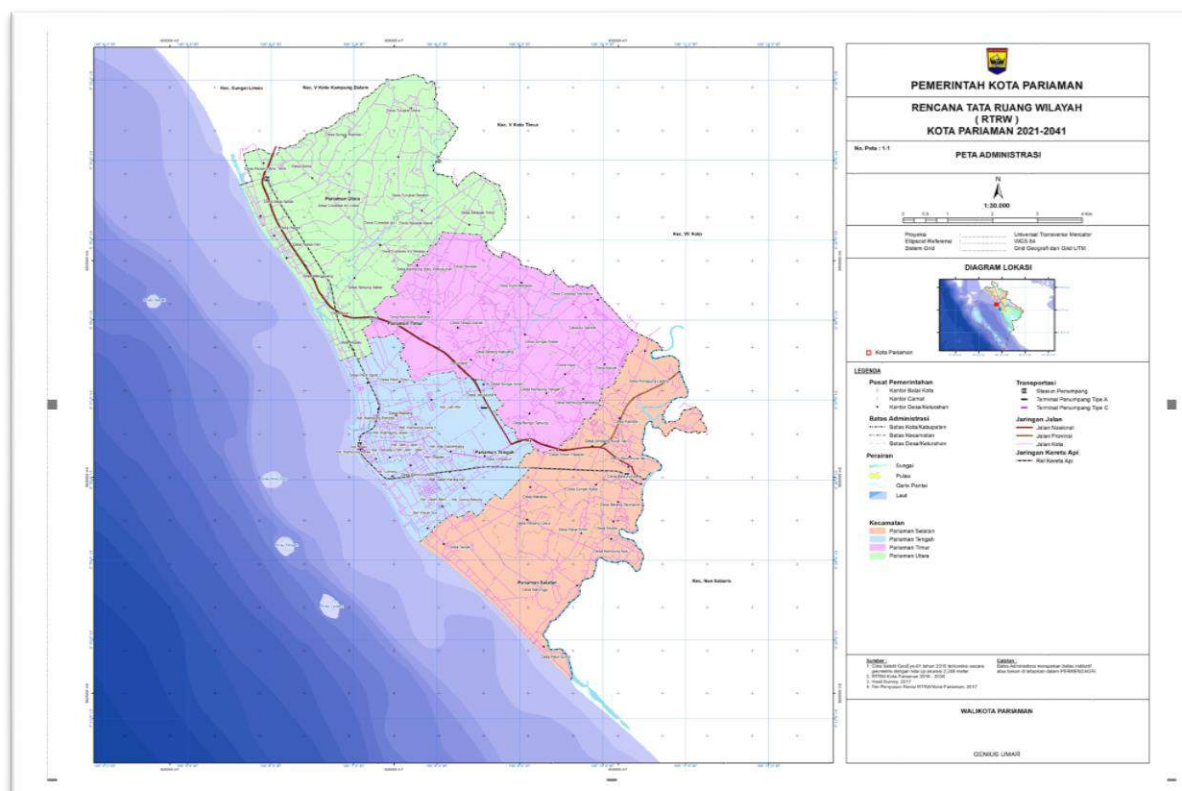
Kota Pariaman secara administrasi berbatasan langsung dengan daerah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan V Koto Kp. Dalam dan V Koto Timur (Kab. Padang Pariaman)
- 2) Sebelah Selatan : Kecamatan Nan Sabaris (Kab. Pd. Pariaman)
- 3) Sebelah timur : Kecamatan VII Koto Sungai Sarik (Kab. Pd. Pariaman)
- 4) Sebelah Barat : Samudra Indonesia



Secara lokasi, wilayah Kota Pariaman diapit oleh Kabupaten Padang Pariaman dan Samudera Indonesia ini mempunyai kedudukan strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya, dan juga diperkuat oleh dukungan aksesibilitas terhadap Kabupaten Padang Pariaman yang nantinya akan mendorong akselerasi peningkatan status perekonomian masyarakat Kota Pariaman yang akan datang. Untuk lebih jelasnya peta administrasi Kota Pariaman dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Pariaman



Sumber : RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030

2.1.1.2 Topografi

Kota Pariaman merupakan hamparan dataran rendah yang terletak di pantai barat Provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian antara 2 sampai dengan 35 m diatas permukaan laut dengan luas daratan 73,36 km² dan luas lautan 282,69 km² dengan 4 buah pulau-pulau kecil : Pulau Ujung, Pulau Tengah, Pulau Angso dan Pulau Kasiak. Panjang pantai lebih kurang 12,7 km.

Karena terletak di tepi pantai pada umumnya merupakan hamparan dataran rendah yang landai. Kondisi topografi Kota Pariaman dapat dikelompokkan kepada jenis morfologi dataran dengan ketinggian antara 2 –



35 meter di atas permukaan laut dengan sedikit daerah perbukitan. Luas kemiringan lahan dapat dirinci pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Kondisi Topografi Kota Pariaman

Kondisi Topografi	Luas (ha)	Persentase (%)
Datar (0-3%)	6.203	95,53%
Agak Landai (3-8%)	23	0.35%
Landai (8-15%)	48	0,74%
Agak Curam (15-25%)	25	0,39%
Curam (25- 40%)	194	2.99%
Jumlah	6.493	100,0%

Sumber : RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030

2.1.1.3 Geologi

Seperti pada umumnya daerah lain yang berada di bagian pantai barat pulau Sumatera, Kota Pariaman memiliki jenis batuan resen dan tufa vulkan. Batuan induk penyusun adalah Aluvium serta Tuf Batu Apung dan Andesit (basal).

Kota Pariaman secara geologis bersama dengan Kabupaten Padang Pariaman terletak pada dua jalur patahan lempeng dunia yaitu Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo – Australia dan topografi Padang Pariaman yang dilalui oleh banyak anak-anak sungai. Adapun jenis batuan yang terdapat di Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

1) Qal : Endapan Aluvial

Batuan Qal/endapan permukaan merupakan formasi geologi aluvium yang terdiri dari lanau, dan kerikil umumnya terdapat di daratan pantai, termasuk endapan rawa di sebelah utara tiku, sebelah Barat Daya Lubuk Alung dan sebelah Timur Padang.

2) Qpt : TUFT Batu apung dan andesit (basal).

Tuf batuapung umumnya terdiri dari serabut-serabut gelas dari 5 hingga 80% fragmen-fragmen batuapung putih (hampir tidak memiliki mineral-mineral mafik). Berukuran garis tengah 1 hingga 20 cm, agak kompak. Setempat terdapat lapisan-lapisan pasir yang kaya akan kuarsa, juga lapisan-lapisan kerikil yang terdiri dari komponen-komponen kuarsa, batuan gunung api dan batuan gamping. Setempat bongkahan-bongkahan obsidian dan pichstone berwarna kelabu kemerahan sampai kecoklatan baik yang masih segar maupun yang sudah lapuk. Endapan tuft ini mungkin berasal dari



erupsi terakhir Kaldera Maninjau atau erupsi celah yang hubungannya dengan jalur sesar besar Sumatera (Westerveld, 1953).

Secara fisik butiran penyusun tanah/batuan yang terdapat di Kota Pariaman yaitu lima satuan: satuan pasir, satuan pasir lempung-lanauan, satuan pasir lempungan, satuan lempungan pasir dan satuan lanau lempungan. Satuan butiran tanah pasir terdapat di kawasan pesisir. Satuan pasir lempungan terdapat pada dataran sementara satuan lanau lempungan terdapat pada daerah kearah timur. Satuan lempung pasir terdapat di bagian utara di daerah Tungkal Utara dan Tungkal Selatan.

Kondisi tanah wilayah Kota Pariaman umumnya memiliki kondisi yang relatif subur. Dengan kondisi seperti itu, maka kegiatan pertanian sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut di Kota Pariaman. Adapun jenis-jenis tanah yang terdapat di Kota Pariaman terdiri dari tanah Glaisol Distrik, Latosol Kronik, Andosol Humik, dan Volkan Datar, yang tersebar di ketiga kecamatan Kota Pariaman.

Berdasarkan sistem klasifikasi Soil Survey Staff USDA, jenis tanah yang terdapat di Kota Pariaman yaitu:

- 1) Satuan lahan tanah Dystropept, Paleudults, Tropaquept yang terdapat di dataran bergelombang di bagian utara.
- 2) Satuan tanah Tropaquets, Dystropepts, Tropopsamments, Tropofluvents yang terdapat pada daerah aliran sungai di bagian mengarah ke utara.
- 3) Satuan tanah Tropaquets, Tropohemist yang terdapat pada daerah dataran di bagian tengah.
- 4) Satuan tanah Tropopsamments, Tropaquets dan Sulfaquents yang terdapat di bagian barat di pesisir pantai.

Tabel 2.3
Jenis dan Luas Tanah di Kota Pariaman

Kondisi Topografi	Luas (ha)
Dystropepts, Paleudults, Tropaquepts	1.713
Tropaquepts, Dystropepts, Tropopsamments, Tropofluvents	1.263
Tropaquepts, Tropohemists	1.481
Tropopsamments, Tropaquets, Sulfaquents	2.036
Total Luas	6.493

Sumber: RTRW Kota Pariaman

2.1.1.4 Hidrogeologi

Berdasarkan peta hidrogeologi Indonesia lembar Padang maka terlihat ketersediaan air tanah di Kota Pariaman terdiri dari tiga tipe akuifer yaitu pertama, akuifer produktif dengan penyebaran luas yang



terdapat disebagian besar wilayah kota. Kedua, akuifer produktif sedang dengan penyebaran luas terdapat di bagian tenggara kota, dan ketiga, akuifer produktif sedang setempat terdapat di bagian tengah wilayah kota membelah dari utara ke selatan.

Keadaan topografi wilayah, geomorfologi dan bentuk wilayah secara bersama-sama membentuk pola aliran sungai. Kota Pariaman dilalui oleh 4 buah sungai yaitu Batang Manggung yang melalui Kecamatan Pariaman Utara, Batang Piaman dan Batang Jirak yang melewati Kecamatan Pariaman Tengah dan Batang Mangau yang melalui Pariaman Selatan. Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Pariaman termasuk kepada DAS Anai, Mangau, Manggung, Naras dan Pariaman yang berhulu di bagian utara di Kabupaten Padang Pariaman.

2.1.1.5 Geomorfologi

Geomorfologi Kota Pariaman terdiri atas dataran estuarin sepanjang hilir sungai pantai, Pada daerah sepanjang aliran sungai di bagian selatan terdapat dataran banjir pada sungai meander di bagian hilir pesisir. Dibagian tengah dan utara terdapat dataran vulkanik dan perbukitan vulkanik.

2.1.1.6 Klimatologi

Kota Pariaman merupakan daerah yang beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh angin barat dan memiliki bulan kering yang sangat pendek. Curah hujan pertahun mencapai angka sekitar 4.055 mm dengan lama hari hujan 198 hari. Suhu rata-rata 25,34°C, dengan kelembaban udara rata-rata 85,25 dan kecepatan angin rata-rata 1,80 km/jam. Musim kemarau dan musim hujan selalu berubah-ubah menurut waktu. Iklim yang demikian memungkinkan untuk tumbuhnya berbagai jenis tanaman, akan tetapi curah hujan dan tingkat kelembaban yang tinggi yang menimbulkan berbagai permasalahan, misalnya tanaman yang membutuhkan iklim musim kemarau tidak dapat tumbuh dengan baik, merupakan kendala bagi penanganan pasca panen komoditas tertentu yang memerlukan cuaca panas dan cerah selama proses pengeringan, kendala dalam penyimpanan komoditas, berkurangnya jumlah hari kerja produktif dan pengaruhnya negatif terhadap sejumlah komoditas. Iklim juga sangat mempengaruhi besarnya tangkapan ikan bagi nelayan.

Tabel 2.4
Ketinggian, Panjang Garis Pantai Kota Pariaman
Menurut Kecamatan

Kecamatan	Ketinggian (dpl)	Panjang Garis Pantai (Km)
Pariaman Selatan	0 – 10	3,30
Pariaman Tengah	0 – 10	4,30
Pariaman Timur	5 – 15	0,00
Pariaman Utara	0 – 10	4,40



Kota Pariaman

0 - 15

12,00

Sumber : RTRW Kota Pariaman

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Berdasarkan identifikasi citra satelit Geo-eye 01 tahun 2016 yang telah terkoreksi secara geometris dengan nilai uji akurasi 2,248 meter ditambah dengan survei lapangan pada tahun 2017 dihasilkan peta penggunaan lahan eksisting Kota Pariaman.

Berdasarkan informasi citra satelit dan survei lapangan dapat dipetakan kawasan pertanian, bentang alam pesisir, lahan tidak produktif dan berbagai pemanfaatan lahan kawasan terbangun seperti perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, pariwisata, industri, pendidikan, kesehatan, perhotelan, sarana sosial, dan RTH.

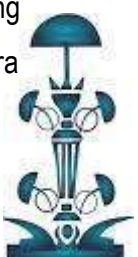
Tabel 2.5
Penggunaan Lahan Kota Pariaman Tahun 2020

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
1	Pemukiman	1.535	20,93%
2	Sawah	1.912	26,06%
3	Tegalan	25,2	0,34%
4	Kebun Campuran	2.691,87	36,70%
5	Perkebunan Rakyat	663,9	9,05%
6	Hutan	0	0,00%
7	Hutan Sejenis	9,2	0,13%
8	Semak/ Alangalang	89,50	1,22%
9	Kolam	0	0,00%
10	Lain-lain	408,9	5,57%
		7.335,57	100%

Sumber : Kota Pariaman Dalam Angka 2021

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Peraturan Pemerintah RI No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Revisi RTRWN menyebutkan bahwa Kawasan PALAPA sebagai pusat kegiatan Nasional (PKN) menggantikan Kota Padang Dengan pendekatan kewilayahan ini Kota Padang berfungsi sebagai kota inti dan Kota Pariaman serta Lubuk Alung sebagai kota satelit. Kawasan PALAPA dan penjabarannya lebih lanjut dalam RTRW Provinsi Sumatera



Barat menjadi kawasan metropolitan Painan-Solok-Padang-Lubuk Alung-Pariaman (PASOPALAPA) sebagai kawasan strategis Provinsi Sumatera Barat.

Dengan perubahan penetapan PKN ini maka konsekuensi pembangunan yaitu penyediaan sarana dan prasarana akan cenderung berskala regional (lintas daerah) perlu diprogramkan di wilayah PASOPALAPA dan arus pergerakan commuter antara Kota Padang dengan Kota Pariaman dengan kereta api maupun moda angkutan mobil penumpang akan semakin tinggi. Oleh karena itu Kota Pariaman perlu menyiapkan kawasan perdagangan dan wisata secara terpadu karena akan menjadi satu kesatuan wilayah pengembangan pesisir pantai yang terbentang dari Kota Pariaman – Kota Padang dan Kawasan Mandeh yang menjadi kawasan strategis wisata provinsi dan nasional.

Wilayah kota pada hakekatnya merupakan pusat kegiatan ekonomi yang dapat melayani wilayah kota itu sendiri maupun wilayah sekitarnya. Untuk dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial budaya, kota perlu dikelola secara optimal melalui suatu proses penataan ruang.

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 11 ayat 2, pemerintah daerah kota mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang wilayah kota dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Semua kegiatan penataan ruang kota tersebut pada dasarnya ditujukan sebagai upaya untuk :

- a. Mewujudkan optimasi dan sinergi pemanfaatan ruang wilayah secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional.
- b. Menciptakan keserasian dan keseimbangan antar wilayah, antar kawasan dan antar sektor pembangunan.
- c. Menciptakan keterpaduan program-program pembangunan wilayah.
- d. Mendorong minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah Kota Pariaman.

A. Kawasan Strategis Kota Pariaman

Kawasan strategis wilayah kota merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis Kota lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kota akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan strategis wilayah kota ditetapkan berdasarkan:

- a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;



- b. Nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
- c. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan terhadap tingkat kestrategisan nilai ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan pada kawasan yang akan ditetapkan;
- d. Daya dukung dan daya tampung wilayah kota; dan
- e. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan strategis wilayah kota ditetapkan dengan kriteria :

- a. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kota yang memiliki kekhususan;
- b. Memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis wilayah provinsi yang ada di wilayah kota;
- c. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kota yang jelas;
- d. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kota;
- e. Merupakan kawasan budidaya maupun kawasan lindung yang memiliki nilai strategis sosial budaya di wilayah kota;
- f. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kota;
- g. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

Kawasan strategis di Kota Pariaman terdiri dari:

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

1) Kerawanan Gempa

Daerah Sumatera Barat dan sekitarnya termasuk Daerah Rawan Gempa bumi Indonesia. Berdasarkan asal usul kejadiannya gempa bumi dapat dibagi menjadi dua bagian yakni gempa bumi yang berasal dari aktifitas tunjaman Lempeng Samudera Hindia-Australia yang berinteraksi dengan Lempeng Benua Asia di sebelah barat Sumatera dan gempa bumi yang berasal dari aktifitas gerak sesar aktif mendatar Sumatera. Jejak rekam gempa bumi merusak yang pernah terjadi akibat interaksi kedua lempeng tersebut di atas diantaranya adalah Gempa bumi Sumatera Barat (1822), Gempa bumi Siri Sori diikuti dengan tsunami (1904), Gempa Bumi Padang (1835, 1981 dan 1991). Gempa bumi tunjaman tersebut terjadi di dasar laut Samudera Hindia dengan kekuatan $> 6,5$ SR dapat memicu terjadinya gelombang



tsunami yang mengancam pantai barat Sumatera. Adapun gempa bumi sesar aktif Sumatera pernah terjadi 1926, 1943, 1977, 2004 dan 2007. Gempa bumi Padang-Pariaman yang terjadi pada tanggal 30 September 2009 berkekuatan 7,9 R dengan kedalaman 71 Km (BMG) merupakan gempa bumi aktifitas tunjaman pada bidang sentuh Lempeng Samudera Hindia-Australia dan Lempeng Benua Eropa-Asia (Eurasia) dan disebut sebagai gempa bumi Interface Plate Boundary Earthquake. Gempa bumi ini tidak menimbulkan tsunami disebabkan gempa bumi tersebut tidak mempunyai energi yang cukup untuk mematahkan permukaan dasar laut Samudera Hindia di sebelah barat Sumatera yang merupakan bagian dari Lempeng Benua Asia.

Pergerakan blok Mentawai di sebelah barat wilayah Kota Pariaman yang diperkirakan masih belum stabil dan mungkin masih menyisakan energi yang belum terlepas memerlukan perhatian tersendiri sebagai pemicu terjadinya gempa di wilayah Kota Pariaman. Instabilitas blok ini telah dikaji oleh para peneliti dari LIPI dan BPPT dan diperkirakan masih aktif di masa mendatang.

Gempa bumi 30 September 2009 adalah gempa bumi tektonik yang terjadi akibat patahnya lempeng tektonik Hindia-Australia dengan mekanisme mendatar mengiri naik berarah barat daya-timur laut (Strike= 70° Dip= 50° Slip= 132°) pada zona antara lempeng tektonik (Interface Plate Boundary Fault), Berdasarkan skala kerusakan bangunan Modified Mercally Intesity (MMI), intensitas maksimum Kota Padang mencapai VIII, sedangkan wilayah pesisir Kabupaten Padang Pariaman intensitas maksimum mencapai VII dan ke arah perbukitan Barisan turun hingga intensitas V – VI. Berdasarkan perhitungan percepatan gempa untuk periode ulang 100 tahun, Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman berkisar antara 0,25 g - 0,5 g.

Kerusakan bangunan umumnya disebabkan oleh struktur bangunannya belum dirancang sesuai tingkat kerawanan gempa di Sumatera Barat, disamping itu akibat timbulnya bahaya likuifaksi telah menyebabkan nilai daya dukung tanah menurun sehingga terjadi keruntuhan pondasi. Berdasarkan tingkat kerusakan ini maka Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman dapat dikategorikan pada intensitas V sampai VIII skala MMI.

2) Gerakan Tanah

Zona Kerentanan Gerakan Tanah ditentukan berdasarkan faktor penyebab kejadian, yakni: geologi, morfologi, curah hujan, tata guna lahan dan kegempaan. Geologi meliputi kondisi sifat fisik dan keteknikan batuan, tanah pelapukan, dan kedudukan batuan serta struktur geologi; morfologi meliputi kemiringan lereng medan; curah hujan meliputi intensitas dan lama hujan; tata lahan meliputi pengolahan lahan dan vegetasi penutup; dan kegempaan meliputi intensitas gempa. Berdasarkan faktor tersebut, daerah penyelidikan dibagi menjadi 4 (empat) zona, yaitu :

a) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah



Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan sangat rendah untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini sangat jarang atau tidak pernah terjadi gerakan tanah, baik gerakan tanah lama maupun gerakan tanah baru, kecuali pada daerah tebing sungai sepanjang alurnya.

Merupakan daerah datar, kemiringan lereng 0 - 5 % dan lereng tidak dibentuk oleh endapan gerakan tanah, bahan timbunan atau lempung yang bersifat mengembang. Vegetasi penutup berupa pemukiman, sawah, tegalan, kebun campuran dan perkebunan.

b) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini jarang terjadi gerakan tanah jika tidak mengalami gangguan pada lereng, dan jika terdapat gerakan tanah lama, lereng telah mantap kembali. Gerakan tanah berdimensi kecil mungkin dapat terjadi, terutama pada tebing lembah (alur) sungai. Kemiringan lereng mulai dari landai (5 – 15%) sampai sangat terjal (50 – 70%), tergantung pada kondisi sifat fisik dan keteknikan batuan dan tanah pembentuk lereng. Pada lereng terjal umumnya dibentuk oleh tanah pelapukan yang cukup tipis dan vegetasi penutup baik, umumnya berupa pemukiman, sawah, tegalan, kebun campuran, perkebunan dan hutan.

c) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan menengah untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir tebing jalan, atau jika lereng mengalami gangguan. Gerakan tanah lama dapat aktif kembali terutama akibat curah hujan yang tinggi. Kisaran kemiringan lereng mulai dari agak terjal (15 - 30%) sampai curam (>70%), tergantung pada kondisi sifat fisik dan keteknikan batuan dan tanah sebagai material pembentuk lereng. Pada lereng terjal umumnya dibentuk oleh tanah pelapukan yang cukup tipis dan vegetasi penutup berupa pemukiman, sawah, tegalan, kebun campuran, perkebunan dan hutan.

d) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini sering terjadi gerakan tanah, sedangkan gerakan tanah lama dan gerakan tanah baru masih aktif bergerak akibat curah hujan tinggi dan erosi kuat. Kisaran kemiringan lereng mulai dari agak terjal (15-30 %) sampai curam (>70 %), tergantung pada kondisi sifat fisik dan keteknikan batuan dan tanah. Pada lereng terjal umumnya dibentuk oleh tanah pelapukan yang cukup tipis dan vegetasi penutup baik, umumnya berupa pemukiman, sawah, tegalan, kebun campuran, perkebunan dan hutan. Kejadian gempa pada hari Kamis 30 September 2009 sekitar pukul 17.16 WIB berkekuatan



7,9 SR yang berpusat di pantai barat Sumatera Barat telah memicu terjadinya bencana gerakan tanah. Gerakan tanah umumnya terjadi pada daerah yang tersusun oleh batuan yang kurang kompak dan tanah pelapukan yang kurang padat, yaitu antara lain pada daerah yang tersusun oleh satuan Tuf Batu Apung Hornblenda Hipersten (Qhpt) dan Tuf Batu Apung dan Andesit atau Basal (Qpt). Selain itu, gerakan tanah juga terjadi pada tebing jalan dan lokasi-lokasi pemotongan lereng yang berkemiringan lereng curam. Gerakan tanah yang memiliki dimensi cukup besar yang mengakibatkan banyak korban meninggal, antara lain terdapat di: Desa Tandikat, Jorong Pulau Air, Jorong Lubuk Laweh, Jorong Gunungtigo dan Paraman Cumanak. Gerakan tanah juga terjadi pada pada tebing jalur jalan Sicincin - Pariaman (Jorong Air Marange, Desa Sicicin) dan jalur jalan mulai dari Kudu - Cumanak. Umumnya lokasi bencana merupakan daerah labil dan berkemiringan lereng terjal dengan potensi gerakan tanah tinggi, artinya daerah ini mudah terjadi gerakan tanah, sedangkan gerakan tanah lama dan gerakan tanah baru masih aktif bergerak, baik akibat curah hujan tinggi dan erosi kuat maupun gempa bumi. Menurut informasi penduduk pada saat terjadi gerakan tanah, sebelumnya telah turun hujan dengan intensitas kecil. Jenis gerakan tanah umumnya berupa longsoran bahan rombakan (debris slide).

3) Banjir

Erosi sungai dan air permukaan dapat terjadi karena pengikisan tebing sungai oleh arus air sungai atau air permukaan, sedangkan aliran banjir bandang terjadi setelah atau selama hujan akibat akumulasi dan pembendungan alur oleh endapan lahar atau material gerakan tanah pada alur sungai di bagian hulu dan dipicu oleh erosi yang kuat dan curah hujan yang tinggi. Erosi ini dapat terjadi pada longsoran serta terbukanya tanaman penutup terutama pada tanah/batuan pasir yang bersifat lepas. Berdasarkan kerawanan terhadap kebencanaan, maka dapat diperoleh wilayah rawan bencana di Kota Pariaman. Diketahui luas wilayah yang rawan bencana tinggi sebesar 31,84 km² (43,4% dari luas wilayah).

4) Tsunami

Tsunami adalah rangkaian gelombang yang mampu menjalar dengan kecepatan hingga lebih dari 900 km per jam, terutama disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Kawasan rawan tsunami menggambarkan tingkat kemudahan suatu wilayah untuk terlanda tsunami. Tingkat kemudahan ini didasarkan pada besarnya intensitas gempa dengan energi yang cukup untuk dapat mematahkan permukaan dasar laut, serta bentuk morfologi pantai. Daerah penyelidikan terdiri dari 3 (tiga) kawasan rawan tsunami yakni; kawasan rawan tsunami tinggi, kawasan rawan tsunami menengah dan kawasan rawan tsunami rendah.



Kawasan rawan bencana tsunami tinggi memiliki resiko kerusakan dan kehancuran aset paling besar apabila terlanda tsunami. Kawasan ini adalah pantai landai berpasir dengan morfologi landai. sebagian berawa bakau dan nipah. Bentuk garis pantai sebagian besar lurus dan sebagian kecil berteluk. Kawasan rawan tsunami tinggi meliputi sepanjang pesisir pantai dengan nilai elevasi kurang dari 5 meter di atas permukaan laut.

Kawasan rawan bencana tsunami menengah memiliki potensi tsunami dengan kerusakan aset relatif lebih kecil dibandingkan dengan kawasan rawan tinggi. Kawasan rawan bencana tsunami menengah meliputi garis ketinggian elevasi di atas 5 hingga 7 meter di atas permukaan laut, dengan ketinggian genangan air maksimum mencapai 2 meter di atas permukaan tanah.

Kawasan rawan bencana tsunami rendah memiliki potensi landaan dan kerusakan paling kecil dibandingkan dengan kawasan lainnya. Kawasan rawan bencana tsunami rendah meliputi daerah dengan garis ketinggian elevasi hingga 9 meter di atas permukaan laut, dengan ketinggian genangan air maksimum mencapai 1 meter di atas permukaan tanah. Kawasan ini meliputi wilayah pesisir dengan morfologi curam dan berbukit.

5) Likuifaksi

Likuifaksi terjadi apabila lapisan tanah yang berupa pasir berbutir halus ($0,075 > 0,50$ mm), relatif seragam, bersifat lepas dan dalam keadaan jenuh air (muka air tanahnya dangkal) mendapat guncangan hebat akibat gempa bumi dengan percepatan gempa tertentu, maka tegangan airpori akan meningkat dan mengakibatkan lapisan tanah pasir tersebut akan cenderung membubur dan menyebabkan nilai daya dukung tanah menjadi berkurang atau bahkan menjadi nol (Kawamura, M., 1989). Berdasarkan data geologi teknik dan analisis citra satelit di Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, lapisan pasir halus yang berpotensi terjadi likuifaksi adalah pada Satuan Pasir yang terbentuk dari endapan pantai, pematang pantai, tematang sungai dan gosong-gosong sungai. Analisis zona potensi likuifaksi ini terbatas hingga kedalaman 6,00 m, karena keterbatasan peralatan. Sehingga hasil analisis yang menggunakan Metoda "Simplified Procedure" (Seed dan Izzard Idris, 1971), lapisan pasir halus (Satuan Pasir) yang berpotensi terjadi likuifaksi berkisar pada kedalaman $>1,00 - 6,00$ m.

6) Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Umumnya Pantai Pariaman berpotensi mendapatkan bencana gelombang ekstrim dan abrasi sebagaimana yang terlihat pada profil kawasan pesisir pada sabuk yang berwarna merah, namun abrasi ini dapat dikurangi dengan penanaman mangrove. Untuk lebih jelasnya potensi bencana gelombang ekstrim dan abrasi.



2.1.4 Aspek Demografi

2.1.4.1 Jumlah Penduduk Kota Pariaman per Kecamatan

Kota Pariaman terdiri dari 4 kecamatan memiliki jumlah penduduk saat ini (Tahun 2020) 94.224 jiwa. Pada tahun 2010 Kota Pariaman memiliki jumlah penduduk 79.043. Dengan demikian berdasarkan hasil sensus tersebut pertumbuhan penduduk Kota Pariaman sebesar 1,8% per tahun. Distribusi dan pertumbuhan penduduk per kecamatan berdasarkan sensus 2010-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Perkembangan Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kota Pariaman
Tahun 2010 – 2020

No.	Kecamatan	Tahun		Laju pert./tahun
		2010	2020	
1.	Pariaman Selatan	16.161	20.006	2,44%
2.	Pariaman Tengah	29.180	31.930	1,40%
3.	Pariaman Utara	19.344	22.591	1,22%
4.	Pariaman Timur	14.968	19.697	8,09%

Sumber : BPS, 2021

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Penduduk per kecamatan kota Pariaman dari tahun 2010 - 2020 terus meningkat, dan terjadi penambahan jumlah penduduk tiap tahunnya.

Tabel 2.7
Proporsi Penduduk Kecamatan di Kota Pariaman Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah penduduk	Persentase (%)
1	Pariaman Selatan	20.006	0,21
2	Pariaman Tengah	31.930	0,34
3	Pariaman Utara	22.591	0,24
4	Pariaman Timur	19.697	0,21
Penduduk kota		94.224	100

Sumber : Bappeda 2021

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk berdasarkan Desa Tahun 2016-2019

No.	Kecamatan	Desa	Tahun				Laju Pert.
			2016	2017	2018	2019	
1.	Pariaman Selatan	Pasir Sunur	298	308	317	319	2,30%
		Marunggi	3.072	3.122	3.183	3.245	1,84%
		Kampung Apar	738	753	768	782	1,95%
		Sikabu	350	359	369	371	1,96%
		Palak Aneh	1.122	1.144	1.167	1.188	1,92%



No.	Kecamatan	Desa	Tahun				Laju Pert.
			2016	2017	2018	2019	
		Padang Cakur	416	425	438	440	1,89%
		Taluk	3.128	3.188	3.245	3.308	1,88%
		Marabau	865	882	900	916	1,93%
		Sungai Kasai	465	475	486	492	1,90%
		Batang Tajongkek	813	828	845	860	1,89%
		Balai Kurai Taji	1.390	1.416	1.443	1.470	1,88%
		Pauh Kurai Taji	812	827	844	859	1,89%
		Simpang	836	851	868	885	1,92%
		Toboh Palabah	1.092	1.113	1.135	1.155	1,89%
		Rambai	1.101	1.122	1.144	1.165	1,90%
		Punggung Lading	1.764	1.797	1.826	1.866	1,89%
2.	Pariaman Tengah	Karan Aur	2.316	2.328	2.344	2.354	0,54%
		Jalan Baru	1.530	1.540	1.549	1.556	0,56%
		Ujung Batung	703	708	713	718	0,71%
		Jalan Kereta Api	786	790	795	800	0,59%
		Cimparuh	2.466	2.480	2.495	2.500	0,46%
		Alai Gelombang	1.143	1.149	1.156	1.162	0,55%
		Taratak	1.179	1.185	1.193	1.199	0,56%
		Kampung Baru	3.493	3.512	3.536	3.547	0,51%
		Lohong	1.187	1.194	1.202	1.208	0,59%
		Pasir	1.218	1.225	1.233	1.238	0,54%
		Kampung Perak	809	815	819	824	0,61%
		Pondok II	1.133	1.139	1.146	1.152	0,56%
		Jawi-Jawi I	877	882	888	893	0,60%
		Jawi-Jawi II	1.372	1.379	1.388	1.395	0,56%
		Kampung Jawa II	1.085	1.091	1.098	1.104	0,58%
		Kampung Jawa I	1.174	1.181	1.187	1.193	0,54%
		Kampung Pondok	1.586	1.595	1.605	1.613	0,56%
		Pauh Barat	1.916	1.925	1.939	1.947	0,54%
		Pauh Timur	1.446	2.454	1.464	1.471	0,57%
		Rawang	1.308	1.316	1.324	1.331	0,58%
		Jati Hilir	1.031	1.037	1.043	1.050	0,61%
		Jati Mudik	699	703	707	714	0,71%
3.	Pariaman Utara	Ampalu	1.772	1.799	1.829	1.855	1,54%
		Tanjung Sabar	599	608	619	630	1,70%
		Apar	999	1.015	1.031	1.047	1,58%
		Manggung	1.726	1.753	1.782	1.809	1,58%
		Cubadak Air	1.030	1.047	1.064	1.080	1,59%
		Naras Hilir	1.406	1.428	884	1.472	1,54%
		Naras I	2.347	2.384	2.424	2.457	1,54%
		Balai Naras	2.084	2.117	2.153	2.184	1,57%
		Padang Birik-Birik	950	965	1.294	995	1,55%
		Sintuk	753	765	777	789	1,57%
		Sungai Rumbai	970	986	1.002	1.018	1,62%
		Cubadak Air Selatan	855	869	1.451	898	1,65%
		Sikapak Barat	1.500	1.524	1.549	1.572	1,58%
		Sikapak Timur	1.008	1.023	1.041	1.056	1,56%



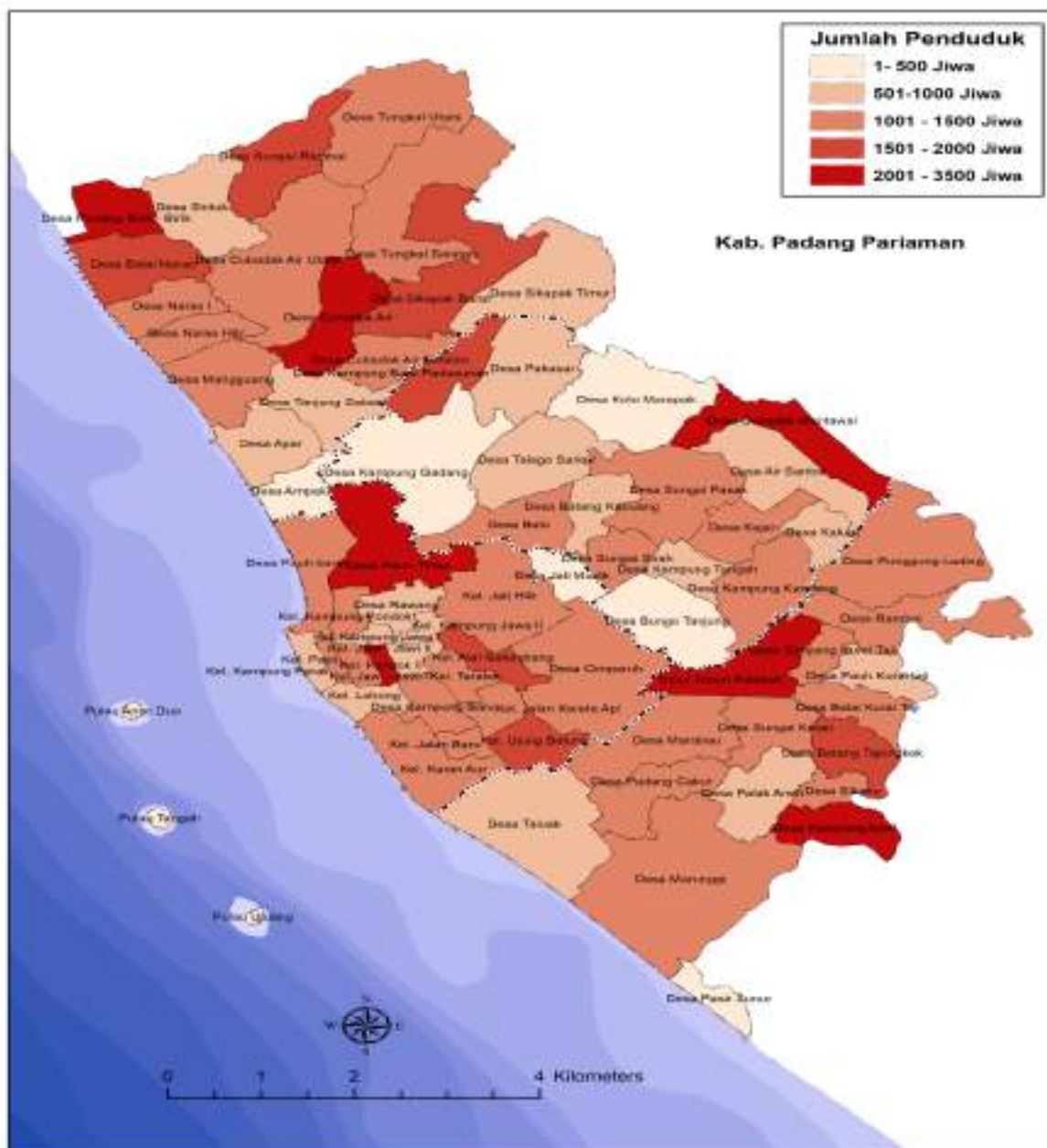
No.	Kecamatan	Desa	Tahun				Laju Pert.
			2016	2017	2018	2019	
4.	Pariaman Timur	Tungkal Selatan	1.254	1.273	980	1.314	1,57%
		Cubadak Air Utara	1.373	1.395	1.418	1.438	1,55%
		Tungkal Utara	820	833	847	861	1,64%
		Kampung Gadang	1.313	1.318	1.324	1.329	0,40%
		Talago Sarik	1.246	1.252	1.258	1.263	0,45%
		Bato	871	876	880	884	0,50%
		Batang kabung	1.229	1.235	1.241	1.246	0,46%
		Sungai Sirah	363	365	367	369	0,55%
		Bungo Tanjung	1.205	1.210	1.216	1.219	0,39%
		Kampung Kandang	1.059	1.064	1.069	1.072	0,41%
		Kaluat	661	663	667	669	0,40%
		Kajai	747	751	755	758	0,49%
		Kampung Tengah	376	378	382	384	0,70%
		Sungai Pasak	1.062	1.066	1.072	1.076	0,44%
		Air Santok	1.132	1.137	1.143	1.147	0,44%
		Cubadak Mentawai	615	619	622	624	0,49%
		Koto Marapak	1.389	1.395	1.403	1.407	0,43%
		Pakasai	1.017	1.021	1.027	1.031	0,46%
		Kampung Baru Padusunan	1.241	1.246	1.253	1.258	0,45%

Sumber : Bappeda 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah penduduk dan persebaran penduduk yang ada di desa pada kota Pariaman dari tahun 2017 – 2019. Pertumbuhan penduduk pada desa di Kota Pariaman terjadi secara fluktuatif karena ada beberapa desa di kota Pariaman mengalami mengalami pertumbuhan dan pengurangan penduduk yang sangat drastis. Jumlah penduduk tertinggi terletak pada Desa Kampung Baru Kecamatan Pariaman Tengah di tahun 2019 yaitu sebanyak 3.547 jiwa dan untuk jumlah penduduk terendah terdapat pada desa Pasir Sunur Kecamatan Pariaman Selatan di tahun 2019 yaitu sebanyak 319 jiwa. Dari gambar 2.3 berikut ini dapat dilihat persebaran pengelompokkan jumlah penduduk kelurahan dan desa yang ada di Kota Pariaman pada tahun 2020.



Gambar 2.2
Peta Jumlah Penduduk Menurut Desa Pada Kota Pariaman Tahun 2020



Sumber : RTRW Kota Pariaman

2.1.4.2 Kepadatan penduduk

Tingkat kepadatan penduduk brutto di Kota Pariaman merupakan jumlah penduduk dibagi luas wilayah dihitung dengan menggunakan rumus :

Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)	-	Jumlah Penduduk (Jiwa)
		Luas Wilayah (Ha)



Atau

$$\text{Kepadatan Penduduk} \left(\frac{\text{Jiwa}}{\text{Ha}} \right) = \frac{\text{Jumlah Penduduk (Jiwa)}}{\text{Luas Wilayah (Ha)}}$$

Angka kepadatan penduduk tersebut kemudian dikategorikan dalam 4 (empat) kategori yaitu (SNI 03-1733-2004) :

- 1) Kepadatan Sangat Tinggi :Kepadatan penduduk > 400 jiwa/ha.
- 2) Kepadatan Tinggi :Kepadatan penduduk 201 s/d 400 jiwa/Ha.
- 3) Kepadatan Sedang :Kepadatan penduduk 150 s/d 200 jiwa/Ha
- 4) Kepadatan Rendah :Kepadatan penduduk < 150 jiwa/Ha

Dengan demikian kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan dan kelurahan/desa Kota Pariaman di tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Kepadatan Penduduk Kota Pariaman tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah (jiwa)	Luas Wilayah (Ha)	Kepadatan Penduduk	
				(jiwa/Ha)	Kategori
1	Pariaman Selatan	20 006	1.805	11	Rendah
2	Pariaman Tengah	31 930	1.162	27	Rendah
3	Pariaman Timur	19 697	1.693	11	Rendah
4	Pariaman Utara	22 591	2.023	12	Rendah
Kota Pariaman		94.224	6.686	61	Rendah

Sumber : Bappeda 2021

Berdasarkan tabel diatas, kepadatan penduduk Kota Pariaman paling tinggi pada tahun 2020 terdapat pada Kecamatan Pariaman Tengah, yaitu sebanyak 27 Jiwa/ha, akan tetapi menurut SNI 03-1733-2004 masih dikategorikan kepadatan rendah.

2.1.4.3 Kepadatan Netto Kota Pariaman

Kepadatan netto atau bersih dihitung berdasarkan jumlah penduduk per luas lahan efektif (yaitu lahan yang mungkin atau layak dikembangkan untuk kegiatan budidaya perkotaan dengan asumsi dimana lahan yang dianggap tidak menjadi daerah terbangun seperti sawah, mangrove, kawasan sempadan pantai dikeluarkan dari perhitungan luas), dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.10
Kepadatan Penduduk berdasarkan Luas Lahan Efektif Per Desa Kota Pariaman

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Ha)	Luas Wilayah Non Efektif (Ha)	Luas Wilayah Efektif (Ha)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
1.	Pariaman	Pasir Sunur	319	33,15	11,75	21,4	15



No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Ha)	Luas Wilayah Non Efektif (Ha)	Luas Wilayah Efektif (Ha)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
	Selatan	Marunggi	3.245	332,2	133,95	198,25	16
		Kampung Apar	782	77,73	23,89	53,84	15
		Sikabu	371	30,31	3,66	26,65	14
		Palak Aneh	1.188	106,15	68,79	37,36	32
		Padang Cakur	440	81,68	59,02	22,66	19
		Taluk	3.308	231,1	31,62	199,48	17
		Marabau	916	127,26	89,81	37,45	24
		Sungai Kasai	492	110,15	82,37	27,78	18
		Batang Tajongkek	860	55,77	18,25	37,52	23
		Balai Kurai Taji	1.470	36,7	8,83	27,87	53
		Pauh Kurai Taji	859	58,88	9,86	49,02	18
		Simpang	885	21,78	4,65	17,13	52
		Toboh Palabah	1.155	113,58	48,09	65,49	18
		Rambai	1.165	134,25	27,48	106,77	11
		Punggung Lading	1.866	226,48	36,44	190,04	10
2.	Pariaman Tengah	Karan Aur	2.354	105,52	25,59	79,93	29
		Jalan Baru	1.556	19,63	0,19	19,44	80
		Ujung Batung	718	55,04	0,69	54,35	13
		Jalan Kereta Api	800	37,43	0,48	36,95	22
		Cimparuh	2.500	207,56	70,45	137,11	18
		Alai Gelombang	1.162	40,68	6,15	34,53	34
		Taratak	1.199	29,04	0,51	28,53	42
		Kampung Baru	3.547	43,91	0,42	43,49	82
		Lohong	1.208	33,26	4,91	28,35	43
		Pasir	1.238	24,24	8,06	16,18	77
		Kampung Perak	824	11,94	0,45	11,49	72
		Pondok II	1.152	19,36	0,77	18,59	62
		Jawi-Jawi I	893	11,74	0,12	11,62	77
		Jawi-Jawi II	1.395	19,61	0,28	19,33	72
		Kampung Jawa II	1.104	14,33	0,08	14,25	77
		Kampung Jawa I	1.193	14,12	0,06	14,06	85
		Kampung Pondok	1.613	23,94	1,72	22,22	73
		Pauh Barat	1.947	81,91	14,45	67,46	29
		Pauh Timur	1.471	138,55	64,02	74,53	20
		Rawang	1.331	41,91	7,56	34,35	39
3.	Pariaman Utara	Jati Hilir	1.050	139,41	30,43	108,98	10
		Jati Mudik	714	39,03	13,29	25,74	28
		Ampalu	1.855	57,2	18,18	39,02	48
		Tanjung Sabar	630	93,43	51,64	41,79	15
		Apar	1.047	71,64	30,49	41,15	25
		Manggung	1.809	128,05	73,29	54,76	33
		Cubadak Air	1.080	113,49	64,26	49,23	22
		Naras Hilir	1.472	72,81	39,66	33,15	44
		Naras I	2.457	71,55	10,92	60,63	41
		Balai Naras	2.184	120,95	47,53	73,42	30
		Padang Birik-Birik	995	82,22	41,65	40,57	25
		Sintuk	789	100,63	25,88	74,75	11
		Sungai Rumbai	1.018	100,29	5,95	94,34	11
		Cubadak Air Selatan	898	62,44	15,71	46,73	19
		Sikapak Barat	1.572	206,5	47,71	158,79	10
		Sikapak Timur	1.056	159,21	10,89	148,32	7
		Tungkal Selatan	1.314	222,58	59,27	163,31	8



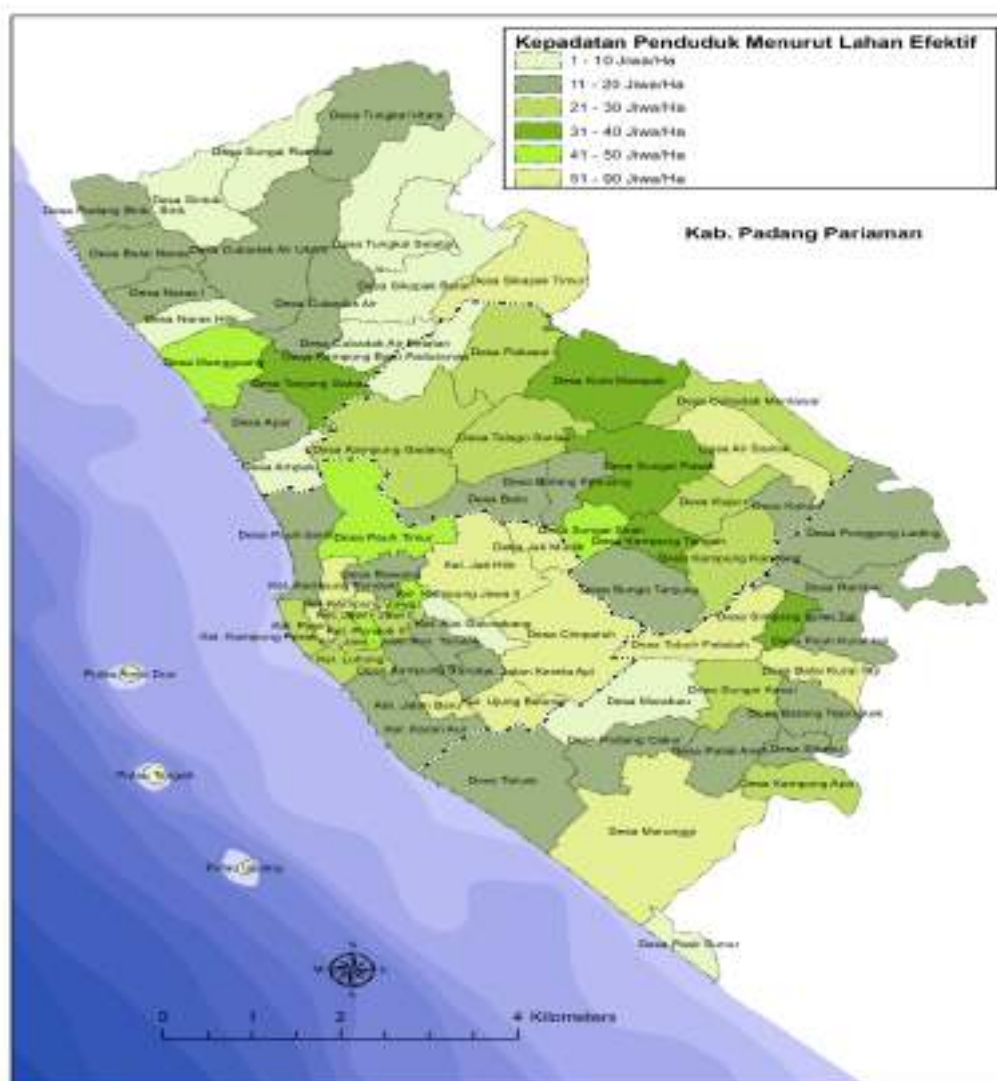
No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Ha)	Luas Wilayah Non Efektif (Ha)	Luas Wilayah Efektif (Ha)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
		Cubadak Air Utara	1.438	169,58	34,75	134,83	11
		Tungkal Utara	861	188,87	5,33	183,54	5
		Kampung Gadang	1.329	195,43	64,91	130,52	10
		Talago Sarik	1.263	128,74	12,31	116,43	11
		Bato	884	89,44	37,7	51,74	17
		Batang Kabung	1.246	53,94	4,64	49,3	25
		Sungai Sirah	369	48,42	37,47	10,95	34
		Bungo Tanjung	1.219	123,95	70,19	53,76	23
		Kampung Kandang	1.072	106,82	14,81	92,01	12
		Kaluat	669	41,68	2,02	39,66	17
		Kajai	758	70,92	14,1	56,82	13
		Kampung Tengah	384	45,26	13,04	32,22	12
		Sungai Pasak	1.076	146,63	91,47	55,16	20
		Air Santok	1.147	144,69	45,45	99,24	12
		Cubadak Mentawai	624	112,71	18,75	93,96	7
		Koto Marapak	1.407	159,1	8,49	150,61	9
		Pakasai	1.031	136,21	20,96	115,25	9
		Kampung Baru Padusunan	1.258	90,04	9,42	80,62	16

Sumber : Bappeda, 2021

Dari kepadatan penduduk berdasarkan lahan efektif per kelurahan/desa di kota Pariaman dapat diketahui sebaran kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada desa Kampung Jawa I Kecamatan Pariaman Tengah yaitu sebanyak 83 Jiwa/Ha dan sebaran kepadatan penduduk terkecil terdapat pada desa Cubadak Air Utara dan desa Tungkal Utara kecamatan Pariaman Utara yaitu sebanyak 5 Jiwa/Ha.



Gambar 2.3
Kepadatan Penduduk berdasarkan Kepadatan Netto Per Kelurahan/Desa
Kota Pariaman



Sumber : RTRW Kota Pariaman

2.1.4.4 Struktur Pekerjaan Penduduk

Definisi penduduk yang bekerja adalah penduduk berumur 15 tahun atau lebih yang bekerja pada berbagai sektor usaha. Jumlah penduduk tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11
Penduduk Menurut 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Kota Pariaman Tahun 2019-2020

No.	Sektor	Tahun		Proporsi 2020 (%)	Laju pertumbuhan 2019-2020 (%/tahun)
		2019	2020		
1.	Pertanian	5.012	5.059	13	0.94

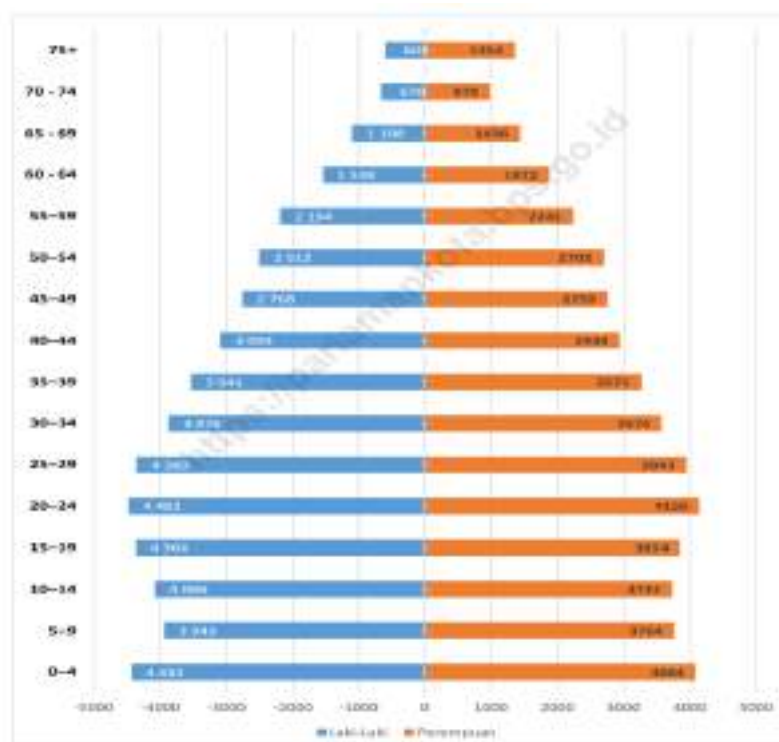


2.	Manufaktur	7.500	8.830	22	17.73
3.	Jasa	28.479	25.779	65	73.09
Total		40.991	39.668	100,0	44,75

Sumber: Bappeda 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa sektor jasa menjadi tumpuan terbesar penciptaan lapangan kerja (65%) dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 73,09%. Sementara sektor pertanian meskipun berada dalam wilayah perkotaan ternyata menampung tenaga kerja yang cukup besar (13%) dengan laju pertumbuhan angkatan kerja 0,94% /tahun. Artinya lapangan kerja di sektor pertanian di Kota Pariaman bukannya berkurang tetapi malah bertambah. Hal ini memerlukan perhatian karena dengan berkurangnya lahan pertanian sementara lapangan kerja disektor pertanian malah bertambah maka hal ini akan menjadi masalah dalam peningkatan kesejahteraan penduduk dimasa depan.

Gambar 2.4
Piramida Penduduk Kota Pariaman Tahun 2020



Sumber : BPS Kota Pariaman



2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan dengan fokus Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita dan indeks gini serta rasio penduduk miskin. Kinerja indikator-indikator tersebut sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu.

● PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha

Dari tahun 2019, BPS menggunakan metode dan lapangan usaha baru dalam penghitungan PDRB. Penyesuaian ini dilakukan sesuai dengan *System of National Accounts* 2008 (SNA 2008) atau Sistem Neraca Nasional (SNN) yang merupakan rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Jika sebelumnya terdapat 9 jenis lapangan usaha, dipenghitungan PDRB yang baru digunakan 17 jenis lapangan usaha. Selain itu, hal baru pada penghitungan PDRB dari tahun 2019 adalah penggunaan tahun dasar penghitungan harga konstan dari sebelumnya tahun 2000 menjadi tahun 2010. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satuan tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.



Tabel 2.12
PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Kota Pariaman
Tahun 2016 – 2020 (Jutaan Rupiah)

Sektor PDRB Lapangan Usaha	Harga Konstan 2010 (Jutaan Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	559.190,78	578.670,91	591.639,08	601.884,66	604.981,97
Pertambangan & Penggalian	59.378,73	60.947,97	63.186,74	65.230,68	62.384,19
Industri Pengolahan	260.721,33	268.091,03	277.421,52	279.839,41	273.290,44
Pengadaan Listrik, Gas	1.603,37	1.775,64	1.966,89	2.099,54	1.978,97
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	1.201,14	1.250,22	1.279,80	1.280,12	1.313,63
Konstruksi	431.156,36	466.150,74	503.507,58	542.554,50	527.585,40
Perdagangan Besar dan Eceran	474.162,12	507.466,07	540.470,22	579.060,05	573.241,65
Transportasi & Pergudangan	367.498,46	377.789,84	390.715,67	399.588,17	361.887,73
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	54.981,96	60.820,89	66.175,97	71.867,80	61.639,91
Informasi & Komunikasi	268.779,17	296.067,75	325.583,05	355.946,94	386.372,22
Jasa Keuangan dan Asuransi	95.051,80	93.289,19	92.779,15	96.219,90	97.324,13
Real Estate	86.658,48	90.278,01	94.283,30	99.383,00	99.539,37
Jasa Perusahaan	4.438,90	4.703,81	4.901,10	5.188,13	4.962,75
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	167.592,87	175.911,19	187.391,25	200.139,33	198.135,54
Jasa Pendidikan	111.189,05	120.761,35	128.942,62	139.512,00	145.713,95
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	33.948,36	37.198,90	39.808,65	42.760,00	45.785,41
Jasa Lainnya	84.760,83	93.061,09	102.087,67	111.527,00	98.523,18
PDRB	3.062.313,74	3.234.234,59	3.412.140,26	3.594.081,22	3.544.660,44

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman



Gambar 2.5
Perkembangan PDRB ADHK Kota Pariaman
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Rp. Juta)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

Dari gambar 2.6 di atas terlihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pariaman ADHK di tahun 2016 terhitung sudah sebesar 3.062 triliun rupiah dan pada tahun 2019 sebesar 3.594 triliun rupiah. Ini berarti bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir telah terjadi peningkatan sekitar 532 Milyar rupiah. Pada tahun 2020 sebesar 3.544 triliun rupiah, ini berarti terjadi penurunan sebesar 50 Milyar rupiah.

Tabel 2.13
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha di
Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	18,26	17,89	17,34	16,74	17,07
B	Pertambangan & Penggalian	1,94	1,88	1,85	1,82	1,76
C	Industri Pengolahan	8,51	8,29	8,13	7,79	7,71
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	14,08	14,41	14,76	15,09	14,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran	15,48	15,69	15,84	16,11	16,17
H	Transportasi & Pergudangan	12,00	11,68	11,45	11,11	10,21
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,80	1,88	1,94	2,00	1,74
J	Informasi & Kemonikasi	8,78	9,15	9,54	9,90	10,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,10	2,88	2,72	2,68	2,75
L	Real Estate	2,83	2,79	2,76	2,77	2,81
M,N	Jasa Perusahaan	0,14	0,15	0,14	0,14	0,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	5,47	5,44	5,49	5,57	5,59



P	Jasa Pendidikan	3,63	3,73	3,78	3,88	4,11
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,11	1,15	1,17	1,19	1,29
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,77	2,88	2,99	3,10	2,78
PDRB/G DRP		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini. PDRB menurut harga berlaku juga digunakan untuk mengetahui sebaran dan struktur ekonomi suatu daerah.

Tabel 2.14
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Pariaman menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016 – 2020 (Jutaan Rupiah)

Sektor PDRB Lapangan Usaha	Harga Berlaku (Jutaan Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	795.386,17	829.643,60	861.148,09	914.713,15	917.578,08
Pertambangan & Pengalihan	83.906,28	86.617,85	90.738,69	94.570,93	91.153,64
Industri Pengolahan	316.386,41	327.586,30	343.221,94	343.323,57	343.922,88
Pengadaan Listrik, Gas	2.627,14	3.151,05	3.624,51	4.147,14	3.946,44
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	1.605,21	1.679,87	1.745,16	1.805,83	1.856,31
Konstruksi	586.394,43	640.718,83	705.142,59	778.020,76	776.169,68
Perdagangan Besar dan Eceran	600.534,13	649.593,88	702.769,97	768.757,94	754.414,31
Transportasi & Pergudangan	481.352,99	500.121,38	519.572,36	540.994,01	503.618,49
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	91.638,61	102.772,70	115.545,51	131.521,29	114.663,01
Informasi & Komunikasi	274.175,15	306.515,54	344.114,61	388.496,08	420.058,75
Jasa Keuangan dan Asuransi	127.808,19	125.865,09	127.415,81	135.440,00	139.028,37
Real Estate	118.398,04	124.758,14	133.887,43	143.419,00	145.171,85
Jasa Perusahaan	5.828,63	6.231,70	6.583,83	7.273,32	6.996,44
Administrasi Pemerintahan,	227.187,29	245.890,64	263.678,47	302.349,55	324.107,30



Sektor PDRB Lapangan Usaha	Harga Berlaku (Jutaan Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib					
Jasa Pendidikan	161.280,04	177.550,49	194.247,73	220.700,00	231.796,83
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	44.358,64	49.246,34	54.164,15	60.803,81	66.722,33
Jasa Lainnya	117.874,57	131.066,79	148.234,78	169.096,00	152.898,18
PDRB	4.036.741,93	4.309.010,19	4.615.745,62	5.005.432,39	4.994.102,88

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

Tabel 2.15
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	19,70	19,25	18,66	18,27	18,37
B	Pertambangan & Penggalian	2,08	2,01	1,97	1,89	1,83
C	Industri Pengolahan	7,84	7,60	7,44	6,86	6,89
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	14,53	14,87	15,28	15,54	15,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran	14,88	15,08	15,22	15,36	15,11
H	Transportasi & Pergudangan	11,92	11,61	11,26	10,81	10,08
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2,27	2,39	2,50	2,63	2,30
J	Informasi & Komunikasi	6,79	7,11	7,46	7,76	8,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,17	2,92	2,76	2,71	2,78
L	Real Estate	2,93	2,90	2,90	2,87	2,91
M,N	Jasa Perusahaan	0,14	0,14	0,14	0,15	0,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	5,63	5,71	5,71	6,04	6,49
P	Jasa Pendidikan	4,00	4,12	4,21	4,41	4,64
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,10	1,14	1,17	1,21	1,34
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,92	3,04	3,21	3,38	3,06
PDRB/G DRP		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman



Gambar 2.6
Perkembangan PDRB ADHB Kota Pariaman
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Rp. Juta)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

Dari gambar 2.7 di atas terlihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pariaman ADHB di tahun 2016 terhitung sudah sebesar 4.036 triliun rupiah dan pada tahun 2019 sebesar 5.005 triliun rupiah. Ini berarti bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir telah terjadi peningkatan sekitar 969 Milyar rupiah. Pada tahun 2020 sebesar 4994 triliun rupiah, ini berarti terjadi penurunan sebesar 11 Milyar rupiah.

Tabel 2.16
Distribusi Persentase PDRB ADHB Kota Pariaman menurut Pengeluaran
Tahun 2016-2020

NO	Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Konsumsi Rumah Tangga	52,36	52,02	52,40	52,88	53,57
2	Konsumsi LNPRT	1,19	1,20	1,16	1,16	1,21
3	Konsumsi Pemerintah	15,48	15,15	14,80	14,59	14,43
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	28,32	28,21	28,08	28,13	28,16
5	Perubahan Inventori	0,06	2,51	0,12	0,11	-0,03
6	Ekspor	2,58	0,90	3,43	3,15	2,66
Total PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman



Gambar 2.7
Perkembangan Kontribusi 3 Kategori Terbesar PDRB ADHB
Kota Pariaman Tahun 2016-2020 (%)



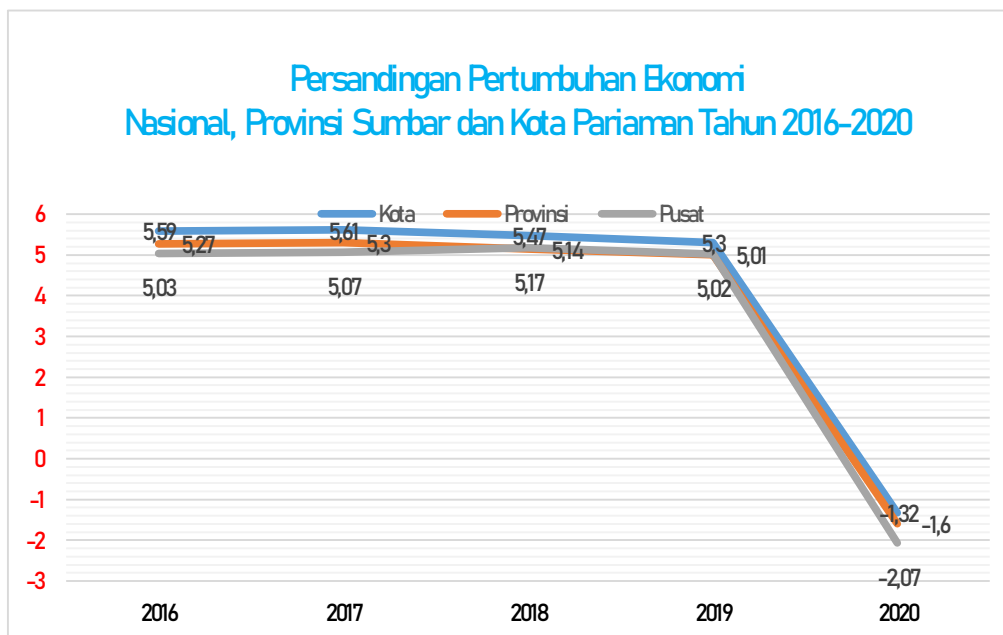
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

Berdasarkan Gambar 2.7 diatas menjelaskan tentang perkembangan kontribusi kategori terbesar dalam PDRB ADHB Kota Pariaman menurut Lapangan Usaha jangka waktu 5 tahun terakhir (2016-2020). Dalam periode selama 5 (lima) tahun jika dirata-ratakan kontribusi yang paling besar masih sektor pertanian yaitu sebesar 18,85 %. Walaupun mengalami penurunan sampai tahun 2019, pada tahun 2020 mulai mengalami peningkatan sebesar 0,1 %. Namun sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan sektor lain. Dan kontribusi terbesar ke-2 adalah sektor konstruksi yaitu sebesar 15,15 %. Sektor ini cukup mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Tidak berbeda jauh dengan sektor konstruksi, kontribusi pada sektor perdagangan sebesar 15,13 %. Sektor ini cukup mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sampai tahun 2019 dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020. Sebagai sebuah Kota (walaupun Kota Kecil) sudah seharusnya kedepan bagaimana sektor perdagangan ini bisa memberikan kontribusi terbesar.

Kondisi ekonomi makro selama lima tahun terakhir (tahun 2016 – 2020) menunjukkan kinerja yang cukup baik. Jika dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang merupakan kenaikan output agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian). Meskipun keadaan dari tahun ketahun cenderung menurun, namun LPE Kota Pariaman selalu diatas LPE Prov Sumatera Barat dan Nasional PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.



Grafik 2.8
Persandingan Pertumbuhan Ekonomi
Nasional, Provinsi Sumbar dan Kota Pariaman Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,32 %. Pertumbuhan ekonomi ini yang negatif ini tidak hanya dialami oleh Kota Pariaman saja tetapi juga dialami oleh seluruh kota dan kabupaten di Sumatera Barat bahkan sektor pusat. Dari Grafik 2.7 diatas dapat dilihat bahwa angka pertumbuhan ekonomi negatif Kota Pariaman masih kecil jika dibandingkan pertumbuhan negatif Provinsi Sumatera Barat dan Pusat. Hal ini terjadi karena dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda di Kota Pariaman khususnya dan dunia umumnya yang melumpuhkan sebagian besar sektor kegiatan sejak awal tahun 2020 hingga sekarang. Tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman telah mencapai 5,59 %, tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan menjadi 5,61 %. Kemudian pada tahun 2018 dan 2019, turun lagi menjadi masing-masing 5,47 % dan 5,3 %. Dari tahun 2016 sampai 2019 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Berdasarkan informasi dari BPS, perlambatan ini jika dilihat sisi pengeluaran disebabkan oleh melemahnya komponen pembentukan modal tetap bruto.

- **PDRB Berdasarkan Pengeluaran**

PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa. Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan



besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis).

Tabel 2.17
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Pariaman menurut Pengeluaran
Tahun 2016 – 2020 (Jutaan Rupiah)

Jenis Pengeluaran		PDRB Kota Pariaman Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020*
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga		1.937.157,05	2.100.066,73	2.257.850,58	2.441.343,47	2.683.048,58
Pengeluaran Konsumsi LNPRT		44.073,69	48.357,03	49.991,03	53.325,75	60.681,75
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah		572.781,85	611.670,02	637.929,77	673.432,26	722.771,00
Pembentukan Modal Tetap Bruto		1.047.552,32	1.138.793,91	1.210.087,95	1.298.584,29	1.410.395,24
Perubahan Inventori		2.327,19	101.488,70	5.213,05	4.900,96	-1.608,09
Nilai Ekspor Barang Dan Jasa		95.551,47	36.365,54	147.937,42	145.271,88	133.094,05
PDRB		3.699.443,57	4.036.741,93	4.309.010,19	4.616.858,62	5.008.382,55

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

Tabel 2.18
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Pariaman menurut Pengeluaran
Tahun 2015 – 2019 (Jutaan Rupiah)

Jenis Pengeluaran		PDRB Kota Pariaman Atas Dasar Harga Konstan (Seri 2010) Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018*	2019**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga		1.464.023,62	1.534.804,36	1.617.031,42	1.701.908,82	1.785.629,60
Pengeluaran Konsumsi LNPRT		35.563,76	37.265,45	38.989,07	40.746,03	45.172,71
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah		413.704,03	418.499,97	419.053,60	432.449,43	451.983,29
Pembentukan Modal Tetap Bruto		798.333,13	849.430,67	885.400,34	919.777,39	966.702,46
Perubahan Inventori		2.042,27	81.490,90	3.791,75	3.474,38	-1.051,31
Nilai Ekspor Barang Dan Jasa		186.661,36	140.822,40	269.968,42	313.784,23	345.644,46
PDRB		2.900.328,17	3.062.313,75	3.234.234,60	3.412.140,28	3.594.081,21

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2021



a. PDRB/Pendapatan per kapita Kota Pariaman

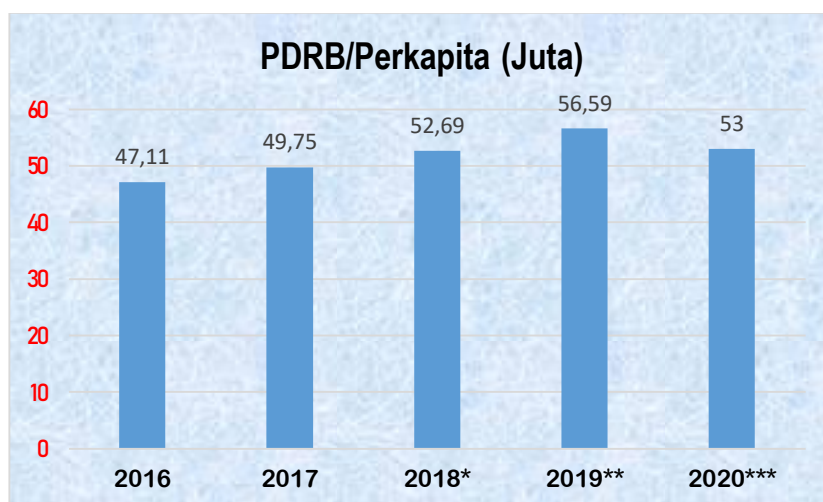
Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah; semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut.

Tabel 2.19
Pendapatan per kapita Kota Pariaman Tahun 2016 - 2020

Uraian	(Dalam Juta Rupiah)				
	2016	2017	2018*	2019**	2020***
PDRB ADHB (Juta)	4.036.741,93	4.309.010,19	4.616.858,61	5.008.382,53	4.994.102,88
Jumlah Penduduk	85.692	86.618	87.626	88.501	94.224
PDRB/Perkapita (Juta)	47,11	49,75	52,69	56,59	53

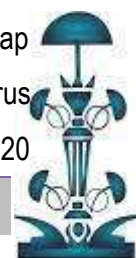
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

Grafik 2.9
Perkembangan Pendapatan Perkapita Kota Pariaman Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

Perkembangan nilai PDRB/Pendapatan perkapita Kota Pariaman tahun 2016 sampai tahun 2020 tersaji dalam gambar 2.10 di atas. Dari gambar terlihat bahwa besarnya nilai pendapatan rata-rata penduduk Kota Pariaman setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya PDRB per kapita setiap tahunnya. Pada tahun 2016, nominal PDRB per kapita Kota Pariaman adalah Rp. 47,11 juta dan terus meningkat hingga tahun 2019 menjadi Rp. 56,69 juta. Namun PDRB perkapita Kota Pariaman Tahun 2020



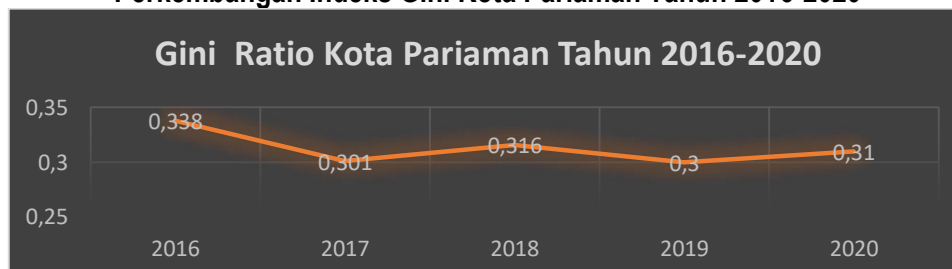
mengalami penurunan menjadi Rp. 53 juta seiring dengan menurunnya PDRB Perkapita Kota Pariaman pada Tahun 2020 tersebut.

b. Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini merupakan hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0 – 1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Berikut adalah pembagian klasifikasi ketimpangan secara lebih detail:

No.	Uraian	Ket
a.	Indeks Gini < 0,3	: Ketimpangan Rendah
b.	0,3 ≤ Indeks Gini ≤ 0,5	: Ketimpangan Sedang
c.	Indeks Gini > 0,5	: Ketimpangan Tinggi

Grafik 2.10
Perkembangan Indeks Gini Kota Pariaman Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2021

Grafik 2.11 menunjukkan perkembangan Indeks Gini Kota Pariaman tahun 2016 – 2020. Berdasarkan nilai Indeks Gini, Kota Pariaman memiliki kriteria ketimpangan sedang (moderat) pada tahun 2016 – 2019. Indeks gini Kota Pariaman selama rentang waktu 2016 – 2020 secara umum berfluktuasi. Pada tahun 2016 nilai Indeks Gini Kota Pariaman 0,338. Tahun 2017 turun menjadi 0,301. Dan pada tahun 2018 nilai Indeks Gini Kota Pariaman naik menjadi 0,316. Kemudian pada tahun 2019 turun lagi dengan nilai 0,3. Kemudian pada tahun 2020 naik lagi dengan nilai 0,31. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan kategori ketimpangan pendapatan Kota Pariaman masih tergolong dalam kategori sedang (moderat).



c. Kemiskinan

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada dibawah garis kemiskinan. Menurut BPS, penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dapat diategorikan menjadi dua, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Terdapat perbedaan dalam penentuan garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan. GKM ditetapkan sebesar 2.100 kkalori per kapita per hari, sedangkan GKNM yaitu untuk sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan berarti penduduk yang tidak miskin (penduduk sejahtera), yaitu penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan diatas garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Pariaman yang ditetapkan semakin meningkat per tahunnya. Pada tahun 2016, garis kemiskinan Kota Pariaman setara Rp. 392.970/kapita/bulan, sedangkan pada tahun 2017 setara Rp Rp 412.231/kapita/bulan, pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi Rp 431.368/kapita/bulan, pada tahun 2019 meningkat menjadi 446.514/kapita/bulan dan pada tahun 2020 juga terjadi peningkatan menjadi 480.028/kapita/bulan. Sedangkan dari sisi persentase penduduk diatas garis kemiskinan di Kota Pariaman mengalami penurunan selama tahun 2016-2020. Pada tahun 2016, penduduk miskin sebesar 5,22 %, tahun 2016 turun lagi menjadi 5,2 % terus berkurang menjadi 5,03 % pada tahun 2018. Serta pada tahun 2019 dan 2020 turun lagi masing-masing menjadi 4,76 % dan 4,10 %. Tabel 2.20 menunjukkan tentang Kondisi kemiskinan (Kemiskinan Makro) Kota Pariaman selama periode 2016-2020.

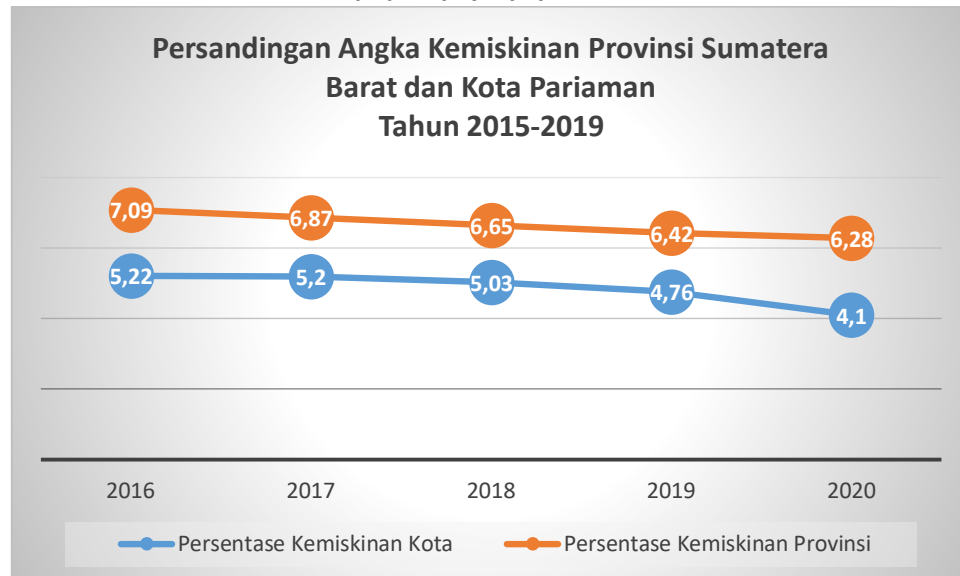
Tabel 2.20
Kondisi Kemiskinan Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk (000)	85.692	86.618	87.626	88.501	94.224
2.	Jml Penduduk Miskin (000)	4.470	4.488	4.399	4.200	3.658
3.	Jumlah Rumah Tangga	18.384	18.583	18.799	18.977	19.581
4.	Persentase Penduduk Miskin (P0)	5,22	5,20	5,03	4,76	4,10
5.	Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,90	0,59	0,68	0,49	0,49
6.	Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0,22	0,14	0,16	0,07	0,10
7.	Garis kemiskinan	392.970	412.231	431.368	446.514	480.028

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman



Gambar 2.11
Persandingan Angka Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Kota Pariaman
Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

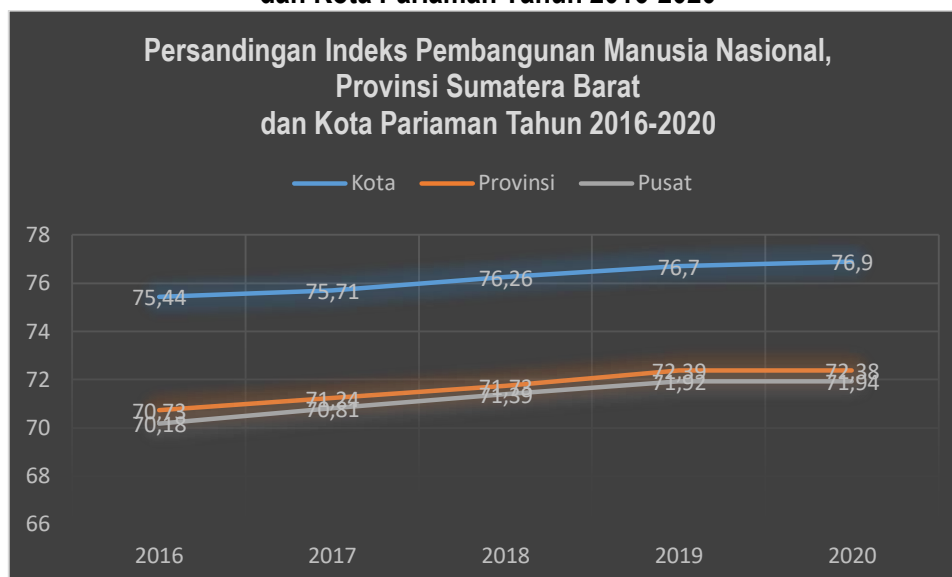
Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Kondisi pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2020 pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum, dalam lima tahun terakhir yaitu 2016-2020, pembangunan manusia di Kota Pariaman terus mengalami peningkatan. Pada gambar 2.13 di bawah, terlihat bahwa pada tahun 2016, capaian IPM Kota Pariaman adalah sebesar 74,98 dan pada tahun 2016 capaian IPM meningkat menjadi 75,44. Dan capaian IPM ini terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 75,71 pada tahun 2016 dan di tahun 2018 sebesar 75.44. Serta pada tahun 2020 sebesar 76.90. Angka IPM Kota Pariaman secara umum lebih tinggi dari IPM Provinsi yang sebesar 72,38 tahun 2020 dan IPM Nasional yang sebesar 71,924 ditahun 2020. Jika diakumulasikan, telah terjadi peningkatan sebesar 1,72 selama periode tersebut.



Gambar 2.12
Persandingan Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Pariaman Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

IPM merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, serta hidup layak. Indikator ini merupakan kemudahan dalam aspek sosial, budaya dan aspek ekonomi. Sebelumnya, komponen penyusun IPM adalah : Angka harapan hidup (AHH) Angka melek huruf (AMH), rata-rata lama sekolah (RLS), kombinasi APK serta PDB per kapita. Namun pada tahun 2010, UNDP merubah metodologi IPM, beberapa perubahan yang dilakukan yakni : (1) Mengganti Angka melek huruf (AMH) dengan Harapan lama sekolah (HLS). (2) Mengganti Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita menjadi Produk Nasional Bruto (PNB) perkapita. (3) Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Perubahan metodologi IPM tahun 2010 oleh UNDP tersebut diadopsi oleh BPS dalam penghitungan IPM 2014 keatas dengan alasan: Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Indikator selanjutnya, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

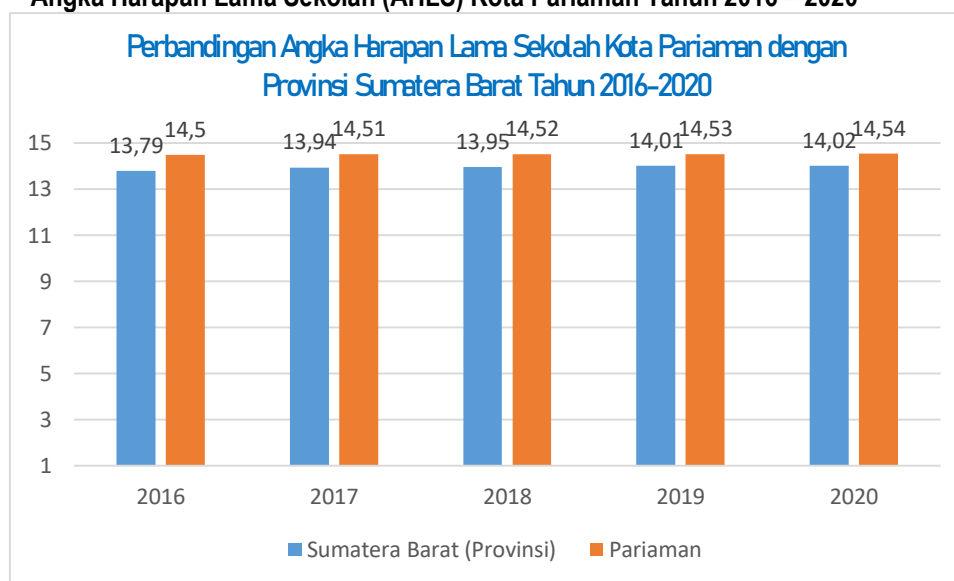
1) Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) merupakan salah satu indikator penghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). AHLS ini merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang



diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. AHLS ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas. Perkembangan AHLS di Kota Pariaman dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Grafik 2.13
Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

Berdasarkan grafik 2.14 diatas perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dari tahun 2016 sampai pada tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2020 AHLS Kota Pariaman sudah mencapai pada angka 14,54. Angka ini berada diatas rata-rata Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Provinsi Sumatera Barat yang baru mencapai 14,02 Tahun 2020. Sementara jika dilihat dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Pencapaian Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pariaman menduduki nomor urut ke-4. Sebagaimana yang bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.21
Peringkat Angka Harapan Lama Sekolah Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Peringkat	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Lama Sekolah
1	Padang	16,52
2	Padang Panjang	15,06



3	Bukittinggi	14,97
4	Pariaman	14,54
5	Tanah Datar	14,33
6	Kota Solok	14,32
7	Payakumbuh	14,26
8	Agam	13,87
9	Padang Pariaman	13,67
10	Pasaman Barat	13,61
11	Pesisir Selatan	13,32
12	Lima Puluh Kota	13,29
13	Sawah Lunto	13,17
14	Kab.Solok	13,04
15	Kepulauan Mentawai	12,82
16	Pasaman	12,80
17	Solok Selatan	12,71
18	Dharmasraya	12,43
19	Sijunjung	12,37
	Sumatera Barat (Provinsi)	14,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

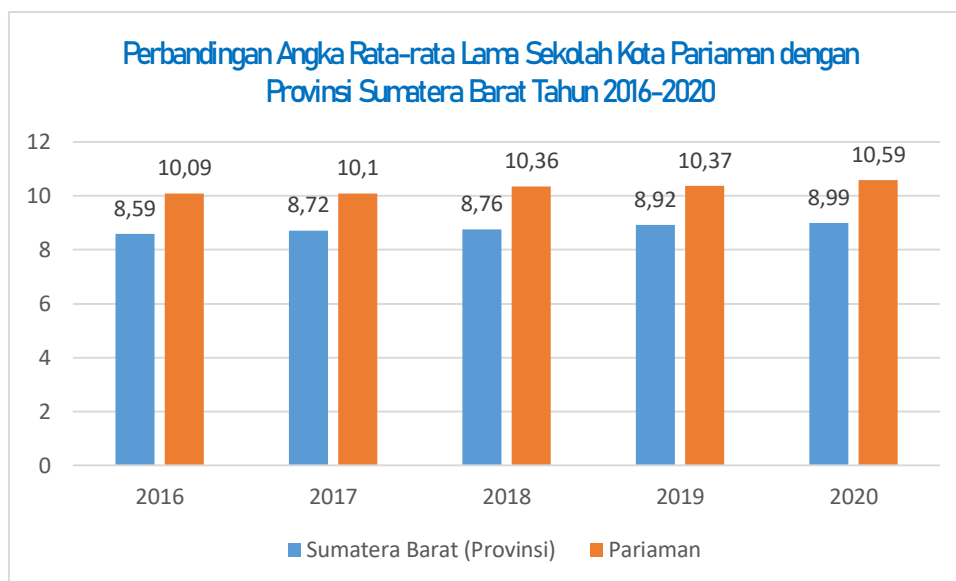
AHLS ini dipengaruhi oleh pendapatan ekonomi keluarga/ masyarakat dan kemampuan pemerintah dalam memenuhi sarana prasarana pendidikan. Kemampuan ekonomi masyarakat akan mendukung kebutuhan anak dalam memperoleh pendidikan yang layak dan kemampuan ekonomi ini juga yang akan menjamin berapa tahunnya anak untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Serta adanya kemampuan pemerintah untuk memberikan sarana prasana pendidikan kepada masyarakat, juga akan mempengaruhi harapan lama sekolah. Karena semakin baik sarana prasarana yang disediakan maka semakin banyak minat masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.

2) Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)

Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal yang mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Pariaman dari tahun 2016 sampai 2020 seperti terlihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.14
Angka Rata-rata Lama Sekolah (AHLS) Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

Dari grafik diatas dapat dilihat Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Pariaman dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 Angka Rata Rata Lama Sekolah 10,09 Tahun dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 10,59 Tahun. Dan berada diatas rata-rata Angka Rata Rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat yang baru mencapai 8,99 Tahun 2020. Pencapaian diatas menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan warga Kota Pariaman adalah telah sampai duduk di bangku kelas DI atau memasuki DII, artinya wajib belajar 9 tahun telah tuntas di Kota Pariaman. Dan akan menuju wajib belajar 12 tahun. Sementara jika dilihat dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Pencapaian Angka Rata Rata Lama Sekolah Kota Pariaman menduduki nomor urut ke-6. Sebagaimana yang bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 22
Peringkat Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Peringkat	Kabupaten/Kota	Angka Rata-Rata Lama Sekolah
1	Padang Panjang	11,62
2	Padang	11,58
3	Bukittinggi	11,33
4	Kota Solok	11,03
5	Payakumbuh	10,73
6	Pariaman	10,59



7	Sawah Lunto	10,17
8	Agam	8,96
9	Tanah Datar	8,61
10	Dharmasraya	8,47
11	Solok Selatan	8,28
12	Pesisir Selatan	8,26
13	Pasaman Barat	8,19
14	Sijunjung	8,11
15	Pasaman	8,09
16	Lima Puluh Kota	7,99
17	Padang Pariaman	7,87
18	Kab.Solok	7,86
19	Kepulauan Mentawai	7,09
	Sumatera Barat (Provinsi)	8,99

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

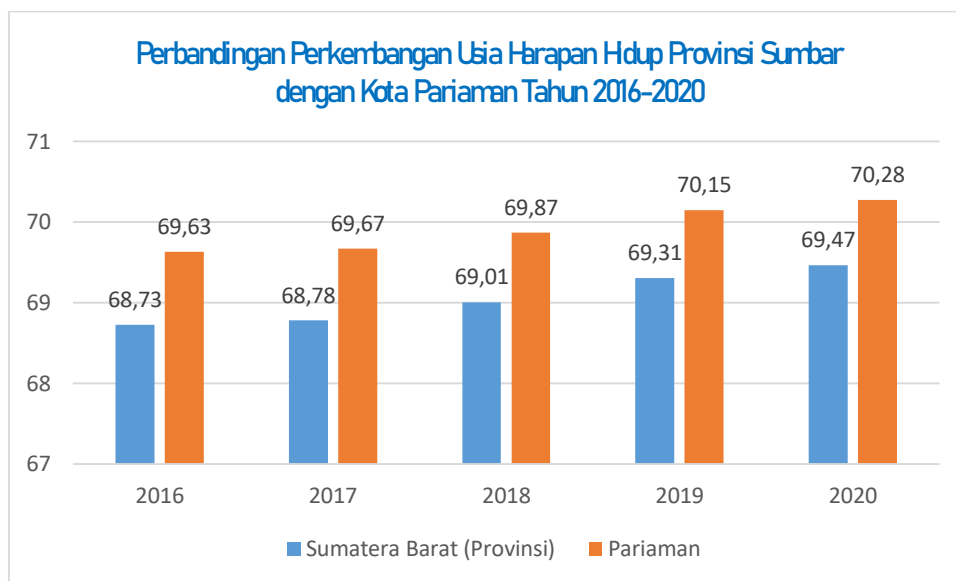
Ada beberapa indikator yang mempengaruhi ARLS ini, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), angka kelulusan siswa, mutu tenaga pendidik, nilai ujian, sarana prasarana sekolah dan sebagainya.

3) Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan masyarakat. Angka Usia Harapan Hidup adalah angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka ini mencerminkan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor social, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Karena itu untuk mempertahankan dan meningkatkan Angka Harapan Hidup, faktor-faktor yang mempengaruhinya harus dikendalikan melalui dukungan program kegiatan di OPD terkait.



Grafik 2.15
Usia Harapan Hidup Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

Dari grafik diatas dapat terlihat bahwa Angka Usia Harapan Hidup masyarakat Kota Pariaman sejak tahun 2016 – 2020 selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 Angka Usia Harapan Hidup masyarakat Kota Pariaman sebesar 69,63. Dan pada Tahun 2020 mencapai pada angka 70,28. Pencapaian Angka Usia Harapan Hidup Kota Pariaman berada diatas rata-rata Angka Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang baru mencapai 69,47 Tahun 2020. Dari pencapaian angka usia harapan hidup ini menggambarkan telah meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Kota Pariaman seiring dengan membaiknya tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat. Sementara jika dilihat dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Pencapaian Angka Usia Harapan Hidup Kota Pariaman menduduki nomor urut ke-4. Sebagaimana yang bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 23
Peringkat Angka Usia Harapan Hidup Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Peringkat	Kabupaten/Kota	Angka Usia Harapan Hidup
1	Bukittinggi	74,38
2	Payakumbuh	73,74
3	Padang	73,65
4	Kota Solok	73,61
5	Padang Panjang	72,82
6	Agam	72,37
7	Dharmasraya	71,33
8	Pesisir Selatan	70,86



Peringkat	Kabupaten/Kota	Angka Usia Harapan Hidup
9	Pariaman	70,28
10	Sawah Lunto	70,00
11	Tanah Datar	69,94
12	Lima Puluh Kota	69,79
13	Padang Pariaman	68,79
14	Kab.Solok	68,58
15	Pasaman Barat	67,82
16	Solok Selatan	67,81
17	Pasaman	67,40
18	Sijunjung	66,21
19	Kepulauan Mentawai	64,73
	Sumatera Barat (Provinsi)	69,47

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

4) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka di suatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Dalam lingkup Kota Pariaman, untuk angka TPT Kota Pariaman cukup berkinerja baik yang tergambar dari angka TPT dari tahun 2016-2019 mengalami penurunan. Sedangkan nilai TPT mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan nilai 5,63 %. Itu berarti pada tahun 2020 mengalami kenaikan 0,21 % dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 angka TPT Kota Pariaman mencapai 6,61 %. Kemudian di tahun 2017 menjadi 5,97 %. Serta di tahun 2018 dan 2019 angka TPT turun lagi masing-masing-masingnya 5,42 %. Peningkatan nilai TPT pada tahun 2020 ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang mengakibatkan lumpuhnya sebagian besar sektor kegiatan dan maraknya pemberhentian hubungan kerja. Begitu juga dengan angka TPAK Kota Pariaman dari tahun ketahun juga menggambarkan kinerja yang cukup baik ini terlihat dari angka TPAK yang selalu mengalami kenaikan dari tahun 2016 hanya baru mencapai 64,95 % hingga menjadi 68,95 % pada tahun 2019. Dan pada Tahun 2020 TPAK Kota Pariaman mengalami penurunan menjadi 64,16 %.

Tabel 2.24
Indikator Urusan Ketenagakerjaan Kota Pariaman
Tahun 2016-2020

TAHUN	TPT (%)	TPAK (%)
2016	6,61	64,95
2017	5,97	65,20
2018	5,72	66,65
2019	5,42	68,95
2020	5,73	64,16

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2021



Tabel 2.25
Jumlah Angkatan Kerja dan Partisipasi Angkatan Kerja
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bekerja	36.113	37.573	39.00	40.991	39.668
2	Pengangguran Terbuka	2.554	2.385	2.368	2.348	2.411
3	Bukan Angkatan Kerja	20.861	21.329	20.704	43.339	42.079

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2021

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kondisi lain dari fokus kesejahteraan sosial adalah usaha meningkatkan ekspresi masyarakat dalam melestarikan seni budaya dan olah raga, dimana kegiatan tersebut memberikan nilai tambah terhadap pelestarian nilai nilai budaya, seni tradisonal asli Kota Pariaman, yang akan memberikan nilai tambah dalam sektor pariwisata di kota pariaman.

Kegiatan olah raga yang digandrungi pemuda akan membawa Kota Pariaman menuju event-event pertandingan olah raga daerah, nasional, maupun internasional. Ditahun 2015 terdapat 33 group kesenian dan selalu mengalami pertumbuhan sebanyak 40 group pada tahun 2019. Akan tetapi untuk jumlah gedung kesenian Kota Pariaman masih mengandalkan 2 unit gedung kesenian dari tahun 2015-2019, sedangkan sarana penyelenggaraan seni dan budaya mengalami penambahan dalam kurun 5 tahun terakhir. Untuk kegiatan olah raga Kota Pariaman memiliki 41 group olah raga di tahun 2015 dan 61 group olah raga pada tahun 2019, jumlah kegiatan olah raga dari tahun 2015-2019 sebanyak 9 kegiatan, dan lapangan olah raga mengalami pertumbuhan sebanyak 54 lapangan selama 5 tahun. Perkembangan seni budaya dan olah raga dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.26
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Pariaman
Tahun 2016-2020

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Seni dan Budaya					
1	Jumlah Group Kesenian	33	40	40	40	40
2	Jumlah Gedung Kesenian	2	2	2	2	2
3	Penyelenggaraan Festival Budaya	7	7	9	9	0
4	Jumlah Kawasan cagar budaya	52	52	52	52	52
4	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	2	4	4	4	4
6	Jumlah Sanggar Kesenian	23	40	40	40	40



NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Olahraga					
7	Jumlah Klub Olah Raga	41	61	61	61	61
8	Jumlah Organisasi Olah Raga	12	12	12	35	35
9	Jumlah Kegiatan Olah Raga	9	9	9	9	0
10	Lapangan Olah Raga	40	40	54	54	54

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemeritahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua pemerintah daerah. Urusan pemerintahan wajib memiliki dua urusan pembangunan daerah, yakni urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan daerah yang wajib dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kota Pariaman.

2.3.1.1 Urusan Pendidikan

Perkembangan indikator pendidikan dari tahun 2016-2020 di Kota Pariaman antara lain diukur berdasarkan indikator Angka Partisipasi kasar (PUD/TK), Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A, APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B, Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI/Paket A dan Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs/Paket B, Angka Kelulusan SD/SDLB/MI/Paket A dan Angka Kelulusan SMP/SMPLB/MTs/Paket B, SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs yang terakreditasi, Kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Kasar merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/ SMP/ SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. Angka partisipasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.



Perkembangan indikator capaian urusan pendidikan di Kota Pariaman Tahun 2016- 2020 adalah sebagaimana disajikan sebagaimana tabel berikut ini.

1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Konsep APS yaitu proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Tujuan menghitung APS adalah untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Nilai APS berkisar antara 0-100. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. Tabel berikut memuat perkembangan nilai APS Kota Pariaman berdasarkan kelompok umur dari tahun 2016-2020:

Tabel 2.27
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Pariaman
Tahun 2016–2020

NO	Tahun	Kelompok Umur		
		7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
1	2016	120.04	73.54	91.27
2	2017	120.92	84.08	91.84
3	2018	122.68	83.25	92.69
4	2019	113.71	77.89	113.52
5	2020	112.08	80.84	113.54

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga, 2021

Nilai APS dicari dengan membandingkan jumlah penduduk pada kelompok umur tertentu yang masih bersekolah dengan jumlah seluruh penduduk penduduk pada kelompok tertentu kemudian dikali 100%. Data diatas pada tahun 2020 kelompok umur 7-12 tahun menunjukkan nilai APS sebesar 112,08. Sementara kelompok umur 13-15 tahun nilai APS nya sebesar 80,84 dan kelompok umur 16-18 tahun sebesar 113,54. Selama lima tahun terakhir nilai APS kelompok umur 7-12 tahun Kota Pariaman pada umumnya terjadi penurunan, sedangkan kelompok umur 13-15 tahun nilai APS berfluktuasi setiap tahunnya



dan kelompok umur 16-18 tahun nilai APS terjadi peningkatan setiap tahunnya dimana secara berurut yaitu 91,27; 91,84; 92,69; 113,52; dan 113,54.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan rohani dan jasmani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Berikut kondisi PAUD di Kota Pariaman dari Tahun 2016-2020:

Tabel 2.28
Data Kondisi PAUD Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	APK Nasional	34,62	33,84	37,92	36,93	37,52
2	APK Propinsi	26,58	26,38	30,22	30,39	29,87
3	APK Kota Pariaman	84,83	86,81	39,21	40,76	35,79
4	Jumlah penduduk Umur 3-6 tahun kota Pariaman	6.100	6.288	6.450	6.253	6.328
5	Jumlah Siswa PAUD	360	1.404	1.529	1.619	1.624

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk pada kelompok usia 3-6 tahun di Kota Pariaman setiap tahunnya mengalami kenaikan. Kenaikan jumlah penduduk ini selaras dengan bertambahnya jumlah siswa PAUD.

2. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Disamping itu juga mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Berikut rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah di Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.29
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Pariaman
Tahun 2016 – 2020

NO	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
I	TK					
a	Jumlah Sekolah	93	93	102	96	99
b	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 5-7	4.626	4.842	5.070	4.946	4.972
c	Perbandingan Jumlah Sekolah dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 5-7	1 : 50	1 : 52	1 : 49	1 : 51	1 : 50
II	SD/MI/SDLB					
a	Jumlah Sekolah	75	75	77	78	79
b	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12	9.446	9.630	9.962	10.058	10.317
c	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12	1 : 125	1 : 128	1 : 129	1 : 128	1 : 130
III	SMP/MTs/SMPLB					
a	Jumlah Sekolah	11	11	12	12	12
b	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15	5.189	5.199	5.246	5.086	5.096
c	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15	1 : 471	1 : 472	1 : 437	1 : 423	1 : 424

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga, 2021

Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa tahun 2016-2020 rasio ketersediaan sekolah pada tingkat pendidikan TK berfluktuatif. Nilai yang fluktuatif ini dikarenakan pertumbuhan penduduk pada kelompok usia 5-7 juga mengalami pertumbuhan yang fluktuatif setiap tahunnya. Sementara pada tingkat pendidikan SD rasio ketersediaan sekolah mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikarenakan adanya penambahan jumlah sekolah pada tahun 2018, 2019 dan 2020. Begitu juga pada tingkat pendidikan SMP rasio ketersediaan sekolah mengalami kenaikan. Walaupun pertumbuhan jumlah penduduk yang berfluktuatif setiap tahunnya, namun penambahan jumlah sekolah tetap dilakukan pada tahun 2018. Secara data ketersediaan sekolah untuk penduduk di Kota Pariaman telah memenuhi kebutuhan.

3. Rasio Rasio Guru dan Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur



jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu proses belajar mengajar. Rasio jumlah guru terhadap jumlah murid di Kota Pariaman tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.30
Rasio Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020

NO	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
I	TK					
a	Jumlah Guru	67	117,	91	122	150
	Jumlah Guru Negeri	5	5,00	4	7	10
	Jumlah Guru Swasta	62	112	87	115	140
b	Jumlah Murid	1.277	1.233	1.286	1.269	1.044
	Jumlah Murid Negeri	128	114	70	77	64
	Jumlah Murid Swasta	1.149	1.119	1.329	1.192	980
c	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	0,052	0,095	0,070	0,096	0,144
II	SD/MI/SDLB					
a	Jumlah Guru	831	753	853	872	818
b	Jumlah Murid	10.889	10.515	10.965	10.911	10.248
c	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	0,076	0,072	0,078	0,080	0,080
III	SMP/MTs/SMPLB					
a	Jumlah Guru	413	373	573	565	537
b	Jumlah Murid	4.594	4.673	6.925	6.767	6.596
c	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	0,090	0,080	0,081	0,083	0,081

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga, 2021

Dari data pada tabel di atas terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir rasio jumlah guru terhadap jumlah murid di Kota Pariaman bervariasi di setiap tingkatan pendidikan. Seperti halnya pada tingkat pendidikan TK rasio jumlah guru terhadap jumlah murid bervariasi dalam lima tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat data jumlah guru tidak selaras dengan jumlah murid. Misalnya pada tahun 2019 jumlah guru adalah 122 sedangkan jumlah murid adalah 1.269 sementara itu jumlah guru dan murid pada tahun 2020 secara



berurut adalah 150 dan 1.044. Hal ini jika disandingkan tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah guru dari tahun sebelumnya namun jumlah murid mengalami penurunan. namun demikian untuk jenjang pendidikan TK tetap memenuhi kondisi idealnya.

Sementara untuk tingkatan pendidikan SD/setara dan SMP/setara, rasio jumlah guru dan jumlah murid mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan jumlah murid yang selalu berkurang namun jumlah guru cenderung bertambah. Sehingga untuk rasio jenjang pendidikan SD/setara dan SMP/setara memenuhi kondisi idealnya.

Rasio antara murid dan rombongan belajar menjadi salah satu aspek penting dalam pendidikan. Hal ini menunjukkan kecukupan antara ruang kelas dan rombel yang tersedia dengan jumlah murid. Berikut rasio jumlah murid terhadap jumlah kelas di Kota Pariaman pada Tahun 2016-2020 tertera dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.31
Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020

NO	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
I	TK					
a	Jumlah Murid	1.277	1.233	1.399	1.269	1.044
b	Jumlah Kelas	76,00	75,00	77	77	76
c	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	16,802	16,440	18,169	16,481	13,737
II	SD/MI/SDLB					
a	Jumlah Murid	10.889	10.515	10.359	10.252	10.248
b	Jumlah Kelas	507,00	518,00	532	530	522
c	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	21,477	20,299	19,472	19,343	19,632
III	SMP/MTs/SMPLB					
a	Jumlah Murid	4.594	4.673	6.925	6.767	6.596
b	Jumlah Kelas	240	232	230	224	222
c	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	19,142	20,142	30,109	30,210	29,711

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga, 2021

Data diatas menunjukkan rasio jumlah murid terhadap jumlah kelas di Kota Pariaman pada Tahun 2016-2020 cenderung meningkat. Rasio jumlah murid terhadap jumlah kelas pada tingkat pendidikan TK dan SD/setara selama lima tahun terakhir meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan jumlah murid



TK yang selalu berkurang dari tahun ke tahun sementara untuk jumlah kelas selalu mengalami penambahan. Sementara itu pada tingkat pendidikan SMP/setara rasio jumlah murid terhadap jumlah kelas berfluktuatif. Dari tahun 2016-2018 rasio jumlah murid terhadap jumlah guru untuk jenjang pendidikan SMP mengalami peningkatan, namun pada tahun 2019-2020 terjadi penurunan. Pada dasarnya pada tahun 2016-2020 jumlah murid berkurang dari tahun ke tahun, sedangkan jumlah kelas bertambah pada tahun 2016-2018 dan berkurang pada tahun 2019 dan 2020. Berikut rasio jumlah murid terhadap jumlah kelas menurut Permendikbud No.17 Tahun 2017:

Tabel 2.32
Rasio Jumlah Murid terhadap Jumlah Kelas Menurut
Permendikbud No.17 Tahun 2017

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid/ Kelas
1	SD	1 : 18 – 28
2	SMP	1 : 20 – 32
3	SMA	1 : 20 – 36
4	SMK	1 : 15 – 36

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga, 2021

4. Angka Putus Sekolah

Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil atau tidaknya pembangunan dibidang pendidikan. Angka putus sekolah ini bertujuan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Berikut persentase anak putus sekolah di Kota Pariaman selama lima tahun terakhir dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.33
Angka Putus Sekolah Kota Pariaman
Tahun 2016-2020

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SD					
	Angka Putus sekolah (%)	0,06	0,12	0,16	0,05	0,01
2	SMP/MI					
	Angka Putus sekolah (%)	0,04	0,17	0,07	0,25	0,09

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga, 2021



Angka putus sekolah SD dan SMP cenderung menurun selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD adalah 0,01 % sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP adalah 0,09 %. Angka putus sekolah ini dipengaruhi oleh banyak faktor baik faktor internal maupun dari lingkungan. Adapun faktor internal yang menyebabkan mereka putus sekolah adalah kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga broken home, sehingga mereka kurang perhatian dari orang tua, selain itu juga tidak adanya kemauan dari mereka sendiri untuk ke sekolah karena adanya pengaruh dari orang lain. Jika kita lihat, faktor ekonomi bukanlah menjadi faktor utama alasan mereka putus sekolah. Karena untuk uang sekolah di sekolah negeri tidak dikenakan biaya. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh besar terhadap kemauan belajar mereka. Salah pergaulan adalah salah satu bentuk pengaruh lingkungan yang buruk yang dapat memicu kemauan mereka untuk bersekolah.

5. Angka Kelulusan Siswa

Angka kelulusan adalah jumlah siswa yang lulus dan dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar/ijazah. Angka ini menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Angka kelulusan siswa pada berbagai jenjang pendidikan setiap tahun mencerminkan kemampuan dan penguasaan siswa atas materi pelajaran yang disampaikan serta kemampuan dalam menghadapi evaluasi belajar. Angka kelulusan siswa berdasarkan jenjang pendidikan di Kota Pariaman pada tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.34
Angka Kelulusan Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kota Pariaman
Tahun 2016 – 2020

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SD					
	Persentase (%)	100	100	100	99,89	100
2	MI					
	Persentase (%)	100	100	100	99,89	100
3	SMP					
	Persentase (%)	99,50	99,93	99,47	98,90	99,79
4	MTs					
	Persentase (%)	99,65	99,87	99,63	99,20	99,88

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kelulusan SD, MI, SMP dan MTs di Kota Pariaman rata-rata 100 %. Untuk jenjang pendidikan SMP angka kelulusan tidak sampai 100 % tetapi di atas 99 %, ini kemungkinan ada siswa yang pindah sebelum ujian kelulusan dilaksanakan. Sedangkan untuk



jenjang pendidikan MI rata-rata 100 % hanya pada tahun 2019 dengan presentase 99,89 % dan MTs selalu angka kelulusannya juga di atas 99 %. Ini kemungkinan ada siswa yang pindah sekolah sehingga mengikuti ujian di sekolah yang baru.

6. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Pendidikan lima tahun terakhir dari tahun 2019 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.35
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan
Tahun 2019 – 2020

NO	Uraian	Indikator	Capaian Tahun	
			2019	2020
A	Pendidikan	1 : 18 – 28		
1	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	1.633	1.761
2	Pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	15.719	15.845
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	375	100

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat persentase pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan di Kota Pariaman yaitu bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan secara berurutan yaitu 1.633 dan 1.761. Hal ini dikarenakan mulai meningkatnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke PAUD untuk kepentingan tumbuh kembang anak.

Sementara itu, jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu 15845 dari tahun sebelumnya yakni 15719 di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya anak dalam mendapatkan pendidikan dasar. Namun dari bidang Pendidikan Kesetaraan Pencapaian SPM mengalami penurunan dari tahun 2019 (375) dibanding tahun 2020 (100) yang disebabkan masih kurangnya kemauan anak-anak yang putus sekolah ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan juga disebabkan kondisi Pandemi Covid 19 sulit untuk menemui anak-anak yang putus sekolah dan keterbatasan



untuk melakukan tatap muka dalam belajar. Pandemi Covid 19 juga mengakibatkan surutnya perekonomian masyarakat, sehingga anak – anak putus sekolah enggan untuk menyambung sekolah lagi karena terkendala biaya.

7) Angka Partispasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Kegunaan APM ini untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Nilai APM berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. APM dan APK Kota Pariaman selama lima tahun terakhir dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.36
Angka Partispasi Murni (APM) dan Angka Partispasi Kasar (APK)
Tahun 2016 – 2020

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Urusan Pendidikan					
1	Angka Partispasi Murni (APM)					
	SD / MI	99,87	100	99,72	99,55	99,61
	SMP / MTs	70,34	72,11	69,36	70,64	73,18
2	angka pertispasi kasar (APK)					
	SD / MI	110,73	111,23	122,68	113,74	112,08
	SMP / MTs	85,43	86,24	83,25	77,64	80,49

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga, 2021



APM dan APK Kota Pariaman untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs berfluktuatif. Hanya pada tahun 2017 pada jenjang pendidikan SD/MI dengan nilai APM 100, sedangkan tahun 2016, 2018, 2019 dan 2020 nilai APM berkisar di atas 99 %. Sementara itu, nilai APM untuk jenjang pendidikan SMP/MTs juga berfluktuatif dari tahun 2016 hingga tahun 2020 secara berurut yaitu 70,34; 72,11; 69,36; 70,64 dan 73,18. Begitu juga dengan nilai APK pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pariaman cenderung berfluktuatif tetapi tidak terlalu jauh perbedaan nilainya. Pada tahun 2020 nilai APK jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 112,08 dan 80,49 sedangkan pada tahun 2019 nilai APK yaitu 113,74 dan 77,64

2.3.1.2 Urusan Kesehatan

1) Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Bidang kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu, sarana kesehatan dan tenaga kesehatan menjadi hal yang penting dalam mendukung bidang kesehatan Kota Pariaman.

Sarana pelayanan kesehatan merupakan faktor utama dalam dalam terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di bidang kesehatan. Untuk itu tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan memenuhi standar harus dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan diharapkan seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik tanpa terkendala oleh kurangnya fasilitas kesehatan. Adapun sarana pelayanan kesehatan di Kota Pariaman seperti tertera dalam tabel berikut:

Tabel 2.37
Sarana Kesehatan Kota Pariaman
Tahun 2016 – 2020

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Sakit Umum	3	4	4	5	5
2	Rumah Sakit Bersalin	0	0	0	0	0
3	Poliklinik	9	9	7	6	6
4	Pustu	13	13	12	10	10
5	Puskesmas	7	7	7	7	7
6	Poskesdes	33	33	33	51	54
7	Posyandu	137	137	71	71	71
8	Apotek	30	30	13	13	13
9	Polindes	26	26	26	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021



Dari data pada tabel diatas bahwa pemerintah daerah selalu berusaha untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat dengan menambah sarana kesehatan. Disamping menyediakan tujuh puskesmas, pemerintah daerah juga menyediakan sepuluh puskesmas pembantu guna menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari puskesmas. Selain itu pemerintah daerah juga menyediakan 54 poskesdes dan 71 posyandu yang tersebar di seluruh desa di Kota Pariaman untuk masyarakat desa sehingga masyarakat tidak perlu khawatir tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat karena jangkauan pelayanan kesehatan semakin dekat dengan masyarakat.

Selain sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan yang merupakan sumber daya manusia yang harus terpenuhi baik dari segi jumlah maupun kualifikasi yang dibutuhkan. Seluruh tenaga kesehatan harus tersebar merata dan sebanding dengan kepadatan dan penyebaran penduduk sehingga pelayanan kesehatan yang optimal akan tercapai. Adapun jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

Tabel 2.38
Tenaga Kesehatan Kota Pariaman
Tahun 2016-2020

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Dokter Spesialis	3	3	3	3	3
2	Dokter	21	21	21	30	30
3	Dokter gigi	6	6	6	9	10
4	Sarjana Kesehatan Masyarakat	31	30	30	52	52
5	Farmasi/ Apoteker	18	18	18	15	31
6	Sarjana Kesehatan (S2)	8	8	8	7	7
7	Sarjana Non Kesehatan	13	13	13	0	2
8	Dokter (PTT)	0	0	0	0	0
9	Bidan (PNS)	74	121	121	116	129
10	Bidan (PTT)	58	7	7	0	0
11	Ahli Gizi	0	0	0	21	17
12	Perawat	76	77	77	21	82
Total						

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Dalam usaha untuk pemenuhan tenaga kesehatan, pemerintah daerah juga melakukan pengangkatan tenaga honor/kontrak untuk menunjang pelayanan kesehatan. Disamping itu juga mengajukan kebutuhan tenaga kesehatan dalam pengangkatan CPNS maupun PPPK dengan menghitung formasi yang dibutuhkan. Dengan tersedianya tenaga kesehatan yang sesuai kebutuhan diharapkan seluruh



program dan kegiatan dapat berjalan dengan maksimal serta pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Diharapkan derajat kesehatan masyarakat meningkat seiring dengan meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

2) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per satuan balita

Posyandu adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait. Berikut rasio jumlah posyandu dan Balita di Kota Pariaman selama lima tahun terakhir dari tahun 2016 sampai tahun 2020 pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.39
Rasio Posyandu dan Balita Kota Pariaman
Tahun 2016 – 2020

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Posyandu	Unit	71	71	71	71	71
2.	Jumlah Balita	Anak	8.137	8.086	8.042	7.986	8.517
3.	Rasio Posyandu/Jml Balita	Per 1.000 balita	8,73	8,78	8,83	8,89	8,34

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

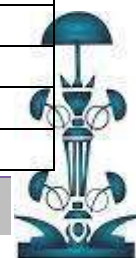
Dari tahun 2016-2020 jumlah posyandu di Kota Pariaman adalah 71 posyandu. Pemerintah daerah menyediakan minimal satu posyandu aktif setiap desa agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Dari nilai rasio posyandu per jumlah balita diatas dari tahun ke tahun sebenarnya tidak mengalami masalah yang berarti. Setiap posyandu pada tahun 2020 rata-rata melayani kurang lebih 120 balita setiap tahunnya dan masih mampu dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal.

Posyandu sebagai wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat pada Keluarga Berencana (KB) yang diselenggarakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan KB mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Berikut rasio jumlah kunjungan balita ke posyandu di Kota Pariaman tahun 2020.



Tabel 2.40
Rasio Kunjungan Balita ke Posyandu di Kota Pariaman
Tahun 2020

No	Kecamatan	Puskesmas	Desa	Cakupan Kehadiran Di Posyandu (Rasio Yang Datang Terhadap Total Sasaran)
1	Pariaman Selatan	Marunggi	Padang Cakur	5
2	Pariaman Tengah	Pauh	Taratak	5
3	Pariaman Selatan	Marunggi	Pasir Sunur	5
4	Pariaman Selatan	Kuraitaji	Pauh Kurai Taji	1
5	Pariaman Selatan	Marunggi	Palak Aneh	1
6	Pariaman Timur	Santok	Cubadak Mentawai	0
7	Pariaman Utara	Sikapak	Tungkal Utara	5
8	Pariaman Tengah	Pauh	Jawi - Jawi li	5
9	Pariaman Utara	Sikapak	Tungkal Selatan	5
10	Pariaman Timur	Santok	Bungo Tanjung	1
11	Pariaman Utara	Naras	Manggung	1
12	Pariaman Tengah	Pauh	Kampung Jawa I	1
13	Pariaman Utara	Sikapak	Cubadak Air	5
14	Pariaman Utara	Naras	Ampalu	5
15	Pariaman Tengah	Pauh	Kampung Perak	5
16	Pariaman Selatan	Marunggi	Sikabu	5
17	Pariaman Timur	Santok	Kaluat	0
18	Pariaman Selatan	Kuraitaji	Punggung Lading	1
19	Pariaman Tengah	Pauh	Pauh Timur	5
20	Pariaman Tengah	Pauh	Pauh Barat	5
21	Pariaman Timur	Santok	Sungai Pasak	5
22	Pariaman Timur	Padusunan	Kp. Baru Padusunan	5
23	Pariaman Selatan	Kuraitaji	Marabau	5
24	Pariaman Tengah	Pauh	Cimparuh	5
25	Pariaman Utara	Naras	Padang Birik-Birik	5
26	Pariaman Selatan	Marunggi	Marunggi	5
27	Pariaman Selatan	Kuraitaji	Simpang	1
28	Pariaman Timur	Santok	Kajai	1
29	Pariaman Timur	Padusunan	Koto Marapak	0
30	Pariaman Tengah	Pauh	Kampung Baru	1
31	Pariaman Selatan	Kuraitaji	Sungai Kasai	5
32	Pariaman Utara	Sikapak	Cubadak Air Selatan	5
33	Pariaman Selatan	Marunggi	Taluk	5
34	Pariaman Tengah	Pauh	Lohong	5
35	Pariaman Utara	Naras	Naras Hilir	5
36	Pariaman Utara	Naras	Sintuk	5



No	Kecamatan	Puskesmas	Desa	Cakupan Kehadiran Di Posyandu (Rasio Yang Datang Terhadap Total Sasaran)
37	Pariaman Utara	Naras	Balai Naras	5
38	Pariaman Timur	Santok	Kampung Tengah	5
39	Pariaman Selatan	Kuraitaji	Balai Kurai Taji	5
40	Pariaman Timur	Padusunan	Talago Sarik	5
41	Pariaman Utara	Sikapak	Cubadak Air Utara	1
42	Pariaman Selatan	Kuraitaji	Batang Tajongkek	5
43	Pariaman Tengah	Pauh	Rawang	5
44	Pariaman Tengah	Pauh	Jati Mudik	5
45	Pariaman Tengah	Pauh	Jawi - Jawi I	5
46	Pariaman Utara	Sikapak	Sikapak Timur	5
47	Pariaman Selatan	Kuraitaji	Toboh Palabah	1
48	Pariaman Utara	Naras	Naras I	5
49	Pariaman Timur	Padusunan	Sungai Sirah	5
50	Pariaman Selatan	Marunggi	Kampung Apar	5
51	Pariaman Utara	Naras	Sungai Rambai	0
52	Pariaman Tengah	Pauh	Jalan Kereta Api	5
53	Pariaman Timur	Padusunan	Pakasai	5
54	Pariaman Tengah	Pauh	Kampung Pondok	5
55	Pariaman Tengah	Pauh	Karan Aur	5
56	Pariaman Utara	Sikapak	Sikapak Barat	5
57	Pariaman Tengah	Pauh	Jati Hilir	1
58	Pariaman Selatan	Kuraitaji	Rambai	5
59	Pariaman Tengah	Pauh	Jalan Baru	1
60	Pariaman Timur	Padusunan	Bato	5
61	Pariaman Utara	Naras	Tanjung Sabar	5
62	Pariaman Tengah	Pauh	Kampung Jawa li	0
63	Pariaman Tengah	Pauh	Alai Gelombang	5
64	Pariaman Timur	Santok	Air Santok	5
65	Pariaman Timur	Padusunan	Kampung Gadang	5
66	Pariaman Utara	Naras	Apar	5
67	Pariaman Tengah	Pauh	Pondok li	5
68	Pariaman Tengah	Pauh	Pasir	1
69	Pariaman Tengah	Pauh	Ujung Batung	5
70	Pariaman Timur	Santok	Kampung Kandang	5
71	Pariaman Timur	Padusunan	Batang Kabung	5

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Data di atas menampilkan rasio kunjungan balita ke posyandu di setiap desa. Jumlah balita di setiap desa berbeda-beda sehingga rasio kunjungan di setiap posyandu pun tidak sama. Secara umum pelayanan



posyandu di setiap desa masih memadai. Ada beberapa desa yang jumlah kunjungan balita ke posyandu masih nol, ini dikarenakan masih minimnya kesadaran masyarakat di desa akan pentingnya pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang balita sejak dini di posyandu guna meningkatkan status gizi balita. Untuk itu masih dibutuhkannya sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat desa sehingga masyarakat memperoleh edukasi terkait kesehatan dan tumbuh kembang balita.

3) Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Puskesmas Pembantu (Pustu) per Satuan Penduduk

Pembangunan di bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit, meningkatkan keadaan status gizi masyarakat, PHBS dan sebagainya dilaksanakan melalui jumlah sarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jumlah penempatan tenaga medis dan paramedis di tengah masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat untuk menjangkau pelayanan kesehatan. Rasio jumlah puskesmas, praktek dokter dan puskesmas pembantu tercantum di dalam tabel berikut:

Tabel 2.41
Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu Kota Pariaman
Tahun 2016 – 2020

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Puskesmas	Unit	7	7	7	7	7
2	Jumlah Praktek Dokter	Unit	24	24	24	24	24
3	Jumlah Pustu	Unit	12	12	12	10	10
4	Jumlah Total Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu	Unit	43	43	43	41	41
5	Jumlah Penduduk	Jiwa	85.692	86.618	87.626	88.501	94.224
6	Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu persatuan Penduduk	1.000 jiwa	0,50	0,50	0,49	0,46	0,44

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio jumlah puskesmas, praktek dokter dan puskesmas pembantu per satuan penduduk setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk Kota Pariaman yang mengalami peningkatan sementara jumlah sarana kesehatan yang tidak terjadi penambahan.



4) Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk

Rumah Sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Berikut ditampilkan rasio jumlah rumah sakit yang ada di Kota Pariaman:

Tabel 2.42
Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Di Kota Pariaman
Tahun 2016-2020

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Sakit	Unit	4	4	4	5	5
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	85.692	86.618	87.626	88.501	94.224
3	Rasio RSUD persatuan Penduduk	1.000 jiwa	0,047	0,046	0,046	0,057	0,053

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Kota Pariaman memiliki 5 rumah sakit, yaitu RSUD Kota Pariaman, RSUD Dr. Sadikin, RS Aisyiyah Pariaman, RS Tamar Medical Centre dan RSIA Citra Aguswar. Pada tahun 2019 ada penambahan satu rumah sakit, hal ini untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat karena pasien yang datang untuk berobat tidak hanya dari dalam Kota Pariaman saja tetapi dari daerah tetangga.

5) Angka Kematian dan Kelahiran Bayi

Jumlah kematian dan kelahiran hidup bayi di Kota Pariaman dalam lima tahun terakhir dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.43
Angka Kematian dan Kelahiran Bayi di Kota Pariaman
Tahun 2016-2020

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kematian Bayi (bayi)	35	21	25	21	14
2.	Jumlah Kelahiran Hidup (bayi)	1.664	1.619	1.628	1.612	1.560

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kematian bayi dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini karena upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam



meminimalisir terjadinya kematian bayi. Pada tahun 2020 jumlah kematian bayi sebanyak 14 bayi, ini merupakan jumlah terkecil dalam lima tahun terakhir.

Angka kelahiran hidup bayi selama lima tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2020 jumlah kelahiran bayi sebanyak 1.560 nilai ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 1.612 pada tahun 2019. Penurunan angka kelahiran hidup bayi ini merupakan bentuk kesadaran masyarakat dalam memberikan jarak kelahiran dan membentuk keluarga yang berkualitas dengan melaksanakan program keluarga berencana.

Jumlah kematian ibu di Kota Pariaman dalam lima tahun terakhir dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.44
Angka Kematian Ibu di Kota Pariaman
Tahun 2016-2020

NO	Puskesmas	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Puskesmas Naras	0	0	0	1	0
2.	Puskesmas Kampung Baru Padusunan	0	0	0	0	0
3.	Puskesmas Pauh	0	0	0	1	0
4.	Puskesmas Kurai Taji	0	0	0	1	0
5.	Puskesmas Marunggi	0	0	0	0	0
6.	Puskesmas Air Santok	0	0	0	1	0
7.	Puskesmas Sikapak Barat	0	0	0	0	0
		0	0	0	4	0

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Secara umum semua puskesmas yang ada di Kota Pariaman jumlah kematian ibu nihil. Pada tahun 2019 jumlah kematian ibu sebanyak 4 orang yang tersebar di beberapa puskesmas. Pada tahun 2019 ini menjadi bahan evaluasi bagi puskesmas dan setiap pihak terkait di bidang kesehatan khususnya untuk menekan angka kematian ibu di tahun berikutnya. Hal tersebut diupayakan dengan serius dan terbukti pada tahun 2020 dimana angka kematian ibu nol (nihil).

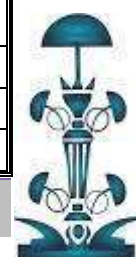
6) Prosentase Kasus Stunting Balita

Stunting adalah kondisi ketika anak lebih pendek dibandingkan anak-anak lain seusianya, atau dengan kata lain, tinggi badan anak berada di bawah standar. Standar yang dipakai sebagai acuan adalah kurva pertumbuhan yang dibuat oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Persentase kasus stunting balita di Kota Pariaman pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.45
Pravelensi Kasus Stunting Balita di Kota Pariaman
Tahun 2020

No	Kecamatan	Puskesmas	Desa	Jumlah Anak Stunting (Pendek & Sangat Pendek)	% Prevalensi STUNTING
1	PARIAMAN SELATAN	MARUNGGI	PADANG CAKUR	14	36,84
2	PARIAMAN TENGAH	PAUH	TARATAK	19	31,67
3	PARIAMAN SELATAN	MARUNGGI	PASIR SUNUR	4	30,77
4	PARIAMAN SELATAN	KURAITAJI	PAUH KURAI TAJI	14	28,57
5	PARIAMAN SELATAN	MARUNGGI	PALAK ANEH	7	24,14
6	PARIAMAN TIMUR	SANTOK	CUBADAK MENTAWAI	17	23,29
7	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK	TUNGKAL UTARA	14	22,95
8	PARIAMAN TENGAH	PAUH	JAWI - JAWI II	12	20,69
9	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK	TUNGKAL SELATAN	16	17,98
10	PARIAMAN TIMUR	SANTOK	BUNGO TANJUNG	17	17,17
11	PARIAMAN UTARA	NARAS	MANGGUNG	17	17,17
12	PARIAMAN TENGAH	PAUH	KAMPUNG JAWA I	11	16,67
13	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK	CUBADAK AIR	10	16,39
14	PARIAMAN UTARA	NARAS	AMPALU	27	15,88
15	PARIAMAN TENGAH	PAUH	KAMPUNG PERAK	7	14,89
16	PARIAMAN SELATAN	MARUNGGI	SIKABU	5	14,29
17	PARIAMAN TIMUR	SANTOK	KALUAT	6	13,95
18	PARIAMAN SELATAN	KURAITAJI	PUNGGUNG LADING	15	13,64
19	PARIAMAN TENGAH	PAUH	PAUH TIMUR	17	13,18
20	PARIAMAN TENGAH	PAUH	PAUH BARAT	20	13,07
21	PARIAMAN TIMUR	SANTOK	SUNGAI PASAK	9	12,86
22	PARIAMAN TIMUR	PADUSUNAN	KP. BARU PADUSUNAN	9	12,86
23	PARIAMAN SELATAN	KURAITAJI	MARABAU	12	12,24
24	PARIAMAN TENGAH	PAUH	CIMPARUH	22	11,83
25	PARIAMAN UTARA	NARAS	PADANG BIRIK-BIRIK	10	11,36
26	PARIAMAN SELATAN	MARUNGGI	MARUNGGI	21	11,29
27	PARIAMAN SELATAN	KURAITAJI	SIMPANG	6	11,11
28	PARIAMAN TIMUR	SANTOK	KAJAI	5	11,11
29	PARIAMAN TIMUR	PADUSUNAN	KOTO MARAPAK	9	11,11
30	PARIAMAN TENGAH	PAUH	KAMPUNG BARU	16	11,03
31	PARIAMAN SELATAN	KURAITAJI	SUNGAI KASAI	3	10,71
32	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK	CUBADAK AIR SELATAN	6	10,71
33	PARIAMAN SELATAN	MARUNGGI	TALUK	25	10,59
34	PARIAMAN TENGAH	PAUH	LOHONG	6	10,53
35	PARIAMAN UTARA	NARAS	NARAS HILIR	13	10,48



No	Kecamatan	Puskesmas	Desa	Jumlah Anak Stunting (Pendek & Sangat Pendek)	% Prevalensi STUNTING
36	PARIAMAN UTARA	NARAS	SINTUK	6	10,17
37	PARIAMAN UTARA	NARAS	BALAI NARAS	14	9,93
38	PARIAMAN TIMUR	SANTOK	KAMPUNG TANGAH	4	9,76
39	PARIAMAN SELATAN	KURAITAJI	BALAI KURAI TAJI	7	9,72
40	PARIAMAN TIMUR	PADUSUNAN	TALAGO SARIK	10	9,62
41	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK	CUBADAK AIR UTARA	10	9,26
42	PARIAMAN SELATAN	KURAITAJI	BATANG TAJONGKEK	4	8,70
43	PARIAMAN TENGAH	PAUH	RAWANG	9	8,11
44	PARIAMAN TENGAH	PAUH	JATI MUDIK	3	7,89
45	PARIAMAN TENGAH	PAUH	JAWI - JAWI I	4	7,84
46	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK	SIKAPAK TIMUR	5	7,58
47	PARIAMAN SELATAN	KURAITAJI	TOBOH PALABAH	9	7,50
48	PARIAMAN UTARA	NARAS	NARAS I	15	7,43
49	PARIAMAN TIMUR	PADUSUNAN	SUNGAI SIRAH	2	7,14
50	PARIAMAN SELATAN	MARUNGGI	KAMPUNG APAR	3	6,98
51	PARIAMAN UTARA	NARAS	SUNGAI RAMBAI	5	6,94
52	PARIAMAN TENGAH	PAUH	JALAN KERETA API	4	6,78
53	PARIAMAN TIMUR	PADUSUNAN	PAKASAI	5	6,67
54	PARIAMAN TENGAH	PAUH	KAMPUNG PONDOK	5	5,62
55	PARIAMAN TENGAH	PAUH	KARAN AUR	6	5,56
56	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK	SIKAPAK BARAT	7	5,30
57	PARIAMAN TENGAH	PAUH	JATI HILIR	4	5,06
58	PARIAMAN SELATAN	KURAITAJI	RAMBAI	3	4,76
59	PARIAMAN TENGAH	PAUH	JALAN BARU	5	4,35
60	PARIAMAN TIMUR	PADUSUNAN	BATO	3	4,35
61	PARIAMAN UTARA	NARAS	TANJUNG SABAR	2	4,17
62	PARIAMAN TENGAH	PAUH	KAMPUNG JAWA II	2	4,08
63	PARIAMAN TENGAH	PAUH	ALAI GELOMBANG	3	3,75
64	PARIAMAN TIMUR	SANTOK	AIR SANTOK	3	3,23
65	PARIAMAN TIMUR	PADUSUNAN	KAMPUNG GADANG	2	2,08
66	PARIAMAN UTARA	NARAS	APAR	1	1,56
67	PARIAMAN TENGAH	PAUH	PONDOK II	1	1,49
68	PARIAMAN TENGAH	PAUH	PASIR	0	0,00
69	PARIAMAN TENGAH	PAUH	UJUNG BATUNG	0	0,00
70	PARIAMAN TIMUR	SANTOK	KAMPUNG KANDANG	0	0,00
71	PARIAMAN TIMUR	PADUSUNAN	BATANG KABUNG	0	0,00

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021



Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase anak stunting di setiap desa bervariasi. Untuk persentase stunting pada anak yang paling rendah yaitu terdapat di empat desa yaitu Desa Pasir, Ujung Batung, Kampung Kandang dan Batang Kabung dimana keempat desa tersebut persentase stuntingnya adalah 0 %. Sedangkan yang paling tinggi yaitu Desa Padang Cakur yaitu sebesar 36,84 %. Tidak meratanya jumlah kasus stunting yang ada di setiap desa ini menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak terkait di bidang kesehatan untuk lebih serius lagi dalam memperhatikan tumbuh kembang anak. Upaya konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting akan dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, sehingga pemantauan dan evaluasi terhadap Program dan Kegiatan.

Upaya Konvergensi Stunting yang akan dilakukan melalui 8 Aksi yaitu : melakukan Analisis Situasi , Melakukan Pemetaan, Melaksanakan Rembuk Stunting, Membuat Perwako Tentang Peran Desa, Melakukan Pembinaan KPM, Membuat Sistem Manajemen Data, Melakukan Pengukuran dan Pulikasi Stunting, Melakukan Evaluasi Stunting untuk memastikan :

- Perencanaan kegiatan Pencegahan stunting dengan berbasis Data
- Intervensi gizi yang diprioritaskan oleh Daerah yang sudah dimasukkan pada perencanaan dan penganggaran
- Melakukan pemantauan secara terpadu sebagai sarana untuk berkoordinasi dan melakukan penyesuaian dalam program
- Melakukan Sistem manajemen data yang baik untuk mengukur hasil pelaksanaan kegiatan
Menjadikan hasil evaluasi Kinerja digunakan dasar perencanaan dan Penganggaran

7) Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di Kota Pariaman dari tahun 2019 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.46
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

NO	Uraian	Indikator	Tahun	
			2019	2020
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 difasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	89,3 %	90,3 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	94,8 %	92,3 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi	Jumlah bayi baru lahir usia 0 -28 hari	98,2 %	92,63 %



NO	Uraian	Indikator	Tahun	
			2019	2020
	Baru Lahir	yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar		
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	90,14 %	59,42 %
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	98,8 %	99 %
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah pengunjung usia 15- 59 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	21,9 %	37 %
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah pengunjung usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	80,7 %	68,61 %
8	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	27,3 %	15,62 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes Militus	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	42,2 %	62 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Berat	Jumlah ODGJ berat di kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100 %	100 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100 %	37,85 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	100 %	55,3 %

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 12 indikator pencapaian SPM bidang kesehatan, namun pada tahun 2020 dari 12 indikator pencapaian SPM tersebut hanya dua indikator saja yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Indikator tersebut yaitu Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar. Sementara 10 indikator lainnya mengalami penurunan. Penyebab dari penurunan capaian SPM ini adalah karena adanya pandemi Covid 19 yang



membuat masyarakat khususnya ibu hamil khawatir pergi tempat pelayanan kesehatan begitu juga dengan masyarakat yang enggan membawa anaknya ke posyandu.

2.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Jalan kota merupakan bagian dari jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, pusat pelayanan dengan persil (perumahan atau perkebunan), antar persil, dan antar pusat pemukiman di kota. Jalan Kondisi Baik adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan $\leq 6\%$), sehingga arus lalu - lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kota Pariaman dalam lima tahun terakhir dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.47
Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Pariaman
Tahun 2016– 2020

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Kondisi Jalan Baik (Km)	Km-	185.821	100.205	112.403	126.158	133.835
2	Panjang Jalan Kota (Km)	Km-	398.726	399.528	410.325	411.896	412.844
3	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	%	46,60	25,08	27,39	30,63	32,42

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum PR & Pertanahan, 2021

Dari data pada tabel di atas menunjukkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kota Pariaman dari tahun 2016 hingga tahun 2020 selalu meningkat seiring juga dengan bertambahnya panjang jalan kota. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah kota pariaman serius dalam mendukung pembangunan daerah guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Konsistensi ini akan tetap di pertahankan dan dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya. Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk terus meningkatkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik ini adalah dengan menambah pembuatan bahu jalan dan drainase yang berfungsi dengan baik. Selain itu juga melakukan kegiatan perbaikan jalan rusak yang belum terlaksana di tahun sebelumnya. Hal ini harus diimbangi dengan anggaran yang ada karena anggaran yang dimiliki oleh daerah terbatas karena adanya pandemi Covid 19.



Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan. Menurut keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999 yang dimaksud dengan trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. Berikut persentase jalan yang memiliki trotoar di Kota Pariaman selama lima tahun terakhir dari tahun 2016 hingga tahun 2020 yaitu:

Tabel 2.48
Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Kota Pariaman
Tahun 2016 – 2020

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jalan Yang Ada Trotoar (Km)	Km	161.842	166.163	171.307	171.307	171.701
2	Panjang Seluruh Jalan Kota (Km)	Km	398.726	399.528	410.325	411.896	412.844
3	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar	KM/ Org	40,59	41,59	41,59	41,59	41,59

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum PR & Pertanahan, 2021

Dari data pada tabel diatas penambahan trotoar jalan hanya dilakukan pada tahun 2017, dimana pada tahun 2016 persentase jalan yang memiliki trotoar sebesar 40,59% sementara pada tahun 2017 naik menjadi 41,59 %. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 tidak ada penambahan trotoar sehingga sampai tahun 2020 persentase jalan yang memiliki trotoar masih tetap 41,59 %.

2) Proporsi Drainase Dalam Kondisi Baik

Drainase adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Pembuangan ini dapat dilakukan dengan mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kota Pariaman dalam lima tahun terakhir dari tahun 2016 sampai 2020 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.49
Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Di Kota Pariaman
Tahun 2016– 2020

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik (Km)	Km	175,27	194,38	218,94	234,65	245,84
2	Panjang Seluruh Drainase (Km)	Km	113,93	116,63	153,26	187,72	208,97
3	Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat.	%	65	60	70	80	85

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum PR & Pertanian, 2021

Dari data pada tabel di atas persentase drainase dalam kondisi baik pada tahun 2017 terjadi penurunan yaitu pada tahun 2016 dengan kondisi baik 65 % sedangkan pada tahun 2017 dalam kondisi baik 60 %. Hal terjadi karena pada tahun 2017 adanya penambahan panjang drainase namun tidak diiringi dengan perbaikan drainase yang rusak. Sementara itu pada tahun 2018 jumlah drainase yang dibuat bertambah menjadi 218,94 Km dengan persentase dalam kondisi baik 70%. Peningkatan jumlah drainase dalam kondisi baik ini terus ditingkatkan pada tahun 2019 dan 2020 walaupun tidak ada penambahan drainase baru.

3) Proporsi Irigasi Dalam Kondisi Baik

Irigasi atau pengairan menjadi hal penting dalam pertanian. Tanpa adanya pengairan yang baik maka tanaman tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Hal tersebut juga akan sangat berpengaruh terhadap hasil panen nantinya. Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kota Pariaman dalam lima tahun terakhir dari tahun 2016 sampai 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.50
Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kota Pariaman
Tahun 2016-2020

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Saluran Irigasi (Km)	Km	4.478	4.493	2.732	2.732	2.732
2	Pajang Irigasi Dalam Kondisi Baik (Km)	Km	3.134	3.370	2.131	2.240	2.322
3	Persentase Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	70	75	78	82	85

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum PR & Pertanian, 2021



4) Persentase Luas Lahan Terairi Irigasi

Indikator persentase irigasi dalam kondisi baik adalah luas lahan pertanian yang terairi irigasi dibagi jumlah luas lahan pertanian seluruhnya di kali 100 persen. Status irigasi di Kota Pariaman adalah termasuk kategori irigasi desa karena luas hamparannya di bawah 100 Ha. Sesuai dengan Keputusan menteri Pekerjaan Umum Nomor 147 Tahun 2001. Persentase luas lahan pertanian yang terairi irigasi di Kota Pariaman selama lima tahun terakhir dari tahun 2016 hingatahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.51
Persentase Luas Lahan Pertanian yang terairi Irigasi Di Kota Pariaman
Tahun 2016-2020

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Lahan Terairi Irigasi (Ha)	Ha	1.846	1.923	1.383	1.383	1.321
2	Luas Lahan Budi Daya (Ha)	Ha	2.502	2.493	1.785	1.785	1.785
3	Persentase Luas Lahan Terairi Irigasi	%	73,78	77,14	77,48	77,48	77,48

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum PR & Pertanahan, 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 persentase luas lahan pertanian yang teairi irigasi di Kota Pariaman sebanyak 73,78 %, kemudian pada tahun 2017 naik menjadi 77,14 %, selanjutnya pada tahun 2018 maish terjadi peningkatan luas lahan yang terairi irigasi yaitu sebesar 77,48 %. Namun pada tahun 2019 dan 2020 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan, persentase luas lahan yang terairi irigasi tetap yaitu sebesar 77,48 %.

5) Sanitasi dan Air Bersih

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi syarat. Akan tetapi peningkatan populasi manusia dan aktivitasnya telah membawa dampak terhadap ketersediaan dan kualitas air di alam. Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum di Kota Pariaman selama lima tahun terakhir dari tahun 2016 hingga 2020 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.52
Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum
Tahun 2016- 2020

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Tangga	18.384	18.583	18.799	18.977	19.581
2	Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih	3.997	4.397	4.952	5.270	5.482

Sumber : Disperum, Perkim & LH, 2021

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga yang ada di Kota Pariaman terus meningkat dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir ini. Begitu juga dengan rumah tangga dengan akses air bersih juga meningkat seiring dengan peningkatan jumlah rumah tangga. Hal ini berdampak pada persentase proporsi rumah tangga dengan akses air minum yang juga meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah kebutuhan air bersih akan selalu meningkat dengan selarasnya peningkatan jumlah penduduk dan rumah tangga serta kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Peningkatan jumlah rumah tangga dengan akses air bersih harus selalu ditingkatkan, hal ini dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih juga melindungi masyarakat dari penyakit diare.

Menurut Depkes RI, 2004 jamban keluarga sehat adalah jamban yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1) Tidak mencemari sumber air minum, letak lubang penampung berjarak 10-15 meter dari sumber air bersih. 2) Tidak berbau dan tinja tidak dapat dijangkau serangga maupun tikus 3) Mudah dibersihkan dan aman penggunaanya 4) Cukup penerangan 5) Lantai kedap air 6) Ventilasi cukup baik 7) Tersedia air dan tersedia alat pembersih 8) Dilengkapi dinding dan atap penutup. Persentase RT Yang Memenuhi Syarat di Kota Pariaman selama lima tahun terakhir dari tahun 2016 hingga 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.53
Persentase RT Yang Memenuhi Syarat

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah	18.374	18.583	18.799	18.977	19.146
2	Jumlah rumah yang diperiksa	18.374	18.583	18.799	18.977	19.146
3	Jumlah rumah dengan jamban	16.321	16.976	17.690	18.350	18.350
4	Persentase rumah dengan jamban	88,83	91,35	94,10	96,70	95,84
	Kota					

Sumber : Dinas Kesehatan 2021



Persentase rumah dengan jamban selama lima tahun terakhir dari tahun 2016 hingga tahun 2019 selalu meningkat. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan, hal ini dikarenakan adanya Covid 19 dimana sebagian besar anggaran dialihkan untuk penanganan Covid 19 di Kota Pariaman. Pada tahun 2016 jumlah rumah dengan jamban adalah 88,83 % terus meningkat pada tahun 2017 menjadi 91,35 % dan tahun 2018 sebesar 94,10 %. Pada tahun 2019 masih meningkat yaitu 96,70 %, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 95,84 %. Buruknya sanitasi di lingkungan masyarakat merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya penyakit di lingkungan tersebut. Selain itu perilaku masyarakat juga mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat itu sendiri. Salah satu perilaku masyarakat tersebut yaitu perilaku BABS. Bertambahnya jumlah penduduk yang berperilaku BABS maka alam semakin tidak mampu dalam mendaur ulang limbah manusia tersebut, sehingga dibutuhkan jamban yang memenuhi syarat di setiap rumah tangga agar dapat merubah pola perilaku BABS masyarakat yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya kesehatan dan taraf hidup masyarakat.

Saluran pembuangan air limbah atau yang sering disingkat dengan SPAL adalah perlengkapan pengelolaan air limbah berupa saluran perpipaan maupun yang lainnya yang dapat dipergunakan untuk membuang air buangan dari sumbernya sampai ke tempat pengelolaan atau tempat buangan air limbah. Perilaku masyarakat yang kurang baik dapat mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap ekosistem dan timbulnya berbagai masalah sanitasi. Sanitasi merupakan salah satu komponen kesehatan lingkungan yaitu pengawasan penyediaan air minum masyarakat, pembuangan tinja, air limbah, tempat pembuangan sampah, pembawa penyakit dan kondisi lingkungan perumahan. Persentase RT dengan SPAL yang Memenuhi Syarat di Kota Pariaman selama lima tahun terakhir dari tahun 2016 hingga 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.54
Persentase RT dengan SPAL yang Memenuhi Syarat

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah	16.704	17.045	17.393	17.748	17.888
2	Jumlah rumah yang diperiksa	16.704	17.045	17.393	17.748	17.888
3	Jumlah rumah dengan SPAL	10.398	10.610	10.827	11.048	11.188
4	Jumlah rumah dengan SPAL yang memenuhi syarat	7.673	7.937	8.205	8.577	8.814
5	Persentase yang memenuhi syarat	73,79	74,81	75,78	77,63	78,78
Kota						

Sumber : Disperum, Perkim & LH, 2021



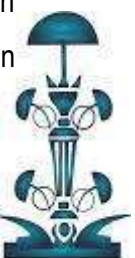
Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase SPAL yang memenuhi syarat dari tahun 2016 hingga tahun 2020 selalu mengalami peningkatan. Hal ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam pengendalian lingkungan hidup di Kota Pariaman. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah rumah tetapi juga diiringi dengan peningkatan jumlah rumah yang memiliki SPAL dan memenuhi syarat. Hingga tahun 2020 sudah mencapai 78,78 % rumah dengan SPAL yang memenuhi syarat hal ini menunjukkan masih ada sekitar 21 % lagi rumah yang belum memiliki SPAL sesuai syarat yang berlaku. Pencapaian jumlah rumah yang memiliki SPAL harus terus ditingkatkan demi menunjang taraf hidup yang lebih baik lagi. Untuk mencapai jumlah rumah yang memiliki SPAL, pemerintah daerah melalui dinas terkait terus melakukan pengarahannya dan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya SPAL di rumah tangga.

2.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kasawan Permukiman

Kualitas lingkungan permukiman menjadi perhatian utama dalam urusan wajib bidang perumahan guna menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Terkait dengan hal ini, Penataan dan pembangunan perumahan permukiman dilaksanakan secara bertahap dan diprioritaskan pada pemukiman penduduk untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Rasio rumah layak huni dihitung dari perbandingan jumlah rumah layak huni (unit) dengan jumlah penduduk (jiwa).

Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan.

Ketersediaan air di Indonesia mencapai 15.000 m³ perkapita pertahun masih di atas rata-rata dunia yang hanya 8.000 m³ perkapita pertahun. Sumber daya air di Kota Pariaman berupa air tanah dan sungai yang mengalir dari wilayah timur laut ke barat daya Pariaman. Potensi pemenuhan kebutuhan akan air bersih di Kota Pariaman pada umumnya relatif besar karena dangkalnya air tanah di wilayah ini sehingga memudahkan penduduk dalam penggunaannya. Pola pengaliran sungai yang relatif paralel menunjukkan perubahan morfologi yang konsisten. Pada daerah pantai aliran sungai umumnya berubah membentuk pola aliran sejajar pantai. Kota Pariaman dilalui oleh 3 buah sungai yaitu Batang Manggung (11,50 km) yang melalui Kecamatan Pariaman Utara, Batang Pariaman (12,00 km) dan Batang Manggau (11,80 km) yang berhulu di Kecamatan Pariaman Selatan dan melewati Kecamatan Pariaman Tengah. Kebutuhan air minum di Kota Pariaman sangat mendesak. Kapasitas yang ada saat ini tidak berimbang dengan jumlah pelanggan yang harus dilayani karena masih banyak rumah tangga yang memanfaatkan air sungai untuk kelangsungan hidupnya selain itu penyediaan sistem air minum juga diarahkan untuk menunjang fungsi pengembangan kota.



Rencana pengembangan utilitas air minum diarahkan pada:

- Pencarian sumber air minum alternatif, misalnya dengan membuat DAM, membuat reservoir, atau memanfaatkan sungai kecil.
- Peningkatan sistem jaringan distribusi
- Penambahan dan perbaikan sistem pelayanan sambungan ke rumah-rumah sehingga persebaran pelayanan air minum dapat meliputi seluruh masyarakat.

Sistem penyediaan air minum dikonsentrasikan di pusat kota yang merupakan pusat kegiatan lokal yaitu di seluruh Kecamatan Pariaman Tengah dan pada pusat-pusat unit lingkungan. Sistem tersebut diakomodasi oleh sarana pengangkutan air bersih berupa truk tangki. Sedangkan untuk daerah lainnya di Kota Pariaman dibangun penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS). Perkiraan kebutuhan air minum di Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55
Perkiraan Kebutuhan Air Minum di Kota Pariaman Tahun 2030

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga 2030	Jumlah kebutuhan air untuk sambungan rumah @230 L/RT/hari	Kebutuhan sambungan rumah (RT)	Jumlah kebutuhan air untuk kran umum @30 L/hari	Kebutuhan sambungan kran umum
Pariaman Utara	4.991	1.147.930	549.036	748.686	6.487
Pariaman Tengah	5.123	1.178.290	705.132	788.499	7.747
Pariaman Selatan	3.928	903.440	432.075	589.193	5.892
Pariaman Timur	2.139	491.970	209.978	201.678	3.155
Jumlah	15.520	3.721.630	1.707.241	2.328.056	23.281

Sumber : Disperum, Perkim & LH, 2021

Perkembangan kebutuhan air minum di Kota Pariaman untuk setiap tahunnya mengalami peningkatan sesuai dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk. Namun dari data yang ada terlihat bahwa persentase penduduk Kota Pariaman yang dapat akses air bersih mengalami fluktuatif tiap tahunnya, hal ini bergantung kepada kemampuan PDAM sebagai unit pengelolaan dan penyediaan air minum di Kota Pariaman. Permasalahan lain yang sering terjadi pada masyarakat perkotaan salah satunya sanitasi, Pemerintah Kota Pariaman memberikan fasilitas dan akses sanitasi pada setiap pemukiman masyarakat.

Kinerja Pemerintah Kota Pariaman pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.56
Perkembangan Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Pariaman Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah tangga pengguna air bersih	220	420	830	1,270.00	1,345.00
2	Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih	1.25	2.31	4.51	7.13	7.59
3	Rumah tangga pengguna listrik	99,66	98,85	99,75	99,72	99,80
4	Rumah tangga bersanitasi	88.83	91.35	94.10	96.70	95.84
5	Lingkungan pemukiman kumuh	6,55	6,20	6,20	6,20	6,20
6	Rumah tinggal berakses sanitasi	32.934	32.934	19.800	20.900	20.900

Sumber : Disperum, Perkim & LH, 2021

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih di Kota Pariaman dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus meningkat. Pemerintah daerah konsisten untuk terus meningkatkan jumlah pengguna air bersih oleh rumah tangga untuk meningkatkan kesehatan dan taraf hidup masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2016 jumlah pengguna air bersih sebanyak 220 rumah tangga kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 420 rumah tangga terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 830 rumah tangga hingga pada tahun 2019 dan tahun 2020 secara berturut-turut berjumlah 1.270 dan 1.345 rumah tangga. Untuk indikator rumah tangga pengguna listrik di Kota Pariaman pada tahun 2020 sudah mencapai 99,80%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sekitar 0,2% lagi yang belum memiliki akses listrik. Lingkungan pemukiman kumuh di Kota Pariaman dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan. Pemerintah daerah akan terus gencar dalam menurunkan persentase lingkungan pemukiman kumuh di Kota Pariaman. Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan kualitas pemukiman kumuh di Kota Pariaman adalah program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh). Kegiatan Kotaku ini selain untuk meningkatkan kualitas pemukiman kumuh juga meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Program pemerintah daerah ini merupakan bentuk pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar dipemukiman kumuh perkotaan, guna mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Tabel 2.57
Kawasan Pemukiman Kumuh Per kecamatan Kota Pariaman Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kawasan pemukiman kumuh					
	Pariaman Tengah	7	7	7	7	7
	Pariaman Utara	3	3	3	3	3
	Pariaman Selatan	3	3	3	3	3



No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Pariaman Timur	0	1	1	1	1
2	Luas Kawasan Pemukiman Kumuh					
	Pariaman Tengah	50,53	50,63	50,63	50,63	50,63
	Pariaman Utara	20,37	20,37	20,37	20,37	20,37
	Pariaman Selatan	32,99	32,99	32,99	32,99	32,99
	Pariaman Timur	0	5,42	5,42	5,42	5,42
3	Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal Dikawasan Pemukiman Kumuh					
	Pariaman Tengah	485	485	485	485	485
	Pariaman Utara	311	311	311	311	311
	Pariaman Selatan	149	149	149	149	149
	Pariaman Timur	0	69	69	69	69

Sumber : Disperum, Perkim & LH, 2021

2.3.1.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Pelaksanaannya dilakukan oleh Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Linmas. Keduanya bersinergi dalam mengupayakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kota Pariaman.

1) Cakupan Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Rasio jumlah polisi pamong praja mencerminkan kapasitas dan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menjamin, memelihara dan menjalankan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah. Semakin tinggi rasio jumlah Polisi Pamong Praja, semakin besar ketersediaannya dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintah daerah dan penegakan peraturan daerah.

Tabel 2. 58
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Petugas Pol PP	150	175	189	283	285
Jumlah Penduduk	85.692	86.618	87.626	88.501	94.224
Rasio Jumlah Petugas Pol PP/10.000 Penduduk	-	1 : 23	1 : 21	1 : 31	1 : 20

Sumber : Satuan Pol PP & Damkar, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam 5 tahun terakhir terdapat peningkatan jumlah personil Satpol PP. Begitu juga jumlah penduduk Kota Pariaman mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika



dilihat, rasio petugas satpol PP dengan jumlah penduduk dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan karena tidak sebandingnya jumlah pertambahan penduduk dengan petugas satpol PP.

Petugas Satpol PP bertugas menjalankan patroli dalam rangka upaya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan SPM tersebut. Target capaian kinerja SPM Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah 3 kali sehari dalam satu wilayah kecamatan. Apabila telah tercipta kondisi ini maka kinerja minimal pelaksanaan patrol tersebut telah dianggap terpenuhi.

Selain itu, Satpol PP juga rutin melaksanakan penertiban dan pengawasan terhadap ketertiban dan bekerjasama dengan instansi lainnya dalam upaya penegakkan Perda di Pariaman. Petugas Linmas juga menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dan berkontribusi dalam menekan angka kriminalitas di Kota Pariaman. Berikut data kriminalitas di Kota Pariaman :

Tabel 2.59
Angka kriminalitas di Kota Pariaman Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Curat (pencurian dan pemberatan)	51	75	75	62	7
Penggelapan	51	22	29	40	22
KDRT	-	-	-	-	-
Penipuan	42	44	29	29	30
Pengrusakan	21	23	16	7	10
Perkosaan	-	-	-	-	-
Pembunuhan	-	-	-	-	2
Jumlah criminal	377	347	338	308	228
Jumlah penduduk	85.692	86.618	87.626	88.501	94.224
Angka kriminalitas (%)	0,444	0,401	0,386	0,348	0,242

Sumber : Satuan Pol PP & Damkar, 2021

Dilihat dari tabel di atas jumlah angka kriminalitas Kota Pariaman dari tahun 2016-2020 secara umum mengalami penurunan dari 377 Tahun 2016 menjadi 228 Tahun 2020. Yang secara presentase jika dibandingkan dengan jumlah penduduk juga mengalami penurunan dari Tahun 2016 sebesar 0,444 % di Tahun 2020 turun menjadi 0,242 %. Penurunan angka kriminalitas bisa dikatakan secara umum bahwa Kota Pariaman adalah kota kecil yang aman dari tindakan kejahatan.



Permasalahan tindak kriminalitas di Kota Pariaman dan dalam rangka sebagai upaya pembinaan kepada masyarakat selalu dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman yang bekerjasama dengan Kepolisian Resor Kota Pariaman. Hal ini adalah sebagai salah satu bentuk pencegahan guna memberantas tindak kriminalitas dalam upaya menciptakan Kota Pariaman yang aman dan jauh dari kejahatan kriminalitas. Tindak kriminalitas menjadi bumerang bagi Pemerintah Kota Pariaman untuk mengatasinya, baik itu untuk menekan jumlahnya dan tindakan pencegahan yang dilakukan.

2) Penanggulangan Bencana Kebakaran

Bencana kebakaran juga selalu terjadi di Kota Pariaman. Setiap peristiwa bencana kebakaran yang terjadi menimbulkan kerugian baik materil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan. Berikut data kebakaran yang terjadi dari tahun 2016-2020 di Kota Pariaman.

Tabel 2.60
Jumlah kasus bencana kebakaran di Kota Pariaman Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kebakaran	49	40	23	2	2

Sumber : Satuan Pol PP & Damkar, 2021

3) Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Pariaman merupakan kota yang relatif rawan longsor dan rawan bencana. Hal ini disebabkan karena tekstur wilayahnya berada di perbukitan dan pemukimannya banyak yang berada di lereng bukit. Sehingga beberapa kawasan di Kota Pariaman menjadi daerah rawan bencana. Berikut data bencana yang terjadi di Kota Pariaman.

Tabel 2.61
Data Bencana di Kota Pariaman Tahun 2016-2020

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Banjir	1	1	3	8	1
2	Gunung Meletus	-	-	-	-	-
3	Longsor	-	-	-	-	-
4	Gempa	-	-	-	1	-
5	Angin puting beliung	-	-	-	-	-

Sumber : Satuan Pol PP & Damkar, 2021



2.3.1.6 Urusan Sosial

Penyediaan fasilitas sosial ditujukan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Penyediaan fasilitas tersebut diberikan oleh pemerintah, dengan melalui dinas terkait, dalam hal ini adalah Dinas Sosial. Indikator kegiatan dinas sosial dilihat dari Jumlah PPKS, Penanganan PPKS, PPKS yang memperoleh bantuan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.62
Perkembangan Indikator Urusan Sosial Kota Pariaman
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	4	5	4	4	4
2.	PPKS yang memperoleh bantuan	20	2.975	3.341	2.755	3.369
3.	Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/ Penanganan PPKS	20	2.975	3.341	2.755	3.369
4.	Jumlah PPKS	5.879	5.878	5.879	5.879	11.135

Sumber : Dinas Sosial 2021

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dalam bidang ini dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang secara otomatis berdampak pada *income* rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam bidang ketenagakerjaan dimana semakin menurun tingkat pengangguran dapat mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia karena diasumsikan pendapatan rumah tangga yang meningkat.

Berdasarkan aspek ketenagakerjaan, pembangunan di Kota Pariaman menggambarkan kinerja yang cukup baik. Berikut perkembangan angkatan kerja di Kota Pariaman periode 2016-2020

Tabel 2.63
Perkembangan Indikator Urusan Tenaga Kerja Kota Pariaman
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64,95	65,20	66,65	68,95	64,16
2.	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	30,00	41,19	52,35	52,35	64,39



No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,61	5,97	5,72	5,42	5,73
4.	Rasio Penduduk Yang Bekerja	79,84	65,49	66,70	36,32	64

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2021

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang potensial untuk memproduksi barang dan jasa, dan jika ada permintaan terhadap tenaga kerja, mereka mampu untuk berpartisipasi didalamnya. Batasan usia > 15 tahun ini sesuai dengan ketentuan batasan penduduk usia kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Batasan ini diberlakukan mengingat juga ada pekerja anak dengan kategori rentang umur antara 10-14 tahun.

Selain tingkat tenaga kerja, di dalam demografi penduduk juga perlu diperhatikan aspek kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

2.3.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam urusan pemberdayaan perempuan pemerintah Kota Pariaman sangat serius terhadap permasalahan rumah tangga (KDRT) terlihat dari jumlah cakupan pengaduan kekerasan yang tertangani penurunannya sangat signifikan dibandingkan dengan tahun yang lalu. Untuk kesetaraan gender menunjukkan peningkatan perbaikan dengan dengan partisipasi perempuan dalam lembaga seperti lembaga hukum, politik, ekonomi, dan social dan jumlah perangkat daerah yang sudah menerapkan pengarusutamaan gender (PUG) dibandingkan dengan tahun lau sudah mengalami peningkatan. Kinerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.64
Perkembangan Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pariaman Tahun 2016-2020

No	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	98,96	98,95	98,61	98,19	98,49
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	50,10	50,60	51,34	52,24	53,15
3.	Rasio KDRT		100	100	100	100	100
4.	Penyelesaian Pengaduan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan	%	64.13	65.06	64.60	65.33	66.20
5.	Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga	%	64,13	65,06	64,60	65,33	66.20
6.	Jumlah Perangkat Daerah Yang Sudah Menerapkan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Perangkat Daerah	6	6	6	10	10
7.	Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus	Orang	98	98	98	99	100
8.	Jumlah lembaga Penampungan Anak Berkebutuhan Khusus	Lembaga	3	4	4	4	4
9.	Jumlah Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC)	Rumah	1	1	1	1	1
10.	Jumlah Tenaga Terlatih Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Orang	42	63	78	78	78
11.	Jumlah Pemberdayaan Perempuan						
-	Bidang Politik	Orang	1	1	1	1	1
-	Bidang Hukum	Orang	38	42	42	43	43
-	Bidang Sosial	Orang	76	76	81	88	88
-	Bidang Ekonomi	Orang	1.214	1.286	1.359	1.426	1.510

Sumber : Dinas P3AKB, 2021

2.3.2.3 Urusan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu keadaan tersedianya pangan yang cukup (baik jumlah dan mutunya), aman, beragam, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Dalam suatu wilayah, diharapkan tercapai ketahanan pangan, yang juga menjadi kebutuhan dasar penduduk. Dengan demikian, diharapkan penduduk Kota Pariaman mendapatkan akses pangan yang baik, dari jumlah maupun mutu pangan.

Secara umum, berdasarkan Tabel 2.39 ketersediaan pangan utama di Kota Pariaman telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini tampak dari persentase ketersediaan pangan utama yang lebih dari 100%, artinya terdapat surplus ketersediaan pangan utama.



Tabel 2.65
Perkembangan Indikator Urusan Pangan Kota Pariaman
Tahun 2016-2020

NO	Indikator Daerah	Kinerja	Satuan	Tahun				
				2016	2017	2018	2019	2020
1.	Skor PPH Kota Pariaman		Nilai	85	86,00	86,00	86,00	86
2.	Regulasi ketahanan pangan		-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Ketersediaan pangan utama		Ton	196,40	203,26	237,95	237,95	240,15
4.	Jumlah Produksi Komoditas Pangan Nabati		Ton	26,084,60	30,532,60	62.838,30	7.125,80	45.156,15
5.	Jumlah Produksi Komoditas Pangan Hewani		Ton	1.509,78	11.862,67	8.501,55	9.564,25	9.745,35
6.	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan		%	85	85	85	85	85
7.	Persentase Keamanan Penanganan Pangan		%	90	90	90	90	90
8.	Ketersediaan Pangan Perkapita/Tingkat konsumsi		Kg/Kapita/Tahun	2.150	2.185	2.023	2.200	2.150
9.	Jumlah Kelembagaan Pangan Masyarakat (Gapoktan)		Lembaga	71	71	71	71	71

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan, 2021

Berdasarkan data tabel diatas secara umum kualitas (Keragaman dan Keseimbangan) konsumsi pangan masyarakat Kota Pariaman ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) terus mengalami peningkatan dengan skor 85 tahun 2016 menjadi 86,0 pada tahun 2020. Sedangkan untuk ketersediaan pangan utama di Kota Pariaman pada tahun 2016 – 2020 cenderung fluktuatif. Ketersediaan pangan di Kota Pariaman berasal dari daerah lain di sekitar Kota Pariaman dan juga hasil produksi di wilayah Kota Pariaman. Di samping itu, perhitungan ketersediaan pangan di kota Pariaman didapat dari akumulasi cadangan pangan ketika bencana terjadi. Perkembangan positif ketersediaan pangan utama di Kota Pariaman ini mengindikasikan bahwa kebutuhan penduduk akan pangan utama dapat tercukupi dengan baik.



2.3.2.4 Urusan Pertanahan

Pada Urusan Pertanahan yang telah dilaksanakan meliputi banyaknya sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan, dan peralihan peralihan hak tanah atas sebabnya dapat dilihat pada tabel :

Tabel 2.66
Perkembangan Indikator Urusan Pertanahan Kota Pariaman
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Banyaknya Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Diterbitkan	40,68	41,90	42,80	45,68	-
-	Hak Milik	477	1.023	902	284	787
-	Hak Guna Bangunan	114	155	142	-	94
-	Hak Wakaf	2	3	18	2	2
-	Hak Pakai	60	75	13	9	32
2.	Peralihan Hak Tanah dan sebabnya					
-	Jual Beli	630	508	720	799	738
-	Hibah	2	2	8	10	3
-	Pemisahan	379	410	499	491	419
-	Lainnya	54	41	67	68	21

Sumber : Dinas PU, PR & Pertanahan, 2021

2.3.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

Lampiran 1 Permendagri menyebutkan bahwa terdapat delapan indikator untuk urusan lingkungan hidup, yakni persentase penanganan sampah, persentase penduduk berakses air minum, persentase luas permukiman yang tertata, pencemaran status mutu air, cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, dan penegakan hukum lingkungan. Dari 8 indikator itu hanya 4 indikator yang dapat disajikan 1) Persentase penanganan sampah, 2) cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, 3) tempat pembuangan sampah (TPS) dan persentase penanganan sampah per satuan penduduk.

Indikator persentase penanganan sampah didapatkan dari perbandingan antara volume sampah yang ditangani dengan volume produksi sampah dikalikan dengan bilangan 100. Indikator persentase penanganan sampah di Kota Pariaman berdasarkan Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat dan LH Kota Pariaman menggunakan perbandingan antara volume sampah yang dibuang ke TPA dengan perkiraan



volume sampah. Analisis terkait dengan pengelolaan sampah dilakukan berdasarkan data dari tahun 2016 hingga tahun 2020.

Tabel 2.67
Perkembangan Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Pariaman
Tahun 2016-2020

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Penanganan Sampah	41.51	72.00	73.00	70.40	70,60
2.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	100	100	100	100	100
3.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0.07	0.091	0.096	0.097	0,097
4.	Rata-rata Perkiraan Timbunan Sampah Perhari	21.655	21.892	22.131	22.370	22.570
5.	Indeks Pencemaran Udara	77,03	90,78	90,85	91.25	91.25
-	Abrasi Pantai	16	16	16	16	16
-	Erosi	2	2	2	2	2
6.	Jumlah Lokasi Pencemaran air Sungai	4	4	4	5	4
7.	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Minum Bersih	80,92	81	78,42	82,49	82,65

Sumber : Disperum, Perkim & LH 2021

2.3.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan data di bawah ini bahwa penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan di Kota Pariaman sudah baik, Keberhasilan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain yaitu kepemilikan KTP, rasio bayi berakta kelahiran, rasio pasangan nikah dan penerapan KTP nasional berbasis NIK. Pada penerapan Nasional KTP berbasis NIK Kota Pariaman sudah melaksanakannya sudah 100%, Jumlah Kepala keluarga yang memiliki KK dan Kepemilikan KTP terus meningkat, artinya kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi dalam kependudukan sudah baik.

Pada tahun 2020 jumlah penduduk yang sudah memiliki e-KTP sebanyak 97,85% dari 67.032 orang penduduk wajib ber-e KTP. Sementara itu untuk Kepala Keluarga di Kota Pariaman sudah memiliki Kartu Keluarga (KK) sebesar 98,35 % di Pariaman. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran penduduk Pariaman terhadap kepemilikan dokumen kependudukan (e-KTP dan KK) sangat tinggi dan usaha Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bekerja sama dengan seluruh Desa dan Kelurahan membuahkan hasil.

Namun, dari keberhasilan diatas masih perlu upaya maksimal bersama seluruh pihak terkait guna meningkatkan kepemilikan Akta Kelahiran yang baru mencapai 52,89 %. Dan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) yang pencapaiannya masih sebesar 31,90 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.68
Data Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah kepala keluarga			Jumlah penduduk memiliki kartu keluarga		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kecamatan Pariaman Utara	4.906	1.593	6.499	4.845	1.537	6.382
2	Kecamatan Pariaman Tengah	7.014	1.976	8.990	6.919	1.936	8.855
3	Kecamatan Pariaman Selatan	4.194	1.442	5.636	4.113	1.388	5.501
4	Kecamatan Pariaman Timur	4.074	1.237	5.311	4.045	1.219	5.264
Total		20.188	6.248	26.436	19.922	6.080	26.002

Sumber : Disdukcapil Kota Pariaman Tahun 2021

Tabel 2.69
Data Kepemilikan KTP-Elektronik di Kota Pariaman Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Wajib KTP			Jumlah Penduduk Memiliki KTP - EI			% Kepemilikan KTP-EI		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kecamatan Pariaman Utara	8.251	8.247	16.498	7.995	8.111	16.106	96,90	98,35	97,62
2	Kecamatan Pariaman Tengah	11.455	11.513	22.968	11.146	11.336	22.482	97,30	98,46	97,88
3	Kecamatan Pariaman Selatan	6.984	7.110	14.094	6.789	7.011	13.800	97,21	98,61	97,91
4	Kecamatan Pariaman Timur	6.681	6.791	13.472	6.494	6.710	13.204	97,20	98,81	98,01
Total		33.371	33.661	67.032	32.424	33.168	65.592	97,16	98,54	97,85

Sumber : Disdukcapil Kota Pariaman Tahun 2021

Sementara itu dilihat dari komposisi penduduk berdasar jenis pekerjaan di Kota Pariaman pada tahun 2020 didominasi oleh belum/tidak bekerja (24,99%) Pelajar/ Mahasiswa (24,52%), Wiraswasta (20,41%), dan pekerjaan lainnya (19,42%). Dan komposisi penduduk berdasar tingkat pendidikan di dominasi oleh penduduk setingkat SLTA/ sederajat (24,44 %). penduduk tidak/ belum sekolah (21,86 %) dan



penduduk tamat SD/Sederajat (14,54%) serta penduduk tamat SLTP/Sederajat (14,52%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.





Tabel 2.70
Data Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kelahiran			% Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kecamatan Pariaman Utara	11.764	11.516	23.280	6.102	6.168	12.270	51,87	53,56	52,71
2	Kecamatan Pariaman Tengah	16.205	15.742	31.947	8.029	7.922	15.951	49,55	50,32	49,93
3	Kecamatan Pariaman Selatan	10.081	9.911	19.992	5.286	5.416	10.702	52,44	54,65	53,53
4	Kecamatan Pariaman Timur	9.647	9.493	19.140	5.457	5.523	10.980	56,57	58,18	57,37
Total		47.697	46.662	94.359	24.874	25.029	49.903	52,15	53,64	52,89

Sumber : Disdukcapil Kota Pariaman Tahun 2021

Tabel 2.71
Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2020

No	Kecamatan	Wajib KIA			Kepemilikan KIA			% Kepemilikan KIA		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kecamatan Pariaman Utara	3.513	3.269	6.782	874	859	1.733	24,88	26,28	25,55
2	Kecamatan Pariaman Tengah	4.751	4.229	8.980	1.431	1.411	2.842	30,12	33,36	31,65
3	Kecamatan Pariaman Selatan	3.097	2.801	5.898	925	887	1.812	29,87	31,67	30,72
4	Kecamatan Pariaman Timur	2.967	2.702	5.669	1.157	1.175	2.332	39,00	43,49	41,14
Total		14.328	13.001	27.329	4.387	4.332	8.719	30,62	33,32	31,90

Sumber : Disdukcapil Kota Pariaman Tahun 2021



Tabel 2.72
Data Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2020 Kota Pariaman

No	Pekerjaan	JENIS KELAMIN			%
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Belum/Tidak Bekerja	12.626	10.959	23.585	24,99
2	Aparatur/Pejabat Negara	2.343	2.574	4.917	5,21
3	Tenaga Pengajar	176	524	700	0,74
4	Wiraswasta	16.453	2.806	19.259	20,41
5	Pertanian/Peternakan	1.952	91	2.043	2,17
6	Nelayan	1.189	4	1.193	1,26
7	Agama Dan Kepercayaan	50	0	50	0,05
8	Pelajar/Mahasiswa	12.378	10.757	23.135	24,52
9	Tenaga Kesehatan	36	272	308	0,33
10	Pensiunan	481	367	848	0,90
11	Lainnya	13	18.308	18.321	19,42
Total		47.697	46.662	94.359	100

Sumber : Disdukcapil Kota Pariaman Tahun 2021

Tabel 2.73
Data Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020 Kota Pariaman

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN			%
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Tidak/Blm Sekolah	10.787	9.842	20.629	21,86
2	Belum Tamat Sd/Sederajat	6.545	6.126	12.671	13,43
3	Tamat Sd/Sederajat	6.738	6.978	13.716	14,54
4	SLTP/Sederajat	7.385	6.318	13.703	14,52
5	SLTA/Sederajat	12.210	10.856	23.066	24,44
6	Diploma I/II	178	642	820	0,87
7	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	680	1.466	2.146	2,27
8	Diploma IV/Strata I	2.922	4.226	7.148	7,58
9	Strata-II	241	202	443	0,47
10	Strata-III	11	6	17	0,02
Total		47.697	46.662	94.359	100

Sumber : Disdukcapil Kota Pariaman Tahun 2021

2.3.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat, dapat dilihat dari keterlibatan lembaga masyarakat dan masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah tidak mampu menangani sendiri



tanpa dukungan dan peran serta semua pihak, yaitu swasta, pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM, dan masyarakat. Berdasarkan cakupan kegiatannya, selama tahun 2019 telah dapat dicapai angka 100% untuk rata-rata jumlah kelompok binaan PKK berbasis NIK, PKK aktif, POsyandu aktif, dan jumlah LPM yang sudah ada per desa/kelurahan.

Tabel 2.74
Perkembangan Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kota Pariaman Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK berbasis NIK	100	100	100	100	100
2.	PKK Aktif	100	100	100	100	100
3.	Kelompok Binaan PKK	75	76	76	76	76
4.	Posyandu Aktif	100	100	100	100	100
5.	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	55	55	55	55	55
6.	Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat	10	10	12	11	11
7.	Jumlah LPM	71	71	71	71	71

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat 2021

2.3.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pemerintah turut hadir dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat/ pasangan yang sudah menikah tentang pentingnya ber-KB, pembentukan forum-forum kelompok masyarakat maupun jejaring/ kemitraan yang peduli KB serta pembentukan pusat-pusat informasi dan konseling bagi remaja dengan tujuan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga.

Rata-rata jumlah anak per keluarga dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah anak dan jumlah keluarga. Rasio akseptor KB, cakupan KB, jumlah balai KB dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.75
Perkembangan Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Pariaman Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	4	4	4	3	3
2.	Rasio Akseptor KB	63,67	63,89	65,85	66,75	64,69
3.	Cakupan Peserta KB Aktif	63,67	63,89	65,85	66,75	64,69
4.	Jumlah Petugas KB	13	13	13	13	13
5.	Jumlah Balai KB	4	4	4	4	4

Sumber : DP3AKB, 2021

2.3.2.9 Urusan Perhubungan

Kinerja Pemerintah pada urusan perhubungan tidak terlepas dari transportasi. Pelayanan transportasi di Kota Pariaman belum optimal karena sistem transportasi barang dan orang belum terkoneksi dengan pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi. Berdasarkan data sarana dan prasarana penunjang bidang perhubungan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, traffic light dan warning light tahun 2016-2020, jumlah rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, demikian juga dengan jumlah kendaraan wajib uji mengalami peningkatan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.76
Perkembangan Indikator Urusan Perhubungan Kota Pariaman
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	147.523	160.601	184.182	119.130	513.246
2.	Jumlah uji KIR angkutan umum	1.600	841	180	111	126
3.	Jumlah pelabuhan laut/ udara/ terminal bis	2	2	1	1	1
4.	Kepemilikan KIR angkutan umum	13,75	13,90	14,25	27,91	30,25
5.	Jumlah rambu-rambu yang dipasang	64	34	592	823	823
6.	Jumlah kecelakaan Lalu Lintas	122	155	179	160	117

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021



Untuk mengetahui sejauh mana pembangunan di bidang perhubungan ini, jumlah kecelakaan lalu lintas digunakan sebagai ukuran keberhasilan. Semakin sedikit jumlah kecelakaan lalu lintas terjadi, maka pembangunan di bidang perhubungan sudah berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Pariaman meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 sampai tahun 2018, secara berturut-turut terdapat 122, 155 dan 179 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di Kota Pariaman. Dibanding tahun sebelumnya angka kecelakaan lalu lintas ini naik. Dengan kondisi seperti perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Kota Pariaman untuk melakukan evaluasi kelayakan jalan dan kendaraan. Selain itu tindakan tegas dan pengawasan yang ketat terhadap pengguna jalan oleh aparat kepolisian juga diperlukan, agar warga masyarakat lebih tertib dalam berkendara di jalan raya.

2.3.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan suatu kebutuhan bagi suatu organisasi, dalam mendukung kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuannya, termasuk juga tentunya dalam lingkungan Pemerintahan. Banyak peluang dan nilai tambah yang bisa diperoleh khususnya berkaitan dengan peningkatan mutu proses kerja di bidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi juga merupakan suatu langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. *Good governance* di lingkungan pemerintahan harus dimulai dengan penataan sistem manajemen dan proses kerja yang terpadu atau modernisasi di bidang administrasi Pemerintah Daerah agar dapat mengaplikasikan telekomunikasi, multimedia dan informatika yang tepat guna pada akhirnya diharapkan dapat mencapai tujuan utama, yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Berikut ini Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.77
Capaian Kinerja Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020

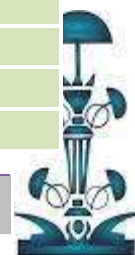
No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Hotspot	-	-	-	-	15
2	Jumlah Aplikasi yang dikelola	1	1	9	17	25
3	Persentase OPD yang memiliki akses internet yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah	100	100	100	100	100
4	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	NA	NA	2,61	2,87	-
5	Jumlah ASN Pengelola TIK	6	6	8	18	18

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika 2021

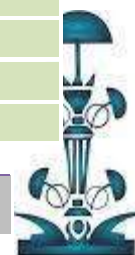


Tabel 2.78
Cakupan Sinyal Telekomunikasi di Kota Pariaman Tahun 2020

No	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	CAKUPAN SINYAL				KET
			2G	3G	4G	BLANKSPOT	
1	Kecamatan Pariaman Utara	Desa Tungkal Utara	√	√	√		
		Desa Tanjung Sabar	√	√	√		
		Desa Cubadak Air Selatan	√	√	√		
		Desa Tungkal Selatan	√	√	√		
		Desa Apar	√	√	√		
		Desa Sikapak Barat	√	√	√		
		Desa Manggung	√	√	√		
		Desa Ampalu	√	√	√		
		Desa Balai Naras	√	√	√		
		Desa Naras I	√	√	√		
		Desa Sintuk	√	√	√		
		Desa Naras Hilir	√	√	√		
		Desa Sikapak Timur	√	√	√		
		Desa Cubadak Air Utara	√	√	√		
		Desa Sei Rambai	√	√	√		
		Desa Cubadak Air	√	√	√		
		Desa Padang Birik-Birik	√	√	√		
2	Kecamatan Pariaman Tengah	Kelurahan Jalan Baru	√	√	√		
		Kelurahan Pasir	√	√	√		
		Kelurahan Pondok II	√	√	√		
		Kelurahan Karan Aur	√	√	√		
		Kelurahan Kampung Pondok	√	√	√		
		Kelurahan Kampung Perak	√	√	√		
		Kelurahan Jawi-Jawi I	√	√	√		
		Kelurahan Kampung Jawa I	√	√	√		
		Kelurahan Kampung Jawa II	√	√	√		
		Kelurahan Taratak	√	√	√		
		Kelurahan Ujung Batung	√	√	√		
		Kelurahan Alai Gelombang	√	√	√		
		Kelurahan Jati Hilir	√	√	√		
		Kelurahan Jawi-Jawi II	√	√	√		
		Kelurahan Jalan Karet Api	√	√	√		
		Kelurahan Lohong	√	√	√		
		Desa Pauh Timur	√	√	√		



No	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	CAKUPAN SINYAL				KET
			2G	3G	4G	BLANKSPOT	
3	Kecamatan Pariaman Timur	Desa Rawang	√	√	√		
		Desa Jati Mudik	√	√	√		
		Desa Cimparuh	√	√	√		
		Desa Kampung Baru	√	√	√		
		Desa Pauh Barat	√	√	√		
		Desa Kaluat	√	√	√		
		Desa Sungai Pasak	√	√	√		
		Desa Batang Kabung	√	√	√		
		Desa Cubadak Mentawai	√	√	√		
		Desa Bato	√	√	√		
		Desa Sungai Sirah	√	√	√		
		Desa Kp.Baru Padusunan	√	√	√		
		Desa Kampung Tengah	√	√	√		
		Desa Bungo Tanjung	√	√	√		
		Desa Air Santok	√	√	√		
		Desa Kajai	√	√	√		
		Desa Kampung Kandang	√	√	√		
		Desa Talago Sarik	√	√	√		
		Desa Koto Marapak	√	√	√		
		Desa Pakasai	√	√	√		
4	Kecamatan Pariaman Selatan	Desa Kampung Gadang	√	√	√		
		Desa Sikabu	√	√	√		
		Desa Pasir Sunur	√	√	√		
		Desa Batang Tajongkek	√	√	√		
		Desa Kampung Apar	√	√	√		
		Desa Padang Cakur	√	√	√		
		Desa Palak Aneh	√	√	√		
		Desa Punggung Lading	√	√	√		
		Desa Marunggi	√	√	√		
		Desa Pauh Kurai Taji	√	√	√		
		Desa Balai Kurai Taji	√	√	√		
		Desa Marabau	√	√	√		
		Desa Toboh Palabah	√	√	√		
		Desa Simpang Kurai Taji	√	√	√		
		Desa Rambai	√	√	√		
		Desa Sungai Kasai	√	√	√		
		Desa Taluk	√	√	√		



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika 2021

Tabel 2.79
Jenis koneksi internet yang dimanfaatkan di seluruh Desa di
Kota Pariaman Tahun 2020

No	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KONEKSI INTERNET YANG DIGUNAKAN SAAT INI (CONTOH PENULISAN : SPEEDY TELKOM)	BANDWIDTH / KECEPATAN PER DETIK (CONTOH PENULISAN : 20/mbps)
1	KECAMATAN PARIAMAN UTARA	Desa Tungkal Utara	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Tanjung Sabar	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Cubadak Air Selatan	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Tungkal Selatan	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Apar	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Sikapak Barat	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Manggung	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Ampalu	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Balai Naras	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Naras I	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Sintuk	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Naras Hilir	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Sikapak Timur	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Cubadak Air Utara	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Sei Rambai	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Cubadak Air	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Padang Birik-Birik	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
2	KECAMATAN PARIAMAN TENGAH	Kelurahan Jalan Baru	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Kelurahan Pasir	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Kelurahan Pondok II	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Kelurahan Karan Aur	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Kelurahan Kampung Pondok	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Kelurahan Kampung Perak	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Kelurahan Jawi-Jawi I	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Kelurahan Kampung Jawa I	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Kelurahan Kampung Jawa II	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Kelurahan Taratak	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Kelurahan Ujung Batung	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Kelurahan Alai Gelombang	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Kelurahan Jati Hilir	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Kelurahan Jawi-Jawi II	Indihome (TELKOM)	20 Mbps



No	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KONEKSI INTERNET YANG DIGUNAKAN SAAT INI (CONTOH PENULISAN : SPEEDY TELKOM)	BANDWIDTH / KECEPATAN PER DETIK (CONTOH PENULISAN : 20/mbps)
		Kelurahan Jalan Karet Api	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Kelurahan Lohong	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Pauh Timur	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Rawang	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Jati Mudik	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Cimparuh	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Kampung Baru	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
3	KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	Desa Pauh Barat	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Kaluat	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Sungai Pasak	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Batang Kabung	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Cubadak Mentawai	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Bato	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Sungai Sirah	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Kp.Baru Padusunan	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Kampung Tengah	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Bungo Tanjung	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Air Santok	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Kajai	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Kampung Kandang	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Talago Sarik	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Koto Marapak	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Pakasai	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Kampung Gadang	Icon net (PLN)	10 Mbps
4	KECAMATAN PARIAMAN SELATAN	Desa Sikabu	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Pasir Sunur	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Batang Tajongkek	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Kampung Apar	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Padang Cakur	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Palak Aneh	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Punggung Lading	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Marunggi	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Pauh Kurai Taji	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Balai Kurai Taji	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Marabau	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Toboh Palabah	Indihome (TELKOM)	20 Mbps



No	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KONEKSI INTERNET YANG DIGUNAKAN SAAT INI (CONTOH PENULISAN : SPEEDY TELKOM)	BANDWIDTH / KECEPATAN PER DETIK (CONTOH PENULISAN : 20/mbps)
		Desa Simpang Kurai Taji	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Rambai	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Sungai Kasai	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Taluk	Indihome (TELKOM)	20 Mbps

Sumber : Dinas Kominfo, 2021

Tabel 2.80
Perkembangan Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika
Kota Pariaman Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Jaringan Komunikasi	8	5	5	5	5
2	Website Milik Pemerintah Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Jumlah Surat Kabar Nasional/ Lokal	31	35	28	27	16
4	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	4	3	3	4	4

Sumber : Dinas Kominfo, 2021

2.3.2.11 Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu kepada jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Pada tahun 2020 produktivitas UKM di Kota Pariaman mengalami penurunan akibat adanya pandemi Covid 19. Pemerintah Kota Pariaman berusaha untuk menumbuhkan kembali gairah para pelaku UKM dengan program-program yang mendukung salah satunya dengan memberikan bantuan modal kepada pelaku UKM. Hal ini dilakukan agar setiap pelaku UKM dapat lebih bersemangat dan gita lagi guna meningkatkan perekonomian keluarga serta usaha yang dijalankan bisa semakin maju. Dari Tahun 2016-2020 persentase koperasi yang aktif mengalami penurunan dari tahun ke



tahun, terakhir di tahun 2020 sebesar 77,9 persen. Tahun 2020 tidak mengalami perubahan dari tahun 2019 karena terkait masa pandemic yang baru dimulai sehingga kegiatan-kegiatan pembinaan terhadap koperasi sangat terbatas untuk dilaksanakan. Pembinaan terhadap koperasi sangat menentukan perkembangan koperasi, untuk koperasi aktif yang menjadi indikator adalah koperasi yang melaksanakan RAT sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, apabila koperasi tidak melaksanakan RAT 2 tahun berturut-turut, maka dianggap koperasi tersebut tidak aktif. Ini perlu kerja keras pemerintah daerah dalam mengaktifkan koperasi yang ada. Koperasi yang tidak RAT diupayakan pembenahan agar dapat menjalankan aktifitas usaha kembali namun apabila tidak bisa diaktifkan lagi akan dibubarkan oleh kementerian Koperasi dan UKM RI. Pembinaan dan pendampingan sangat diperlukan oleh koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya. Secara modal dan keanggotaan koperasi dapat dilihat perkembangan seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.81
Perkembangan Koperasi dan Permodalan Kota Pariaman

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi (unit)	82	72	79	84	88
2	Jumlah Koperasi Aktif	62	61	68	73	77
3	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	20	11	11	11	11
4	Jumlah Koperasi RAT	43	39	36	37	39
5	Jumlah Anggota orang	9.016	8.591	8.543	9.066	9.039
6	Jumlah Karyawan	58	28	53	27	27
7	Volume Usaha (Rp))	44.775.451.000	51.755.342.000	51.755.342.000	54.796.945.000	55.571.503.000
8	Modal Sendiri (Rp)	39.852.276.000	43.989.870.000	48.989.870.000	54.172.499.000	56.769.440.000
9	Modal Luar (Rp)	16.848.396.000	17.213.813.000	17.213.813.000	16.870.484.000	17.381.599.000
10	Asset (Rp)	56.700.672.000	61.203.683.000	61.203.683.000	65.241.987.000	74.151.039.000
11	SHU (Rp)	3.244.660.000	3.873.031.000	3.873.031.000	4.021.421.000	4.089.921.000

Sumber : Dinas Koperindag & KUKM 2021

Tabel 2.82
Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kota Pariaman Tahun 2016 dan 2020 (koperasi)

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	sehat	8	9	7	4	2
2	Cukup sehat	16	19	18	28	11
3	Kurang sehat	1	2	0	0	1



4	Belum dinilai	18	9	11	5	25
---	---------------	----	---	----	---	----

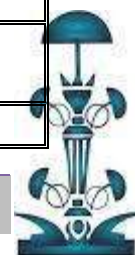
Sumber : Dinas Koperindag & KUKM 2021

2.3.2.12 Urusan Penanaman Modal

Iklim investasi di Kota Pariaman sudah mulai menunjukkan *'trend positif'* sejak tiga setahun terakhir. Walaupun perkembangan kenaikannya tidak terlalu tinggi. Namun ini tetap menjadi komitmen daerah Kota Pariaman bagaimana menumbuhkan minat investor untuk berinvestasi di Kota Pariaman. Bila dilihat dari sumber daya alam Kota Pariaman mempunyai potensi untuk investor menanamkan investasinya. Yang perlu disediakan oleh Kota Pariaman adalah bagaimana bisa memberikan kemudahan dan daya minat yang tinggi bagi investor tersebut. Dan sebagai kota yang potensial untuk pengembangan investasi. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar Kota Pariaman untuk dapat menarik minat para investor berbagai industri dan pelaku bisnis beragam sektor untuk turut memajukan perekonomian daerah. Kemudahan berinvestasi di Kota Pariaman tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota Pariaman untuk menyederhanakan pelayanan perijinan serta mengedepankan pelayanan yang bersih dan bebas pungli. Berikut ini dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 2.83
Perkembangan Indikator Urusan Urusan Penanaman Modal
Kota Pariaman Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	2	6	6	6	-
2	Jumlah Perusahaan PMDN yang berinvestasi	NA	NA	13	167	295
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp.000)	109.600.000	75.500.000	80.400.000	36.000.000	42.000.000-
4	Jumlah Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp.000)	53.640.000	63.750.000	5.352.000	45.600.000	25.600.000
5	Kenaikan/Penurunan Realisasi PMDN	45,78	-28,54	-17,09	-55,22	-85,05
6	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	7,78	7,90	6,38	3,78	-
7	Jumlah Perizinan	198	6	6	6	-



Investasi PMDN Yang Dikeluarkan/Setujui					
---	--	--	--	--	--

Sumber : DPM, PTSP & Naker, 2021

2.3.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental). Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku berisiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipatif serta keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio- ekonomi dan politik.

Pemuda merupakan aset pembangunan yang harus mendapat perhatian dari pemerintah. Salah satu bentuk perhatian yang telah diberikan oleh pemerintah selama ini adalah fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olahraga. Untuk lebih jelasnya gambaran kondisi di urusan pemuda dan olahraga dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.84
Perkembangan Indikator Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Kota Pariaman Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Organisasi Pemuda	10	10	22	22	22
2	Jumlah organisasi olahraga	12	12	35	35	35
3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	2	2	3	3	3
4	Jumlah Kegiatan Olahraga	9	9	9	9	9
5.	Gelanggang/Balai Remaja	13	13	0	0	0
6.	Lapangan Olahraga	40	40	54	54	54

Sumber : Dikpora, 2021



Berdasarkan data di atas, perkembangan pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga meningkat signifikan, pada tahun 2019 jumlah organisasi pemuda sebanyak 22 organisasi. untuk perkembangan jumlah organisasi olahraga yang naik pada tahun 2020 hanya berjumlah 35 Organisasi.

2.3.2.14 Urusan Statistik

Statistik merupakan basis dasar yang diperlukan untuk perencanaan daerah. Tentunya semua bentuk perencanaan akan bertolak dari kondisi statistik pembangunan yang disajikan ke dalam data yang terstruktur. Oleh karena itu semestinya buku statistik ini dapat terinformasikan secara progresif. Kendati buku statistik yang dibutuhkan belum lengkap, akan tetapi secara progresif data semestinya disajikan hingga satu bulan terakhir dalam setiap perjalanan tatakala waktu. Namun sebaliknya yang terjadi seringkali buku statistik terbit harus lengkap sehingga data yang dijadikan dasar perencanaan menjadi kurang up date. Untuk mengolah data statistik ini diperlukan indikator yang sesuai. Indikator pada aspek statistik meliputi tersedianya buku “Kota dalam Angka” dan buku “PDRB Kota”. Untuk buku “Kota dalam Angka” tahun 2016 hingga 2020 telah terpenuhi. Sejalan dengan buku “Kota dalam Angka”, buku “PDRB Kota” juga telah terpenuhi

Tabel 2.85
Perkembangan Indikator Urusan Statistik Kota Pariaman
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Buku “Kota Dalam Angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku “PDRB Kota”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Kominfo, 2021

Pada data tersebut hanya menginformasikan bahwa buku statistik Kota Pariaman telah tersedia, namun belum menjawab kebutuhan pengukuran dari indikator jumlah eksemplar buku yang tersedia. Sementara itu tentunya penerbitan buku statistik ini merupakan pekerjaan yang melekat sebagai fungsi wajib yang harus dijalankan yang bersifat periodik, dengan batasan anggaran yang jelas. Semestinya penyebutan jumlah eksemplar sudah harus dapat dipenuhi karena sebenarnya dalam perencanaan dan alokasi anggaran sudah harus jelas.



2.3.2.15 Urusan Persandian

Target dari pengamanan informasi pada urusan persandian berupa Tanda Tanga Elektronik (TTE) bagi Kepala OPD. Pada saat ini Tanda Tangan Elektronik (TTE) baru tersedia bagi OPD yang melaksanakan pelayanan publik, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga kerja. Untuk OPD lainnya di Kota Pariaman saat ini proses penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam penandatanganan dokumen masih dalam tahap pembentukan kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kerjasama ini diharapkan dapat segera terbentuk sehingga kedepannya seluruh Kepala OPD dapat menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam setiap penandatanganan dokumen.

2.3.2.16 Urusan Kebudayaan

Kebudayaan Kota Pariaman cukup beranekaragam terutama kebudayaan minang yang masih terjaga samapai sekarang. Program budaya yang dilaksanakan untuk mendukung kebudayaan di Kota Pariaman adalah Pesta Budaya Tabuik Kota Pariaman mempunyai potensi yang sangat besar di bidang budaya. Sampai dengan tahun 2019, upaya pemerintah untuk melestarikan budaya loka ditandai dengan banyaknya festival seni budaya yang diselenggarakan, baik skala kecil maupun skala yang cukup besar, baik yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat maupun pemerintah. Namun pada tahun 2020 pegelaran festival seni budaya di Kota Pariaman tidak dilaksanakan. Hal ini karena pandemi Covid-19 sehingga seluruh masyarakat kota harus mematuhi protokol kesehatan dan menghindari kerumunan. Kinerja pemerintah dalam pelestarian seni dan budaya lokal tergambar dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.86
Perkembangan Indikator Urusan Kebudayaan
Kota Pariaman Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	7	7	7	7	10
2	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	2	2	2	2	2
3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	52	52	52	52	52
4.	Jumlah Sanggar Kesenian	33	40	40	41	41
5.	Jumlah Gedung Kesenian	2	2	2	2	3
6.	Jumlah Group Kesenian	23	40	40	40	42

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021



2.3.2.17 Urusan Perpustakaan

Perpustakaan mempunyai posisi yang strategis dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia karena keberadaannya disamping sebagai sumber informasi dan pengetahuan, juga menjadi salah satu alat untuk mengukur minat baca masyarakat. Guna menunjang hal tersebut, pemerintah setiap tahun selalu berupa untuk meningkatkan kualitas perpustakaan, baik melalui penambahan koleksi wisata, maupun peningkatan pelayanan lainnya, seperti layanan perpustakaan keliling. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke perpustakaan. Tabel 2.87 menggambarkan perkembangan pengelolaan perpustakaan daerah.

Tabel 2.87
Perkembangan Indikator Urusan Perpustakaan
Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perpustakaan	104	104	104	165	165
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	1.851	2.607	3.715	1.180	1.218
3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	7.624	8.277	11.995	1.202	1.302
4.	Jumlah Perpustakaan Keliling	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Perpustakaan & Kearsipan, 2021

2.3.2.18 Urusan Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan diarahkan terutama untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kearsipan, diantaranya melalui bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan arsip secara baku. Sampai dengan tahun 2019, sudah 30 SKPD yang diberikan bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan arsip secara baku. Namun hal ini belum menggambarkan secara lebih akurat apakah sistem pengelolaan arsip secara baku sudah benar-benar dilaksanakan oleh SKPD.

Dalam rangka peningkatan SDM pengelola kearsipan telah diupayakan peningkatan kapasitas, meskipun selama kurun waktu 5 tahun terakhir baru dilaksanakan satu kali. Hasil-hasil pembangunan urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.88
Perkembangan Indikator Urusan Kearsipan Kota Pariaman
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengelolaan arsip secara baku	0	30	30	30	30
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	0	2	2	2	2
3	Jumlah OPD Yang Menerapkan Arsip Secara Baku	0	3	3	3	3
4	Persentase OPD Yang Telah Menerapkan Arsip secara Baku	0	30	30	30	30

Sumber : Dinas Perpustakaan & Kearsipan, 2021

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Berikut analisis singkat potensi yang dimiliki oleh Kota Pariaman

2.3.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan merupakan salah satu komoditas yang dikembangkan oleh Kota Pariaman. Hal ini dikarenakan struktur daerah Kota Pariaman yang sesuai untuk mengembangkan usaha perikanan dan kelautan. Potensi subsektor perikanan Darat dan Laut merupakan lapangan usaha yang mempunyai prospek sangat bagus untuk dikembangkan.

Pada urusan Kelautan dan Perikanan, secara rinci perkembangan pembangunan urusan Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.89
Perkembangan Indikator Urusan Kelautan Dan Perikanan
Kota Pariaman Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	6.372,72	6.524,99	6.327,09	3.210,53	3.310,53



2	Capaian Produksi Perikanan	Ton	64,43	68,16	91,62	46,29	47,29
3	Perikanan Darat	Ton	158	180	192	254	258
4	Jumlah Konsumsi Ikan	Kg/Kapita	27,8	38,89	38,89	38,89	38,89
5	Capaian Konsumsi Ikan	Kg/Kapita	79,43	121,53	121,53	115,60	105,60
7	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	192,8	254,91	315,44	318,81	322,42
8	Jumlah Kasus Pencurian Ikan	Kasus	1	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan, 2021

Produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu dari 46,29 ton naik menjadi 47,29 ton. Hal ini juga terjadi pada indikator yang lain seperti capaian produksi perikanan pada tahun 2019 sebanyak 46,29 ton sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 47,29 ton, perikanan darat sebanyak 254 ton pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebanyak 258 ton, dan produksi perikanan budidaya pada tahun 2019 sebanyak 318,81 ton pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 322,42 ton. Namun untuk indikator capaian konsumsi ikan mengalami penurunan pada tahun 2020. Dapat dilihat capaian konsumsi ikan pada tahun 2019 sebanyak 115,60 ton sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 105,60 ton.

2.3.3.2 Urusan Pariwisata

Pariwisata adalah suatu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Pariwisata juga dapat didefinisikan sebagai suatu transformasi orang untuk sementara dan dalam waktu jangka pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat dimana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu. Selain itu pengertian pariwisata yang lainnya adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga meliputi industri-industri klasik seperti kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan, transportasi secara ekonomi juga dipandang sebagai industri.



Tabel 2.90
Nama Objek Wisata di Kota Pariaman Menurut Jenisnya dan Kecamatan
Tahun 2020

No.	Objek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata
Pariaman Tengah			
1	Pantai Gandoriah	Kel. Pasir	Wisata Alam
2	Pantai Cermin	Kel. Karan Aur	Wisata Alam
3	Pulau Angso Duo	Pulau Angso Duo	Wisata Alam
4	Pulau Tengah	Pulau Tengah	Wisata Alam
5	Talao Pauh	Desa Pauh Pariaman	Wisata Alam
6	Kuburan Panjang	Pulau Angso Duo	Wisata Sejarah
7	Pesta Budaya Tabuik	Kel. Pasir	Wisata Budaya
8	Mariam Kuno	Kampung Pondok	Wisata Sejarah
9	Mesjid Tua	Kampung. Perak	Wisata Sejarah
10	Rumah Gadang Moh. Sholeh	Kampung Perak	Wisata Budaya
Pariaman Selatan			
1	Pantai Sunur	Desa Sunur	Wisata Alam
2	Pantai Kata	Desa Taluak	Wisata Alam
3	Pulau Ujung	Pulau Ujung	Wisata Alam
4	Surfing	Desa Taluak	Wisata Alam
5	Mesjid Tua Kuraitaji	Desa Balai Kuraitaji	Wisata Sejarah
Pariaman Timur			
1	Benteng jepang Santok	Air Santok	Wisata Sejarah
2	Benteng Santok II	Air Santok I	Wisata Sejarah
3	Guci Badano	Bungo Tanjung	Wisata Sejarah
Pariaman Utara			
1	Pantai Teluk Belibis	Desa Padang Birik-Birik	Wisata Alam
2	Talao Manggung	Desa Manggung	Wisata Alam
3	Pulau Kasiak	Pulau Kasiak	Wisata Alam
4	Penangkaran Penyu	Desa Apar	Wisata Minat khusus
5	STIB	Apar	Wisata Alam
6	Balon Udara/ Sepeda gunung	Tungkal Selatan	Wisata Alam

Sumber : Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kota Pariaman, 2021

Objek wisata yang ada di Kota Pariaman cukup beragam jenis dan lokasinya. Dari beberapa potensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun asing. Berikut dapat kita lihat perkembangan wisatawan yang datang ke Kota Pariaman dari tahun 2016-2020.



Tabel 2.91
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pariwisata
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Objek Wisata	Objek	23	22	22	23	25
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	2.907.194	3.099.310	3.320.825	3.925.086	112.278
3	Jumlah destinasi Wisata Alam Yang Di Kembangkan	Destinasi	12	12	12	12	15
4	Jumlah Kawasan Wisata Laut	Kawasan	4	4	4	4	4
5	Jumlah Restoran	Restoran	69	89	103	90	91
6	Jumlah Hotel	Hotel	11	11	11	11	11

Sumber : Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kota Pariaman, 2021

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Pariaman dalam periode 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan domestik adalah sebanyak 2.907.194 orang dan terus meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2019 dengan jumlah kunjungan wisatawan mencapai 3.925.086 orang. Namun, pada tahun 2020 dengan terjadinya musibah pandemi Covid-19 mulai awal tahun 2020. Musibah pandemi ini melumpuhkan sebagian besar sektor kegiatan tidak hanya di Kota Pariaman tetapi juga melanda ke seluruh belahan dunia. Dengan adanya protokol kesehatan yang harus dipatuhi seperti *social distancing* yang mengharuskan untuk menjaga jarak dan tidak membuat kerumunan serta larangan untuk mengunjungi tempat wisata. Hal ini berdampak langsung terhadap sektor pariwisata yang dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang datang ke Kota Pariaman. Dapat dilihat jumlah wisatawan yang datang ke Kota Pariaman selama tahun 2020 hanya 112.278 orang.

Pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap turunnya pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata di Kota Pariaman. Banyaknya event-event pariwisata oleh Pemerintah Kota Pariaman seperti Festival Tabuik, Lomba Triathlon, Pariaman Fashion Parade, Pariaman Expo, Tour de Singkarak, Pariaman Batagak Gala dan lain-lain yang biasanya rutin diselenggarakan setiap tahunnya untuk meningkatkan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara. Tetapi untuk tahun 2020 tidak semua event tersebut dapat dilaksanakan dengan semestinya. Namun demikian, ada beberapa event yang dapat



dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk meningkatkan jumlah wisatawan berkunjung ke suatu daerah maka diperlukan juga sarana dan prasarana pendukung seperti hotel dan penginapan. Pada tahun 2020 jumlah hotel, penginapan dan homestay yang terdapat di Kota Pariaman adalah sebanyak 42 buah dengan rincian 10 unit hotel dan 32 unit homestay dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

2.3.3.3 Urusan Pertanian

Pertanian sebagai salah satu kategori dalam pembentukan PDRB Kota Pariaman mempunyai peranan yang sangat penting. Kontribusi pertanian merupakan yang terbesar dibandingkan dengan kategori yang lainnya. Sebagai salah satu penyumbang terbesar dalam kategori pertanian ini adalah produksi padi yang dihasilkan dari lahan sawah. Sawah adalah lahan usaha tani yang secara fisik permukaan tanahnya rata. Perkembangan indikator kinerja urusan pertanian dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.92
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pertanian
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Bina Kelompok Tani	%	78,99	80,35	86	87	89
2	Jumlah Ketersediaan Alat Pertanian	Unit	658	772	333	333	340
3	Jumlah Ketersediaan Alat Mesin Pertanian	Unit	615	552	669	669	705
4	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Ha	Ton	5,31	5,89	5,24	5,5	5,62
5	Luas Sawah	Ha	2.502	2.493	1.785	1.785	1.785
6	Luas Panen Padi sawah	Ha	5.851	7.099	6.708	4.710	4.769
7	Produksi Padi Sawah	Ton/Ha	5,31	5,89	5,83	6,18	5,62
9	Jumlah pemotongan sapi potong	Ekor	1.113	2.817	1.708	1.913	1.888

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan, 2021

Luas lahan sawah pada tahun 2020 adalah seluas 1.785 hektar atau sekitar 24,33% dari 7.336 hektar total dan terus mengalami penurunan di wilayah Kota Pariaman. Dimana pada tahun 2017 luas lahan sawah Kota Pariaman adalah 2.493 Ha. Penurunan luas lahan sawah ini dikarenakan adanya



pembangunan seiring dengan bertambahnya jumlah. Begitupun dengan jumlah bina kelompok tani dan ketersediaan alat pertanian juga berkurang karena jumlah lahan sawah yang akan digarap juga berkurang. Produktivitas padi di Kota Pariaman dari tahun ke tahun berfluktuatif. Hal ini seiring dengan berkurangnya lahan sawah, namun Pemerintah Kota Pariaman tetap berupaya untuk meningkatkan produktivitas padi. Dapat dilihat pada tahun 2018 produktivitas padi Kota Pariaman adalah 5,24 Ton/Ha dimana terjadi penurunan dari 5,89 ton/Ha pada tahun 2017. Kemudian jumlah produktivitas padi meningkat lagi pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 5,5 ton/Ha dan 5,62 ton/Ha.

2.3.3.4 Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang relatif berkembang di Kota Pariaman. Dalam periode 5 (lima) tahun terakhir data yang ada memperlihatkan jumlah pedagang yang mengurus izin usaha perdagangan (SIUP) di Kota Pariaman mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung menurun di 5 tahun terakhir. Pedagang yang mengurus SIUP terdiri dari klasifikasi pedagang kecil, pedagang menengah, dan tidak ada klasifikasi pedagang besar di Kota Pariaman.

Masih di bidang perdagangan, dalam meningkatkan pelayanannya, dilakukan peningkatan sarana perdagangan yang representatif, sehingga perekonomian rakyat tetap berkembang seiring dengan maraknya pasar modern seperti minimarket. Pada Tahun 2020 jumlah minimarket meningkat menjadi 30 unit, dan jenis perizinan yang dikeluarkan menjadi sebanyak 132 izin.

Tabel 2.93
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perdagangan
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Izin	-	-	-	-	-
-	Perdagangan Kecil dan Mikro	Izin	186	137	108	137	132
-	Pedagang Menengah	Izin	11	16	30	16	25
2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	50	50	55	57	60
3.	Jumlah Pasar tradisional	Buah	7	7	7	7	8
4.	Sistem Pelayanan Perizinan		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Jenis Perizinan	Buah	NA	28	115	135	192

Sumber : Dinas Perindagkop & KUKM, 2021



Jumlah izin perdagangan kecil dan mikro serta izin pedagang menengah Kota Pariaman dari tahun ke tahun berfluktuatif. Sedangkan jumlah cakupan bina pedagang/usha informal di Kota Pariaman cenderung meningkat dimana pada tahun 2017 berjumlah 50% kemudian terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 55%, begitu juga pada tahun 2019 dan tahun 2020 menjadi 57% dan 60%. Pada tahun 2020 terjadi penambahan satu pasar tradisional di Kota Pariaman, sehingga yang awalnya jumlah pasar tradisional sebanyak 7 pasar, pada tahun 2020 menjadi 8 pasar tradisional. Seiring berkembangnya jenis usaha dan perdagangan di Kota Pariaman, jenis perizinan juga selalu bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2017 hanya ada 28 jenis perizinan kemudian bertambah lagi pada tahun 2018 menjadi 115 jenis perizinan, tahun 2019 dan 2020 secara berurutan ada 135 dan 192 jenis perizinan.

2.3.3.5 Urusan Perindustrian

Industri merupakan salah satu sektor penggerak pembangunan perekonomian, sektor ini memegang peranan yang penting dalam setiap aktivitas sektor lainnya. Jika sektor industri berkembang dengan pesat maka sektor lainnya seperti investasi, perdagangan dan jasa juga akan ikut berkembang. Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dan dinilai dari perkembangan sektor industrinya, jika semakin baik laju pertumbuhan sektor industrinya maka daerah tersebut juga akan semakin cepat maju dan berkembang. Hal ini nantinya akan memberikan peluang terhadap pembukaan lapangan kerja/usaha bagi masyarakat dan pada akhirnya akan mampu mengurangi nilai pengangguran dan kemiskinan.

Industri yang berkembang di Kota Pariaman masih didominasi oleh industri kecil menengah (IKM). Kontribusi IKM terhadap pembentukan PDRB masih relatif kecil. Perkembangannya industri dan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.94
Perkembangan capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Perindustrian
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Pemerintah Daerah	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertumbuhan Industri	1,60	1,60	1,70	1,60	0,20
2	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	7,80	7,64	7,40	7,44	6,86
3	Cakupan bina kelompok pengrajin (Termasuk Pembinaan)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perindagkop & KUKM, 2021



2.4.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.4.4.1 Urusan Sekretariat Daerah

Tabel 2. 95
Predikat Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja Pemerintah Daerah	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Predikat LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Sumber: Bagian Pemerintahan Setdako, 2021

2.4.4.2 Urusan Sekretariat Dewan

Pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan indikator Jumlah perda yang dibahas dan tersedianya kebutuhan rapat pembahasan yang diukur adalah PERDA APBD dan APBD Perubahan. Untuk penetapan APBD dilakukan tepat waktu, sedangkan APBD Perubahan penetapannya hanya tepat waktu pada tahun 2020.

Tabel 2.96
Penetapan Perda Tepat Waktu 5 Tahun Terakhir

No	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Perda APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2	Perda APBD Perubahan	Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : Bagian Hukum SETDAKO

2.4.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.4.5.1 Unsur Perencanaan

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka 5 (lima) tahun,



dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 (satu) tahun serta Rencana Tata Ruang Wilayah untuk jangka 20 (dua puluh) tahun. Ketersediaan masing-masing dokumen tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.97
Perkembangan Indikator Urusan Perencanaan Pembangunan
Kota Pariaman Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
2	Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
3	Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
4.	Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Bappeda 2021

2.4.5.2 Unsur Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023. Keuangan daerah merupakan salah satu faktor yang sangat strategis untuk mencapai/mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pemerintah Kota Pariaman, disamping faktor sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.98



Tabel 2.98
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Opini Publik
1.	2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2.	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3.	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4.	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5.	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat

2.4.5.3 Unsur Kepegawaian

Selama kurun waktu tahun 2016 – 2020, jumlah PNS berfluktuasi. Tapi mulai tahun 2016 dan tahun 2018 jumlah PNS Kota Pariaman mulai menurun. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan moratorium penerimaan PNS yang diterapkan oleh pemerintah pusat serta dengan ditariknya pendidikan menengah menjadi kewenangan provinsi akibatnya guru SMA/SMK menjadi pegawai provinsi. Pada tahun 2019-2020 jumlah PNS Kota Pariaman mulai meningkat dengan adanya penerimaan PNS untuk pemerintah daerah Kota Pariaman. Data urusan kepegawaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

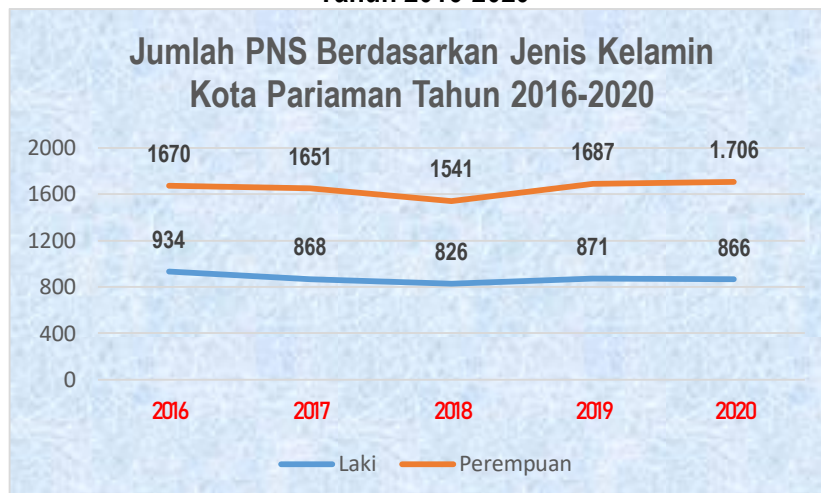
Tabel 2.99
Perkembangan Indikator Urusan Kepegawaian Kota Pariaman Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Laki	934	868	826	871	866
2.	Perempuan	1.670	1.651	1.541	1.687	1.706
	Berdasarkan Tingkat Pendidikan					
1.	SD	12	12	10	7	7
2.	SMP	10	17	13	10	19
3.	SMA	312	360	291	271	228
4.	D-I dan D-II	147	213	109	91	49
5.	D-III	335	319	314	368	403
6.	D-IV/S-1	1.571	2.133	1.480	1.623	1.718
7.	S-2	131	200	150	188	148
8.	S-3	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2021



Gambar 2.16
Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Pariaman
Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2021

2.4.5.4 Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil, maka dilaksanakanlah pendidikan dan pelatihan. Jumlah PNS yang melaksanakan tugas belajar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan PNS kepada masyarakat.

Tabel 2.100
Perkembangan Indikator Unsur Pendidikan dan Pelatihan Kota Pariaman
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PNS yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Jumlah PNS yang mengikuti diklat sesuai tupoksi dan persyaratan jabatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Persentase ASN yang difasilitasi Tugas Belajar dan Izin Belajar	2,5	3,5	4,0	4,5	5,0
4	Persentase ASN yang mendapatkan kenaikan pangkat	15,0	17,5	20,5	23,5	25,0

Sumber : BKPSDM, 2021



2.4.5.5 Unsur Penelitian Dan Pengembangan

Urusan kelitbangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pariaman dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan terlaksananya penelitian dan pengembangan diharapkan tersedianya inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan daya saing daerah, Pelaksanaan Inovasi Daerah tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menjadi hal masif untuk dapat diterapkan. Penumbuhkembangan dan penyebarluasan praktik-praktik inovasi yang baik secara berkelanjutan, disamping itu perlu dilakukan menjadikan inovasi sebagai salah satu budaya dalam pemecahan masalah dalam pelaksanaan pemerintahan yang selaras dengan kebijakan Pimpinan Daerah yang menuntut adanya inovasi dalam setiap pelaksanaan tata kelola pemerintah maupun pelayanan publik pada setiap Organisasi Perangkat Daerah.

Adapun fokus dari Inovasi Daerah Kota Pariaman antara lain :

1. Penciptaan manajemen administrasi Inovasi Daerah yang berkelanjutan di Kota Pariaman.
2. Pembangunan kerangka dasar kebijakan Inovasi Daerah Kota Pariaman.
3. Penguatan Kelembagaan dan daya dukung Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKININ) atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
4. Penciptaan budaya inovasi di Kota Pariaman.
5. Penciptaan keselarasan dengan perkembangan global dan wadah untuk mengatasi setiap permasalahan yang muncul secara efektif dan efisien.

a. Berdasarkan asal usulan inisiatif Inovasi Daerah

Tabel 2.101
Jumlah Inovasi berdasarkan Inisiator

No	Indikator Kinerja Daerah	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kepala Daerah	0	0	0	0	0
2	Anggota DPRD	0	0	0	0	0
3	ASN	0	0	0	0	0
4	Perangkat Daerah	87	87	87	87	87



5	Masyarakat	0	0	0	0	0
---	------------	---	---	---	---	---

Sumber : Bappeda, 2021

b. Sebaran data usulan Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah di Kota Pariaman

Tabel 2.102
Jumlah Usulan Inovasi Perangkat Daerah di Kota Pariaman tahun 2021

No	Organisai Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah	Persentase (%)
1	Dikpora	11	12.6
2	Dinkes	5	5.75
3	DPUPR & Pertanahan	2	2.30
4	DisperkimLH	1	1.15
5	Satpol PP & Damkar	3	3.45
6	BPBD	2	2.30
7	Dinsos	4	4.60
8	DP3AKB	5	5.75
9	Disdukcapil	7	8.04
10	DPMDes	3	3.45
11	Dishub	2	2.30
12	Diskominfo	8	9.20
13	Disperindagkop	2	2.30
14	DPMPTSP & Naker	6	6.70
15	DPPP	4	4.60
16	Disparbud	5	5.75
17	BPKPD	2	2.30
18	BKPSDM	2	2.30
19	Bappeda	3	3.45
20	Inspektorat	1	1.15
21	Kantor Kesbangpol	2	2.30
22	Kecamatan Pariaman Utara	3	3.45
23	Kecamatan Pariaman Tengah	2	2.30
24	Kecamatan Pariaman Selatan	1	1.15
25	Kecamatan Pariaman Timur	1	1.15
Total		87	100

Sumber : Bappeda Kota Pariaman, 2021



2.4.5.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dibentuklah Inspektorat Daerah Kota Pariaman dimana unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Kota Pariaman menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang akan dilaksanakan ke dalam program dan kegiatan yang dikerjakan setiap tahunnya. Dalam penerapan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan dilakukan secara internal dan eksternal. Untuk internal yang dilakukan oleh Inspektorat, dan untuk eksternal dilaksanakan oleh BPKP.

Tabel 2.103
Jumlah Auditor di Kota Pariaman Tahun 2018-2020

No	Uraian Jabatan Fungsional	2016	2017	2018	2019	2020
1	Auditor					
	Utama	0	0	0	0	0
	Madya	0	0	1	3	2
	Muda	2	3	4	11	11
	Pertama	4	4	0	1	1
	Pelaksana	0	0	0	0	0
	Pelaksana Lanjutan	1	1	1	0	0
	Penyelia	0	0	0	0	0
2	P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Perangkat Daerah)					
	Madya	5	5	5	6	6
	Muda	0	0	0	4	4
	Utama	0	0	0	0	0
	Pertama	0	0	0	3	3
3	Auditor Kepegawaian	0	0	1	0	0

Sumber : Inspektorat Kota Pariaman, 2021



Tabel 2.104
Capaian Nilai Sakip dan Indeks RB Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun					Ket
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Nilai Sakip	50,44 (CC)	52,35 (CC)	53,22 (CC)	56,15 (CC)	56,50 (CC)	
2.	Indeks RB	-	-	49,25 (C)	51,62 (CC)	53,42 (CC)	

Sumber : Kemenpan & RB Republik Indonesia

2.4.7 Unsur Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan umum meliputi :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Di Kota Pariaman urusan pemerintahan ini dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.



2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah atau infrastruktur, fokus iklim berinvestasi dan fokus sumber daya manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga merupakan salah satu dari enam komponen pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran (*demand side*). Komponen lainnya adalah Konsumsi LNPRT, Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Perubahan Inventori, Ekspor dan Impor. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan. Konsumsi Rumah Tangga mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Jenis barang dan jasa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 1) Makanan, Minuman, dan Rokok; 2) Pakaian dan Alas Kaki; 3) Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga; 4) Kesehatan dan Pendidikan; 5) Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya; 6) Hotel dan Restoran, dan 7) Lainnya.

PDRB ADHB Kota Pariaman Menurut Pengeluaran selama tahun 2016-2020 didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Tahun 2020, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Pariaman sebesar 2.070,24 miliar rupiah atau sebesar 56,62 persen dari total pengeluaran. Proporsi pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga ini berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 proporsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap total PDRB ADHB sebesar 55,35 persen, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 55,48 persen. Pada tahun 2018 proporsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga meningkat lagi menjadi 55,76 persen, dan turun kembali pada tahun 2019 menjadi 56,59 dan meningkat lagi tahun 2020 menjadi 56,62 persen.



Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga berkaitan erat dengan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat pada skala rumah tangga. Semakin tinggi angka konsumsi rumah tangga (RT), maka secara umum kemampuan ekonomi masyarakat juga mengindikasikan perkembangan yang positif. Konsumsi rumah tangga ini dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa kelompok konsumsi, diantaranya adalah konsumsi makanan dan non makanan. Berikut ini tabel perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita tahun 2016-2020.

Tabel 2.105
Perkembangan Pengeluaran konsumsi rumah tangga Perkapita
Kota Pariaman Tahun 2015-2019 (Juta/Rupiah)

No	Uraian	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga perkapita pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	1.937.157,05	2.100.066,73	2.257.850,58	2.441.343,47	2.683.048,58
2	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga perkapita pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan	1.464.032,62	1.534.804,36	1.617.031,42	1.701.908,82	1.785.629,60
3	Pengeluaran Konsumsi LPNRT	44.073,69	48.357,03	49.991,43	53.325,75	60.681,75
4	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	572.781,85	611.670,02	637.929,77	673.432,26	727.771,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2021

2. Pengeluaran Konsumsi Non Makanan Per Kapita

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga berkaitan erat dengan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat pada skala rumah tangga. Semakin tinggi angka konsumsi rumah tangga, semakin tinggi kemampuan ekonomi masyarakat, dan hal ini mengindikasikan perkembangan ekonomi yang positif.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dikelompokkan dalam : Pengeluaran Konsumsi untuk Makanan dan Pengeluaran Konsumsi Non Makanan. Dengan adanya pengelompokan pengeluaran tersebut, maka dapat diidentifikasi perkembangan karakteristik pengeluaran masyarakat selama ini. Selama rentang waktu tahun 2016-2020, kelompok pengeluaran konsumsi makanan mendominasi



pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kota Pariaman, kecuali tahun 2020, kelompok pengeluaran konsumsi non makanan lebih tinggi dari pengeluaran konsumsi makanan.

Tabel 2.106
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas
di Kota Pariaman Tahun 2016-2020

No.	Kelompok Komoditas	Tahun										Ket
		2016		2017		2018		2019		2020		
		(RP)	%	(RP)	%	(RP)	%	(RP)	%	(RP)	%	
1.	Makanan	-	-	675.596	55.45	676.113	52.80	660.802.44	50.41	764.497.58	51.04	
2.	Non Makanan	-	-	542.766	44.55	604.385	47.20	650.023.16	49.59	733.254.95	48.90	

Sumber : BPS Kota Pariaman, 2021

3. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah merupakan indikator daya saing daerah yang dihitung dengan cara membagi PDRB Atas Dasar Harga Konstan dengan total tenaga kerja. Produktivitas Total Daerah menggambarkan efektifitas tenaga kerja dalam menambah jumlah produksi barang dan jasa di suatu wilayah, dengan kata lain indikator ini menggambarkan besaran produktivitas tenaga kerja. Perkembangan Produktivitas Total Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.107
Produktivitas Total Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	PDRB ADHK (Rp. Juta)	2.900.328,17	3.062.313,75	3.234.234,60	3.412.140,28	3.594.081,21
2.	Jumlah Tenaga Kerja (Jiwa)	22.248	36.113	39.000	43.339	42.079
3.	Produktivitas Tenaga Kerja (Juta/Jiwa/ tahun)	130	85	83	79	85

Sumber : BPS Kota Pariaman, 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa produktivitas tenaga kerja Kota Pariaman tahun 2016-2020 mengalami cenderung fluktuasi. Dimana pada tahun 2016 nilainya produktivitas daerah pada angka 130 juta/jiwa. Dan pada tahun 2017 turun menjadi 85 juta rupiah/jiwa. pada tahun 2018 turun lagi menjadi 83



juta rupiah/jiwa. Hingga pada tahun 2019 turun lagi menjadi 79 juta rupiah/jiwa. Kemudian pada tahun 2020 naik lagi menjadi 85 juta rupiah/jiwa. Produktivitas total daerah juga dapat dihitung menurut lapangan usaha dengan tujuan untuk mengidentifikasi kinerja sektor-sektor perekonomian secara lebih spesifik dengan didasarkan pada nilai kontribusi serta serapan tenaga kerjanya. Produktivitas total daerah menurut lapangan usaha diperoleh dari jumlah penduduk yang bekerja pada lapangan usaha utama dengan PDRB yang dihasilkan oleh lapangan usaha utama tersebut. Pada tahun 2016-2020, kelompok lapangan usaha di Kota Pariaman terdiri dari lima sektor besar, yaitu : Pertanian; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel; Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan; dan Lainnya. Sektor *lainnya* terdiri dari Pertambangan dan Penggalan; Listrik, Gas dan Air; Kontruksi; Angkutan; Pergudangan; Komunikasi; Keuangan; Asuransi; Real Estate; dan Jasa Perusahaan.

3. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani (NTP) adalah *rasio antara* indeks harga yang diterima petani (*IT*) dengan indeks harga yang dibayar petani (*IB*) yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Pengumpulan data dan perhitungan NTP di Indonesia dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan hanya menghitung Nilai Tukar Petani sampai tingkat Provinsi. Dengan demikian Nilai Tukar Petani Kota Pariaman merujuk pada Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Barat. *Indeks harga yang diterima petani (IT)* adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Dari nilai IT ini dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. IT ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. IT dihitung berdasarkan nilai jual hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani, mencakup sektor padi, palawija, hasil peternakan, perkebunan rakyat, sayuran, buah, dan hasil perikanan (perikanan tangkap maupun budi daya). *Indeks harga yang dibayar petani (IB)* adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian. Dari IB ini dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan IB juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan. IB dihitung berdasarkan indeks harga yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan



barang modal dan biaya produksi, yang dibagi lagi menjadi sektor makanan dan barang/jasa non makanan.

Secara umum Nilai tukar petani (NTP) menunjukkan tiga kondisi :

1. $NTP > 100$ atau $IT > IB$

Ini berarti nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani *lebih besar* dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi. Dengan kata lain petani mengalami *surplus*.

2. $NTP = 100$ atau $IT = IB$

Ini berarti nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani *sama besar* dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi. Dengan kata lain petani mengalami *titik impas*.

3. $NTP < 100$ atau $IT < IB$

Ini berarti nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani *lebih kecil* dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi. Dengan kata lain petani mengalami *defisit*.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Aspek daya saing dari segi perhubungan memiliki tiga indikator utama yakni indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, serta indikator jumlah orang/barang melalui terminal per tahun. Pada indikator jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dan indikator jumlah orang/barang melalui terminal per tahun memiliki formula yang sama di Kota Pariaman. Hal ini dikarenakan Kota Pariaman tidak memiliki terminal cargo (terminal barang) dan hanya memiliki satu terminal yakni Terminal Jati Tipe A.

Sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur pada dasarnya adalah elemen pendukung bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat dalam suatu wilayah, salah satunya adalah infrastruktur bidang perhubungan. Tabel 2.108 menggambarkan perkembangan bidang perhubungan selama kurun waktu 2016 – 2020:



Tabel 2.108
Perkembangan Indikator Daya Saing Daerah Bidang Perhubungan
Kota Pariaman Tahun 2016-2020

No	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	147,523	160,601	184,182	119,130	25,000
2	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Bis	2	2	1	1	1

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

1. Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Restoran merupakan tempat yang menyediakan dan menjual makanan dan minuman di suatu bangunan tetap dengan pembeli yang membayar pajak. Ketersediaan restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Dari tahun 2019-2020, jumlah restoran di Kota Pariaman cenderung meningkat. Berikut ini tabel perkembangan jumlah restoran di Kota Pariaman Tahun 2016-2020.

Tabel 2.109
Perkembangan Jumlah Restoran Di Kota Pariaman
Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Restoran	69	89	103	90	91

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2021

2. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Penginapan atau hotel merupakan salah satu kebutuhan penunjang dalam kegiatan pariwisata di suatu wilayah, termasuk di Kota Pariaman. Kota Pariaman yang terkenal dengan wisata alam dan bahari banyak menarik wisatawan dari luar daerah sehingga keberadaan penginapan atau hotel banyak dibutuhkan oleh wisatawan. Beberapa tahun terakhir, pertumbuhan hotel atau penginapan di Kota Pariaman menunjukkan pertumbuhan positif seiring berkembangnya pariwisata Kota Pariaman. Memang di Kota Pariaman belum ada hotel yang berbintang semuanya masih kategori hotel melati. Namun untuk tahun berikutnya Kota Pariaman sedang berusaha menarik investor untuk bisa berinvestasi untuk



membangun hotel yang berbintang. Berikut ini tabel perkembangan jumlah hotel di Kota Pariaman Tahun 2016-2020.

Tabel 2.110
Perkembangan Jumlah Hotel Di Kota Pariaman
Tahun 2016-2020

No	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penginapan/Hotel	9	43	43	42	42

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2021

Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Sumber air bersih dapat dibedakan atas air hujan, air sungai dan danau, mata air, air sumur dangkal, air sumur dalam. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.111
Perkembangan Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air minum bersih
Kota Pariaman Tahun 2015-2019

No	Uraian	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air minum bersih	85.44	80.92	81.00	78.42	82.49

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2021

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Tinggi rendahnya minat pelaku usaha untuk menanamkan investasi tergantung di antaranya kepada tingkat keamanan dan ketertiban, kemudahan pengurusan perizinan, tersedianya infrastruktur pendukung, jumlah dan macam pajak yang harus dipenuhi, dan regulasi yang mendukung iklim usaha. Tabel 2.112 menggambarkan indikator yang terkait dengan iklim investasi di Kota Pariaman.



Tabel 2.112
Perkembangan Indikator Fokus Iklim Berinvestasi Kota Pariaman
Tahun 2016-2020

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Lama Proses Perizinan (Rata-rata proses perizinan)	5	5	5	5	5
2.	Jumlah dan Macam Pajak Retribusi Daerah	2	26	26	26	26
3.	Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha	0	0	0	0	0
4.	Jumlah Perizinan Investasi PMDN Yang Dikeluarkan/Detujui	196	6	6	6	6

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2021

2.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia

1) Rasio Lulusan S1/S2/S3

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor penting dalam pembangunan daerah. Sehingga kualitas SDM tersebut sangat menentukan kualitas pembangunan daerah tersebut. Kualitas SDM ditentukan salah satunya oleh tingkat pendidikan yang ditempuh. Korelasinya adalah, semakin tinggi tingkat pendidikan SDM maka semakin tinggi juga kualitas SDM di suatu wilayah, sehingga semakin berkualitas tenaga kerja di dalam wilayah tersebut.

Pada indikator ini kualitas tenaga kerja dilihat dari seberapa banyak jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kota Pariaman. Pemaparan data dapat dilihat pada tabel di bawah yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Pariaman selama tahun 2016-2020 menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2016 dan 2017 rasio lulusan S1, S2, dan S3 yaitu sebesar 10,63 %. Dan pada tahun 2018 rasio lulusan S1, S2, dan S3 naik menjadi 19,11 %. Begitu juga untuk tahun 2019 dan tahun 2020 rasio lulusan S1, S2, dan S3 selalu naik yaitu sebesar 19,11 % dan 22,22 %. Berikut ini tabel perkembangan rasio lulusan S1, S2, dan S3 Kota Pariaman Tahun 2016-2020.

Tabel 2.113
Perkembangan Indikator Fokus Sumber Daya Manusia Kota Pariaman
Tahun 2016-2020

No	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio lulusan S1/S2/S3 yang	10,63	10,63	19,11	19,11	22,22



bekerja					
---------	--	--	--	--	--

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2021

2) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15 - 65 tahun dan usia tidak produktif (0 - 14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (dependency ratio) Kota Pariaman pada tahun 2020 adalah 56,21 persen. Itu artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 56 orang yang belum produktif dan/atau dianggap tidak produktif lagi. Dari tahun 2016 hingga 2020, rasio ketergantungan ini cukup mengalami sedikit penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif di Kota Pariaman semakin kecil setiap tahunnya.

Tabel 2.114
Perkembangan Indikator Fokus Sumber Daya Manusia Rasio Ketergantungan Kota Pariaman Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Ketergantungan	56,50	56,31	56,21	56,21	56,21

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2021



BAB III

Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Formulasi kerangka ekonomi dan pendanaan daerah merupakan salah satu elemen vital dalam proses perencanaan daerah. Keberadaan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang komprehensif serta akurat dapat merepresentasikan kondisi dan prospek daerah dari perspektif ekonomi. Rancangan kerangka ekonomi daerah yang baik juga telah melalui tahapan sinkronisasi dan integrasi dengan kerangka ekonomi regional dan nasional. Sinkronisasi ini sangat diperlukan karena daerah akan menikmati eksternalitas positif dan sekaligus turut menanggung derita eksternalitas negatif dari kondisi ekonomi pada level regional maupun nasional.

Rancangan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 secara detil mendeskripsikan kondisi perekonomian Kota Pariaman serta arah kebijakan pendanaan Pemerintah Daerah Kota Pariaman. Rancangan ini akan memberikan kontribusi dalam upaya memproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah secara akurat. Selain itu rancangan kerangka ekonomi dan pendanaan ini juga dapat dijadikan sebagai dasar asumsi operasionalisasi kebijakan di tahun 2022.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Pariaman tahun 2022 memiliki tema **"Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah"**

3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global

Perekonomian di banyak negara pada triwulan III Tahun 2020 memperlihatkan perbaikan yang didorong oleh stimulus kebijakan serta peningkatan mobilitas. Perekonomian Tiongkok tumbuh positif sementara Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang mengalami perbaikan melebihi perkiraan. Peningkatan kinerja perekonomian global ini tidak terlepas dari stimulus moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral di banyak negara dengan menjaga suku bunga pada tingkat yang rendah dan menambah likuiditas. Penambahan likuiditas dilakukan dengan pembelian obligasi pemerintah, penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) dan *Pandemic Emergency Purchase Programme* (PEPP). Sementara dari sisi kebijakan fiskal, dilakukan melalui peningkatan anggaran kesehatan, peningkatan dan perluasan jaring pengaman sosial, relaksasi pajak serta program pemulihan ekonomi.

Berdasarkan data *World Economic Outlook*, Oktober 2020, tren pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mengalami recovery dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 5.2 persen pada tahun 2021.



Tabel 3.1
Pemulihan Ekonomi Global

Pertumbuhan Dunia	YoY				Q to Q			
	Realisasi		Proyeksi		Realisasi		Proyeksi	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Ekonomi Dunia	3,5	2,8	-4,4	5,2	3,1	2,7	-2,6	3,7
Ekonomi Negara Maju	2,2	1,7	-5,8	3,9	1,7	1,5	-4,9	3,8
AS	3	2,2	-4,3	3,1	2,5	2,3	-4,1	3,2
Zona Euro	1,8	1,3	-8,3	5,2	1,1	1	-6,6	4,8
- Jerman	1,3	0,6	-6,0	4,2	0,3	0,4	-5,2	4,6
- Prancis	1,8	1,5	-9,8	6	1,4	0,8	-6,7	4
- Italia	0,8	0,3	-10,6	5,2	0,1	0,1	-8,0	3,4
- Spanyol	2,4	2	-12,8	7,2	2,1	1,8	-10,8	6,6
Jepang	0,3	0,7	-5,3	2,3	-0,3	-0,7	-2,3	0,7
Inggris	1,3	1,5	-9,8	5,9	1,5	1,1	-6,4	3,7
Kanada	2	1,7	-7,1	5,2	1,8	1,5	-5,9	4,9
Negara Maju Lainnya	2,7	1,7	-3,8	3,6	2,3	2,1	-4,2	5
Emerging Market dan Negara Berkembang	4,5	3,7	-3,3	6	4,3	3,8	-0,5	3,6
Emerging dan Asia Berkembang	6,3	5,5	-1,7	8	6,1	5,1	2,2	3,6
China	6,7	6,1	1,9	8,2	6,6	6	5,8	3,9
India	6,1	4,2	-10,3	8,8	5,5	3,1	-4,0	1,4
ASEAN - 5	5,3	4,9	-3,4	6,2	5,3	4,6	-2,1	5,2
Emerging dan Eropa Berkembang	3,3	2,1	-4,6	3,9	N/A	N/A	N/A	N/A
Rusia	2,5	1,3	-4,1	2,8	2,9	2,2	-4,5	2,8
Amerika Latin dan Karibia	1,1	0	-8,1	3,6	-0,2	-0,3	-6,5	2,1
Brasil	1,3	1,1	-5,8	2,8	0,8	1,6	-4,7	1,7
Meksiko	2,2	-0,3	-9,0	3,5	1,2	-0,8	-7,0	2,7
Timur Tengah	2,1	1,4	-4,1	3	N/A	N/A	N/A	N/A
Saudi Arabia	2,4	0,3	-5,4	3,1	4,3	-0,3	-5,2	6,6
Sub-Sahara Afrika	3,3	3,2	-3,0	3,1	N/A	N/A	N/A	N/A
Nigeria	1,9	2,2	-4,3	1,7	N/A	N/A	N/A	N/A
Afrika Selatan	0,8	0,2	-8,0	3	0,2	-0,6	-5,5	1

Sumber : IMF, Word Economic Outlook, Oktober 2020



Pada Tahun 2021, pertumbuhan kelompok negara maju diperkirakan menguat pada level 3.9 persen setelah pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar - 5.8 persen. Proyeksi pertumbuhan 2021 tersebut melebihi pertumbuhan pada tahun 2019 yang hanya 1.7 persen. Amerika Serikat diproyeksikan mengalami kontraksi sebesar - 4.3 persen sebelum menguat kembali pada level 3.1 persen. Zona Euro diproyeksikan mengalami kontraksi lebih dalam yaitu pada level - 8.3 persen untuk kemudian menguat kembali pada level 5.2 persen.

Emerging market di Asia mengalami kontraksi pada level yang lebih moderate jika dibandingkan dengan Eropa dan Amerika Serikat. Kelompok Emerging market dan negara berkembang Asia mengalami kontraksi sebesar – 3.3 persen pada Tahun 2020 untuk kemudian mengalami perbaikan pada level 6 persen di Tahun 2021. Prospek untuk China diperkirakan lebih kuat dibandingkan dengan negara-negara lainnya yaitu pada level 1.9 persen pada tahun 2020 dan sebesar 8.2 persen pada tahun 2021. Aktivitas perekonomian pulih lebih cepat seiring dibukanya negara pada awal April dan pada paruh kedua GDP China tercatat tumbuh positif.

Untuk negara berkembang selain China, proyeksi masih cukup mengkhawatirkan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti sistem kesehatan yang kewalahan menghadapi pandemi yang masih berlangsung, terpukulnya sektor-sektor penting seperti pariwisata, bertambahnya ketergantungan terhadap keuangan dari luar. Pada Tahun 2020, semua negara- negara ini mengalami kontraksi ekonomi termasuk negara-negara besar seperti India dan Indonesia.

Negara-negara Latin Amerika, seperti di region lainnya, akan mengalami kontraksi ekonomi cukup dalam. Sementara wilayah Timur Tengah dan Asia tengah diperkirakan akan mengalami penurunan produksi cukup tajam yang disebabkan oleh rendahnya harga minyak dunia, perang sipil dan krisis ekonomi. Untuk kedua region ini, *rebound* pada tahun 2021 belum mampu menutup kontraksi pada tahun sebelumnya.

Setelah *rebound* di Tahun 2021, proyeksi pertumbuhan ekonomi global akan kembali melambat pada kisaran 3.5 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebelum pandemi Covid- 19 melanda, pertumbuhan ekonomi global jangka menengah, periode 2020 – 2025, diproyeksikan berada pada level menengah.

3.1.2 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global

Sampai dengan triwulan III tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik yang tercermin pada pertumbuhan sebesar 5,05% (qtq) dari kontraksi 4,19% (qtq), atau kontraksi pertumbuhan yang berkurang menjadi -3,49 % (yoy) dari -5,32% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perbaikan ekonomi domestik terjadi pada hampir semua komponen PDB sisi pengeluaran.



Peningkatan realisasi stimulus Pemerintah, terutama berupa bantuan sosial, belanja barang dan jasa lainnya, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) berpengaruh kuat pada konsumsi pemerintah yang pada triwulan III 2020 tumbuh tinggi sebesar 9,76% (yoy), setelah sebelumnya berkontraksi sebesar -6,9% (yoy) pada triwulan II 2020. Dorongan stimulus tersebut dan mobilitas masyarakat yang membaik turut menopang perbaikan kontraksi konsumsi rumah tangga menjadi sebesar -4,04% (yoy). Kinerja investasi juga membaik menjadi -6,48% (yoy), terutama didorong investasi nonbangunan. Selain itu, kinerja ekspor mengalami kontraksi yang lebih kecil sebesar -10,82% (yoy) sejalan peningkatan mobilitas penduduk yang meningkat dan perbaikan kinerja mitra dagang utama Indonesia, terutama Tiongkok.

Tabel 3.2
Komponen Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penggunaan

No.	Komponen	2018	2019				2019	2020		
			I	II	III	IV		I	II	III
1	Konsumsi Rumah Tangga	5,05	5,02	5,18	5,01	4,97	5,04	2,83	-5,52	-4,04
2	Konsumsi LNPRT	9,1	16,96	15,29	7,41	3,53	10,62	-5,09	-7,75	-2,12
3	Konsumsi Pemerintah	4,8	5,22	8,23	0,98	0,48	3,25	3,75	-6,9	9,76
4	Investasi PMTDB	6,64	5,03	4,55	4,21	4,06	4,45	1,7	-8,61	-6,48
5	- Investasi Bangunan	5,41	5,48	5,46	5,03	5,53	5,37	2,76	-5,26	-5,6
	- Investasi Non Bangunan	10,31	3,69	1,96	1,95	-0,13	1,8	-1,46	-18,62	-8,99
6	Eksport	6,55	-1,58	-1,73	0,1	-0,39	-0,87	0,24	-11,66	-10,82
7	Import	11,88	-7,47	-6,84	-8,3	-8,05	-7,69	-2,19	-16,96	-21,86
	PDB	5,17	5,07	5,05	5,02	4,97	5,02	2,97	-5,32	-3,49

Sumber : Bank Indonesia

Di sisi Lapangan Usaha (LU), sebagian besar LU mengalami perbaikan, terutama LU yang terkait dengan penanganan COVID-19 dan aktivitas *new normal*. LU Informasi dan Komunikasi tumbuh tinggi seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam penerapan *Work from Home* (WFH) dan *School from Home* (SFH). LU terkait penanganan COVID-19 dan *new normal*, seperti LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, LU Jasa Pendidikan, dan LU Jasa Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, serta LU Real

Estat, tumbuh positif. Sebagian besar LU utama juga mulai menunjukkan perbaikan pada triwulan III 2020. Mobilitas masyarakat yang meningkat turut mendorong perbaikan kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, LU Transportasi dan Pergudangan serta LU Transportasi dan Pergudangan yang mencatat kontraksi yang lebih kecil. Selain itu, LU Industri Pengolahan menunjukkan perbaikan sejalan dengan optimisme atas prospek perbaikan ekspor.



Tabel 3.3
Komponen Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

No.	Komponen	2018	2019	2020		
				I	II	III
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,89	3,64	0,02	2,19	2,15
2	Pertambangan dan Penggalian	2,16	1,22	0,43	-2,72	-4,28
3	Industri Pengolahan	4,27	3,8	2,06	-6,19	-4,31
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,47	4,04	3,85	-5,46	-2,44
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,56	6,83	4,56	4,56	6,04
6	Konstruksi	6,09	5,76	2,9	-5,39	-4,52
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,97	4,62	1,6	-7,57	-5,03
8	Transportasi dan Pergudangan	7,06	6,4	1,29	-30,84	-16,7
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,68	5,8	1,95	-22,02	-11,86
10	Informasi dan Komunikasi	7,02	9,41	9,8	10,88	10,61
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,17	6,6	10,62	1,03	-0,95
12	Real Estate	3,48	5,74	3,79	2,3	1,98
13	Jasa Perusahaan	8,64	10,25	5,39	-12,09	-7,61
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7	4,67	3,16	-3,22	1,86
15	Jasa Pendidikan	5,35	6,29	5,89	1,21	2,44
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,15	8,68	10,39	3,71	15,33
17	Jasa lainnya	8,97	10,55	7,09	-12,6	-5,55
18	PRODUK DOMESTIK BRUTO	5,17	5,02	2,96	-5,32	-3,49

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Nasional

No.	Indikator	Realisasi	Proyeksi		
		2019*	2020**	2021***	2022****
1	Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,02	(1,7) – (0,6)	5,0	5,4 – 5,9
2	Inflasi (% , yoy)	2,72	1,5	3,0	2,0 – 4,0
3	Nilai tukar (Rp/US\$)	14.250***	14.650	14.600	N/A

Sumber : *) Badan Pusat Statistik, 2020

**) APBN 2021

***) RPJMN 2020-2023

Berdasarkan asumsi ekonomi Makro yang tercantum dalam APBN 2021 yang disusun oleh Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2021 diperkirakan sebesar 5,0 persen.



Selanjutnya untuk tingkat inflasi di tahun 2021 diperkirakan berada pada kisaran 3,0 persen. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp.14.600 per dolar AS.

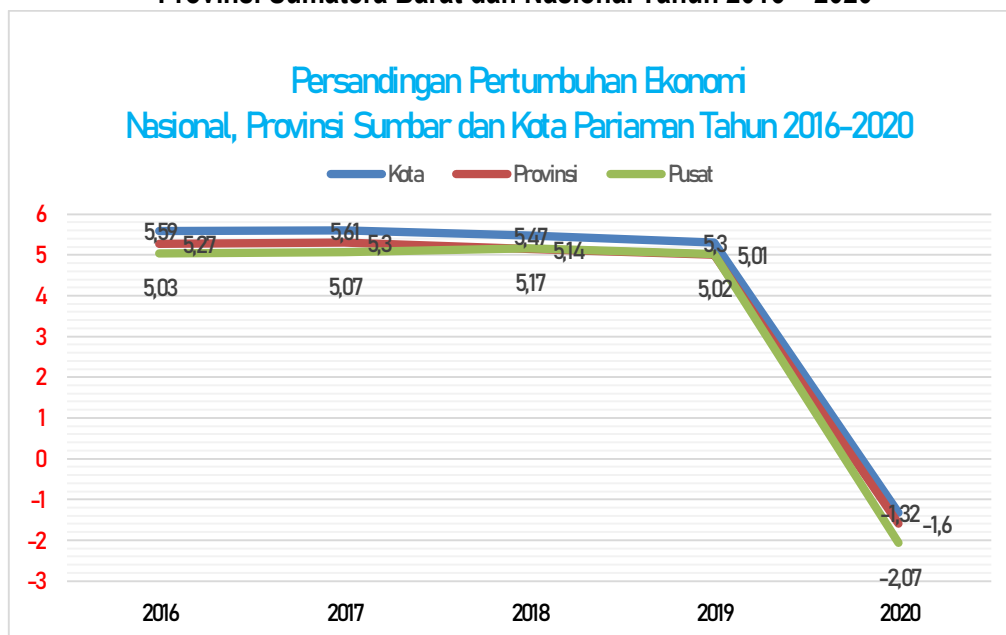
3.1.3 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Daerah

Secara umum kondisi perekonomian Kota Pariaman sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan global. Kondisi perekonomian Kota Pariaman selama kurun waktu tahun 2016 – 2020 mengalami pertumbuhan yang tidak stabil. Perekonomian Kota Pariaman pada triwulan III 2020 masih mengalami kontraksi namun membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, seiring dengan peningkatan stimulus fiskal di Kota Pariaman serta mobilitas masyarakat. Dari sisi pengeluaran, berkurangnya kontraksi perekonomian tersebut terutama disumbang oleh Konsumsi Pemerintah yang tumbuh positif, sementara komponen pengeluaran lainnya masih mengalami kontraksi. Peningkatan Konsumsi Pemerintah tersebut bersumber dari peningkatan belanja barang dan bantuan sosial dalam rangka menangani pandemi COVID-19.

Kondisi ekonomi makro selama lima tahun terakhir (tahun 2016 – 2020) menunjukkan kinerja yang cukup baik. Jika dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang merupakan kenaikan output agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian). Meskipun keadaan dari tahun ketahun cenderung menurun, namun LPE Kota Pariaman selalu diatas LPE Prov Sumatera Barat dan Nasional PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.



Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pariaman Dibandingkan Dengan
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016 – 2020



Sumber : 1) Pariaman dalam Angka 2021 dan 2) Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021

Pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif sebesar - 1,32 %. Pertumbuhan ekonomi ini yang negatif ini tidak hanya dialami oleh Kota Pariaman saja tetapi juga dialami oleh seluruh kota dan kabupaten di Sumatera Barat bahkan sektor pusat. Dari Grafik 2.7 diatas dapat dilihat bahwa angka pertumbuhan ekonomi negatif Kota Pariaman masih kecil jika dibandingkan pertumbuhan negatif Provinsi Sumatera Barat dan Pusat. Hal ini terjadi karena dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda di Kota Pariaman khususnya dan dunia umumnya yang melumpuhkan sebagian besar sektor kegiatan sejak awal tahun 2020 hingga sekarang. Tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman telah mencapai 5,59 %, tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan menjadi 5,61 %. Kemudian pada tahun 2018 dan 2019, turun lagi menjadi masing-masing 5,47 % dan 5,3 %. Dari tahun 2016 sampai 2019 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Berdasarkan informasi dari BPS, perlambatan ini jika dilihat sisi pengeluaran disebabkan oleh melemahnya komponen pembentukan modal tetap bruto.

PDRB Berdasarkan Pengeluaran

PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik



maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa. Dengan demikian PDRB Pengeluaran

menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis).

Tabel 3.5
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2015 – 2019
(Jutaan Rupiah)

Jenis Pengeluaran	PDRB Kota Pariaman Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.937.157,05	2.100.066,73	2.257.850,58	2.441.343,47	2.683.048,58
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	44.073,69	48.357,03	49.991,03	53.325,75	60.681,75
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	572.781,85	611.670,02	637.929,77	673.432,26	722.771,00
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.047.552,32	1.138.793,91	1.210.087,95	1.298.584,29	1.410.395,24
Perubahan Inventori	2.327,19	101.488,70	5.213,05	4.900,96	-1.608,09
Nilai Ekspor Barang Dan Jasa	95.551,47	36.365,54	147.937,42	145.271,88	133.094,05
PDRB	3.699.443,57	4.036.741,93	4.309.010,19	4.616.858,62	5.008.382,55

Sumber : Pariaman dalam Angka 2021

Tabel 3.6
PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran Tahun 2015 – 2019
(Jutaan Rupiah)

Jenis Pengeluaran	PDRB Kota Pariaman Atas Dasar Harga Konstan (Seri 2010) Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.464.023,62	1.534.804,36	1.617.031,42	1.701.908,82	1.785.629,60
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	35.563,76	37.265,45	38.989,07	40.746,03	45.172,71
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	413.704,03	418.499,97	419.053,60	432.449,43	451.983,29
Pembentukan Modal Tetap Bruto	798.333,13	849.430,67	885.400,34	919.777,39	966.702,46
Perubahan Inventori	2.042,27	81.490,90	3.791,75	3.474,38	-1.051,31
Nilai Ekspor Barang Dan	186.661,36	140.822,40	269.968,42	313.784,23	345.644,46



Jasa					
PDRB	2.900.328,17	3.062.313,75	3.234.234,60	3.412.140,28	3.594.081,21

Sumber : Pariaman dalam Angka 2021

a. PDRB/Pendapatan per kapita Kota Pariaman

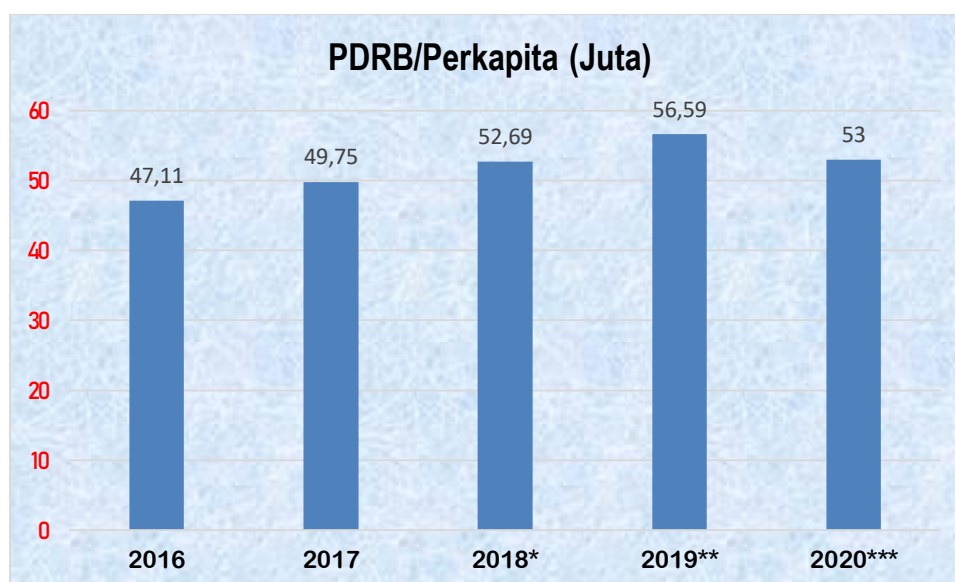
Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah; semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut.

Tabel 3.7
Pendapatan per kapita Kota Pariaman Tahun 2015 - 2019

Uraian	(Dalam Juta Rupiah)				
	2016	2017	2018*	2019**	2020***
PDRB ADHB (Juta)	4.036.741,93	4.309.010,19	4.616.858,61	5.008.382,53	4.994.102,88
Jumlah Penduduk	85.692	86.618	87.626	88.501	94.224
PDRB/Perkapita (Juta)	47,11	49,75	52,69	56,59	53

Sumber : Pariaman dalam Angka 2021

Grafik 3.2
Perkembangan Pendapatan Perkapita Kota Pariaman Tahun 2016-2020



Sumber : 1) Pariaman dalam Angka 2021



Perkembangan nilai PDRB/Pendapatan perkapita Kota Pariaman tahun 2016 sampai tahun 2020 tersaji dalam gambar 2.8 di atas. Dari gambar terlihat bahwa besarnya nilai pendapatan rata-rata penduduk Kota Pariaman setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya PDRB per kapita setiap tahunnya. Pada tahun 2016, nominal PDRB per kapita Kota Pariaman adalah Rp. 47,11 juta dan terus meningkat hingga tahun 2019 menjadi Rp. 56,69 juta. Namun PDRB perkapita Kota Pariaman Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 53 juta seiring dengan menurunnya PDRB Perkapita Kota Pariaman pada Tahun 2020 tersebut.

b. Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini merupakan hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0 – 1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Berikut adalah pembagian klasifikasi ketimpangan secara lebih detail:

No.	Uraian	Ket
a.	Indeks Gini < 0,3	: Ketimpangan Rendah
b.	0,3 ≤ Indeks Gini ≤ 0,5	: Ketimpangan Sedang
c.	Indeks Gini > 0,5	: Ketimpangan Tinggi

Grafik 3.3
Perkembangan Indeks Gini Kota Pariaman Tahun 2016-2020



Sumber : Pariaman dalam Angka 2021, Olahan

Grafik 2.9 menunjukkan perkembangan Indeks Gini Kota Pariaman tahun 2016 – 2020. Berdasarkan nilai Indeks Gini, Kota Pariaman memiliki kriteria ketimpangan sedang (moderat) pada tahun 2016 – 2019. Indeks gini Kota Pariaman selama rentang waktu 2016 – 2020 secara umum berfluktuasi. Pada tahun 2016 nilai Indeks Gini Kota Pariaman 0,338. Tahun 2017 turun menjadi 0,301. Dan pada tahun 2018 nilai Indeks



Gini Kota Pariaman naik menjadi 0,316. Kemudian pada tahun 2019 turun lagi dengan nilai 0,3. Kemudian pada tahun 2020 naik lagi dengan nilai 0,31. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan kategori ketimpangan pendapatan Kota Pariaman masih tergolong dalam kategori sedang (moderat).

3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Kota Pariaman ke depan tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi akibat dari COVID-19 yaitu penanganan dampak pada sektor ketenagakerjaan. Sektor yang menyerap tenaga kerja seperti industri, UMKM, dan pariwisata yang tidak dapat berjalan menghasilkan efek domino bagi kondisi ketenagakerjaan di Kota Pariaman. Hal ini dapat terlihat dengan meningkatnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tantangan yang dihadapi Kota Pariaman secara sektoral pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Tantangan pada sektor investasi dimasa pandemic Covid-10 adalah membangkitkan dan menumbuhkan semangat berinvestasi oleh sehingga kondisi investasi yang ideal untuk pembangunan ekonomi Kota Pariaman dapat tercapai.
- 2) Tantangan pada sektor industri terletak pada kondisi UMKM Kota Pariaman yang merupakan industri UMKM masyarakat, dan produk pangan olahan. Pandemi COVID-19 memiliki cukup dampak yang besar bagi UMKM baik termasuk juga bagi industri kecil, terutama dalam hal pemasaran produk hasil industri maupun dalam aspek penyediaan bahan baku sehingga mempengaruhi kinerja industri kecil Kota Pariaman secara keseluruhan. Oleh sebab itu tantangan sektor industri kecil adalah substitusi bahan baku impor, penyesuaian alur produksi terhadap protokol kesehatan dan percepatan revolusi industri 4.0;
- 3) Tantangan pada sektor pariwisata yaitu kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan/atau PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang berdampak pada penutupan sejumlah destinasi pariwisata, perhotelan, restoran, dan UMKM.
- 4) Tantangan pada sektor pangan terkait ketersediaan bahan pangan. Pada sisi produksi ketersediaan pangan Kota Pariaman cukup memadai tetapi sistem transportasi dan logistik pangan terganggu akibat pembatasan aktivitas, sehingga produk petani tidak bisa dipasarkan yang memicu rendahnya harga jual di tingkat petani; dan
- 5) Tantangan pada sektor ketenagakerjaan merupakan sektor yang mengalami dampak terbesar dalam pandemi COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya PHK dan karyawan yang dirumahkan sebagai akibat dari aktivitas usaha yang terhenti.



Prospek perekonomian Tahun 2021, pada Triwulan I tahun 2021 diberlakukan PPKM sehingga pergerakan ekonomi Triwulan I diperkirakan sama dengan Triwulan IV Tahun 2021, pada Triwulan I Vaksin COVID-19 sudah mulai terdistribusi untuk tenaga kesehatan dan Lansia, pada tahun 2021 diperkirakan vaksin COVID-19 telah terdistribusi dengan merata di seluruh Kota Pariaman.

Pembangunan infrastruktur padat karya pada tahun 2021 sudah dapat dilaksanakan, hal ini dapat menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang cukup besar. Pembukaan objek wisata alam, hotel, restoran mulai dilaksanakan dengan sertifikasi CHSE (*Cleanliness, Health, Safety dan Environment Sustainability*).

Pada Tahun 2022, diperkirakan vaksin telah didistribusikan secara merata di seluruh Kota Pariaman, telah terjadi *herd immunity* atau kekebalan secara populasi, sehingga dapat menekan jumlah kasus COVID-19. Penurunan Kasus COVID-19 akan berdampak pada perbaikan ekonomi. Industri sudah mendekati normal, Pariwisata sudah mulai bergerak, perdagangan luar dan dalam negeri sudah mulai membaik, pembangunan infrastruktur strategis sudah dimulai kembali. Secara umum, pada tahun 2022, perekonomian sudah mulai pulih walaupun belum kembali seperti tahun 2019. Laju Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 diperkirakan akan sama atau lebih besar dari 4 %.

Kondisi ekonomi daerah tahun 2022 tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor eksternal yang berdasar dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional. Dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang diperkirakan mempengaruhi perekonomian, tantangan yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2022 adalah:

- Potensi kenaikan inflasi yang berpotensi terjadi dari dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai akibat dari tren harga minyak dunia yang terus meningkat.
- Kondisi infrastruktur yang belum optimal akibat belum selesainya pembangunan infrastruktur untuk mempercepat akses pariwisata dan pertanian serta masih adanya beberapa titik jalan yang sering tergenang air yang sedikit banyaknya mengganggu distribusi barang dan jasa serta pergerakan masyarakat
- Jumlah penduduk yang semakin bertambah dan komposisi usia produktif yang cukup tinggi dibandingkan dengan usia non produktif merupakan tantangan bagi penyediaan lapangan pekerjaan. Keberadaan bonus demografi ini merupakan peluang untuk pengembangan perekonomian sekaligus tantangan dalam hal penyediaan sarana prasarana dasar kehidupan masyarakat yang memadai secara kuantitas dan kualitas
- Tingkat kemandirian yang ditunjukkan dengan persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pariaman dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2017-2020) tercatat rata-rata sebesar 6 %

dari total penerimaan pendapatan daerah. Hal ini mencerminkan bahwa penerimaan pendapatan daerah masih bergantung dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

- Dampak pandemik Covid-19 yang sudah melanda negara hampir di seluruh dunia. Dampaknya tidak hanya menyebabkan banyak kematian. Tetapi melumpuhkan perekonomian dunia yang mungkin akan dirasakan dampak 2 atau 4 tahun kedepan.

Selain tantangan, beberapa hal yang diharapkan akan mendukung prospek perekonomian Kota Pariaman di tahun 2022 antara lain:

- Kota Pariaman diprediksikan bakal menjadi kota kunjungan wisata yang semakin ramai pada 2022, menyusul sejumlah infrastruktur yang tengah dibangun segera rampung, seperti Pembangunan Pasar Pariaman, pengembangan/pembangunan beberapa objek wisata termasuk juga pembangunan objek wisata oleh masing-masing Desa di Kota Pariaman. Dimana semua ini nanti diharapkan akan menambah daya Tarik wisatawan untuk berkunjung ke Pariaman dan beberapa pembangunan/peningkatan jalan akan mempermudah pergerakan orang dan barang akan semakin lancar.
- Posisi Kota Pariaman yang cukup dekat dengan Bandara BIM sehingga dari sisi akses hal ini sangat menguntungkan Kota Pariaman. Perkembangan kota dan kabupaten di sekitar Kota Pariaman diharapkan juga semakin meningkatkan ekonomi Kota Pariaman dari sisi konsumsi masyarakat.
- Peluang pengembangan pasar pasca berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Dengan memperhatikan tantangan dan daya dukung yang ada di Kota Pariaman serta arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 maka prospek perekonomian daerah Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

- Pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman Tahun 2022 diprediksi akan mengalami pertumbuhan sebesar 3,5 – 4,0 % atau lebih tinggi dari prediksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2022 yang tercatat sebesar 3,2 % – 3,4 % dan target nasional tahun 2022 sebesar 5,4 % – 6 %
- Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif, diharapkan akan berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan. Pada tahun 2022, jumlah warga miskin diprediksi dapat menurun menjadi sebesar 3,90 %, melalui program/kegiatan pembangunan terpadu dalam penanganan kemiskinan.
- Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diprediksikan menjadi 4,80 % melalui upaya-upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja pada sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah

dan produktifitas tinggi. Selain itu, meningkatnya minat kewirausahaan (entrepreneurship) bagi pengusaha muda diharapkan dapat ikut mengurangi angka TPT di Kota Pariaman.

Tabel 3.8
Proyeksi Indikator Ekonomi Kota Pariaman 2022

No	Indikator	Realisasi		2020	2022	
		2018	2019		Target RPJMD	Target RKPD
1	LPE (%)	5,51	5,33	- 1,3	6,00	4,00
2	Persentase Pertumbuhan Investasi	1	1,1	1,2	1,3	1,3
3	TPT (%)	5,72	5,47	5,10	4,80	5,51
4	Kemiskinan (%)	5,03	4,76	4,10	4,20	3,90
5	Gini Ratio	0,316	0,300	0,310	0,240	0,295

Sumber : 1) Pariaman Dalam Angka 2020 dan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023

3.1.5 Proyeksi Tahun 2021 s.d 2022

Perkiraan membaiknya perekonomian dunia dan domestik serta didukung penyediaan vaksin COVID-19 hingga meningkatnya pembangunan infrastruktur dan telah dibukanya Objek Wisata serta telah beroperasinya Pasar Rakyat Pariaman pada tahun 2021 dan 2022, ekonomi Kota Pariaman diperkirakan akan tumbuh positif. Pada tahun 2021 LPE Kota Pariaman diperkirakan tumbuh sekitar 3,0 % – 3,5 % dan meningkat pada tahun 2022 dan 2023 sekitar 4,0 % dan 4,5 %

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 31 ayat (1), ada 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (i) pajak daerah; (ii) retribusi daerah; (iii) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (iv) lain-lain PAD yang sah.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prosep perekonomian daerah, serta dengan memperhatikan kinerja pelaksanaan APBD Kota Pariaman, maka realisasi dan proyeksi penerimaan pendapatan Kota Pariaman diuraikan sebagai mana tabel 3.5





Tabel 3.9
Realisasi Pendapatan Kota Pariaman Tahun 2017 s/d 2020 dan Target Pendapatan Tahun 2022

	Uraian	Realisasi			Uraian	Realisasi	Target
		2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)		2020 (Rp)	(RKPD) 2022 (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	30.881.846.112	32.213.303.036	36.665.174.233	Pendapatan Asli Daerah	32.961.765.488	45.500.928.276
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	8.304.791.195	9.982.897.861	10.064.592.853	Pendapatan Pajak Daerah	10.067.079.783	10.990.000.000
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.369.770.163	4.184.671.257	4.390.195.539	Hasil Retribusi Daerah	6.635.664.791	12.667.428.276
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.290.774.658	4.752.048.233	6.673.276.954	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.242.632.803	8.539.000.000
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.916.510.096	13.293.685.685	15.537.108.886	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.016.388.111	13.304.500.000
4.2	Dana Perimbangan	522.676.988.201	559.697.541.700	596.967.652.126	Pendapatan Tranfers Pemerintah Pusat	586.837.360.678	602.713.213.031
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	14.355.010.047	11.588.903.939	9.686.847.678	Dana Perimbangan	<u>487.508.161.619</u>	<u>519.026.058.117</u>
4.2.2	Dana Alokasi Umum	415.241.327.000	415.241.327.000	428.104.412.000	Dana Bagi Hasil	11.967.958.117	11.690.020.817
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	85.580.651.154	83.096.934.607	88.505.092.453	Dana Alokasi Umum (DAU)	389.252.498.000	421.044.044.300
4.2.4	Dana Desa	-	41.270.376.154	48.050.233.995	Dana Alokasi Khusus	86.287.705.502	86.291.993.000
4.2.5	Dana Insentif Daerah (DID)	7.500.000.000	8.500.000.000	22.621.066.000	DID	7.148.713.000	7.148.713.000
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	85.111.754.450	35.258.277.027	39.900.446.486	Dana Desa	49.758.531.000	49.758.531.000
4.3.1	Pendapatan Hibah	12.638.983.711	12.081.503.949	12.331.560.000	Pendapatan Tranfers Antar Pemerintah Daerah	26.779.910.914	26.779.910.914
4.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.836.260.931	23.176.773.078	27.568.886.486	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	26.779.910.914	26.779.910.914
4.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.850.000.000	0	0	Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	16.878.706.228	16.878.706.228
4.3.4	Pendapatan Lainnya	44.148.673.000	0	0	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	5.000.000.000	5.000.000.000
4.3.5	Dana Desa	0	0	0	Pendapatan Hibah Dana BOS	11.878.706.228	11.878.706.228
4.3.6	Dana Insentif Daerah	0	0	0			





4.3.7	Dana BOS	0	0	0			
Jumlah Pendapatan Daerah		639.032.751.955	627.169.121.763	673.533.272.845		632.222.867.998	665.092.847.535

Sumber : 1) LRA (2018-2020), 2) APBD Murni 2021, 3) Perda No.3 tentang RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023



1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam upaya peningkatan PAD Pemerintah Kota Pariaman telah melakukan kebijakan-kebijakan dalam penggalian terhadap sumber-sumber penerimaan PAD. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 realisasi penerimaan PAD terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 realisasi penerimaan PAD menurun tercatat sebesar Rp. 32.961.765.488,-. Ini disebabkan Pandemi Covid-19 yang melanda hampir semua Negara di Dunia termasuk juga Kota Pariaman khususnya dimana Dimana sejak Covid-19 melanda aktivitas masyarakat dibatasi akibat perekonomian menjadi lesu. Tahun 2022 PAD proyeksikan dalam RKPD mencapai sebesar Rp. 45.500.928.276,-

2) Pendapatan Tranfer

Realisasi penerimaan pendapatan dari pos dana perimbangan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, hal tersebut menunjukan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam menggali potensi penerimaan pendapatan dari pos dana perimbangan menunjukan kinerja yang baik.

Pada tahun 2017 penerimaan pendapatan dari pos dana perimbangan adalah sebesar Rp 522.676.988.201,- . Dan pada tahun 2019 dana perimbangan ini meningkat menjadi Rp. 596.967.652.126,-. Kemudian sejak pada tahun 2020 dengan telah berlakunya PP 12 Tahun dana perimbangan diganti dengan istilah Pendapatan Transfers. Dan untuk tahun 2022 pendapatan transfers diproyeksikan sebesar Rp. 602.713.213.031,-

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Penerimaan pendapatan dari pos Lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 85.111.754.450,- mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi Rp. 39.900.446.486,-. Penurunan ini lebih disebabkan karena pergeseran penempatan dana desa dari semula pada tahun 2017 ditempatkan pada lain-lain pendapatan yang sah. Namun pada tahun 2019 ini dana desa ini ditempatkan pada pos dana perimbangan. Kemudian pada tahun 2020 penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah turun lagi menjadi 16.878.706.228,- . Penurunan ini disebabkan karena terjadi lagi pergeseran penempatan alokasi dari pendapatan itu sendiri. Sedangkan untuk 2022 Lain-lain pendapatan yang sah diproyeksikan sebesar Rp. 16.878.706.228,-



Dilihat dari komposisi penerimaan pendapatan, Pendapatan Transfers menempati porsi terbesar dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 91 %, diikuti PAD sebesar 6,84 % dan disusul oleh sektor Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 2,16 %.





Tabel 3.10
Persentase Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kota Pariaman
Tahun 2017-2020 dan Proyeksi Tahun 2020 (RKPD dan RPJMD)

Kode	Uraian	2017	2018	2019	2020	2022 (RKPD) **)	2022 (RPJMD) ***)
		Kontribusi (%)	Kontribusi (%)	Kontribusi (%)	Kontribusi (%)	Kontribusi (%)	Kontribusi (%)
1.1	PAD	4,83	5,14	5,44	8,11	6,84	5,45
1.2	DANA PERIMBANGAN	81,79	89,24	88,63	76,30	91	88,79
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	13,32	5,62	5,92	15,60	2,16	5,76
Total Persentase		100	100	100	100	100	100

Sumber : 1) LRA (2018-2020), 2) APBD Murni 2021, 3) Perda No.3 tentang RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023



Dari proyeksi di atas, untuk tahun 2022, proporsi terbesar pendapatan daerah direncanakan berasal dari Pendapatan Transfers Pusat. Dari sisi potensi PAD memang masih bisa di optimalkan. Tentu hal ini menuntut Pemerintah Kota untuk menggali sumber pembiayaan yang lain dengan tetap berupaya memaksimalkan potensi PAD yang masih dapat ditingkatkan.

Pendapatan Transfers berasal dari dana yang berasal dari non APBD (Dana Pusat) yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (fiscal gap) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (fiscal need) dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity). Dengan tidak adanya lagi celah fiskal maka ketergantungan terhadap non APBD juga makin kecil, sehingga pemerintah kota akan lebih optimal dalam mengembangkan sendi-sendi perekonomian daerah. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut diperlukan upaya-upaya yang meminimalisir guna meningkatkan proporsi pendapatan yang bersumber dari PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dengan melihat kontribusi dan pertumbuhan pada masing-masing pos Pendapatan yang diuraikan tersebut di atas, maka kerangka pendanaan pendapatan daerah tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 665.092.847.535,- atau lebih tinggi 6 % dibanding APBD tahun 2021 atau selisih Rp. 38.276.731.300,-



Tabel 3.11
Proyeksi Penerimaan Pendapatan Kota Pariaman Tahun 2022

No.	URAIAN	(RPJMD) 2022 (Rp)	Uraian	(RKPD) 2022 (Rp)
1				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	50.749.420.736	Pendapatan Asli Daerah	45.500.928.276
-	Pendapatan Pajak Daerah	13.395.989.230	Pendapatan Pajak Daerah	10.990.000.000
-	Hasil Retribusi Daerah	9.281.806.249	Hasil Retribusi Daerah	12.267.428.276
-	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.146.735.615	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.539.000.000
-	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	19.924.889.642	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.304.500.000
1.2	Dana Perimbangan	809.869.674.042	Pendapatan Transfers Pemerintah Pusat	602.713.213.031
-	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	16.944.324.782	Dana Perimbangan	519.026.058.117
-	Dana Alokasi Umum	571.657.003.808	Dana Bagi Hasil	11.690.020.817
-	Dana Alokasi Khusus	133.018.923.466	Dana Alokasi Umum (DAU)	421.044.044.300
-	Dana Desa	54.654.569.800	Dana Alokasi Khusus	86.291.993.000
-	Dana Insentif Daerah (DID)	30.108.638.846	DID	7.148.713.000
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	50.749.164.039	Dana Desa	49.758.531.000
-	Pendapatan Hibah	-	Pendapatan Transfers Antar Pemerintah Daerah	26.779.910.914
-	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	33.841.293.309	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	26.779.910.914
-	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.000.000.000	Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	16.878.706.228
-	Pendapatan Lainnya	-	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	5.000.000.000
-	Dana Desa	-	Pendapatan Hibah Dana BOS	11.878.706.228
-	Dana Insentif Daerah	-		
-	Dana BOS	12.267.870.730		
Jumlah Pendapatan Daerah		907.882.045.477		665.092.847.535

Sumber : 1) BPKPD, 2021 2) Perda No.3 tentang RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keutamaan kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Pemerintah Kota Pariaman dalam rangka

meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan, ditempuh melalui arah kebijakan keuangan daerah dengan uraian sebagai berikut.



3.2.2.1 Arah Kebijakan pendapatan daerah

Efektifitas penyelenggaraan pemerintah tidak terlepas dari kapasitas keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pariaman. Kebijakan belanja pembangunan daerah akan mempertimbangkan kapasitas fiskal yang dimiliki. Arah kebijakan keuangan daerah dalam kerangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah Kota Pariaman tahun 2022 antara lain

:

1. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui:
 - a. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, terutama pajak yang memiliki potensi besar seperti PBB, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame;
 - b. Pembenahan manajemen penerimaan PAD, melalui pemanfaatan IT dan kerjasama perbankan melalui e-tax, penghapusan denda administrasi, dan updating objek pajak pada kawasan berkembang;
 - c. Meningkatkan retribusi Parkir Pinggir Jalan melalui metode parkir berlangganan;
 - d. Meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi melalui evaluasi dan revisi secara berkala terhadap peraturan daerah pajak dan retribusi terutama yang menyangkut penyesuaian tarif;
 - e. Mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sah
3. Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
4. Mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan lainnya, melalui dana CSR.



3.2.2.2 Arah Kebijakan belanja daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, baik melalui belanja operasi maupun belanja program dan kegiatan. Belanja Daerah Kota Pariaman selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2017-2022) rata-rata mengalami peningkatan sebesar 14,89 % per tahun.





Tabel 3.12
Realisasi Belanja Tahun 2017 s/d 2022 dan Target Belanja 2020 serta Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022

NO	Uraian	Realisasi			Uraian	Realisasi 2020	Target 2021	Proyeksi (2022)
		2017	2018	2019				
1.1	BELANJA				Belanja	645.135.093.144	659.718.564.007	648.480.755.235
-	BELANJA TIDAK LANGSUNG	305.401.002.419	329.318.278.815	354.740.513.629	Belanja Operasi	521.155.012.421	449.463.447.583	451.201.053.811
-	Belanja Pegawai	196.265.256.699	226.490.770.521	253.475.262.165	Belanja Pegawai	261.891.125.789	248.955.584.256	250.955.584.256
-	Belanja Hibah	13.103.800.000	6.288.113.020	3.550.600.000	Belanja Barang	163.630.577.300	192.430.504.998	192.168.111.226
-	Belanja Bantuan Sosial	5.338.750.000	4.483.229.000	2.572.500.000	Belanja Hibah	1.760.600.000	2.384.778.329	2.384.778.329
-	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	763.246.055	1.299.609.679	1.242.668.546	Belanja Bantuan Sosial	0	5.692.580.000	5.692.580.000
-	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	89.929.949.665	90.756.556.595	93.899.482.918				
-	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	Belanja Modal	94.872.709.332	108.356.978.566	95.381.563.566
					Belanja Tanah	2.663.337.991	0	0
					Belanja Peralatan dan Mesin	40.032.441.637	19.590.393.291	15.590.393.291
					Belanja Bangunan dan Gedung	20.529.078.105	24.126.908.211	18.126.908.211
					Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	26.136.217.098	64.598.813.464	61.623.398.464
					Belanja Aset Tetap dan Lainnya	5.138.464.611	40.863.600	40.863.600





					Belanja Tidak Terduga	28.043.161.776	5.000.000.000	5.000.000.000
					Belanja Transfers	1.467.379.505	96.898.137.858	96.898.137.858
					Bagi Hasil Pajak	898.793.424	2.365.742.827	2.365.742.827
					Bagi Hasil Retribusi	568.586.081	94.532.395.031	94.532.395.031
1.2	BELANJA LANGSUNG	335.910.900.578	305.463.362.348	348.722.778.449				
-	Belanja Pegawai	22.528.494.750	8.943.672.000	15.981.824.230	-	0	0	0
-	Belanja Barang dan Jasa	160.089.255.624	164.089.091.767	176.346.311.538	-	0	0	0
-	Belanja Modal	153.293.150.203	132.430.598.581	156.394.642.681	-	0	0	0
	Jumlah Belanja	641.311.902.997	627.169.121.763	703.463.292.078		645.135.093.144	659.718.564.007	648.480.755.235

Sumber : 1) BPKPD, 2021 2) Perda No.3 tentang RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023



Porsi belanja daerah dari tahun 2017 s/d 2019 antara Belanja Tidak Langsung dengan Belanja Langsung berada dalam posisi berimbang dan porsi Belanja Tahun 2020 s.d 2022 (Berdasarkan PP 12 Tahun 2019) sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.10 hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Kota Pariaman dalam melaksanakan program/ kegiatan daerah.



Tabel 3.13
Prosentase Kontribusi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung daerah Tahun 2017 s/d 2019 dan Proporsi Belanja Tahun 2020-2022
Berdasarkan PP 12 Tahun 2019

Kode	Uraian	Realisasi			Uraian	Proyeksi		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
1.1	BELANJA				Belanja			
a	Belanja Tidak Langsung	48	52	50	Belanja Operasi	80,78	68,13	69,58
b	Belanja Langsung	52	48	50	Belanja Modal	14,71	16,42	14,71
					Belanja Tidak Terduga	4,35	0,76	0,77
					Belanja Tranfers	0,23	14,69	14,94
	Total Persentase	100	100	100		100	100	100

Sumber : 1) BPKPD, 2021 2) Perda No.3 tentang RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023



Belanja Daerah tahun 2022 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan Belanja pada tahun 2022 adalah:

1. Gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Di tahun 2022 belanja gaji PNSD disusun dengan mengantisipasi rencana pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14, access dan kenaikan tunjangan-tunjangan serta rencana penambahan CPNS;
2. Anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) di tahun 2022 berpedoman pada ketetapan tentang tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan nilai yang meningkat sebesar 5 % dari alokasi TPP di tahun 2021. Peningkatan pemberian TPP ini karena adanya penambahan PNS.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana lainnya.
4. Penganggaran hibah dan bansos di tahun 2022 dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Belanja bantuan keuangan partai politik disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja langsung merupakan belanja yang kinerja dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan belanja langsung pada tahun 2022 antara lain :

1. Penganggaran belanja program dan kegiatan diimplementasikan melalui program dan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Perda Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023 dan RPJPD 2005-2025 dengan memperhatikan isu-isu strategis dan permasalahan mendesak yang harus ditangani di tahun 2022.
2. Penganggaran Belanja program dan kegiatan disusun berdasarkan target capaian kinerja yang jelas dan terukur yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran.
3. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah maka belanja daerah diprioritaskan dalam upaya pencapaian sasaran dan target pembangunan.
4. Penganggaran belanja perjalanan dinas, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, dibatasi frekuensi dan jumlah harinya serta memperhatikan target kinerja yang ingin dicapai dari perjalanan dinas tersebut.
5. Penganggaran Belanja program dan kegiatan disusun dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam rangka pencapaian sasaran program dan kegiatan secara efektif dan efisien.
6. Dalam rangka mendukung tercapainya keterpaduan kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Pariaman dengan kebijakan dan prioritas pembangunan di Provinsi dan Nasional, dilakukan sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional di tahun 2022.
7. Pekerjaan pengadaan serta biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pengadaan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Kota Pariaman dari tahun 2017-2020 sebagian bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan



Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukkan sebagai pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.

Penerimaan Pembiayaan daerah diarahkan tidak hanya fokus dari pemanfaatan SiLPA sebagai sumber utama penerimaan, namun nanti kedepan juga diupayakan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber penerimaan lain yaitu: 1. Revitalisasi dan restrukturisasi BMUD; 2. Kerjasama pemerintah dengan swasta; 3. Rencana penerbitan obligasi daerah.

Pengeluaran pembiayaan daerah pada RKPD tahun 2022 direncanakan untuk Penyertaan Modal untuk Bank Nagari.



Tabel 3.14
Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 s/d 2020 dan Target Pembiayaan Tahun 2021
serta Proyeksi Pembiayaan Tahun 2022

		Realisasi				Target 2021	Proyeksi 2022
		2017	2018	2019	2020		
3.	PEMBIAYAAN DAERAH						
3.1	Penerimaan Pembiayaan						
-	Penggunaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA	77.189.993.671	63.687.634.270	54.275.114.870	64.893.861.921	31.975.415.000	49.850.000.000
-	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
-	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
-	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
-	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman / Hibah (Dana Bergulir UKM.)	-	-	-	-	-	-
-	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	77.189.993.671	63.687.634.270	54.275.114.870	64.893.861.921	31.975.415.000	49.850.000.000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan						
-	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
-	Penyertaan Modal	11.183.000.000	1.800.000.000	-	8.650.000.000	-	10.000.000.000
-	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-	-	-	-
-	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-





	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11.183.000.000	1.800.000.000	-	8.650.000.000	-	
	Pembiayaan Netto	66.006.993.671	61.887.634.270	54.275.114.870	56.243.861.921	31.975.415.000	39.850.000.000

Sumber : 1) BPKPD, 2020 2) Perda No.3 tentang RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023



Tahun 2022 diproyeksikan penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 49.850.000.000,- yaitu penerimaan pembiayaan daerah Kota Pariaman yang berasal dari penerimaan dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA). Sedangkan pada pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000.000,- yang gunakan untuk penyertaan modal pada Bank Nagari.

Tabel 3.15
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Pariaman Tahun 2022

Kode	Uraian	2022 RKPD**)	2022 RPJMD***)	Selisih (Rp)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
-	Penggunaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA	49.850.000.000	34.899.062.906	14.950.937.094
-	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
-	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-
-	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
-	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman / Hibah (Dana Bergulir UKM.)	-	-	-
-	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	49.850.000.000	34.899.062.906	14.950.937.094
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
-	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
-	Penyertaan Modal	10.000.000.000	10.000.000.000	-
-	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-
-	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000	10.000.000.000	-
	Pembiayaan Netto	39.850.000.000	24.899.062.906	14.950.937.094

Sumber : 1) BPKPD, 2021 2) Perda No.3 tentang RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023

Dari uraian arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi proyeksi pendapatan, proyeksi belanja daerah dan proyeksi pembiayaan daerah Kota Pariaman Tahun 2022 tersebut diatas maka dapat dihitung kemampuan Pemerintah Kota Pariaman dalam membiayai program-program pembangunan Tahun 2022. Dari uraian proyeksi pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Kota Pariaman tersebut di atas, secara total proyeksi kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah Kota Pariaman Tahun 2022



adalah sebesar Rp. 714.942.847.535. Dan diperkirakan penerimaan dari pembiayaan daerah sebesar Rp. .49.850.000.000,- yang berasal dari SilPa. Secara rinci proyeksi penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Kota Pariaman tahun 2022 sebagaimana tabel 3.13

Tabel 3.16
Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan
Kota Pariaman Tahun 2021

NO	Uraian	RPJMD 2022 (Rp)	Uraian	RKPD 2022 (Rp)
1.	PENDAPATAN DAERAH		PENDAPATAN DAERAH	
-	Pendapatan Asli Daerah	50.749.420.736	Pendapatan Asli Daerah	45.500.928.276
-	Dana Perimbangan	809.869.674.042	Pendapatan Transfers Pemerintah Pusat	602.713.213.031
-	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	50.749.164.039	Pendapatan Transfers Antar Pemerintah Daerah	26.779.910.914
			Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	16.878.706.226
	Jumlah Pendapatan (1)	907.882.045.477	Jumlah Pendapatan (1)	665.092.847.535
2	PEMBIAYAAN		PEMBIAYAAN	
-	Penerimaan Pembiayaan	-	Penerimaan Pembiayaan	-
-	Penggunaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	39.734.373.812	Penggunaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	49.850.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (2)	39.734.373.812	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (2)	49.850.000.000
	Total Penerimaan Pembiayaan (1 + 2)	868.898.864.992	Total Penerimaan Pembiayaan (1 + 2)	714.942.847.535

Sumber : 1) Perda No.3 tentang RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023

Dengan mempertimbangkan kebijakan dan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut di atas, maka untuk melihat kemampuan pembiayaan pembangunan di tahun 2022, perlu untuk menghitung kebutuhan wajib dan mengikat yang harus disediakan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di Kota Pariaman seperti terlihat pada tabel 3.14 di bawah ini:



Tabel 3.17
Perhitungan Kebutuhan Belanja & Pengeluaran Pembiayaan Daerah Yang
Mengikat Pada RKPD Kota Pariaman Tahun 2022

NO	Uraian	Proyeksi RKPD 2022 (Rp)
A.	Belanja :	483.192.438.839
-	Belanja Gaji + Tunjangan Pegawai + Gaji P3K	170.045.631.083
-	Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah + BOP	512.651.000
-	Gaji Anggota DPRD + Tunjangan	9.520.452.596
-	Belanja TPP	60.000.000.000
-	Belanja IWP BPJS	19.000.000.000
-	Belanja Transfers Daerah (ADD + DD) Desa	99.385.671.578
-	Belanja Dana DAK Fisik	39.527.878.000
-	Belanja Dana DAK Non Fisik	41.483.913.000
-	Belanja Dana JKN	3.411.000.000
-	Belanja BOK Puskesmas	5.281.499.750
-	Belanja Dana BOS	12.423.741.832
-	Alokasi Dana Kelurahan	17.600.000.000
-	Belanja BTT	5.000.000.000
B.	Pembiayaan	
-	Penyertaan Modal Bank Nagari	10.000.000.000,-
TOTAL PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT (A + B)		493.192.438.839

Sumber : 1) BPKPD, 2021

Total pengeluaran belanja wajib dan mengikat diatas menjadi dasar dalam menentukan rumusan kapasitas riil keuangan daerah dalam membiayai program/ kegiatan pembangunan di Kota Pariaman tahun 2022.

Tabel 3.18
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kota Pariaman Tahun 2022

NO	Uraian	Proyeksi RKPD 2022 (Rp)
1.	Penerimaan Pendapatan	665.092.847.535
2.	Pencairan dana cadangan	-
3	Sisa lebih riil perhitungan anggaran sebelumnya (SILPA)	49.850.000.000
-	Total Penerimaan	714.942.847.535
	Dikurangi :	
4.	Total Pengeluaran Wajib dan Mengikat	493.192.438.839
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	221.750.408.696

Sumber : 1) Bappeda, 2021



Tabel 3.19
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah (Pengeluaran
Wajib Tidak Mengikat) Kota Pariaman Tahun 2022

NO	Kapasitas Riil/Belanja		Proyeksi RKPD 2022 (Rp)
1.	Kapasitas riil kemampuan keuangan		221.750.408.696
-	Belanja Bansos	0	
-	Belanja Hibah	5.000.000.000	
-	Belanja Program	216.750.408.696	
	Dikurangi		<u>221.750.408.696</u>
	Defisit/Surplus Tahun Berkenaan		-

Sumber : 1) Bappeda, 2021

Dari uraian tersebut di atas, diperoleh kemampuan riil keuangan Daerah tahun 2021 sebesar Rp 221.750.408.696,- Dengan perkiraan kebutuhan Belanja Hibah sebesar Rp. 5.000.000.000,- maka yang dapat dimanfaatkan untuk belanja program/ kegiatan Perangkat Daerah di luar kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya (earmarking) adalah sebesar Rp. 216.750.408.696,-. Dari besarnya anggaran belanja Program tersebut diharapkan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran untuk melaksanakan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota yang termuat pada RPJMD Tahun 2018-2023.



Tabel 3.20
Proyeksi Struktur Keuangan Daerah Tahun 2022

NO	Uraian	RKPD 2022 (Rp)
A	PENDAPATAN	665.092.847.535
I	Pendapatan Asli Daerah	45.500.928.276
-	Pendapatan Pajak Daerah	10.990.000.000
-	Hasil Retribusi Daerah	12.267.428.276
-	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.539.000.000
-	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.304.500.000
II	Pendapatan Transfers Pemerintah Pusat	602.713.213.031
-	Dana Perimbangan	519.026.058.117
-	Dana Bagi Hasil	11.690.020.817
-	Dana Alokasi Umum (DAU)	421.044.044.300
-	Dana Alokasi Khusus	86.291.993.000
-	DID	7.148.713.000
-	Dana Desa	49.758.531.000
III	Pendapatan Transfers Antar Pemerintah Daerah	26.779.910.914
-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	26.779.910.914
IV	Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	16.878.706.228
-	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	5.000.000.000
-	Pendapatan Hibah Dana BOS	11.878.706.228
B	Belanja	648.480.755.235
I	Belanja Operasi	451.201.053.811
-	Belanja Pegawai	250.955.584.256
-	Belanja Barang	192.168.111.226
-	Belanja Hibah	2.384.778.329
-	Belanja Bantuan Sosial	5.692.580.000
II	Belanja Modal	95.381.563.566
-	Belanja Tanah	0
-	Belanja Peralatan dan Mesin	15.590.393.291
-	Belanja Bangunan dan Gedung	18.126.908.211
-	Belanja Jalan ,Irigasi dan Jaringan	61.623.398.464
-	Belanja Aset Tetap dan Lainnya	40.863.600
III	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
IV	Belanja Transfers	96.898.137.858
	Bagi Hasil Pajak	2.365.742.827
	Bagi Hasil Retribusi	94.532.395.031
C	PEMBIAYAAN DAERAH	



	Penerimaan Pembiayaan	
	Penggunaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA	49.850.000.000
	Pencairan Dana Cadangan	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman / Hibah (Dana Bergulir UKM.)	-
	Penerimaan Piutang Daerah	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	49.850.000.000
	Pengeluaran Pembiayaan	
	Pembentukan Dana Cadangan	
	Penyertaan Modal	10.000.000.000
	Pembayaran Pokok Hutang	
	Pemberian Pinjaman Daerah	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
	Pembiayaan Netto	39.850.000.000

Sumber : 1) Bappeda, 2021



BAB IV

Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2019-2023, sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi tahun bersangkutan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah. Sehingga untuk mencapai kesinambungan prioritas pembangunan Kota Pariaman maka penyusunan RKPD Kota Pariaman Tahun 2022 harus selaras dan sinergi dengan RPJMD Kota Pariaman Periode Tahun 2018-2023 tahun keempat.

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, (4) pendekatan perencanaan dari bawah (bottom up) dan (5) pendekatan perencanaan dari atas (top down).

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Pariaman dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan Kota Pariaman sebagaimana RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Sumatera Barat maupun Tingkat Nasional.

Visi pembangunan daerah sebagaimana RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 yaitu "**Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya**" Perwujudan Visi tersebut mengandung maksud bahwa Pariaman sebagai kota kecil berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam wisata, perdagangan dan jasa, yang religious dan berbudaya dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, agama dan budaya.



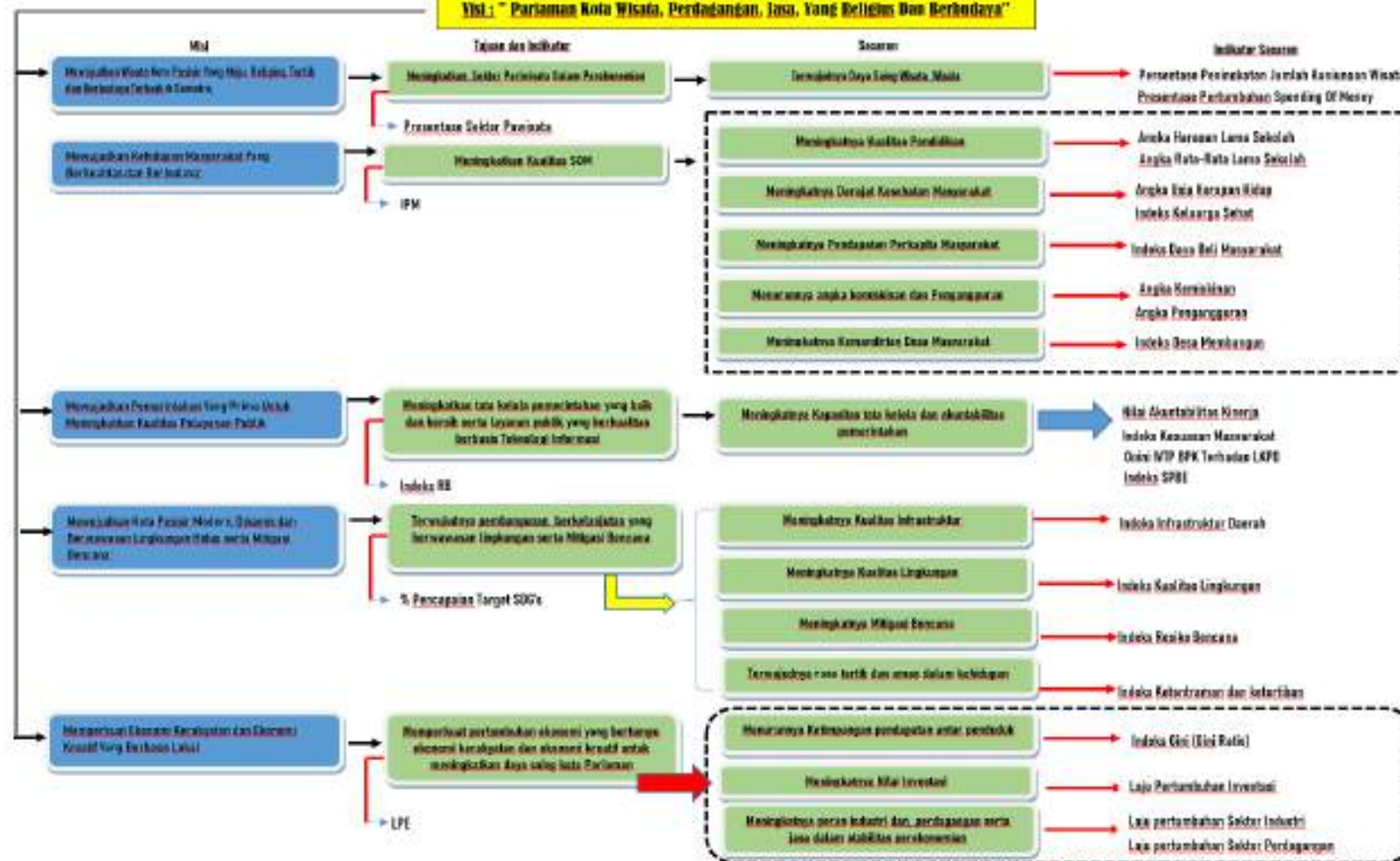
Untuk memahami Visi Pembangunan Kota Pariaman tersebut jelaskan pengertian sebagai berikut:

- Kota Wisata** : Kota Pariaman diarahkan sebagai kota tujuan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun domestik. Dengan gerakan yang menyatukan seluruh potensi daerah dan stakeholder dalam penyediaan sarana pariwisata dan prasarana wisata atau fasilitas umum sehingga menarik wisatawan untuk datang ke destinasi wisata yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Perdagangan dan Jasa** : mengandung arti bahwa Kota Pariaman akan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang maju, yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Pariaman. Kota Pariaman yang maju dalam perdagangan dan jasa dapat terlihat antara lain melalui laju pertumbuhan ekonomi yang tiap tahun terus meningkat, kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB dan kontribusi kategori Industri Pengolahan serta terhadap PDRB yang semakin meningkat serta nilai investasi yang semakin besar
- Religius** : mengandung arti bahwa masyarakat Kota Pariaman meyakini kebenaran ajaran Agama Islam serta mengamalkannya dalam wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tindakan nyata dalam keseharian, dengan menjunjung tinggi toleransi dan kepedulian dalam menjalankan kehidupannya.
- Berbudaya** : mempunyai arti bahwa setiap perilaku kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diyakini sebagai nilai-nilai budi pekerti yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial sebagai identitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.



Grafik 4.1 Kerangka Logis Pencapaian Visi RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023

Visi: "Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya"



Dalam rangka mewujudkan visi jangka menengah Kota Pariaman sebagai Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya" maka misi Kota Pariaman dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya Terbaik di Sumatra;
2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berbudaya;
3. Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Smart City;
4. Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana;
5. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal.

Lima butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah di temakan dalam bentuk Visi pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir misi, maka penjabaran Misi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya Terbaik di Sumatra

Pembangunan diprioritaskan pada pembangunan destinasi wisata dan peningkatan pengelolaan wisata yang maju, religius, tertib dan berbudaya dengan cara meningkatkan daya saing pariwisata adalah bagaimana cara menarik minat para wisatawan untuk datang berkunjung yang tentunya akan mendatangkan devisa dan menciptakan nilai tambah *multipliers effect* terhadap akselerasi pembangunan daerah. Kota Pariaman yang kaya akan nilai sejarah, seni dan budaya dapat dikembangkan untuk tujuan pelestarian sejarah, seni dan budaya islam. Semua daya pesona tersebut memberi nilai tambah diiringi dengan usaha minat wisatawan untuk menikmati berbagai objek wisata serta hasil industri kreatif yang ada. Selain itu perlu jaminan wisata yang mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya yang tertib.

2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berbudaya

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta menjunjung tinggi budaya asli Kota Pariaman. Misi membangun sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi, berbudaya, dan berkualitas melalui penguasaan iptek serta memiliki etos kerja yang tinggi ditandai dengan meningkatnya status kesehatan dan taraf pendidikan masyarakat dengan ukuran penilaian dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengembangan dan Peningkatan mutu SDM dapat dilihat dari tiga



dimensi, yaitu kualitas pendidikan yang bermutu tinggi disemua strata, perkembangan IPTEK yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan derajat kesehatan yang tinggi dan merata keseluruh pelosok daerah dan lapisan masyarakat. Termasuk dalam kualitas sumberdaya manusia ini adalah adanya disiplin dan etos kerja yang tinggi serta terdapatnya kesetaraan gender sehingga produktivitas tinggi tersebut mampu memanfaatkan peluang, dapat menghadapi tantangan dan siap mengantisipasi kompetisi global.

3. Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City.

Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan berbasiskan Smart City.

4. Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana;

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan Kota Pesisir Yang Modern yang ditunjukan dengan peningkatan kualitas insfrastruktur, pengembangan water front city, peningkatan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing. Dengan tetap memperhatikan pembangunan yang dinamis, berwasasan lingkungan hidup serta mitigasi bencana.

5. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal.

Misi ini diarahkan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional serta meningkatkan investasi pada sektor industri kecil dan menengah untuk menyerap tenaga kerja yang didukung oleh keberadaan kawasan industri dan perdagangan serta dibangunnya sentra-sentra industri kecil dan rumah tangga.



Untuk mencapai kelima misi pembangunan Kota Pariaman dalam jangka menengah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi tersebut. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran operasional untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi.

Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki titik kritis (critical point) dalam penyusunan RPJMD. Bilamana visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan, maka program Walikota dan Wakil Walikota terpilih akan mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Berangkat dari pada Visi dan Misi tersebut maka dapat dirumuskan Tujuan dan Sasaran sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

1. Dalam rangka pencapaian misi mewujudkan pengelolaan wisata kota yang maju, religius, tertib dan berbudaya, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian, dengan sasaran pembangunan:
 - 1) Terwujudnya Daya Saing Wisata.
2. Dalam rangka pencapaian misi mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan berbudaya, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Kualitas SDM, dengan sasaran pembangunan:
 - 1) Meningkatnya Kualitas Pendidikan
 - 2) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
 - 3) Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat



- 4) Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran
- 5) Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa
3. Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal dan Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Smart City, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran pembangunan :
 - 1) Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat
4. Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana; maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan serta Mitigasi Bencana, dengan sasaran sebagai berikut :
 - 1) Infrastruktur wilayah meningkat
 - 2) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
 - 3) Meningkatnya Mitigasi Bencana
 - 4) Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat serta Kenyamanan Lingkungan Sosial
5. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan daya saing Kota Pariaman, dengan sasaran pembangunan:
 - 1) Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun
 - 2) Meningkatnya Nilai Investasi
 - 3) Meningkatnya peran industri dan perdagangan serta jasa dalam stabilitas perekonomian

Tabel: 4.1
Matriks Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

No	Visi : " Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya"					Ket
	Misi	Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran	
1	Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya terbaik Sumatra	1	Meningkatkan Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian	Presentase Sektor Pawisata Terhadap PDRB	1 Terwujudnya Daya Saing Wisata	
2	Mewujudkan Kehidupan	2	Meningkatkan Kualitas SDM	Indeks Pembangunan	2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	



	Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas			Manusia (IPM)			
					3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	
					4	Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	
					5	Menurunnya angka kemiskinan dan Pengangguran	
					6	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	
3	Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City	3	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih yang berbasis Smart city	Indeks RB	7	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	
4	Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana	4	Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan serta Mitigasi Bencana	Pencapaian Target SDG's	8	Infrastruktur wilayah meningkat	
					9	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	
					10	Meningkatnya Mitigasi Bencana	
					11	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat serta Kenyamanan Lingkungan Sosial	
5	Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal	5	Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif untuk	Angka Pertumbuhan Ekonomi	12	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	



			meningkatkan daya saing kota Pariaman				
				Laju Inflasi	13	Meningkatnya Nilai Investasi	
					14	Meningkatnya peran industri dan perdagangan serta jasa dalam stabilitas perekonomian	

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Pembangunan Kota Pariaman sebagaimana RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023, serta untuk menjamin keselarasan pembangunan maka rumusan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja dan targetnya pembangunan Kota Pariaman Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel 4.2

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pariaman Tahun 2022

NO	Visi : " Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya"											
	Misi		Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2022
1	Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya terbaik Sumatra		1	Meningkatkan Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian	Presentase Sektor Pawisata Terhadap PDRB		1	Terwujudnya Daya Saing Wisata	1	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	%	3,5
									2	Presentase Pertumbuhan Spending Of Money	%	3
2	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berbudaya		2	Meningkatkan Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	3	Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	14,68
									4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	11,60
							3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	5	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,50
									6	Indeks Keluarga Sehat	Nilai	0,175
							4	Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	7	Indeks Daya Beli Masyarakat	(Juta/Rp)	13,6
							5	Menurunnya angka kemiskinan dan Pengangguran	8	Angka Kemiskinan	%	3,90
									9	Angka Pengangguran	%	5,0
							6	Meningkatnya Kemandirian Desa	10	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,6960





3	Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City	3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi	Indeks RB	7	Meningkatnya Kapasitas tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan	11	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Kategori	BB
							12	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	86,65 (Baik)
							13	Opini WTP BPK Terhadap LKPD	Opini	WTP
							14	Indeks SPBE	Skor	3,0
4	Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana	4	Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan serta Mitigasi Bencana	% Pencapaian Target SDG's	8	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	15	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	75,20
					9	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	16	Indeks Kualitas Lingkungan	%	58,5
					10	Meningkatnya Mitigasi Bencana	17	Indeks Resiko Bencana	Kategori	171 (Tinggi)
					11	Terwujudnya rasa tertib dan aman dalam kehidupan Masyarakat	18	Indeks Ketentraman dan ketertiban	Nilai	70,20
5	Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal	5	Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan daya saing kota Pariaman	Angka Pertumbuhan Ekonomi	12	Menurunnya Ketimpangan pendapatan antar penduduk	19	Indeks Gini (Gini Ratio)	%	0,290
					13	Meningkatnya Nilai Investasi	20	Laju Pertumbuhan Investasi	%	2,5





				14	Meningkatnya peran industri dan perdagangan serta jasa dalam stabilitas perekonomian	21	Laju pertumbuhan Sektor Industri (%)	%	1,5
						22	Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa (%)	%	2





4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

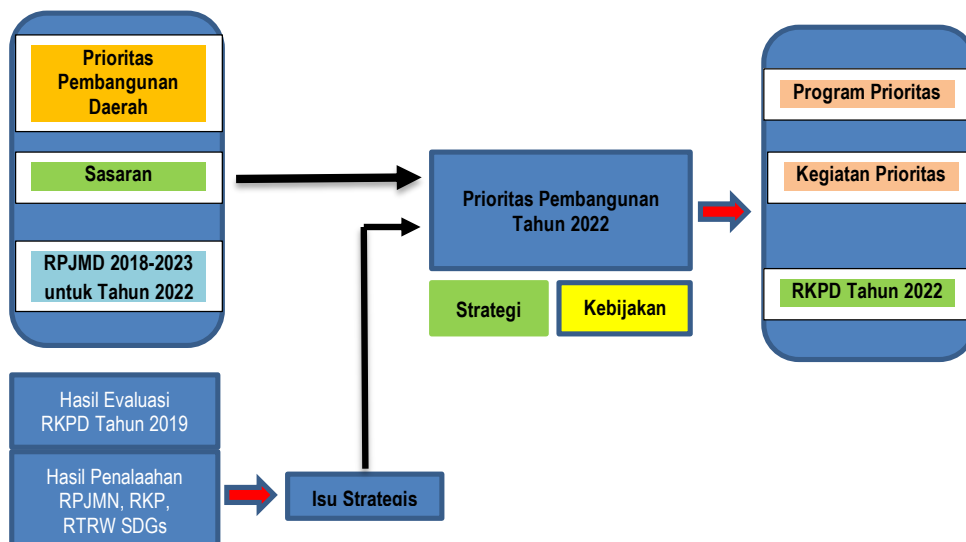
Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2021 dilakukan berdasarkan pada analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja RPJMD serta identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah beserta kerangka pendanaan.

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan usul-usulan SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya dengan memperhatikan :

1. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional
2. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD.
3. Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
4. Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

Rumusan perencanaan pembangunan Tahun 2021 selanjutnya disajikan dalam bentuk Kerangka pikir perencanaan pembangunan RKPD Kota Pariaman Tahun 2021, seperti dapat terlihat pada Gambar 4.2 berikut.

Gambar 4.2
Kerangka Pikir RKPD Kota Pariaman Tahun 2022



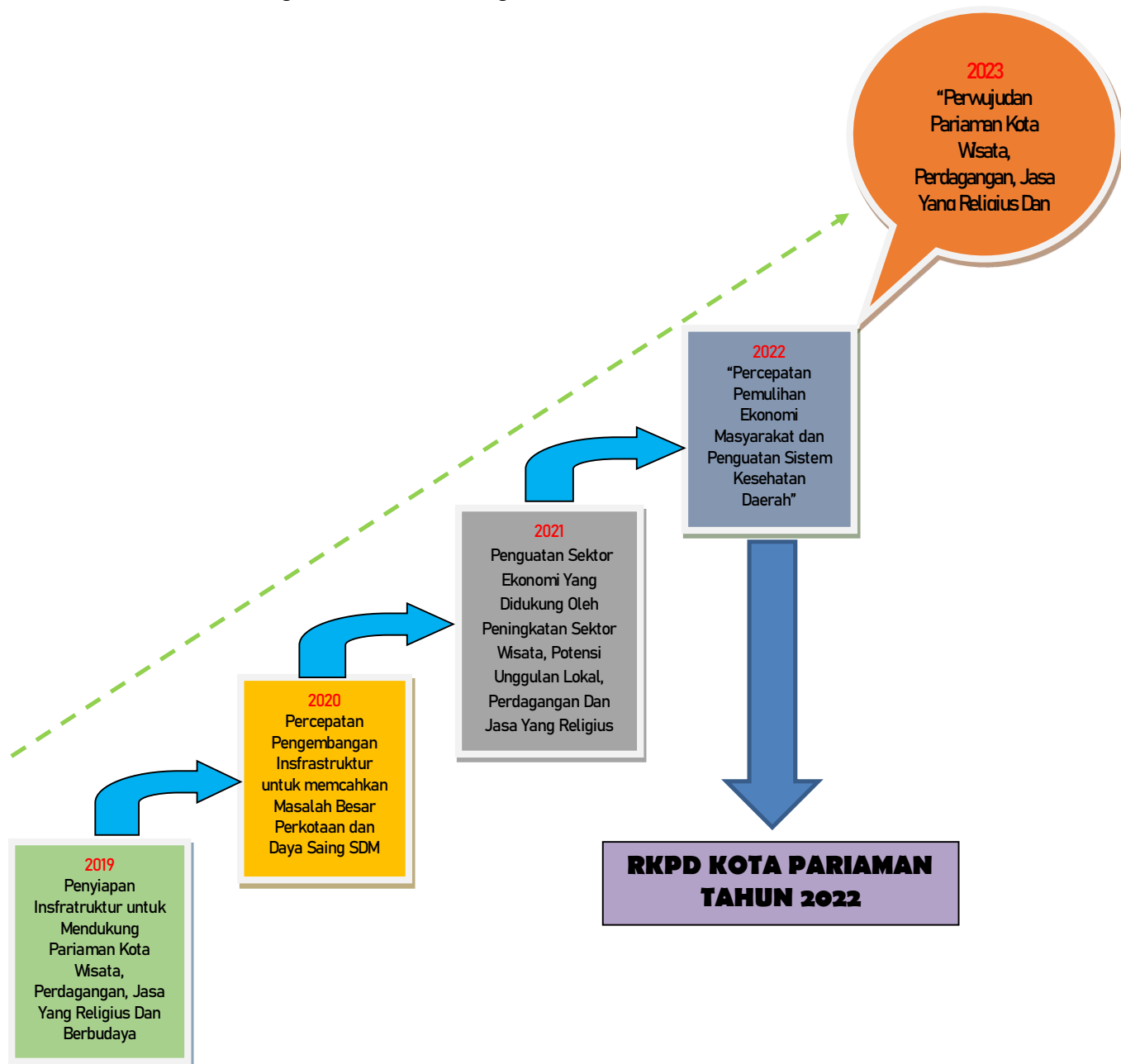
Prioritas pembangunan adalah kumpulan program prioritas yang bersifat lintas sektoral sebagai penjabaran operasional dari rencana pembangunan. Pembangunan Kota Pariaman Tahun 2018-2023 dijabarkan ke dalam 9 (Sembilan) prioritas pembangunan, sebagai berikut:

1. Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat melalui sektor strategis daerah
2. Penguatan sistem kesehatan daerah
3. Peningkatan kualitas pendidikan
4. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat
5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City
6. Pengentasan Kemiskinan Dan Pengurangan Tingkat Pengangguran
7. Peningkatan Pengelolaan Daya Saing Pariwisata yang terpadu dengan pengembangan Ekonomi Kerakyataan Yang Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan diatas, maka dapat disimpulkan tema atau fokus pembangunan. Tema atau fokus pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kota Pariaman dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahun. Penetapan tema atau fokus RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari tema atau fokus pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025, yaitu **“Mewujudkan Pariaman Sebagai Kota Perdagangan Dan Jasa Di Wilayah Pesisir Barat Sumatera Menuju Masyarakat Madani ”**. Untuk mewujudkan tema pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kota Pariaman, maka tema atau fokus pembangunan lima tahunan (2018-2023) disajikan pada Gambar 4.3 berikut ini.



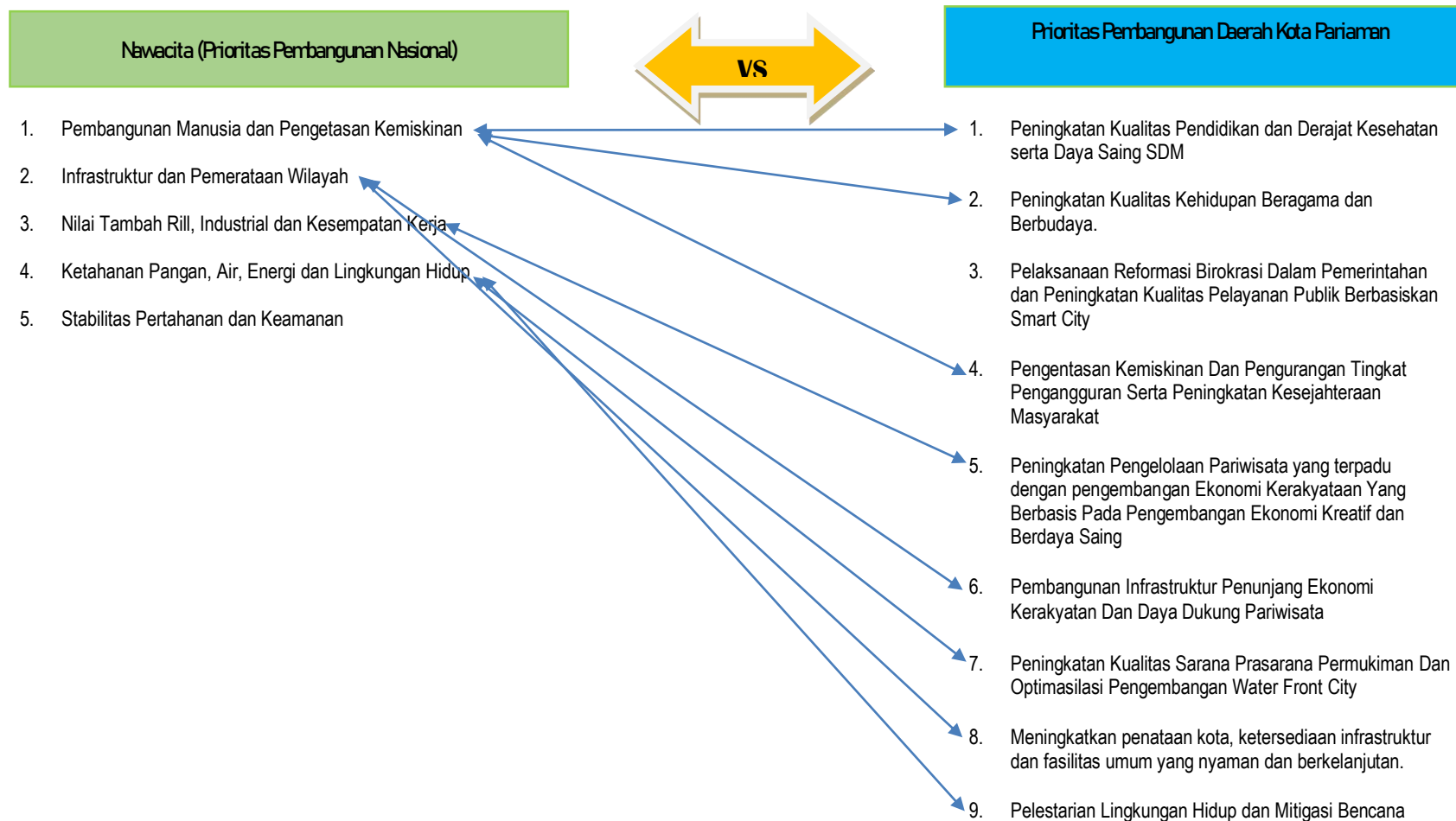
Gambar 4.3
Agenda/Tema Pembangunan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023







Gambar 4.4
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dengan
Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pariaman



4.2.1 Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional tahun 2022, Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yaitu "**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**", dengan 4 (empat) Fokus Pembangunan, yaitu: (1) Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi; (2) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional; (3) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial; dan (4) Reformasi Sistem Ketahanan Bencana. Agenda untuk setiap fokus pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Agenda Untuk Fokus Pembangunan Nasional

No.	Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi	Reformasi Sistem Kesehatan Nasional	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	e-formasi Sistem Ketahanan Bencana
	Industri			
-	Pemulihan rantai pasok, peningkatan keterampilan SDM, restrukturisasi permesinan serta peningkatan standar produk	kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas <i>health security</i> terutamasurveilans, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya Kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/produksi dengan normal.	Perluasan program bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informal. Langkah ini dilakukan utamanya untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok yang rentan, pasca pandemi COVID-19	Penguatan Sistem Peringatan Bencana
-	Akselerasi industri substansi impor khususnya makanan, minuman, kimia dan farmasi			
	Pariwisata			
-	Peningkatan aksesibilitas; pemulihan dan peningktna frekuensi dan jalur penerbangan, diskon avur dan biaya bandara			
-	Peningkatan wisatawan domestik; pengaturan			



		cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik, diskon tiket, pertemuan K/L di daerah.			
	-	Peningkatan pemasaran wisata : insentif dan paket wisata khusus untuk organisasi yang sudah pulih, optimalisasi pameran terintegrasi dengan pasar internasional			
	-	Peningkatan event; olah raga, seni budaya, dan MICE			
	-	Percepatan kesiapan destinasi : akselerasi infrastruktur, standar layanan (transportasi, makanan, minuman, arus wisatawan, kebersihan, keamanan)			
	Investasi				
		Investasi: menarik investasi sebesar besarnya untuk menggerakkan ekonomi, melalui			
	-	Penyederhanaan perizinan dan peningkatan kepastian usaha			
	-	Perluasan <i>positive lists</i> investasi, didukung kolaborasi lintas K/L dan pemda untuk harmonisasi regulasi dan prosedur, serta fasilitasi pengembangan kemitraan usaha			
	-	Percepatan integrasi sistem perizinan			
	-	Promosi investasi terarah			
	-	Pendampingan realisasi investasi skala besar di industri, pariwisata dan infrastruktur; <i>debottlenecking</i> dan <i>aftercare</i> investasi agar tidak pindah ke negara lain.			

Sumber : Diolah Bappeda Kota Pariaman, 2021

Tema pembangunan RKP Tahun 2022 tersebut dijabarkan dalam bentuk prioritas pembangunan nasional. Pada dokumen Rancangan RKP Tahun 2022, telah ditetapkan sasaran dan prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut:



A. Prioritas Nasional Tahun 2022

- 1) PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2) PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan;
- 3) PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- 6) PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
- 7) PN 7, Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik.

B. Prioritas Nasional Tahun 2022

- 1) SN 1, Meningkatnya Daya Dukung dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi Sebagai Modalitas Bagi Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan;
- 2) SN 2, Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian;
- 3) Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah dengan Mendorong Transformasi dan Akselerasi Pembangunan Wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan Tetap Menjaga Momentum Pertumbuhan di Wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera;
- 4) Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dan Menguatnya Tata Kelola Kependudukan;
- 5) Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk;
- 6) Terpenuhinya Layanan Dasar Bidang Kesehatan;
- 7) Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
- 8) Terwujudnya Pengentasan Kemiskinan;
- 9) Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing;
- 10) Menguatnya Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memantapkan Ketahanan Budaya;
- 11) Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan untuk Meningkatkan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan;
- 12) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Daya Rekat Sosial;
- 13) Menguatnya Moderasi Beragama untuk Mewujudkan Kerukunan Umat dan Membangun Harmoni Sosial dalam Kehidupan Masyarakat;
- 14) Meningkatnya Ketahanan Keluarga untuk Memperkuat Karakter

Bangsa;

- 15) Meningkatnya Budaya Literasi untuk Mewujudkan Masyarakat Berpengetahuan, Inovatif dan Kreatif;
- 16) Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar;
- 17) Meningkatnya Konektivitas Wilayah;
- 18) Meningkatnya Layanan Angkutan Umum Massal di 6 (enam) Kota Metropolitan;
- 19) Meningkatnya Akses dan Pasokan Energi dan Tenaga Listrik yang Merata, Andal, dan Efisien;
- 20) Meningkatnya Infrastruktur Energi Listrik yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Akses Listrik Terhadap Rumah Tangga Hingga ke Pelosok;
- 21) Meningkatnya Pembangunan dan Pemanfaatan Infrastruktur Tik, Serta Kontribusi Sektor Informasi dan Komunikasi dalam Pertumbuhan Ekonomi;
- 22) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- 23) Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim;
- 24) Pembangunan Rendah Karbon; dan
- 25) Menguatnya Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik.

Dari 7 (tujuh) Prioritas Nasional tersebut, sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada tahun 2020 yaitu terjadinya pandemi COVID-19, maka pada tahun 2022 prioritas pembangunan nasional tahun 2022 ditekankan pada PN-1 memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Risiko dari adanya pandemi COVID-19 yaitu terjadinya perlambatan ekonomi, perubahan kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, serta perubahan dan pergeseran rencana, namun menjadi pemicu terjadinya optimalisasi pengembangan IPTEK.

4.2.2 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang antara lain diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah, antara lain:

- 1) Penanganan pandemi COVID-19 termasuk memperkuat proses 3T (*Testing, Tracing, Treatment*), penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), ketersediaan tempat tidur isolasi pasien COVID-19, pembangunan sarana prasarana kesehatan dan vaksinasi COVID-19;

- 2) Pencegahan pandemi COVID-19 melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan;
- 3) Pembangunan dan peningkatan puskesmas dan rumah sakit;
- 4) Pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu dan pekerja tertentu;
- 5) Pemerataan distribusi tenaga kesehatan disertai dengan pemenuhan infrastruktur penunjang dan infrastruktur kesehatannya;
- 6) Penanganan angka kematian ibu dan anak serta *stunting*;
- 7) Pemberian bantuan langsung tunai bagi masyarakat selama masa pandemi;
- 8) Digitalisasi pemasaran produk UMKM dan pertanian;
- 9) Pengembangan skala usaha dari pelaku usaha UMKM;
- 10) Pengentasan kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran;
- 11) Pengoptimalan peran BUMDes melalui program *One Village One Company* (OVOC);
- 12) Prioritas proyek infrastruktur padat karya;
- 13) Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

4.2.3 Isu Strategis Pembangunan Kota Pariaman

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Perumusan isu strategis Kota Pariaman tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan kondisi tahun 2021, arah kebijakan dari RPJMD dan arah kebijakan RKP serta memperhatikan dinamika isu strategis global dan nasional seperti fenomena Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah pandemi COVID-19 yang mengharuskan Pemerintah Kota Pariaman melakukan *refocusing* dan realokasi APBD Tahun Anggaran 2020. Hal ini mengakibatkan tidak optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun 2020. Proses penyusunan isu strategis pembangunan Kota Pariaman tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 4.4
Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Kota Pariaman Tahun 2022

	Arah Kebijakan RKP 2022	Isu Global	Isu Strategis RPJMD Kota Pariaman 2018-2023		Isu Strategis Pembangunan Kota Pariaman Tahun 2022	Ket
1	Mempercepat pemulihan industri, pariwisata, dan investasi pasca pandemi COVID-19, dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.	Dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19	Peningkatan Kualitas Pendidikan	1		
2	Memantapkan pertumbuhan pembangunan wilayah Jawa bagian Utara dan Bali bagian Selatan sebagai pusat ekonomi dan budaya yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan bertumpu pada industri manufaktur berteknologi tinggi, ekonomi kreatif dan jasa pariwisata, serta penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor		Peningkatan Kualitas Kesehatan terutama masalah stunting dan gizi buruk	2		
3	Mengakselerasi pemerataan pembangunan wilayah Jawa bagian Selatan dan Bali bagian Utara sebagai pusat pengembangan ekonomi skala lokal dan regional dengan bertumpu pada agroindustri dan ekowisata.		Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	3		
4	Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencapaian ketahanan sosial ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan.		Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	4		
5	Menguatkan kapasitas mitigasi dan		Pelestarian Nilai-Nilai			



	penanganan bencana.		Budaya Lokal			
			Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			
			Peningkatan Tata Ruang Dan Kualitas Lingkungan Hidup			
			Peningkatan Infrastruktur yang Tangguh dan Berkelanjutan serta Mitigasi Bencana			
			Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah			
			Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah			

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pariaman Sebagai **"Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya"**, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2018 sampai dengan 2023. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pariaman ditunjukkan pada Tabel 4.5

Tabel 4.5
Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : " Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya"							
Misi 1 : Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya terbaik Sumatra							
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	Meningkatkan Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian	1	Terwujudnya Daya Saing Wisata	1	Perwilayahan Pembangunan DPN	1	Perencanaan Pembangunan DPN dan KSPN
						2	Penegakan regulasi Pembangunan DPN dan KSPN
						3	Pengendalian implementasi Pembangunan DPN dan KSPN
				2	Pembangunan Daya Tarik Wisata	1	Perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPN dan pengembangan daerah



						2	Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada
						3	Pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas
						4	Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPN
				3	Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata	1	Pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPN
						2	Pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPN
						3	Pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPN
				4	Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata	1	Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPN
						2	Peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung



							pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPN
						3	Pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung
				5	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata	1	Pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata
						2	Optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisata
						3	Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata
						4	Penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisata
						5	Perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal
						6	Peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan

							menengah yang dikembangkan masyarakat lokal
						7	Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata setempat
				6	Pengembangan investasi di bidang pariwisata	1	Peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata
						2	Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata

Adapun program yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran diatas adalah :

1	Program pengembangan destinasi pariwisata
2	Program Peningkatan Pelestarian Kebudayaan
3	Program Pembangunan SDM Pariwisata
4	Program Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat Seni dan Budaya
5	Program Pengembangan Daya Tarik Wisata
6	Program Pembangunan Fasilitas Pariwisata
7	Program Pengembangan Citra Pariwisata
8	Program Pengembangan Promosi Pariwisata
9	Program Pengembangan Kemitraan Promosi Pariwisata
10	Program Pengendalian Perpajakan

Misi 2 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas Dan Berbudaya

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2 Meningkatkan Kualitas SDM	2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1 Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	1 Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran Sekolah Dasar (SD)



						2	Meningkatkan Pendidikan Agama Berbasis Afeksi
						3	Meningkatkan Akreditasi Sekolah SD
						4	Meningkatkan Prestasi Siswa dan Sekolah SD
				2	Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1	Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)
						2	Meningkatkan Pendidikan Agama Berbasis Afeksi
						3	Meningkatkan Akreditasi Sekolah SMP
						4	Meningkatkan Prestasi Siswa dan Sekolah SMP
				3	Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Non Formal dan Informal	1	Melaksanakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C
						2	Meningkatkan Pembinaan Taman Bacaan Masyarakat atau Pustaka Yang Ada Di Desa
						3	Meningkatkan Pemberdayaan Pendidikan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan
						4	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
						5	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Vokasional
						6	Meningkatkan Akreditasi Lembaga Kursus dan Pendidikan Non Formal



				4	Peningkatan Pengembangan Pendidikan	1	Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidikan
						2	Meningkatkan Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
						3	Meningkatkan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
						4	Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan
						5	Meningkatkan pengelolaan sekolah inklusi
				5	Peningkatan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan	1	Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan
						2	Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan keliling
						3	Meningkatkan kapasitas pengelola perpustakaan kota, sekolah dan khusus
						4	Meningkatkan budaya gemar membaca
				6	Optimalisasi pelestarian koleksi pustaka dan data informasi perpustakaan	1	Meningkatkan pengelolaan koleksi pustaka
						2	Meningkatkan jumlah judul bahan pustaka
						3	Meningkatkan pengelolaan sistem perpustakaan



	Adapun program yang diperlukan untuk mencapai sasaran diatas adalah :						
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini						
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun						
3	Program Pendidikan Non Formal						
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan						
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan						
6	Program Fasilitas Keagamaan dan Kemasyarakatan						
7	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan						
		3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar	1	Meningkatkan kepuasan layanan kesehatan puskesmas
				2	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	1	Meningkatkan pelayanan kesehatan rumah sakit Pratama
				3	Peningkatan upaya pelayanan kesehatan	1	Meningkatkan penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan
						2	Meningkatkan Kepastian Kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Warga Kota Pariaman
						3	Meningkatkan fasilitas kesehatan terakreditasi milik pemerintah
						4	Meningkatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah Dalam Memenuhi Standar
						5	Mengoptimalkan cakupan penanganan kegawat darurat kesehatan
						6	Menambahkan layanan puskesmas 24 jam dengan layanan rawat



							inap persalinan
				4	Peningkatan regulasi dan pengembangan sumber daya kesehatan	1	Meningkatkan fasilitas kesehatan sesuai standar
						2	Meningkatkan tenaga kesehatan yang berijin
						3	Meningkatkan tenaga kesehatan sesuai kompetensi
						4	Meningkatkan ketersediaan obat, vaksin dan alkes
						5	Mengendalikan penggunaan obat rasional di puskesmas
				5	Peningkatan kesehatan masyarakat	1	Mengoptimalkan pelayanan antenatal sesuai standar untuk ibu hamil
						2	Mengoptimalkan pelayanan persalinan sesuai standar
						3	Mengoptimalkan Pelayanan Sesuai Standar Bagi Bayi Yang Baru Lahir
						4	Mengoptimalkan pelayanan kesehatan sesuai standar untuk balita
						5	Mengoptimalkan Anak Pada Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar
						6	Meningkatkan penduduk usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar



						7	Meningkatkan jumlah wilayah dalam melaksanakan KTR
						8	Mengoptimalkan cakupan Desa/kelurahan siaga aktif (Mandiri)
						9	Meningkatkan rumah, tempat-tempat umum (TTU), tempat pengelolaan makanan (TPM) dalam memenuhi syarat kesehatan
						10	Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi kesehatan
				6	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit	1	Mengoptimalkan pelayanan TB sesuai standar bagi penderita TB
						2	Mengoptimalkan layanan pemeriksaan bagi orang yang berisiko terinfeksi HIV AIDS
						3	Mengoptimalkan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
						4	Meningkatkan cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
						5	Meningkatkan penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar
						6	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi sesuai standar
						7	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penderita diabetes melitus sesuai standar



						8	Mengoptimalkan cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
				7	Pengendalian penduduk	1	Meningkatkan edukasi pengendalian penduduk bagi aparat, remaja dan masyarakat
						2	Meningkatkan pengelolaan Data, Advokasi, dan Komunikasi Informasi Edukasi
				8	Peningkatan keluarga berencana dan pembangunan ketahanan keluarga	1	Meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan keluarga berencana (KB)
						2	Meningkatkan kepesertaan KB
						3	Meningkatkan pembinaan pendewasaan usia perkawinan
						4	Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi
						5	Meningkatkan ketahanan keluarga melalui BKB, BKR, Bina keluarga lansia
	Adapun program yang diperlukan untuk mencapai sasaran diatas adalah :						
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan						
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat						
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan						
4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat						
5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat						
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat						
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular						



8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan						
9	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan						
10	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita						
11	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia						
12	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak						
13	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular						
14	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata						
15	Program pelayanan kesehatan Rujukan						
16	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan						
17	Program Keluarga Berencana						
18	Program Kesehatan Reproduksi Remaja						
19	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan						
20	Program pelayanan kontrasepsi						
21	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan						
22	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri						
23	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak						
24	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat						
25	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR						
26	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga						
		4	Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	1	Peningkatan ketahanan pangan	1	Peningkatan ketahanan pangan Meningkatkan pembinaan ketersediaan dan distribusi pangan
						2	Meningkatkan pembinaan pola konsumsi dan kewaspadaan pangan
				2	Peningkatan pembinaan budidaya dan produk kehewan dan	1	Meningkatkan pembinaan budidaya peternakan dan



					perikanan		perikanan
						2	Meningkatkan mutu dan keamanan produk hasil peternakan dan perikanan
				3	Peningkatan pembinaan budidaya dan produk hasil pertanian	1	Meningkatkan pembinaan budidaya pertanian
						2	Meningkatkan mutu dan keamanan produk hasil pertanian

Adapun program yang diperlukan untuk mencapai sasaran diatas adalah :

1.	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
2	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
3	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
4	Program pengembangan industri kecil dan menengah
5	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
6	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
7	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

		5	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran	1	Mempercepat Penanggulangan kemiskinan secara terpadu	1	Meningkatkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial Meningkatkan
						2	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin
						3	Meningkatkan PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial
						4	Peningkatan advokasi



							dan rehabilitasi sosial
				4.	Perluasan kesempatan kerja dan Peluang Usaha	1	Peningkatan jaringan tenaga kerja
						2	Peningkatan ketrampilan masyarakat
						3	Meningkatkan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar
Adapun program yang diperlukan untuk mencapai sasaran diatas adalah :							
1	Program Penanganan PMKS						
2	Program Penguatan PSKS						
3	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja						
4	Program Peningkatan Kesempatan Kerja						
5	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan						
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial						
		6	Meningkatnya Kemandirian Desa	1	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Meningkatkan kelembagaan kemasyarakatan
						2	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
						3	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis Desa/Kelurahan
				2	Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	1	Mengoptimalkan organisasi perempuan
						2	Meningkatkan penanganan terhadap



							perempuan korban kekerasan
						3	Meningkatkan layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
				3	Peningkatan Perlindungan Anak	1	Meningkatkan pengarusutamaan hak anak
						2	Meningkatkan penanganan terhadap anak korban kekerasan
						3	Fasilitasi Taman Pendidikan Anak
				4	Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan	1	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
						2	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat
						3	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat
						4	Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat
	Adapun program yang diperlukan untuk mencapai sasaran diatas adalah :						
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan						
2	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan						
3	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa						



4	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
5	Program peningkatan kemampuan teknologi industri
6	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
7	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
8	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	7	Meningkatnya Kapasitas tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	1	Peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan	1	Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
						2	Meningkatkan Pengawasan Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan
						3	Meningkatkan fasilitasi peringatan hari besar keagamaan
						4	Meningkatkan Pemantapan Nasionalisme Ormas dan Organisasi Keagamaan
				2	Penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum	1	Meningkatkan kualitas penyusunan peraturan perundangundangan
						2	Mengoptimalkan fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dengan DPRD
						3	Meningkatkan kualitas layanan konsultasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum
						4	Meningkatkan pembinaan masyarakat sadar hukum



						5	Meningkatkan kualitas penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah
				3	Peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama	1	Mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
						2	Meningkatkan kualitas bahan pendukung kebijakan peningkatan pajak dan retribusi daerah
						3	Meningkatkan pembinaan terhadap BUMD dan BLUD
						4	Meningkatkan kualitas kerjasama daerah
				4	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	1	Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan fisik kegiatan
						2	Meningkatkan pengendalian Kontrak Kritis
						3	Meningkatkan fasilitasi penyusunan pedoman pelaksanaan APBD
				5	Peningkatan pelayanan pengadaan barang/jasa	1	Meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi pengadaan barang dan jasa
						2	Meningkatkan pengelolaan proses pelelangan
						3	Meningkatkan kapasitas SDM pengadaan
						4	Meningkatkan penyelesaian



							permasalahan pengadaan
				6	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah	1	Meningkatkan Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur
						2	Meningkatkan kualitas Pemantapan Ketatalaksanaan
						3	Meningkatkan pembinaan pelayanan publik
						4	Meningkatkan pembinaan akuntabilitas publik perangkat daerah
						5	Meningkatkan pemantapan kelembagaan perangkat daerah
						6	Meningkatkan kualitas kebijakan pengukuran kinerja ASN
				7	Peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan
						2	Meningkatkan kualitas Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah
						3	Meningkatkan kualitas Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Pariaman
				8	Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah,	1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah,



					Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah		Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah
						2	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Pariaman
				9	Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang ekonomi	1	Meningkatkan kualitas perencanaan bidang ekonomi
						2	Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang ekonomi
				10	Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang fisik	1	Meningkatkan kualitas perencanaan bidang fisk
						2	Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang fisik
				11	Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang sosial	1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Bidang Sosial Budaya
						2	Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang sosial
				12	Peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
						2	Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah



						3	Meningkatkan kualitas data pembangunan daerah
				13	Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah	1	Meningkatkan penelitian dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah
						2	Meningkatkan fasilitasi inovasi daerah
				14	Peningkatan perencanaan dan pengendalian anggaran	1	Meningkatkan kualitas dokumen penganggaran
						2	Mengoptimalkan pengendalian anggaran
				15	Pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer	1	Melaksanakan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah
						2	Mengoptimalkan pengendalian belanja daerah
						3	Meningkatkan pengelolaan dana transfer
				16	Peningkatan pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	Meningkatkan kualitas Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
						2	Meningkatkan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual
						3	Meningkatkan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)



				17	Peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset	1	Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan aset daerah
						2	Optimalisasi Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan
				18	Peningkatan pelayanan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah	1	Meningkatkan pemutakhiran data wajib pajak
						2	Mengoptimalkan penerapan sistem e-tax
						3	Meningkatkan pelayanan pajak daerah
				19	Pengoptimalan pembukuan & penagihan pajak daerah	1	Meningkatkan Pengelolaan Penagihan Pajak Daerah
						2	Meningkatkan pembinaan wajib pajak daerah
						3	Meningkatkan pembukuan dan pelaporan pajak daerah
				20	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan dan aparatur	1	Optimalisasi pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur
						2	Meningkatkan pembinaan kepatuhan aparatur
				21	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset	1	Optimalisasi pengawasan bidang pengelolaan keuangan dan aset
						2	Meningkatkan kualitas Review Dokumen



							Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan
				22	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pembangunan fisik	3	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pembangunan fisik
						4	Meningkatkan kualitas Review Pengadaan Barang dan Jasa
				23	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang sosial ekonomi budaya	1	Optimalisasi pengawasan bidang sosial ekonomi dan budaya
						2	Meningkatkan kualitas Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja
				24	Peningkatan dan evaluasi pengawasan	1	Mengoptimalkan tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal
						2	Meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)
				25	Peningkatan pengembangan karir aparatur sipil negara	1	Optimalisasi penyediaan data formasi pegawai
						2	Meningkatkan pengelolaan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN)
						3	Meningkatkan pengembangan karier ASN
						4	Meningkatkan pengelolaan data dan informasi kepegawaian
				26	Peningkatan pelayanan	1	Meningkatkan pengelolaan mutasi data



					administrasi kepegawaian		kepegawaian2
						2	Meningkatkan pembinaan jabatan fungsional
						3	Meningkatkan pembinaan ASN
						4	Meningkatkan pengelolaan kesejahteraan ASN
						5	Optimalisasi penatausahaan kepegawaian
						6	Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian secara elektronik
				27	Peningkatan kompetensi aparatur sipil negara	1	Optimalisasi analisa kebutuhan diklat
						2	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
				28	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	1	Meningkatkan pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
						2	Meningkatkan Pelaksanaan Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk
				29	Peningkatan pelayanan pencatatan sipil	1	Meningkatkan Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian
						2	Meningkatkan Pelayanan Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Dan Kewarganegaraan
				30	Peningkatan pengelolaan	1	Meningkatkan kerjasama administrasi



					informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data		kependudukan
						2	Meningkatkan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
						3	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Kependudukan
						4	Meningkatkan kapasitas SDM Teknologi informasi dan komunikasi
				31	Peningkatan pengelolaan pengembangan kearsipan	1	Meningkatkan pengelolaan arsip
						2	Meningkatkan sarana prasarana kearsipan
						3	Meningkatkan kapasitas pengelola arsip
				32	Pengoptimalan fasilitasi penyusunan perundang-undangan	1	Meningkatkan kualitas penyusunan kajian perundang-undangan
						2	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD
						3	Meningkatkan Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD
				33	Peningkatan fasilitasi penganggaran dan pengawasan	1	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran
						2	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Fungsi



							Pengawasan DPRD
						3	Meningkatkan Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat
				34	Peningkatan pengelolaan informasi dan statistik	1	Meningkatkan pengelolaan media informasi pemerintah
						2	Meningkatkan sosialisasi kebijakan pemerintah melalui berbagai media
				35	Peningkatan komunikasi publik	1	Meningkatkan pengelolaan kehumasan dan pelayanan informasi
						2	Meningkatkan pengelolaan keluhan dan aduan masyarakat
						3	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika pada ruang publik
						4	Meningkatkan pembangunan aplikasi untuk mewujudkan e-government
						5	Meningkatkan pengetahuan teknologi informasi bagi aparatur
						6	Meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung e-government
				36	Peningkatan pelayanan persandian	1	Meningkatkan kualitas sarana prasarana persandian dan telekomunikasi
						2	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Komunikasi



						dan Informatika
	Adapun program yang diperlukan untuk mencapai sasaran diatas adalah :					
1	Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah					
2	Program Pengembangan Ketatalaksanaan					
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
4	Program Peningkatan Manajemen SDM dan Aparatur					
5	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan					
6	Program Pelayanan dan Bantuan Hukum					
7	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah					
8	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan					
9	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah					
10	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					
11	Program Pengembangan Kearsipan					
12	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah					
13	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa					
14	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH					
15	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan					
16	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi					
17	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah					
18	Program perencanaan pembangunan daerah					
19	Program perencanaan pembangunan ekonomi					
20	Program perencanaan sosial dan budaya					
21	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam					
22	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK					
23	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat					
25	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa					



26	Program E-Government
27	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik
28	Program Pengembangan Data/ Informasi Statistik Sektor
29	Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi
30	Program Penataan Administrasi Kependudukan

Misi 4 : Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
4	Meningkatkan keberlanjutan pembangunan Kota yang modern berwawasan lingkungan serta Mitigasi Bencana	8	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	1	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	1	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan perlengkapan jalan
						2	Meningkatkan kualitas penerangan jalan umum
				2	Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Perkotaan	1	Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Perkotaan
				3	Peningkatan dan pemeliharaan saluran pengairan dan drainase	1	Meningkatkan pembangunan saluran pengairan/penyediaan bangunan talud
						2	Meningkatkan kualitas saluran pengairan/penyediaan bangunan talud
						3	Mengoptimalkan penataan kawasan sungai
				4	Penambahan pembangunan gedung pemerintah	1	Meningkatkan pemenuhan bangunan-bangunan gedung sesuai standar kebutuhan
				5	Peningkatan perumahan permukiman dan	1	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman



				tata bangunan		
					2	Meningkatkan penanganan Kawasan Kumuh
					3	Meningkatkan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
					4	Mengoptimalkan cakupan saluran air limbah
					5	Mengoptimalkan pengelolaan air minum
			6	Peningkatan pengelolaan persampahan	1	Meningkatkan pembinaan kelompok masyarakat peduli sampah
					2	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah
					3	Meningkatkan kebersihan jalan
			7	Peningkatan pengelolaan lalu lintas	1	Meningkatkan kajian dan pengembangan lalu lintas
					2	Meningkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas
					3	Meningkatkan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
			8	Peningkatan pengelolaan perparkiran	1	Meningkatkan pembinaan juru parkir, petugas parkir dan pedagang TKP
					2	Meningkatkan sarana dan prasarana perparkiran
					3	Mengoptimalkan penyelenggaraan perparkiran
					4	Meningkatkan penertiban

							parkir liar
				9	Peningkatan angkutan jalan, pengendalian operasional dan keselamatan lalu lintas	1	Meningkatkan kualitas pengujian kendaraan bermotor
						2	Meningkatkan kualitas sarana transportasi publik.
						3	Meningkatkan edukasi keselamatan lalu lintas bagi pelajar dan masyarakat
						4	Meningkatkan Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional
	Adapun program yang diperlukan untuk mencapai sasaran diatas adalah :						
1	Program pembangunan jalan dan jembatan						
2	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong						
3	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah						
4	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan						
5	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan						
6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya						
7	Program Pengendalian Banjir						
8	Program Pembinaan Jasa Konstruksi						
9	Program Pengendalian Pemanfaatan Penerangan Jalan Umum						
10	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan						
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga						
12	Program Pengendalian Perpakiran						
13	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan						
14	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ						



15	Program peningkatan pelayanan angkutan						
16	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas						
17	Program Pengendalian Perpakiran						
18	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor						
19	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal						
20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)						
21	Program pendidikan politik masyarakat						
22	Program pengembangan wawasan kebangsaan						
		9	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Peningkatan efektivitas penataan dan pengendalian dampak lingkungan	1	Meningkatkan ketertiban dokumen lingkungan Meningkatkan
						2	Meningkatkan konservasi air tanah
						3	Meningkatkan ketertiban Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
						4	Meningkatkan pemantauan usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan
				2	Optimalisasi pengembangan kapasitas lingkungan hidup	1	Mengoptimalkan wawasan lingkungan di sekolah
						2	Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
						3	Meningkatkan pantauan pada perusahaan mikro kecil dalam menaati dokumen lingkungan
						4	Meningkatkan pemantauan layanan



							pengujian parameter kualitas air dan udara
				3	Optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) publik	1	Meningkatkan pembangunan RTH Publik
						2	Meningkatkan pengelolaan RTH publik
						3	Meningkatkan pemeliharaan taman kota dan perindang jalan
	Adapun program yang diperlukan untuk mencapai sasaran diatas adalah :						
1	Program Pengembangan Perumahan						
2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan						
3	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup						
4	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam						
5	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup						
6	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)						
7	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam						
8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah						
9	Program pembangunan infrastruktur perdesaan						
10	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya						
		10	Meningkatnya Mitigasi Bencana	1	Peningkatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana alam	1	Meningkatkan edukasi bencana bagi warga di kawasan rawan bencana
						2	Meningkatkan kampung/Desa tangguh bencana
						3	Mengoptimalkan pelayanan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap bagi



							korban bencana
						4	Meningkatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana
				2	Peningkatan ketangguhan bencana	1	Peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana
						2	Meningkatkan ketangguhan kota terhadap bencana
						3	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi bencana
				3	Peningkatan pencegahan kebakaran	1	Meningkatkan edukasi proteksi kebakaran
						2	Meningkatkan pelayanan rekomendasi kebakaran
				4	Peningkatan penanggulangan kebakaran	1	Meningkatkan ketrampilan petugas kebakaran
						2	Meningkatkan sarana dan prasarana penanganan kebakaran
						3	Meningkatkan ketepatan waktu penyelamatan kebakaran
	Adapun program yang diperlukan untuk mencapai sasaran diatas adalah :						
1	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam						
2	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kebencanaan						
		11	Terwujudnya Rasa Tertib dan Aman Dalam Kehidupan Bermasyarakat	1	Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat	1	Meningkatkan penanganan pelanggaran Perda

				2		2	Meningkatkan Peran Sat Pol PP, Dubalang Desa/Kelurahan dalam Menjalankan Tugasnya
						3	Membuat Regulasi tentang Penegakan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat

Adapun program yang diperlukan untuk mencapai sasaran diatas adalah :

1	Program pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban umum, serta Perlindungan Masyarakat
2	Program Penegakan Perundang-undangan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
5	Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan daya saing kota Pariaman	12	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan antar Penduduk	1	Pemeliharaan sarana prasarana kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar	1	Meningkatkan pengelolaan kebersihan pasar
						2	Meningkatkan pengelolaan pengamanan dan penertiban pasar
				2	Peningkatan penataan, pengembangan dan pendapatan pasar	1	Meningkatkan penataan lahan dan pedagang
						2	Meningkatkan SDM pelaku pasar tradisional
						3	Meningkatkan pemeliharaan sarana prasarana pasar
						4	Meningkatkan pengelolaan pendapatan



							pasar
				3	Peningkatan Pengembangan Dan Penempatan Tenaga Kerja	1	Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja
						2	Meningkatkan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja
						3	Meningkatkan Penempatan Calon Tenaga Kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) , Antar Kerja Lokal (AKL), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
						4	Memperluas kesempatan kerja melalui padat karya infrastruktur
				4	Peningkatan perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja	1	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kesejahteraan tenaga kerja
						2	Meningkatkan upah minimum kota
				5	Pengoptimalan kualitas koperasi	1	Meningkatkan pembinaan kelembagaan koperasi
						2	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan koperasi
				6	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil mikro	1	Meningkatkan Fasilitas Kemitraan dan Pembiayaan Bagi Pelaku MK
						2	Menumbuhkan Wirausaha Baru (HBC)
						3	Meningkatkan Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan Manajemen bagi Usaha



							Mikro
						4	Meningkatkan pengembangan kemitraan UKM dengan hote, restoran dan toko
	Adapun program yang diperlukan untuk mencapai sasaran diatas adalah :						
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani						
2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)						
3	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan						
4	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan						
5	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan						
6	Program peningkatan produksi hasil peternakan						
7	Program pengembangan budidaya perikanan						
8	Program pengembangan perikanan tangkap						
9	Program peningkatan produksi hasil peternakan						
10	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan						
11	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan						
12	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan						
13	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Pertanian/ Peternakan						
14	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif						
15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan						
16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah						
17	Program pengembangan industri kecil dan menengah						
18	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah						
19	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi						
20	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri						
		13	Meningkatnya Nilai Investasi	1	Peningkatan pelayanan penanaman modal dan perizinan	1	Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan data terkait permohonan izin
						2	Menerbitkan izin sesuai dengan prosedur
				2	Peningkatan pengawasan dan penanganan pengaduan penanaman modal dan perizinan	1	Melaksanakan pengawasan izin sesuai dengan izin yang diawasi
						2	Menindaklanjuti pengaduan terkait perizinan dan penanaman modal
				3	Penguatan regulasi dan pengembangan	1	Melaksanakan kajian dan sosialisasi peraturan



					kinerja layanan penanaman modal dan perizinan		perizinan
						2	Mengevaluasi regulasi pelayanan perizinan
						3	Melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan perizinan
				4	Pengembangan penanaman modal	1	Meningkatkan pengembangan SIM Aplikasi Perizinan dan Penanaman Modal
						2	Meningkatkan promosi penanaman modal
						3	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penanaman modal
				5	Mengintensifkan investasi untuk menghidupkan kawasan pengembangan dan pusat-pusat pertumbuhan	1	Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan kapasitas kelembagaan
						2	Mewujudkan kepastian hukum, sistem dan prosedur investasi yang jelas
	Adapun program yang diperlukan untuk mencapai sasaran diatas adalah :						
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi						
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi						
3	Program Pengembangan Pelayanan Perizinan						
		14	Meningkatnya peran industri dan perdagangan	1	Pengoptimalan pembinaan perindustrian	1	Meningkatkan pembinaan teknis perindustrian

			serta jasa dalam stabilitas perekonomian				
						2	Meningkatkan pembinaan sarana perindustrian
						3	Meningkatkan pameran industri kreatif
						4	Meningkatkan perancangan teknologi tepat guna bagi IKM
						5	Meningkatkan pembinaan sentra industri Kerajinan
				2	Pengotimalan pembinaan dan pengendalian perdagangan	1	Meningkatkan Pengembangan Kemitraan dengan Toko Modern
						2	Meningkatkan pengawasan pengendalian harga
						3	Meningkatkan tata titik lokasi PKL
						4	Meningkatkan promosi produk UMKM
	Adapun program yang diperlukan untuk mencapai sasaran diatas adalah :						
1	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif						
2	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan						
3	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah						
4	Program pengembangan industri kecil dan menengah						
5	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah						
6	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi						
7	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri						
8	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif						

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2022



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2022

Pada bab ini disajikan rekapitulasi program dan kegiatan daerah berikut dengan jumlah pagu indikatif masing-masing program yang direncanakan. Secara eksplisit juga memuat matrik tentang rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kota Pariaman yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Dalam matrik rencana kerja ini memuat program pembangunan Kota Pariaman yang mempedomani visi misi dan program Kepala Daerah terpilih yang dimuat pada Dokumen RPJMD 2018-2023 sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dan sudah dikelompokkan berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar serta Urusan Pilihan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.





**MATRIX :
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2022
(BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN OPD)**



**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif										
												Nasional	Daerah													
1					2					3					4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM			100,00							100,00	93.374.623.293	Dikpora								
						Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat			BB							BB		Dikpora								
						Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan			100							100		Dikpora								
1	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi				18.310.160								18.310.160	Dikpora								
1	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun			1 Dok	10.010.160	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Dok	10.010.160	Dikpora								
1	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja yang disusun			4 Dok	8.300.000						4 Dok	8.300.000	Dikpora								
1	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				91.192.287.937								91.192.287.937	Dikpora								
1	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji PNS dan P3K yang dibayarkan Jumlah TPP yang dibayarkan Jumlah Tunjangan Profesi dan Tamsil Guru yang dibayarkan			14 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	90.664.287.937	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					14 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	90.664.287.937	Dikpora								
1	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayarkan			100 OB	528.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					100 OB	528.000.000	Dikpora								
1	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				381.648.696								381.648.696	Dikpora								
1	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan			6 Jenis	4.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					6 Jenis	4.000.000	Dikpora								
1	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang disediakan Jumlah makan minum yang disediakan Jumlah peralatan kebersihan yang disediakan			45 Jenis 500 Paket 26 Jenis	19.998.696	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					45 Jenis 500 Paket 26 Jenis	19.998.696	Dikpora								
1	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah map dan amplop yang dicetak Jumlah surat yang digandakan			1100 Lembar 38000 Lemba	7.500.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1100 Lembar 38000 Lemba	7.500.000	Dikpora								
1	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinas dan konsultasi yang diikuti SKPD			12 Bulan	350.150.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					12 Bulan	350.150.000	Dikpora								
1	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.641.650.000								1.641.650.000	Dikpora								
1	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan			200 Lembar	2.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					200 Lembar	2.000.000	Dikpora								
1	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah paket internet yang dibayarkan Jumlah paket listrik yang dibayarkan			12 Bulan 12 Bulan	76.550.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					12 Bulan 12 Bulan	76.550.000	Dikpora								
1	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga administrasi perkantoran dan PTK kategori 2 yang dibayarkan Jumlah tenaga kebersihan dan sopir yang dibayarkan			58 OB 15 OH	1.563.100.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					58 OB 15 OH	1.563.100.000	Dikpora								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Daerah				
1	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				140.726.500						140.726.500	Dikpora	
1	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bahan bakar minyak yang dibayarkan Jumlah kendaraan yang dipelihara Jumlah surat tanda nomor kendaraan yang dibayarkan			8960 Liter 18 Unit 18 Unit	123.226.500	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				8960 Liter 18 Unit 18 Unit	123.226.500	Dikpora
1	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat/ perlengkapan kantor yang dipelihara (AC) Jumlah sarana kantor yang dipelihara (PC dan Laptop)			15 Unit 17 Unit	2.500.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				15 Unit 17 Unit	2.500.000	Dikpora
1	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah aula yang direhab Jumlah gedung kantor yang dipelihara			1 Unit 1 Unit	15.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Unit 1 Unit	15.000.000	Dikpora
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan SNP			90,00						90,00	22.194.613.746	Dikpora
						Rata-rata Nilai Mid Semester			7,75						7,75		Dikpora
						Rata-rata persentase pencapaian KKM SD pada Satuan Pendidikan 1)			94,00						94,00		Dikpora
						Rata-rata persentase pencapaian KKM SMP pada Satuan Pendidikan 1)			6,10						6,10		Dikpora
						Rata-Rata Nilai Semester			8,80						8,80		Dikpora
						Persentase satuan PAUDNI yang memiliki sapras sesuai SNP			70,00						70,00		Dikpora
						Persentase satuan Pendidikan yang pengelolaannya berkategori baik			80,00						80,00		Dikpora
						Persentase PTK yang sesuai dengan SNP			65,00						65,00		Dikpora
						Angka Melek Huruf			99,81						99,81		Dikpora
						Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik 2)			51,06						51,06		Dikpora
1	01	02	2,01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				14.002.802.046						14.002.802.046		Dikpora
1	01	02	2,01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Sekolah yang Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			1 Sekolah Dasar	256.495.000					1 Sekolah Dasar	256.495.000	Dikpora
1	01	02	2,01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			2 SMP	278.078.274					2 SMP	278.078.274	Dikpora
1	01	02	2,01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Sekolah Pembangunan Perpustakaan Sekolah			1 Sekolah Dasar	234.255.000					1 Sekolah Dasar	234.255.000	Dikpora
1	01	02	2,01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang dibangun pagar			1 SD	1.346.000.000	Kota Pariaman, Pariaman Utara, Apar				1 SD	1.346.000.000	Dikpora
1	01	02	2,01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Sekolah yang direhab ruang kelasnya			1 Sekolah Dasar	757.200.000					1 Sekolah Dasar	757.200.000	Dikpora
1	01	02	2,01	14	Pengadaan Mebel Sekolah					200.000.000						200.000.000	Dikpora
1	01	02	2,01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Siswa yang menerima Kartu Pariaman Pintar			792 Siswa	769.120.000					792 Siswa	769.120.000	Dikpora
1	01	02	2,01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Sekolah yang Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			1 SMP	401.400.000					1 SMP	401.400.000	Dikpora
1	01	02	2,01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah guru yang mengikuti sosialisasi ANBK Jumlah guru yang mengikuti sosialisasi Ijazah			150 Orang 130 Orang	66.000.000					150 Orang 130 Orang	66.000.000	Dikpora

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
												Nasional					Daerah
1	01	02	2,01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah sekolah yang di monev			89 SD	10.807.000					89 SD	10.807.000	Dikpora
1	01	02	2,01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Sekolah yang mengikuti Kegiatan Minat Bakat			89 Sekolah	89.586.000					89 Sekolah	89.586.000	Dikpora
1	01	02	2,01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah PTK yang menerima insentif			261 Orang	1.472.500.000					261 Orang	1.472.500.000	Dikpora
1	01	02	2,01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Guru atau Kepsek yang mengikuti Bimtek Calon Pengawas dan Calon Penilik Jumlah Guru SD yang mengikuti KKG Jumlah Guru yang Dinilai Angka Kreditnya Jumlah Guru yang mengikuti Bimtek Calon Kepala Sekolah Jumlah Guru yang mengikuti Diklat Penilai Angka Kredit Jumlah Guru yang mengikuti Sosialisasi Dewan Pendidikan			50 Orang 600 Orang 500 Orang 100 Orang 30 Orang 150 Orang	559.520.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				50 Orang 600 Orang 500 Orang 100 Orang 30 Orang 150 Orang	559.520.000	Dikpora
1	01	02	2,01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					7.561.840.772						7.561.840.772	Dikpora
1	01	02	2,02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					3.260.926.700						3.260.926.700	Dikpora
1	01	02	2,02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah					625.570.000						625.570.000	Dikpora
1	01	02	2,02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					800.000.000						800.000.000	Dikpora
1	01	02	2,02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Sekolah yang Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium			1 SMP	381.162.617					1 SMP	381.162.617	Dikpora
1	01	02	2,02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Siswa yang menerima kartu pariaman pintar			681 Siswa	852.800.000					681 Siswa	852.800.000	Dikpora
1	01	02	2,02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa					54.514.083						54.514.083	Dikpora
1	01	02	2,02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Sekolah yang mengikuti Kegiatan Minat Bakat			13 SMP	97.600.000					13 SMP	97.600.000	Dikpora
1	01	02	2,02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah PTK yang menerima insentif			91 Orang	449.280.000					91 Orang	449.280.000	Dikpora
1	01	02	2,03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					4.900.865.000						4.900.865.000	Dikpora
1	01	02	2,03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah TK Negeri yg mendapatkan dana operasional PAUD			2 sekolah	2.886.980.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2 sekolah	2.886.980.000	Dikpora
1	01	02	2,03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah TK Negeri Pembina yang mendapatkan perlengkapan sekolah Jumlah TK Negeri yang mendapat moubiler Jumlah TK Swasta dan KB yang di berikan bantuan APE			2 sekolah 2 sekolah 8 sekolah/lem	231.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2 sekolah 2 sekolah 8 sekolah/lem	231.500.000	Dikpora
1	01	02	2,03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah anak yang mengikuti gebyar paud Jumlah anak yang mengikuti Kegiatan Terlaksananya bimtek kurikulum muatan lokal dan kurikulum K13			50 orang 600 orang 120 Orang	30.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				50 orang 600 orang 120 Orang	30.000.000	Dikpora
1	01	02	2,03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD Dikmas			3372 orang/b	1.303.960.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				3372 orang/b	1.303.960.000	Dikpora

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah				
1	01	02	2,03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Bantuan dana Pendidikan guru PAUD Jumlah peserta Diklat Kepala Sekolah Jumlah peserta KKG, PKG, PAUD dan MKKS jumlah peserta study tiru inklusi Jumlah peserta workshop manajemen PAUD Jumlah peserta workshop pendidikan inklusi Jumlah peserta workshop peningkatan kapasitas guru Jumlah terlatihnya pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan PNF Terlaksananya apresiasi terhadap bunda PAUD kecamatan dan desa			30 Orang 30 Orang 300 Orang 4 Orang 96 Orang 25 Orang 96 Orang 8 Orang 82 Orang	230.045.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				30 Orang 30 Orang 300 Orang 4 Orang 96 Orang 25 Orang 96 Orang 8 Orang 82 Orang	230.045.000	Dikpora
1	01	02	2,03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Asesmen peserta didik TK Jumlah lembaga yang didata dan diberikan pembinaan Jumlah lembaga yang di monev Jumlah proposal dan spj bop yang terverikasi			80 Orang 150 lembaga 150 lembaga 150 lembaga	218.380.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				80 Orang 150 lembaga 150 lembaga 150 lembaga	218.380.000	Dikpora
1	01	02	2,04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					30.020.000						30.020.000	Dikpora
1	01	02	2,04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta yang dapat ijazah paket a Jumlah Peserta yang dapat ijazah paket b Jumlah peserta yang dapat ijazah paket c			200 orang 250 orang 350 orang	30.020.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				200 orang 250 orang 350 orang	30.020.000	Dikpora
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda pelopor yang sampai ke tingkat nasional			2						2	1.026.500.000	Dikpora
						Persentase pemuda yang berwirausaha			65						65		Dikpora
						Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif			30						30		Dikpora
2	19	02	2,01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader					631.000.000						631.000.000	Dikpora
2	19	02	2,01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah anggota paskibraka yang diseleksi dan dilatih		Jumlah anggota paskibraka yang diseleksi dan dilatih	200 Orang	631.000.000					200 Orang	631.000.000	Dikpora
2	19	02	2,02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					395.500.000						395.500.000	Dikpora
2	19	02	2,02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti KNPI umlah peserta yang mengikuti Forum youth center			400 Orang 1400 Orang	395.500.000					400 Orang 1400 Orang	395.500.000	Dikpora
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah medali pada event olahraga tingkat daerah			170						170	2.152.600.000	Dikpora

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
												Nasional					Daerah
						Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik			90					90		Dikpora	
						Jumlah sapras olah raga yang direhab			3					3		Dikpora	
						Jumlah Penyelenggaraan event olah raga rekreasi			9					9		Dikpora	
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000					100.000.000		Dikpora	
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	jumlah sepatu roda yang tersedia			10 pasang	100.000.000				10 pasang	100.000.000	Dikpora	
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				252.600.000					252.600.000		Dikpora	
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah GSI SMP Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sepatu Roda Jumlah siswa SD dan SMP yang mengikuti KOSN dan GSI			152 siswa 10 set 292 siswa	252.600.000				152 siswa 10 set 292 siswa	252.600.000	Dikpora	
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				1.500.000.000					1.500.000.000		Dikpora	
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan				1.500.000.000					1.500.000.000		Dikpora	
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				300.000.000					300.000.000		Dikpora	
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				300.000.000					300.000.000		Dikpora	
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Peringkat pramuka tingkat provins			7					6	443.700.000	Dikpora	
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				443.700.000					443.700.000		Dikpora	
2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				443.700.000					443.700.000		Dikpora	
TOTAL														119.192.037.039			

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KESEHATAN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif										
												Nasional	Daerah													
1					2					3					4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM			89							89	42.863.776.354	Dinkes								
						Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat			BB							BB		Dinkes								
						persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan			100							100		Dinkes								
1	02	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13.000.000							13.000.000	Dinkes									
1	02	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan Terlaksananya Pemutakhiran Data Aset dinkes Terlaksananya Rakorkesda Tahun 2022 Terlaksana Sinkronisasi penganggaran dan perencanaan Bidang Kesehatan dan Monev BOK Tahun 2022		50 Dokumen 1 Tahun 1 Tahun 1 Kegiatan	13.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					50 Dokumen 1 Tahun 1 Tahun 1 Kegiatan	13.000.000	Dinkes									
1	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				41.905.396.004							41.905.396.004	Dinkes									
1	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji PNS yang dibayarkan Jumlah TPP yang dibayarkan		14 Bulan 12 Bulan	41.650.096.004	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					14 Bulan 12 Bulan	41.650.096.004	Dinkes									
1	02	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN dengan jasa administrasi dan keuangan yang dibayarkan		25 Orang	255.300.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					25 Orang	255.300.000	Dinkes									
1	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				345.000.000							345.000.000	Dinkes									
1	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		6 Jenis	10.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					6 Jenis	10.000.000	Dinkes									
1	02	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK Kantor yang tersedia Jumlah paket makan Minum Rapat yang tersedia		34 Jenis 600 paket	25.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					34 Jenis 600 paket	25.000.000	Dinkes									
1	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia Jumlah lembaran fotocopi yang tersedia		3 Jenis 21424 Lembar	10.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					3 Jenis 21424 Lembar	10.000.000	Dinkes									
1	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah esselon II, III, IV dan staf		1 Tahun	300.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Tahun	300.000.000	Dinkes									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																				
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif																																																					
												Nasional	Daerah																																																								
1					2					3								4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14	
1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								294.366.000																							294.366.000	Dinkes																																
1	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Persentase surat menyurat yang dikelola							100 %	3.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														100%	3.000.000	Dinkes																																		
1	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Jumlah gedung yang dibayarkan							3 Gedung	192.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													3 Gedung	192.000.000	Dinkes																																			
1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Jumlah alat kebersihan kantor tersedia Jumlah jasa tenaga kebersihan yang disediakan Jumlah jasa tenaga sopir yang disediakan							16 Jenis 3 Orang 1 Orang	99.366.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													16 Jenis 3 Orang 1 Orang	99.366.000	Dinkes																																			
1	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								288.514.350																					288.514.350	Dinkes																																		
1	02	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Jumlah kendaraan yang terbayarkan pajak Jumlah kendaraan yang terpelihara							72 unit 27 unit	245.034.350	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											72 unit 27 unit	245.034.350	Dinkes																																					
1	02	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Jumlah AC yang ter pelihara Jumlah Perlengkapan kantor yang terpelihara							18 unit 35 unit	28.480.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											18 unit 35 unit	28.480.000	Dinkes																																					
1	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor Terlasananya Pemeliharaan Gedung Kantor							1 Tahun 1 Tahun	15.000.000												1 Tahun 1 Tahun	15.000.000	Dinkes																																					
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD								17.500.000																					17.500.000	Dinkes																																		
1	02	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								17.500.000																				17.500.000	Dinkes																																			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					Jumlah kasus kematian bayi 1)							23													23	19.363.485.248	Dinkes																																					
										Jumlah kasus kematian ibu melahirkan 1)							3													3					Dinkes																																		
										Persentase penanganan kasus penyakit menular berpotensi KLB 1)							100													100					Dinkes																																		
										Persentase penanganan kasus penyakit tidak menular 1)							100													100					Dinkes																																		
										Persentase Desa / Kelurahan STBM 1)							100													100						Dinkes																																	
1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								5.031.810.000																				5.031.810.000	Dinkes																																			
1	02	02	2,01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya								354.000.000																				354.000.000	Dinkes																																			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif											
					Nasional	Daerah																				
1					2					3					4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
1	02	02	2,01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1			1 Tahun	2.363.912.000					1 Tahun	2.363.912.000	Dinkes									
1	02	02	2,01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	terlaksananya pengadaan obat dan vaksin			1 Tahun	963.638.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	963.638.000	Dinkes									
1	02	02	2,01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	terlaksananya pengadaan bahan habis pakai			1 Tahun	1.350.260.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	1.350.260.000	Dinkes									
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					14.230.775.248						14.230.775.248	Dinkes									
1	02	02	2,02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	konvergensi dalam rangka penurunan angka kesakitan dan kematian maternal dan perinatal terlaksananya pertemuan review kohort			4 kali 50 orang	40.000.080	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				4 kali 50 orang	40.000.080	Dinkes									
1	02	02	2,02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	konvergensi dalam penurunan angka kesakitan dan angka kematian maternal dan perinatal Terlaksananya pertemuan review kohort ibu hamil			3 kali 40 orang	69.223.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				3 kali 40 orang	69.223.000	Dinkes									
1	02	02	2,02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terlaksananya kegiatan pelacakan kasus kematian neonatal terlaksananya kegiatan review pelayanan neonatal essensia terlaksananya kegiatanSkreening Hipothiroid Kongenital (SHK)			1 tahun 40 orang 1000 orang	30.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 tahun 40 orang 1000 orang	30.000.000	Dinkes									
1	02	02	2,02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Review SDIDDTK pada bayi dan Balita Terlaksananya Pertemuan Lintas Program Imunisasi Terlaksananya Pertemuan Program Imunisasi			1 Tahun 60 orang 90 orang	58.320.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun 60 orang 90 orang	58.320.000	Dinkes									
1	02	02	2,02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terlaksananya Pertemuan BIAS bagi SD Terlaksananya Sosialisasi penjangkaran pada guru Terlaksananya sosialisasi penjangkaran pada petugas			90 orang 1 Kali 1 Tahun	39.796.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				90 orang 1 Kali 1 Tahun	39.796.000	Dinkes									
1	02	02	2,02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya kampanye dan pemucian faktor resiko pada usia produktif			1 Tahun	9.895.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	9.895.000	Dinkes									
1	02	02	2,02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi kesehatan lansia Terlaksananya pelatihan kesehatan lansia Terlaksananya kegiatan monev lansia			50 orang 1 Kali 4 kali	44.480.018	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				50 orang 1 Kali 4 kali	44.480.018	Dinkes									
1	02	02	2,02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	terlaksananya capaity building petugas kesehatan dalam pencegahan dan penanganan kasus hipertensi			30 Nakes	23.076.200	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				30 Nakes	23.076.200	Dinkes									
1	02	02	2,02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Petugas Kesehatan			30 orang	62.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				30 orang	62.000.000	Dinkes									
1	02	02	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rapat Koordinasi TPKJM rujukan rehabilitasi kemandirian ODGJ Terkontrol			4 kec 4 orang	18.350.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				4 kec 4 orang	18.350.000	Dinkes									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
												Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pemantapan pelaksanaan DPPM dan KOPI TB Pembentukan POS TB 22 desa/Kelurahan (DAK)			1 kegiatan 22 desa/kelu 1 kegiatan	58.560.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 kegiatan 22 desa/kelu 1 kegiatan	58.560.000	Dinkes
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pelatihan PDP Peringatan Hari AIDS Sedunia 2022 (DAK) Rapat Koordinasi GENS KOPAR (Gerakan Nikah Sehat Kota Pariaman)			8 Puskesmas 1 kegiatan 4 kecamatan	62.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				8 Puskesmas 1 kegiatan 4 kecamatan	62.000.000	Dinkes
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Konvergensi percepatan penurunan stunting di kota pariaman Surveillans Gizi Terlaksananya pemberian makanan tambahan pada bumil dan anak Terlaksananya peringatan Hari Gizi Nasional Terlaksananya sosialisasi penanggulangan anemia pada remaja putri dan ibu hamil			1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	397.800.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	397.800.000	Dinkes
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kegiatan Penguatan pelaksanaan pos UKK Kegiatan Workshop SITK Odan SIPGAR Terlaksananya pemeriksaan kebugaran calon jamaah haji Kota Pariaman			7 Puskesmas 7 Puskesmas 1 Kali	25.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				7 Puskesmas 7 Puskesmas 1 Kali	25.000.000	Dinkes
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kegiatan Fogging/Pengasapan sarang nyamuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas petugas terkait penyehatan air dan sanitasi dasar Kegiatan Pertemuan Koordinasi percepatan ODF dan 5 Pilar STBM Terlaksananya Sosialisasi, pelatihan surveillans KAMRT			140 fokus 14 orang 33 orang 14 orang	56.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				140 fokus 14 orang 33 orang 14 orang	56.000.000	Dinkes
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					104.352.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					104.352.000	Dinkes
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terlaksananya pelayanan kesehatan calon jamaah haji Kota Pariaman			1 tahun	49.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 tahun	49.000.000	Dinkes

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Evaluasi pelaksanaan KPD Kampanye dan peringatan hari DM Kampanye Pemeriksaan Tekanan Darah dan Peringatan Hari Hptensi Lomba IVA Test Monev PTM Pelatihan POD Cacat Kusta pada nakes Pelatihan Update tatalaksana kusta pada bides Pemantauan kawasan tanpa rokok Pembekalan Kader POSBINDU Penguatan Program Pandu PTM Peningkatan sarana dan Prasarana POSBINDU Penyuluhan Filariasis dan Kecacingan Lintas Sektor Perjadin P2M/pelacakan kasus/prov (DAK), RVS Kusta Masyarakat dan Sekolah Skrining Kesehatan Pengemudi Sosialisasi dan Pembentukan POSBINDU Institusi Surveilain Pelaporan Hepatitis dan ISP(SIHEPI) Workshop dan Diseminasi Penyakit Menular Rabies / Zoonosis pada Anak Sekolah Dasar dan Guru UKS Workshop Manajemen Tatalaksana ISPA			1 kegiatan 1 kali 1 Kali 4 kec 7 Puskesmas 60 orang 63 orang 50 % 50 kader 7 Puskesmas 20 kit 4 Kecamatan 170 kali 10 desa/sekol 100 orang 8 Posbindu 8 puekesmas 50 SD 4 kecamatan 8 puskesmas	161.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 kegiatan 1 kali 1 Kali 4 kec 7 Puskesmas 60 orang 63 orang 50 % 50 kader 7 Puskesmas 20 kit 4 Kecamatan 170 kali 10 desa/sekol 100 orang 8 Posbindu 8 puekesmas 50 SD 4 kecamatan 8 puskesmas	161.000.000	Dinkes
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Program JKN/KIS Terlaksananya Kegiatan Pencanagan UHC Pariaman Sehat Terlaksananya Klain Non Kapitasi Terlaksananya rapat operasional program JKN			100 % 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	10.939.449.700	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				100 % 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	10.939.449.700	Dinkes
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Terlaksananya Pengiriman Spesimen Penyakit yang Berpotensi KLB			50 kali	107.784.250	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				50 kali	107.784.250	Dinkes
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Terlaksananya Forum Kota Sehat			4 kecamatan	50.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				4 kecamatan	50.000.000	Dinkes
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya pelatihan pembuatan laporan keuangan PPK BLUD bagi Pengelola Keuangan Puskesmas dan Dinas Kesehatan			1 Tahun	100.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	100.000.000	Dinkes
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya karantina covid19 Terlaksananya pelayanan PSC 119 Terlaksananya pemberian insentif tanakes yg menangani covid -19			1 tahun 1 kegiatan 1 tahun	1.596.349.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 tahun 1 kegiatan 1 tahun	1.596.349.000	Dinkes
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terakreditasi Puskesmas di Kota Pariaman Terlaksananya Monev Mutu Dan Akreditasi Terlaksananya pembinaan mutu dan akreditasi terlaksananya workshop peningkatan mutu Terlaksananya Workshop PPI dan KP			4 Puskesmas 7 Puskesmas 7 Puskesmas 7 Puskesmas 7 Puskesmas	117.200.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				4 Puskesmas 7 Puskesmas 7 Puskesmas 7 Puskesmas 7 Puskesmas	117.200.000	Dinkes

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif											
												Nasional					Daerah									
1					2					3					4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya Evaluasi Program Surveilans Terlaksananya Pertemuan SKDR Terlaksananya Pertemuan surveilans PD3I			1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	11.140.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	11.140.000		Dinkes							
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi							93.900.000						93.900.000		Dinkes						
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					93.900.000								93.900.000		Dinkes						
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							7.000.000						7.000.000		Dinkes						
1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Pemberian Rekomendasi Izin dan pengawasan perizinan RS kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya			1 Tahun	7.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Tahun	7.000.000		Dinkes							
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN													49.655.000		Dinkes						
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota							24.940.000						24.940.000		Dinkes						
1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah dan Swasta			90%	18.990.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					90%	18.990.000		Dinkes							
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terdatanya tenaga kesehatan yang memiliki SIP Terlaksananya pertemuan Perizinan tenaga kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan			90% 1 Tahun	5.950.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					90% 1 Tahun	5.950.000		Dinkes							
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							24.715.000						24.715.000		Dinkes						
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar					24.715.000								24.715.000		Dinkes						
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							100						100	273.475.774	Dinkes						
						Persentase kegiatan pengawasan keamanan pangan			100									100		Dinkes						
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							39.999.774						39.999.774		Dinkes						
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pertemuan POR Terlaksananya Sosialisasi Gema Cermat			30 Orang 160 Orang	39.999.774	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					30 Orang 160 Orang	39.999.774		Dinkes							
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							87.884.000						87.884.000		Dinkes						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
												Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02	04	2,03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Penyuluhan Keamanan Pangan			70 Orang	87.884.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				70 Orang	87.884.000	Dinkes
1	02	04	2,04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					62.000.000						62.000.000	Dinkes
1	02	04	2,04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya Pemeriksaaan Depot Air Minum Terlaksananya pengelolaan sampah medis puskesmas se kota pariaman Terlaksananya Replikasi Desa Aman Pangan			78 Depot 1 Tahun 1 Desa	62.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				78 Depot 1 Tahun 1 Desa	62.000.000	Dinkes
1	02	04	2,05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan					15.000.000						15.000.000	Dinkes
1	02	04	2,05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya Penyuluhan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS)			60 Orang	15.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				60 Orang	15.000.000	Dinkes
1	02	04	2,06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga					68.592.000						68.592.000	Dinkes
1	02	04	2,06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan					68.592.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					68.592.000	Dinkes
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase PHBS rumah tangga dan sekolah			90						90	489.654.750	Dinkes
1	02	05	2,01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					421.654.750						421.654.750	Dinkes
1	02	05	2,01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	KIE keamanan pangan Pemberdayaan masyarakat di sekolah Terlaksananya peringatan hari kesehatan nasional			560 orang 60 orang 1 kali	421.654.750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				560 orang 60 orang 1 kali	421.654.750	Dinkes
1	02	05	2,02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					68.000.000						68.000.000	Dinkes
1	02	05	2,02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kemampuan petugas dalam mendesain media promosi meningkatnya kemampuan kader poyandu dan nakes dalam melaksanakan promosi meningkatnya kemampuan petugas promkes dalam teknik promosi kesehatan			1 Tahun 217 Orang 1 Kali	68.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun 217 Orang 1 Kali	68.000.000	Dinkes
TOTAL																63.040.047.126	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
												Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	13	7	9	10	11	12	13	14
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM			85	6.054.178.282					87	6.054.178.282	PUPR
						Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat			100						100		PUPR
						Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan			90						90		PUPR
1	03	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.000.000						5.000.000	PUPR
1	03	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan SKPD yang Disusun			5 Dok	5.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				5 Dok	5.000.000	PUPR
1	03	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.445.187.330						5.445.187.330	PUPR
1	03	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan Terbayarkan			14 Bln	5.187.127.330	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				14 Bln	5.187.127.330	PUPR
1	03	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan			12 bulan	258.060.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 bulan	258.060.000	PUPR
1	03	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					89.944.424						89.944.424	PUPR
1	03	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Listrik Yang Disediakan			12 Bln	4.999.424	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bln	4.999.424	PUPR
1	03	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK dan Makan Minum			12 Bln	15.945.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bln	15.945.000	PUPR
1	03	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan			12 Bln	5.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bln	5.000.000	PUPR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
												Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	13	7	9	10	11	12	13	14
1	03	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah			12 Bln	64.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bln	64.000.000	PUPR
1	03	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					351.026.528						351.026.528	PUPR
1	03	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang Disediakan			1 Keg	2.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Keg	2.000.000	PUPR
1	03	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Dan Listrik			12 Bln	106.800.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bln	106.800.000	PUPR
1	03	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor Yang Disediakan			12 Bln	242.226.528	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bln	242.226.528	PUPR
1	03	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					163.020.000						163.020.000	PUPR
1	03	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpelihara dan terbayarnya pajak kendaraan dinas			12 Bln	153.020.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bln	153.020.000	PUPR
1	03	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara			1 Keg	10.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Keg	10.000.000	PUPR
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi dengan kondisi baik 1)			89,49						89,49	5.113.182.389	PUPR
						Persentase sungai berfungsi baik			89,59						89,59		PUPR
1	03	02	2,01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					1.430.697.389						1.430.697.389	PUPR
1	03	02	2,01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya Pembangunan Normalisasi/ Restorasi Sungai			0.5 km	909.137.389					0.5 km	909.137.389	PUPR
1	03	02	2,01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Terlaksananya operasional dan pemeliharaan tanggul dan tebing sungai guna mengantisipasi bencana longsor			2 km	521.560.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2 km	521.560.000	PUPR
1	03	02	2,02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					3.682.485.000						3.682.485.000	PUPR
1	03	02	2,02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabnya jaringan irigasi permukaan Kota Pariaman			1000 meter	3.135.100.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1000 meter	3.135.100.000	PUPR
1	03	02	2,02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Kota Pariaman			16 DI	374.815.000					16 DI	374.815.000	PUPR
1	03	02	2,02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Kota Pariaman			4 DI	172.570.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				4 DI	172.570.000	PUPR
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase jalan kota yang memiliki drainase			64,44						64,44	194.094.000	PUPR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif											
												Nasional					Daerah									
1					2					3					4	5	6	13	7		9	10	11	12	13	14
1	03	06	2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						194.094.000													194.094.000		PUPR
1	03	06	2,01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Jaringan Drainase				1 km	31.854.000												1 km	31.854.000		PUPR
1	03	06	2,01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Terpeliharanya Sistem Jaringan Drainase Guna Menjaga Umur Rencana Bangunan				15 km	162.240.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											15 km	162.240.000		PUPR
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase penyediaan sarana perkantoran tertentu yang representatif				79,38													79,38	14.847.150.000		PUPR
						Persentase Ketersediaan Fasilitas Umum Perkotaan 2)				71,98													71,98			PUPR
						Persentase bangunan gedung pemerintah yang representatif				83,15													83,15			PUPR
1	03	08	2,01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						14.847.150.000													14.847.150.000		PUPR
1	03	08	2,01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terlaksananya Penyelenggaraan TABG				1 Keg	177.655.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											1 Keg	177.655.000		PUPR
1	03	08	2,01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Dokumen Pengadaan Tanah Kawasan Masjid Terapung Terawasinya Pembangunan Kantor Lurah Pasir Terbangunnya Kantor Koramil Kota Pariaman Terbangunnya Kantor Lurah Pasir Terbangunnya Kawasan Youth Center Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Mesjid Terapung Terlaksananya Lanjutan Pengawasan Pembangunan Mesjid Terapung Terlaksananya Pembangunan Landasan Kapal Perang Eks KRI Teluk Ratai Terlaksananya Pembangunan Rest Area, Tugu dan Gerbang Batas Kota Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Landasan Kapal Perang Eks KRI Teluk Ratai Terlaksananya Pengawasan Rehab Gor Sutan Radjo Bujang Terlaksananya Rehab Gor Sutan Radjo Bujang Terpeliharanya Gedung Kantor			1 Dok 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 2 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok	14.669.495.000											1 Dok 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok	14.669.495.000		PUPR		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
												Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	13	7	9	10	11	12	13	14
						Terpeliharanya Rumah Jabatan Tersedianya Dokumen DED Pembangunan Pasar Baru (Pasar Basah) Kota Pariaman Tersedianya Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Museum Kapal KRI Teluk Ratai Tersedianya Penyusunan Dokumen DED Pembangunan Museum Kapal KRI Teluk Ratai Tersedianya Perencanaan Pembangunan Kantor Lurah Pasir											PUPR
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Pesentase kawasan strategis yang tertata										1.295.173.560	PUPR
1	03	09	2,01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota											1.295.173.560	PUPR
1	03	09	2,01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Wisata Talao Pauh Terlaksananya Pembangunan Lapangan Merdeka Terlaksananya Penyusunan Dokumen DEDPembangunan Kawasan Wisata Pantai Ma"ruf Amin Terlaksananya Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Kawasan Wisata Pantai Ma"ruf Amin Tersedianya Sarana Bermain Ramah Anak			1 Keg 1 keg 1 Dok 1 Dok 1 Keg	1.035.490.000					1 Keg 1 keg 1 Dok 1 Dok 1 Keg	1.035.490.000	PUPR
1	03	09	2,01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Pemeliharaan Ruang Terbuka/ Kawasan Wisata Lainnya			1 Keg	259.683.560	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Keg	259.683.560	PUPR
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kota memenuhi standar konstruksi dan fungsi										37.948.060.040	PUPR
1	03	10	2,01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					37.948.060.040						37.948.060.040	PUPR
1	03	10	2,01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	terlaksananya pembebasan lahan atau tanah Jalan			1 Keg	85.793.500					1 Keg	85.793.500	PUPR
1	03	10	2,01	05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun			11.8 km	12.248.697.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				11.8 km	12.248.697.000	PUPR
1	03	10	2,01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang dibangun			6.22 km	16.754.892.000					6.22 km	16.754.892.000	PUPR
1	03	10	2,01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan					3.685.041.000						3.685.041.000	PUPR
1	03	10	2,01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpelihara dan Terjaganya Jalan dan Trotoar			40 km	5.023.636.540	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				40 km	5.023.636.540	PUPR
1	03	10	2,01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terpelihara dan Terjaganya Jembatan			10 Jembatan	150.000.000					10 Jembatan	150.000.000	PUPR
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pekerjaan jasa konstruksi yang berkinerja baik			85						85	75.567.750	PUPR
1	03	11	2,01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					35.824.750						35.824.750	PUPR
1	03	11	2,01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			1 Keg	35.824.750					1 Keg	35.824.750	PUPR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif												
												Nasional					Daerah										
1					2					3					4	5	6	13	7		9	10	11	12	13		14
1	03	11	2,04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi					39.743.000							39.743.000								39.743.000	PUPR	
1	03	11	2,04	02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Bimtek Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			1 keg	39.743.000						1 keg	39.743.000							1 keg	39.743.000	PUPR	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kepatuhan pelaku pembangunan sesuai rencana tata ruang 1)			36,18							36,18	208.372.000							36,18	208.372.000	PUPR	
1	03	12	2,01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota					151.691.000							151.691.000								151.691.000	PUPR	
1	03	12	2,01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Tersedianya Materi Teknis RDTR			1 Dok	151.691.000						1 Dok	151.691.000							1 Dok	151.691.000	PUPR	
1	03	12	2,03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					56.681.000							56.681.000								56.681.000	PUPR	
1	03	12	2,03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Laporan Informasi Penataan Ruang			1 Dok	56.681.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Dok	56.681.000							1 Dok	56.681.000	PUPR	
2	10	02			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase luas tanah yang pemanfaatannya sesuai izin lokasi			85							85	13.749.843								85	13.749.843	PUPR
2	10	02	2,01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					13.749.843							13.749.843								13.749.843	PUPR	
2	10	02	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Tersedianya Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			12 Izin	13.749.843	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					12 Izin	13.749.843							12 Izin	13.749.843	PUPR	
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase tanah sengketa konflik yang difasilitasi			27,83							27,83	52.998.760								52.998.760	PUPR	
2	10	04	2,01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota					52.998.760							52.998.760								52.998.760	PUPR	
2	10	04	2,01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Hasil Inventarisasi			1 Dok	15.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Dok	15.000.000							1 Dok	15.000.000	PUPR	
2	10	04	2,01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Mediasi			2 Kasus	37.998.760						2 Kasus	37.998.760							2 Kasus	37.998.760	PUPR	
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	% Luas Ha Tanah Yang Dibebaskan			100							100	14.999.945								14.999.945	PUPR	
2	10	05	2,01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					14.999.945							14.999.945								14.999.945	PUPR	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
1						2	3	4	5	6	13	7	9	10	11	12	13	14
2	10	05	2,01	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pengadaan Tanah Pada OPD			1 Keg	14.999.945	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Keg	14.999.945	PUPR
2	10	09				PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH											286.829.500	PUPR
2	10	09	2,01			Penerbitan Izin Membuka Tanah					286.829.500						286.829.500	PUPR
2	10	09	2,01	02		Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Sertifikat Tanah PEMKO Pariaman yang Diterbitkan			50 Sertifikat	286.829.500	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				50 Sertifikat	286.829.500	PUPR
2	10	10				PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum			15						15	57.054.000	PUPR
							Persentase sertifikasi aset tanah dan bangunan pemko 1)			17,46						17,46		PUPR
2	10	10	2,01			Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota					57.054.000						57.054.000	PUPR
2	10	10	2,01	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Fasilitas P[enyelenggaraan PTSL di Kota Pariaman			10 desa/kelu	57.054.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				10 desa/kelu	57.054.000	PUPR
TOTAL																	66.161.410.069	



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif												
												Nasional					Daerah										
1					2					3					4	5	6	13	7		9	10	11	12	13		14
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai IKM			90	5.529.245.759					90	5.529.245.759	Satpol										
						Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat			BB						BB		Satpol										
						Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan			100						100		Satpol										
1	05	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.850.000						10.850.000	Satpol										
1	05	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan yang berkualitas baik			2 dokumen	3.350.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2 dokumen	3.350.000	Satpol										
1	05	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen perncanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas dan laporan keuangan yang			3 dokumen	7.500.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua				3 dokumen	7.500.000	Satpol										
1	05	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.030.454.317						5.030.454.317	Satpol										
1	05	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Pegawai PNS yang dibayarkan perbulannya Jumlah pegawai yang dibayarkan TPP perbulannya			14 Bulan 12 Bulan	4.891.554.317	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				14 Bulan 12 Bulan	4.891.554.317	Satpol										
1	05	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	honorarium penyediaan jasa adm keuangan honorarium penyediaan jasa adm keuangan			12 bulan 18 orang	138.900.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 bulan 18 orang	138.900.000	Satpol										
1	05	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					92.500.000						92.500.000	Satpol										
1	05	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat alat listrik yang disediakan			8 item	10.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				8 item	10.000.000	Satpol										
1	05	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan kosumsi untuk rapat rapat dinas dan tamu			37 item 400 ok	15.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				37 item 400 ok	15.000.000	Satpol										
1	05	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan Jumlah Fotocopy yang disediakan			3 item 50000 lembar	7.500.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				3 item 50000 lembar	7.500.000	Satpol										
1	05	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	perjalanan dinas yang tersedia			12 bulan	60.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 bulan	60.000.000	Satpol										
1	05	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					90.242.342						90.242.342	Satpol										
1	05	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai yang disediakan			300 lembar	1.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				300 lembar	1.000.000	Satpol										
1	05	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			12 bulan	49.200.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 bulan	49.200.000	Satpol										
1	05	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	honor tenaga kebersihan Jumlah peralatan pelayanan umum yang			2 orang/tahu 20 macam	40.042.342	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2 orang/tahu 20 macam	40.042.342	Satpol										

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
												Nasional					Daerah
1	05	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				305.199.100					305.199.100	Satpol		
1	05	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara perizinan kendaraan dinas		11 unit 11 unit	134.349.100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			11 unit 11 unit	134.349.100	Satpol		
1	05	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara perizinan kendaraan operasional		11 unit 11 unit	159.900.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			11 unit 11 unit	159.900.000	Satpol		
1	05	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara		35 unit	5.950.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			35 unit	5.950.000	Satpol		
1	05	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	JUmlah gedung kantor yang dipelihara		2 Item	5.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua			2 Item	5.000.000	Satpol		
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda 1		100	3.468.132.560				100	3.468.132.560	Satpol		
						Persentase anggota Linmas yang ikut pelatihan		100					100		Satpol		
						Persentase pelayanan penanggulangan bencana		100					100		Satpol		
1	05	02	2,01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				3.413.787.560					3.413.787.560	Satpol		
1	05	02	2,01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	jumlah iven yang diamankan jumlah lokasi vital yang diamankan jumlah tenaga kontrak yang membantu pencegahan dan penanggulangan gangguan trantibum Persentase zona merah yang tertib dan religius		4 event 13 lokasi 137 Ob 100 %	3.137.567.560	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 event 13 lokasi 137 Ob 100 %	3.137.567.560	Satpol		
1	05	02	2,01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	jumlah perda/perwako yang ditegakkan		11 buah	126.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			11 buah	126.500.000	Satpol		
1	05	02	2,01	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah hari besar/event yang diamankan yang dibantu dalam penjagaan Trantibum oleh TNI-Polri Jumlah Perda/Perwako yang dibantu dalampenegakan oleh TNI-POLRI lokasi yang dilakukan penjagaan oleh TNI-Polri		4 event 11 buah 1 lokasi	149.720.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 event 11 buah 1 lokasi	149.720.000	Satpol		
1	05	02	2,02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				54.345.000					54.345.000	Satpol		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
												Nasional					Daerah
1	05	02	2,02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kasus pelanggaran Perda/Perwako secara NonYustisi Penegakan dan Penanganan Peraturan Daerah Kota Pariaman Penegakan dan Penanganan Peraturan Walikota Pariaman Terlaksananya Penegakan dan Penanganan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Pariaman			63 kasus 1 Perda 1 Perwako 90 %	35.970.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			63 kasus 1 Perda 1 Perwako 90 %	35.970.000	Satpol	
1	05	02	2,02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kasus pelanggaran Perda/Perwako secaraYustisi			16 kasus	18.375.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			16 kasus	18.375.000	Satpol	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Cakupan pelayanan penanganan kebakaran 1)			133	1.568.050.056				133	1.568.050.056	Satpol	
1	05	04	2,01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.568.050.056					1.568.050.056	Satpol	
1	05	04	2,01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya masyarakat yang sadar bahaya kebakaran serta biaya jasa serta jaminan tenaga kerja dan kesehatan bagi tenaga kontrak bantuan pemadam kebakaran			1 tahun	1.372.495.056	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1.372.495.056	Satpol	
1	05	04	2,01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	cakupan warga negara yang memperoleh layanan penanggulangan kebakaran			100 %	166.350.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100%	166.350.000	Satpol	
1	05	04	2,01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			100 %	29.205.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100%	29.205.000	Satpol	
Total															10.565.428.375		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	13	7	9	10	11	12	13	14
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai IKM			89,00	3.352.305.773					89,00	3.352.305.773	BPBD
						Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat			BB						BB		BPBD
						Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan			100						100		BPBD
1	05	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.000.000						4.000.000	BPBD
1	05	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan keuangan yang disusun Jumlah Dokumen LKPJ yang di susun Jumlah Dokumen LPPD yang disusun Jumlah dokumen RTP yang disusun			1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	4.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	4.000.000	BPBD
1	05	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.700.006.923						2.700.006.923	BPBD
1	05	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.571.906.923						2.571.906.923	BPBD
1	05	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa administrasi dan keuangan yang dibayarkan			1 Tahun	128.100.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	128.100.000	BPBD
1	05	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					84.895.200						84.895.200	BPBD
1	05	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diganti/disediakan			1 tahun	4.895.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 tahun	4.895.000	BPBD
1	05	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK Kantor Yang Disediakan Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan			1 tahun 1 tahun	15.000.200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 tahun 1 tahun	15.000.200	BPBD
1	05	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak yang disediakan dalam 1 tahun Jumlah Lembar Fotocopy Yang Disediakan			1 tahun 1 tahun	5.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 tahun 1 tahun	5.000.000	BPBD
1	05	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat dan konsultasi yang dilakukan ke provinsi, pusat, lintas SKPD, dll			1 tahun	60.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 tahun	60.000.000	BPBD
1	05	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					249.456.200						249.456.200	BPBD
1	05	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia			1 Tahun	1.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	1.000.000	BPBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
												Nasional					Daerah
1	05	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kwh listrik yang dibayarkan Yang Dibayarkan Perbulannya			1 Tahun	132.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	132.000.000	BPBD
1	05	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bahan Kebersihan dan alat Kebersihan Kantor Yang Disediakan			1 Tahun 6 orang	116.456.200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun 6 orang	116.456.200	BPBD
1	05	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah tenaga kebersihan yang di bayarkan				313.947.450						313.947.450	BPBD
1	05	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang bayarkan perbulannya Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dibayarkan Pajaknya			1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	103.947.450	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	103.947.450	BPBD
1	05	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan			1 Tahun	10.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	10.000.000	BPBD
1	05	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dilakukan Rehab			1 tahun	200.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 tahun	200.000.000	BPBD
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana 1)			100	1.504.060.000					100	1.504.060.000	BPBD
						Presentase kejadian bencana yg bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana 1)			100						100		BPBD
						Persentase warga Kota Pariaman yang menerima pelayanan penanggulangan bencana 1)			100						100		BPBD
						Persentase pelayanan penanggulangan bencana			100						100		BPBD
1	05	03	2,03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					1.250.330.000						1.250.330.000	BPBD
1	05	03	2,03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Terlaksananya Operasional Pencegahan dan Penanggulangan Bencana			1 Tahun	1.136.250.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	1.136.250.000	BPBD
1	05	03	2,03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana			6 petugas	114.080.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				6 petugas	114.080.000	BPBD
1	05	03	2,04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					253.730.000						253.730.000	BPBD
1	05	03	2,04	03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota					200.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					200.000.000	BPBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah				
1	05	03	2,04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan					53.730.000					53.730.000	BPBD	
Total															4.856.365.773		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif										
												Nasional	Daerah												
1					2					3					4	5	6	13	7	9	10	11	12	13	14
1	03	04				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					1.140.000.000												1.140.000.000		PERKIMLH
1	03	04	2,01			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota					1.140.000.000												1.140.000.000		PERKIMLH
1		03	04	2,01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPS3R yang Dibangun			2 unit	1.140.000.000											2 unit	1.140.000.000		PERKIMLH
1	03	05				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak 1)			98,18	4.431.332.500											98,18	4.431.332.500		PERKIMLH
1	03	05	2,01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					4.431.332.500												4.431.332.500		PERKIMLH
1		03	05	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang disusun			1 dokumen	62.573.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										1 dokumen	62.573.000		PERKIMLH
1	03	05	2,01	06		Pembangunan/penyediaan SUD Sistem Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Pembangunan Tanki Septik			500 unit	4.166.455.000											500 unit	4.166.455.000		PERKIMLH
1	03	05	2,01	08		Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Tersedianya Administrasi Pembangunan Prasarana DAK			1 tahun	202.304.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										1 tahun	202.304.500		PERKIMLH
1	03	06				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase jalan kota yang memiliki drainase			64,44	345.850.000											64,44	345.850.000		PERKIMLH
1	03	06	2,01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					345.850.000												345.850.000		PERKIMLH
1	03	06	2,01	09		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Lokasi Sarana dan Prasarana Drainase yang direhab/dipelihara			10 ruas	345.850.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										10 ruas	345.850.000		PERKIMLH
1	03	07				PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase jalan lingkung dengan kondisi baik			45	525.225.000											45	525.225.000		PERKIMLH
1	03	07	2,01			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					525.225.000												525.225.000		PERKIMLH
1	03	07	2,01	01		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi atau Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Lingkungan di Kawasan Permukiman			1 kegiatan	525.225.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										1 kegiatan	525.225.000		PERKIMLH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah			
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM			87	7.281.365.365				87	7.281.365.365	PERKIMLH
						Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat			BB					BB		PERKIMLH
						Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan			100					100		PERKIMLH
1	04	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					16.208.000					16.208.000	PERKIMLH
1	04	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Yang Disajikan			2 DOKUMEN	6.208.000				2 DOKUMEN	6.208.000	PERKIMLH
1	04	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD			3 Dokumen	10.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3 Dokumen	10.000.000	PERKIMLH
					Jumlah Dokumen Perencanaan OPD Yang Disusun (Renstra dan Renja)				2 Dokumen					2 Dokumen		PERKIMLH
1	04	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.784.423.835					6.784.423.835	PERKIMLH
1	04	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah TPP yang dibayarkan lancarnya pembayaran gaji, lancarnya pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja			12 Bulan 14 bulan	6.531.223.835	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan 14 bulan	6.531.223.835	PERKIMLH
1	04	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah jasa administrasi dan keuangan yang dibayarkan			21 orang	253.200.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			21 orang	253.200.000	PERKIMLH
1	04	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					14.500.000					14.500.000	PERKIMLH
1	04	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek			3 orang	14.500.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3 orang	14.500.000	PERKIMLH
1	04	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					91.501.830					91.501.830	PERKIMLH
1	04	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen listrik yang disediakan kantor			6 jenis	2.998.580				6 jenis	2.998.580	PERKIMLH
1	04	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah ATK kantor yang disediakan jumlah makan dan minum rapat yang disediakan kantor			12 bulan 12 bulan	18.503.250	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan 12 bulan	18.503.250	PERKIMLH
1	04	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan yang disediakan kantor			6 jenis	10.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6 jenis	10.000.000	PERKIMLH
1	04	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat dan konsultasi yang dilakukan			12 bulan	60.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	60.000.000	PERKIMLH
1	04	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					233.107.400					233.107.400	PERKIMLH
1	04	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai yang disediakan			195 lembar	1.950.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			195 lembar	1.950.000	PERKIMLH
1	04	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah kwh listrik yang dibayarkan perbulannya			12 bulan	122.200.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	122.200.000	PERKIMLH
1	04	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honor Tenaga Administrasi, Sopir, dan GO Kebersihan kantor yang dibayarkan Jumlah jenis alat kebersihan kantor yang disediakan			5 orang 12 bulan	108.957.400	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 orang 12 bulan	108.957.400	PERKIMLH
1	04	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					141.624.300					141.624.300	PERKIMLH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah			
1	04	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Jumlah pajak kendaraan dinas yang dibayarkan			33 unit 33 unit	119.514.300	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			33 unit 33 unit	119.514.300	PERKIMLH
1	04	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			33 unit	22.110.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			33 unit	22.110.000	PERKIMLH
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penurunan angka Backlog (kebutuhan rumah) 1)			13,97	54.387.500				13,97	54.387.500	PERKIMLH
1	04	02	2,01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					54.387.500					54.387.500	PERKIMLH
1	04	02	2,01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota					54.387.500					54.387.500	PERKIMLH
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak 1)			96,97	5.898.487.000				96,97	5.898.487.000	PERKIMLH
						Persentase Rumah Layak Huni 1)			96,27					96,27		PERKIMLH
						Persentase Luas Permukiman Kumuh 2)			0,3					0,3		PERKIMLH
1	04	03	2,02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha					17.695.000					17.695.000	PERKIMLH
1	04	03	2,02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Peserta Sosialisasi/coaching Clinic Kegiatan KOTAKU Tersedianya Dana administrasi pendampingan kegiatan KOTAKU Tersusunnya Dokumen PR2KPKPK			2 keg 2 keg 1 Dokumen	17.695.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 keg 2 keg 1 Dokumen	17.695.000	PERKIMLH
1	04	03	2,03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh)					5.880.792.000					5.880.792.000	PERKIMLH
1	04	03	2,03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terfasilitasinya perbaikan RTLH DAK Perumahan Terfasilitasinya sosialisasi kegiatan RTLH Tersedianya Dana Pendamping Kegiatan Pra Pelaksanaan APBN Perumahan Swadaya (DAK dan BSPS))			162 Unti 1 keg 162 unit PB (DAK)	5.880.792.000				162 Unti 1 keg 162 unit PB (DAK)	5.880.792.000	PERKIMLH
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang 1)			18,62	991.372.364				18,62	991.372.364	PERKIMLH
1	04	05	2,01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					991.372.364					991.372.364	PERKIMLH
1	04	05	2,01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas di Perumahan Terlaksananya Sosialisasi penyediaan PSU perumahan			1 keg 1 keg	991.372.364	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 keg 1 keg	991.372.364	PERKIMLH
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air 1)			75	188.430.984				75	188.430.984	PERKIMLH
						Indeks kualitas udara 1)			80					80		PERKIMLH
2	11	03	2,01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					120.340.000					120.340.000	PERKIMLH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Daerah				
2	11	03	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah titik/ lokasi pemantauan kualitas air permukaan (sungai, talao, dan laut) Jumlah titik/lokasi pemantauan kualitas udara ambien/emisi Terlaksananya invetarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air			48 Titik 12 Titik 1 Sungai	120.340.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				48 Titik 12 Titik 1 Sungai	120.340.000	PERKIMLH
2	11	03	2,02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					68.090.984						68.090.984	PERKIMLH
2	11	03	2,02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah dokumen informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan Executive Summary yang dihasilkan			2 Dokumen	68.090.984	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2 Dokumen	68.090.984	PERKIMLH
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase RTH Publik (City In The Garden)			10	1.366.687.600					11	1.366.687.600	PERKIMLH
2	11	04	2,01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					1.366.687.600						1.366.687.600	PERKIMLH
2	11	04	2,01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	jumlah kawasan RTH dan taman kota yang dipelihara			16 kawasan	1.366.687.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				16 kawasan	1.366.687.600	PERKIMLH
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH					5.085.950						5.085.950	PERKIMLH
2	11	05	2,02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					5.085.950						5.085.950	PERKIMLH
2	11	05	2,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan			25 kali	5.085.950	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				25 kali	5.085.950	PERKIMLH
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup 1)			60,01	32.032.500					60,01	32.032.500	PERKIMLH
2	11	06	2,01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					32.032.500						32.032.500	PERKIMLH
2	11	06	2,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	rekomendasi kelayakan lingkungan yang diproses sesuai SOP			25 rekomend	21.145.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				25 rekomend	21.145.000	PERKIMLH
2	11	06	2,01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi			15 Usaha/Ke	10.887.500	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				15 Usaha/Ke	10.887.500	PERKIMLH
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Kelompok Masyarakat dan sekolah yang terbina dalam pengelolaan lingkungan			80	17.861.500					80	17.861.500	PERKIMLH
2	11	08	2,01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					17.861.500						17.861.500	PERKIMLH
2	11	08	2,01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya bimtek gerakan PBLHS Terlaksananya pembinaan dan penilaian calon sekolah penerima adiwiyata Terlaksananya peringatan HPSN di Kota Pariaman			60 orang 5 kategori 1 Kali	17.861.500	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				60 orang 5 kategori 1 Kali	17.861.500	PERKIMLH
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					2.920.000						2.920.000	PERKIMLH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas					
												Nasional		Daerah			
2	11	10	2,01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan				2.920.000						2.920.000	PERKIMLH	
2	11	10	2,01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti			6 kasus	2.920.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				6 kasus	2.920.000	PERKIMLH
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase cakupan pelayanan persampahan 1)			95,34	2.919.410.070					95,34	2.919.410.070	PERKIMLH
2	11	11	2,01		Pengelolaan Sampah					2.919.410.070						2.919.410.070	PERKIMLH
2	11	11	2,01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Kebersihan Kota			12 bulan	2.919.410.070	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 bulan	2.919.410.070	PERKIMLH
														Total		25.200.448.333	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS SOSIAL
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif												
												Nasional					Daerah										
1					2					3					4	5	6	13	7		9	10	11	12	13		14
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai IKM			91	3.286.583.592					91	3.286.583.592	Dinsos										
						Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat			BB						BB		Dinsos										
						Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan			100						100		Dinsos										
1	06	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7.000.000						7.000.000	Dinsos										
1	06	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd			5 dokumen	7.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				5 dokumen	7.000.000	Dinsos										
1	06	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.852.767.130						2.852.767.130	Dinsos										
1	06	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji Pegawai dan TPP			1 tahun	2.738.767.130					1 tahun	2.738.767.130	Dinsos										
1	06	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah tenaga yang mendapat jasa administrasi keuangan			17 orang	114.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				17 orang	114.000.000	Dinsos										
1	06	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					83.249.056						83.249.056	Dinsos										
1	06	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor			1 tahun	3.298.896	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 tahun	3.298.896	Dinsos										
1	06	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis atk Jumlah rapat yag dilaksanakan			1 tahun 1 tahun	14.950.160	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 tahun 1 tahun	14.950.160	Dinsos										
1	06	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan			1 tahun	5.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 tahun	5.000.000	Dinsos										
1	06	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rakor yang dilaksanakan/diikuti			1 tahun	60.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 tahun	60.000.000	Dinsos										
1	06	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					126.000.000						126.000.000	Dinsos										
1	06	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Roda 2			5 Unit	90.000.000					5 Unit	90.000.000	Dinsos										
1	06	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC Infocus Komputer Printer			1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	36.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	36.000.000	Dinsos										

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
												Nasional					Daerah
1	06	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				113.626.406						113.626.406	Dinsos	
1	06	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat			1 tahun	3.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua				1 tahun	3.000.000	Dinsos
1	06	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			1 tahun	3.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 tahun	3.000.000	Dinsos
1	06	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor			1 tahun	107.626.406	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 tahun	107.626.406	Dinsos
1	06	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				103.941.000						103.941.000	Dinsos	
1	06	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang mendapat pemeliharaan dan perizinan Jumlah Kendaraan yang mendapatkan pemeliharaan rutin			11 unit 1 Tahun	97.241.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				11 unit 1 Tahun	97.241.000	Dinsos
1	06	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang mendapatkan Pemeliharaan rutin			1 Tahun 1 Tahun	6.700.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua				1 Tahun 1 Tahun	6.700.000	Dinsos
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos 1)			70	393.930.044					70	393.930.044	Dinsos
1	06	02	2,03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah				393.930.044						393.930.044	Dinsos	
1	06	02	2,03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Keluarga (Pendamping PKH) yang mendapatkan penguatan dalam melakukan pendampingan keluarga penerima bansos PKH			1 tahun	23.551.902					1 tahun	23.551.902	Dinsos
1	06	02	2,03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbantunya masyarakat miskin yang belum tersentuh bantuan oleh LKKS Terlaksananya Sosialisasi Posdaya Terlaksananya Sunatan Masal oleh LKKS Terlatihnya Karang Taruna dalam pengelolaan UEP Terlayannya anak panti asuhan oleh LKKS Terlayannya masyarakat melalui SLRT			200 KK 4 Kecamatan 50 Anak 71 Desa / Kelurahan 230 Anak 1 Tahun	347.765.642	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				200 KK 4 Kecamatan 50 Anak 71 Desa / Kelurahan 230 Anak 1 Tahun	347.765.642	Dinsos
1	06	02	2,03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah pelayanan dan konsultasi keluarga bermasalah sosial			1 tahun	22.612.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 tahun	22.612.500	Dinsos
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang tertangani oleh PSKS 1)			100	84.350.000					100	84.350.000	Dinsos
1	06	04	2,01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				42.000.000						42.000.000	Dinsos	
1	06	04	2,01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase kasus kedaruratan penyandang DT,LT, AT, Gepeng dan Masyarakat yang ditangani			100 %	42.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				100 %	42.000.000	Dinsos

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah			
1	06	04	2,02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				42.350.000						42.350.000	Dinsos
1	06	04	2,02	03	Penyediaan Permakanan	Terlaksananya rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS/PPKS lainnya selain HIV dan NAPZA luar Panti serta berbasiskan keluarga dan lingkungan		1 Tahun	3.750.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun		3.750.000	Dinsos
1	06	04	2,02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Kasus Penyandang Dis. Pemntal, Org Terlantar,Jenazah Terlantar, dan Tuna Sosial lainnya yang dilakukan reunifikasi ke Keluarga Pengasuh dan Layanan Kedaruratan.		100 %	15.600.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %		15.600.000	Dinsos
1	06	04	2,02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase Kasus Penyandang Dis. Pemntal dan Tuna Sosial lainnya yang dilakukan layanan rujukan		100 %	23.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %		23.000.000	Dinsos
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keakuratan data kemiskinan (DTKS)		100	674.466.800				100		674.466.800	Dinsos
1	06	05	2,02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				674.466.800						674.466.800	Dinsos
1	06	05	2,02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi DTKS Terlaksananya Pendataan PPKS dan PSKS		1 Tahun 1 Tahun	44.600.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun 1 Tahun		44.600.000	Dinsos
1	06	05	2,02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data FM yang dikelola untuk pelaksanaan program perlindungan sosial		100 %	29.866.800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %		29.866.800	Dinsos
1	06	05	2,02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial keluarga miskin melalui bantuan sosial Rehabilitasi Rumah tidak layak huni		100 Persen	400.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 Persen		400.000.000	Dinsos
1	06	05	2,02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Ekonomi Keluarga Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) mealalui bantuan sosial wanita rawan sosial ekonomi		100 persen	200.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 persen		200.000.000	Dinsos
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tetangani		100	85.198.000				100		85.198.000	Dinsos
1	06	06	2,01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				74.068.000						74.068.000	Dinsos
1	06	06	2,01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah ketersediaan stok permakanan untuk penanganan bencana alam dan sosial		1 Tahun	33.400.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun		33.400.000	Dinsos
1	06	06	2,01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah ketersediaan stok sandang untuk penanganan bencana alam dan sosial		1 Tahun	40.668.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun		40.668.000	Dinsos
1	06	06	2,02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				11.130.000						11.130.000	Dinsos
1	06	06	2,02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terlaksananya apel siaga TAGANA dan Pengerahan PAM Lebaran		100 Persen	11.130.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 Persen		11.130.000	Dinsos
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase keterlibatan kelompok masyarakat dalam peringatan hari Pahlawan		100	32.141.446				100		32.141.446	Dinsos

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas					
												Nasional		Daerah			
1	06	07	2,01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				32.141.446					32.141.446	Dinsos		
1	06	07	2,01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa			100 %	14.999.350	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	14.999.350	Dinsos	
1	06	07	2,01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Pengamanan Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota			1 Orang	17.142.096	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Orang	17.142.096	Dinsos	
															Total	4.556.669.882	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM			90						90	3.132.386.582	Disdukcapil
						Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat			BB						BB		Disdukcapil
						Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan			100%						100%		Disdukcapil
2	12	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					6.080.500						6.080.500	Disdukcapil
2	12	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 dokumen	3.481.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				4 dokumen	3.481.000	Disdukcapil
2	12	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3 dokumen	2.599.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				3 dokumen	2.599.500	Disdukcapil
2	12	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.773.225.482						2.773.225.482	Disdukcapil
2	12	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN serta Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			14 bulan	2.667.934.982	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				14 bulan	2.667.934.982	Disdukcapil
2	12	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN serta Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 bulan	100.800.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 bulan	100.800.000	Disdukcapil
2	12	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN serta Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 dokumen	4.490.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 dokumen	4.490.500	Disdukcapil
2	12	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					77.312.500						77.312.500	Disdukcapil
2	12	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan dan Bahan Logistik Kantor serta Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD			12 bulan	1.510.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 bulan	1.510.000	Disdukcapil
2	12	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan dan Bahan Logistik Kantor serta Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD			12 bulan	15.170.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 bulan	15.170.000	Disdukcapil
2	12	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan dan Bahan Logistik Kantor serta Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD			12 bulan	7.232.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 bulan	7.232.500	Disdukcapil
2	12	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan dan Bahan Logistik Kantor serta Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD			12 bulan	53.400.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 bulan	53.400.000	Disdukcapil
2	12	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					146.280.600						146.280.600	Disdukcapil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
2	12	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Suart Menyurat dan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12 bulan	2.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 bulan	2.000.000	Disdukcapil
2	12	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Suart Menyurat dan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12 bulan	144.280.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 bulan	144.280.600	Disdukcapil
2	12	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					129.487.500						129.487.500	Disdukcapil
2	12	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah			12 bulan	100.762.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 bulan	100.762.500	Disdukcapil
2	12	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah			12 bulan	17.925.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 bulan	17.925.000	Disdukcapil
2	12	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah			12 bulan	10.800.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 bulan	10.800.000	Disdukcapil
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan kepemilikan KK			100%						100%	257.630.500	Disdukcapil
						cakupan kepemilikan KTP-el			91%						91%		Disdukcapil
						Persentase penyelesaian penerbitan dokumen pendaftaran penduduk tepat			100%						100%		Disdukcapil
						Rata-rata lama waktu penyelesaian penerbitan dokumen (SOP) pendaftaran			1 Hari						1 Hari		Disdukcapil
2	12	02	2,01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk					257.630.500						257.630.500	Disdukcapil
2	12	02	2,01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Publik dalam Bidang Administrasi Kependudukan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan akta Capil ke Desa/Kelurahan di kota Pariaman serta Tersedianya Formulir Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Akta Capil dan juga Tersusun dan Terpeliharanya Arsip Dokumen Administrasi Kependudukan			21 Jenis	76.618.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				21 Jenis	76.618.000	Disdukcapil
2	12	02	2,01	06	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Terlaksananya Pelayanan Publik dalam Bidang Administrasi Kependudukan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan akta Capil ke Desa/Kelurahan di kota Pariaman serta Tersedianya Formulir Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Akta Capil dan juga Tersusun dan Terpeliharanya Arsip Dokumen Administrasi Kependudukan			12 bulan	7.225.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 bulan	7.225.000	Disdukcapil
2	12	02	2,01	07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Terlaksananya Pelayanan Publik dalam Bidang Administrasi Kependudukan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan akta Capil ke Desa/Kelurahan di kota Pariaman serta Tersedianya Formulir Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Akta Capil dan juga Tersusun dan Terpeliharanya Arsip Dokumen Administrasi Kependudukan			12 bulan 12 bulan	173.787.500	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 bulan 12 bulan	173.787.500	Disdukcapil
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun			92%						92%	7.707.000	Disdukcapil
						Cakupan penerbitan akta kematian			62%						62%		Disdukcapil
						Persentase penyelesaian penerbitan dokumen pencatatan sipil tepat waktu			100%						100%		Disdukcapil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Rata-rata lama waktu penyelesaian penerbitan dokumen (SOP) pencatatan sipil			1 Hari					1 Hari		Disdukcapil	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil					7.707.000					7.707.000	Disdukcapil	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlayannya Masyarakat dalam Pembuatan Akta Capil			12 Bulan	7.707.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	7.707.000	Disdukcapil	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase sarana dan prasarana SIAK dan KTP EI dalam kondisi baik									13.630.000	Disdukcapil	
						Jumlah nota kesepahaman kerjasam inovasi pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil										Disdukcapil	
						Persentase pemberian hak akses data kependudukan										Disdukcapil	
						Persentase pengolahan data kependudukan										Disdukcapil	
						Persentase media yang digunakan untuk publikasi dan edukasi										Disdukcapil	
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					13.630.000					13.630.000	Disdukcapil	
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			12 bulan	6.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	6.000.000	Disdukcapil	
2	12	04	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			12 bulan	7.630.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	7.630.000	Disdukcapil	
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase penyajian data kependudukan			100%					100%	27.228.250	Disdukcapil	
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan					27.228.250					27.228.250	Disdukcapil	
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Tersusunnya Buku Profil Kependudukan			2 Buku	27.228.250	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 Buku	27.228.250	Disdukcapil	
TOTAL																3.438.582.332	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas					
										Pagu Indikatif			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	13	8	9	10	11	12	13	14
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM			89%	3.476.634.852					89%	3.476.634.852	
						Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat			BB						BB		DPMDes
						Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan			100%						100%		DPMDes
2	13	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi					15.052.960						15.052.960	
2	13	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja (n+1) Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah			12 Bulan 2 Jenis laporan	7.499.960	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bulan 2 Jenis laporan	7.499.960	DPMDes
2	13	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Lakip Tahun n-1			12 Bulan	7.553.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bulan	7.553.000	DPMDes
2	13	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.855.640.692						2.855.640.692	
2	13	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai DPMD yang dibayarkan gaji dan tunjangan Jumlah realisasi pembayaran gaji ASN			12 bulan 27 Orang	2.732.340.692	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 bulan 27 Orang	2.732.340.692	DPMDes
2	13	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah honorarium DPMD			17 orang	123.300.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan				17 orang	123.300.000	DPMDes
2	13	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					234.995.700						234.995.700	
2	13	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik			12 bulan	2.999.200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 bulan	2.999.200	DPMDes
2	13	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan ATK Jumlah penyediaan makan minum rapat dan kegiatan			12 Bulan 12 bulan	15.010.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bulan 12 bulan	15.010.500	DPMDes
2	13	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan			12 Bulan	15.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan				12 Bulan	15.000.000	DPMDes
2	13	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi			12 Bulan	201.986.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bulan	201.986.000	DPMDes
2	13	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang					45.000.000						45.000.000	
2	13	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia			4 Unit	20.000.000					4 Unit	20.000.000	DPMDes
2	13	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Smart TV yang tersedia			1 Paket	25.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Paket	25.000.000	DPMDes
2	13	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan					116.900.000						116.900.000	
2	13	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengelolaan surat masuk dan keluar yang dikelola secara baik			12 Bulan	1.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bulan	1.500.000	DPMDes

2	13	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah KWH listrik yang dibayarkan			12 Bulan	42.600.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bulan	42.600.000	DPMDes
2	13	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor			12 Bulan	72.800.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,				12 Bulan	72.800.000	DPMDes
2	13	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang					209.045.500						209.045.500	
2	13	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					144.045.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					144.045.500	DPMDes
2	13	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					30.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,					30.000.000	DPMDes
2	13	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan yang tersedia Penebangan pohon yang dipelihara Sumur bor yang tersedia			1 Tahun 1 Tahun 1 Paket	35.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun 1 Tahun 1 Paket	35.000.000	DPMDes
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	% Desa Yang Melakukan Penataan Dengan Baik			80%	49.240.000					85%	49.240.000	
2	13	02	2,01		Penyelenggaraan Penataan Desa					49.240.000						49.240.000	
2	13	02	2,01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Terlaksananya Sosialisasi pembuatan Peta Desa dan Penegasan Batas Desa			55 peta	23.080.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				55 peta	23.080.000	DPMDes
2	13	02	2,01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Meningkatnya Kemampuan Desa Melaksanakan Kewenangan Desa Terlaksananya Koordinasi Penataan Kewenangan Desa			55 Peta 55 Peta	26.160.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				55 Peta 55 Peta	26.160.000	DPMDes
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	% Desa Yang Melaksanakan Kerjasama Dengan Pihak Lain				2.400.000						2.400.000	
2	13	03	2,01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa					2.400.000						2.400.000	
2	13	03	2,01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Tersusunnya regulasi tentang kerjasama antar desa dalam Kota Pariaman			1 dok	2.400.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 dok	2.400.000	DPMDes
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	% Desa Yang Melakukan Administrasi Dengan Baik			85%	547.241.919					90%	547.241.919	
2	13	04	2,01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan					547.241.919						547.241.919	
2	13	04	2,01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya pendampingan Musrenbang Desa/Kel			55 desa	7.400.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				55 desa	7.400.000	DPMDes

2	13	04	2,01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya bimtek pengelolaan keuangan desa (PKPKD, PPKD, dan Bendahara) Terlaksananya Bimtek perpajakan bagi bendahara desa Terlaksananya evaluasi rancangan APBDes dan perubahan Terlaksananya monitoring kegiatan desa Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Terlaksananya perwako pengelolaan keuangan desa Terlaksananya sosialisasi perwako			55 Desa 55 Desa 55 Desa 2 Kali 55 Desa 4 Perwako 55 Desa	23.090.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				55 Desa 55 Desa 55 Desa 2 Kali 55 Desa 4 Perwako 55 Desa	23.090.000	DPMDes
2	13	04	2,01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya peningkatan kompetensi Kepala Desa Terlaksananya rapat-rapat koordinasi Kepala Desa dan Lurah dengan perangkat daerah			55 orang 2 kali	64.091.500	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				55 orang 2 kali	64.091.500	DPMDes
2	13	04	2,01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	RKPDes RPJMDes Terlaksananya pendampingan penyusunan RKPDes dan RPJMDes			55 Desa 19 Desa 55 Desa	33.596.000					55 Desa 19 Desa 55 Desa	33.596.000	DPMDes
2	13	04	2,01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	RKPDes RPJMDes Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan desa			55 Desa 19 Desa 55 Desa	2.560.000					55 Desa 19 Desa 55 Desa	2.560.000	DPMDes
2	13	04	2,01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Bumdes yang dibina Jumlah pelaksanaan Rakor Bumdes Jumlah pengurus Bumdes yang dilatih			55 Desa 6 Kali 55 Desa	35.720.000					55 Desa 6 Kali 55 Desa	35.720.000	DPMDes
2	13	04	2,01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			18 Desa	314.528.500					18 Desa	314.528.500	DPMDes
2	13	04	2,01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	jumlah desa yang didampingi jumlah dokumen profil desa yang dihasilkan			55 desa 1 dokumen	1.600.000					55 desa 1 dokumen	1.600.000	DPMDes
2	13	04	2,01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya evaluasi, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan aset desa Terlaksananya Sosialisasi/bimbingan teknis aset desa Tersediannya pelaporan aset desa melalui Aplikasi SIPADES			55 Desa 55 Desa 55 Desa	12.920.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				55 Desa 55 Desa 55 Desa	12.920.000	DPMDes
2	13	04	2,01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan untuk menghadapi lomba desa berprestasi TK Prov. Terlaksananya penilaian lomba desa/ kelurahan berprestasi untuk Kota Pariaman			1 desa/kelura 4 desa/kelura	51.735.919	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 desa/kelura 4 desa/kelura	51.735.919	DPMDes
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA											2.833.141.000	
2	13	05	2,01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang					2.833.141.000						2.833.141.000	
2	13	05	2,01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi DPD LPM Kota Fasilitasi tenaga PDB (45 Orang) Terfasilitasinya lembaga adat (LKAAM, Bundo kanguang, KAN) Terlaksananya pembinaan lembaga kemasyarakatan desa (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang taruna)			1 kali 13 bulan 12 bulan 71 desa/kelu	1.540.165.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 kali 13 bulan 12 bulan 71 desa/kelu	1.540.165.000	DPMDes

2	13	05	2,01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Pelatihan LPM Terlaksananya pelatihan ABS-SBK Terlaksananya penilaian kader posyandu secara berjenjang			71 desa 1 ANGKATAN 4 kecamatan	38.080.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				71 desa 1 ANGKATAN 4 kecamatan	38.080.000	DPMDes
2	13	05	2,01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terfasilitasinya sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat			1 Tahun	10.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	10.000.000	DPMDes
2	13	05	2,01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dokumen pemetaan dan pengkajian kebutuhan teknologi tepat guna Sayembara dan gelar teknologi tepat guna yang dilaksanakan			1 Dokumen 1 Kali	29.200.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen 1 Kali	29.200.000	DPMDes
2	13	05	2,01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			1 kali	19.496.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 kali	19.496.000	DPMDes
2	13	05	2,01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi transportasi kader Dasawisma 1050 orang Jambore kader PKK TK Kota Jambore kader PKK TK Prov dan Nasional Terlaksananya 10 program pokok PKK (operasional sekretariat, pokja I sda IV			12 Bulan 1 kali 2 kali 12 bulan	1.196.200.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bulan 1 kali 2 kali 12 bulan	1.196.200.000	DPMDes
TOTAL																6.908.657.771	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
									Target 2022	Pagu Indikatif Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	13		8	9	10	11	12	13
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM			90%	3.816.028.348					90%	3.816.028.348	
						Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik			80%						80%		DP3AKB
						Persentase ASN berpakaian Dinas dengan Atribut Lengkap			100%						100%		DP3AKB
						Persentase kepuasan ASN terhadap pelayanan kepegawaian			89%						89%		DP3AKB
						Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat			A						A		DP3AKB
						Persentase sasaran program kegiatan renja perangkat daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah			90%						90%		DP3AKB
						Persentase pelaksanaan program dan kegiatan APBD bebas temuan			90%						90%		DP3AKB
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja					4.224.240						4.224.240	
2	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ			3 dokumen	4.224.240	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				3 dokumen	4.224.240	DP3AKB
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.903.848.538						2.903.848.538	
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah bulan			14 bulan	2.779.503.638	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				14 bulan	2.779.503.638	DP3AKB
2	08	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola Administrasi Keuangan Kantor yang dibayarkan			12 bulan	124.344.900	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 bulan	124.344.900	DP3AKB
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					91.432.850						91.432.850	
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			7 jenis	5.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				7 jenis	5.000.000	DP3AKB
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK kantor yang disediakan Jumlah makan minum rapat yang disediakan			15 jenis 185 orang	14.998.850	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				15 jenis 185 orang	14.998.850	DP3AKB
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan			5 jenis	10.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				5 jenis	10.000.000	DP3AKB
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat dan konsultasi yang dilakukan ke provinsi, pust, lintas SKPD dan lain- lain			12 bulan	61.434.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 bulan	61.434.000	DP3AKB
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					18.000.000						18.000.000	
2	08	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan			1 jenis	5.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 jenis	5.000.000	DP3AKB
2	08	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			3 jenis	13.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				3 jenis	13.000.000	DP3AKB
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					235.322.720						235.322.720	
2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat masuk dan surat keluar yang dikelola dengan baik			1000 dokume	1.500.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1000 dokume	1.500.000	DP3AKB
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kantor yang dibayarkan			2 unit	98.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2 unit	98.000.000	DP3AKB

2	08	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kontrak yang dibayarkan honornya		7 orang	135.822.720	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 orang	135.822.720	DP3AKB
2	08	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				563.200.000				563.200.000	
2	08	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan		30 unit 30 unit 30 unit	200.200.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 unit 30 unit 30 unit	200.200.000	DP3AKB
2	08	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan kantor		2 jenis	9.000.000			2 jenis	9.000.000	DP3AKB
2	08	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhab		1 unit	354.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit	354.000.000	DP3AKB
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan yang duduk di legislatif 1)		16%	121.491.000			16%	121.491.000	
						Jumlah kelembagaan PUG		33 Lembaga				33 Lembaga		DP3AKB
						Persentase program dan kegiatan yang diPPRG-kan		17%				17%		DP3AKB
						Persentase pelaku usaha ekonomi perempuan		75%				75%		DP3AKB
2	08	02	2,02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial,				121.491.000				121.491.000	
2	08	02	2,02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terfasilitasinya Kegiatan DW dan GOW		12 kali	121.491.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 kali	121.491.000	DP3AKB
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kekerasan terhadap perempuan 1)		0,04%	36.193.750			0,04%	36.193.750	
						Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan		100%				100%		DP3AKB
2	08	03	2,01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup				10.993.750				10.993.750	
2	08	03	2,01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya advokasi pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan		40 orang	10.993.750	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 orang	10.993.750	DP3AKB
2	08	03	2,02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan				25.200.000				25.200.000	
2	08	03	2,02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendampingan perempuan korban kekerasan		30 kasus	25.200.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 kasus	25.200.000	DP3AKB
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah organisasi perempuan yang aktif		33 Buah	490.730.000			33 Buah	490.730.000	
2	08	04	2,01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan				38.930.000				38.930.000	
2	08	04	2,01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya Kota Layak Anak, Sekolah Ramah Anak dan Ruang Bermain Ramah Anak		1 sekolah	26.930.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 sekolah	26.930.000	DP3AKB
2	08	04	2,01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasi Forum Lansia		140 orang	12.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		140 orang	12.000.000	DP3AKB
2	08	04	2,03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG				451.800.000				451.800.000	
2	08	04	2,03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya perlindungan perempuan dan Anak		100 persen	451.800.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen	451.800.000	DP3AKB
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak		850 Buah	46.165.000			850 Buah	46.165.000	
						Jumlah Perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat		12 Lembaga				12 Lembaga		DP3AKB
2	08	06	2,02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia				46.165.000				46.165.000	
2	08	06	2,02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Forum anak dan Peringatan HAN		150 orang	20.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150 orang	20.000.000	DP3AKB
2	08	06	2,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pelayanan Puspaga		50 orang	26.165.000			50 orang	26.165.000	DP3AKB

2	14	02				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase kebijakan propinsi tentang data kependudukan yang dilaksanakan oleh pemko			100%	957.950.000					100%	957.950.000	
2	14	02	2.02			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan					957.950.000						957.950.000	
2	14	02	2.02	09		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Terlaksananya Kegiatan DAK Tahun 2022 Terlaksananya Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia			1 tahun 1 dokumen	419.365.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 tahun 1 dokumen	419.365.000	DP3AKB
2	14	02	2.02	11		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB Anti Stunting			12 bulan	538.585.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 bulan	538.585.000	DP3AKB
2	14	03				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Unmeet need			10,87%	346.021.800					10,87%	346.021.800	
							Cakupan peserta KB aktif			62,94%						62,94%		DP3AKB
							Jumlah Peserta KB Baru (PB)			2170						2170		DP3AKB
2	14	03	2.03			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan					346.021.800						346.021.800	
2	14	03	2.03	01		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Pesrta KB Baru Yang dilayani			1500 orang	346.021.800	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1500 orang	346.021.800	DP3AKB
2	14	04				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rata- rata Usia Perkawinan			22,5 Tahun	861.389.500					22,5 Tahun	861.389.500	
							Jumlah Kelompok PIK- Remaja sekolah dan luar sekolah yang aktif			30 Kelompok						30 Kelompok		DP3AKB
							Persentase BKB aktif			65%						65%		DP3AKB
							Persentase UPPKS Aktif			54%						54%		DP3AKB
							Persentase BKL aktif			83%						83%		DP3AKB
2	14	04	2.01			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan					861.389.500						861.389.500	
2	14	04	2.01	04		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah PIK-R yang dibina dan dinilai			22 PIK-R	10.569.500	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				22 PIK-R	10.569.500	DP3AKB
2	14	04	2.01	05		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya dana operasional Kader			1087 orang	806.280.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1087 orang	806.280.000	DP3AKB
2	14	04	2.01	07		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pelajar yang mengikuti Kegiatan Temu Kreatifitas Remaja serta Saka Kencana Tk. Propinsi			25 orang	44.540.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				25 orang	44.540.000	DP3AKB
TOTAL																	6.675.969.398	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif										
										Pagu Indikatif							Nasional	Daerah							
1					2					3					4	5	6	13	8	9	10	11	12	13	14
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM			94%	3.403.967.797					94%	3.403.967.797									
						Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat			BB						BB		Dishub								
						Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan			100%						100%		Dishub								
2	15	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.730.000						8.730.000										
2	15	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian dan ikhtisar kinerja SKPD			6 Dokumen	8.730.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				6 Dokumen	8.730.000	Dishub								
2	15	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2.965.822.877									
2	15	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			14 Bulan	2.819.528.877	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				14 Bulan	2.819.528.877	Dishub								
2	15	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor PA,KPA,PPTK,Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan serta Bendahara Barang			12 Bulan	146.294.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bulan	146.294.000	Dishub								
2	15	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											103.576.620									
2	15	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen listrik yang disediakan			4 Jenis	4.999.560	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				4 Jenis	4.999.560	Dishub								
2	15	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan			1 Tahun	8.577.500	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	8.577.500	Dishub								
2	15	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan Jumlah Makan Minum rapat yang disediakan			1 tahun 350 OK	14.999.560	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 tahun 350 OK	14.999.560	Dishub								
2	15	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang & penggandaan yang disediakan			6 Jenis	15.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				6 Jenis	15.000.000	Dishub								
2	15	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi luar daerah dan dalam daerah			1 tahun	60.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 tahun	60.000.000	Dishub								
2	15	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											210.002.500									
2	15	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan			200 lembar	2.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				200 lembar	2.000.000	Dishub								
2	15	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kwh Listrik & rekening telpon yg dibayarkan			1 tahun	60.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 tahun	60.000.000	Dishub								
2	15	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat kersihan kantor yang disediakan Jumlah Tenaga kebersihan kantor yang disediakan			20 Jenis 2 Org	148.002.500	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				20 Jenis 2 Org	148.002.500	Dishub								
2	15	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											115.835.800									
2	15	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah perpanjangan izin surat kendaraan dinas			33 izin	29.850.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				33 izin	29.850.000	Dishub								

2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yg dipelihara	12 unit	85.985.800	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 unit	85.985.800	Dishub
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	80,21%	2.190.305.771		80,21%	2.190.305.771	
						Persentase masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum	50,80%			50,80%		Dishub
						Persentase peningkatan pelayanan parkir	74%			74%		Dishub
						Persentase ruas jalan yang dilengkapi fasilitas pendukung jalan	88%			88%		Dishub
						Persentase ketersediaan fasilitas umum	71,55%			71,55%		Dishub
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			316.010.000			316.010.000	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan jalan yang terpasang Tersedianya Perlengkapan Zona Selamat Sekolah	1 Jenis 2 Lokasi	77.226.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Jenis 2 Lokasi	77.226.000	Dishub
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara	9 unit	238.784.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 unit	238.784.000	Dishub
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			302.473.271			302.473.271	
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana & prasarana PKB yang disediakan	1 Paket	249.881.971	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	249.881.971	Dishub
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pemeliharaan dan kalibrasi alat PKB yang dilakukan	1 kegiatan	52.591.300	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kegiatan	52.591.300	Dishub
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			576.376.500			576.376.500	
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	terdatanya data perlengkapan jalan	1 kegiatan	17.105.500	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kegiatan	17.105.500	Dishub
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	terlaksananya operasional LLAJ	1 Tahun	533.056.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	533.056.000	Dishub
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya rapat koordinasi forum lalu lintas	4 kali	26.215.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 kali	26.215.000	Dishub
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			22.995.000			22.995.000	
2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	terlaksananya kegiatan WTN	1 tahun	22.995.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	22.995.000	Dishub
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			972.451.000			972.451.000	
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bus Sekolah yang dioperasikan	11 unit	772.268.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 unit	772.268.000	Dishub
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	terlaksananya pengawasan kendaraan barang	1 tahun	200.183.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	200.183.000	Dishub
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			640.083.920			640.083.920	
2	15	03	2.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota			164.923.920			164.923.920	
2	15	03	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayaran Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	tersedianya pakaian lapangan tenaga pengawas	4 Jenis	164.923.920	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Jenis	164.923.920	Dishub

2	15	03	2,06		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota					426.040.000						426.040.000	
2	15	03	2,06	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pelayanan pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan antar pulau			1 kegiatan	426.040.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 kegiatan	426.040.000	Dishub
2	15	03	2,08		Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal					49.120.000						49.120.000	
2	15	03	2,08	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah kapal patroli dan demaga yang dipelihara			4 unit	49.120.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				4 unit	49.120.000	Dishub
TOTAL																6.234.357.488	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung																																																					
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif																																																						
												Nasional					Daerah																																																				
1					2					3					4					5					6					13					8					9					10					11					12					13					14				
2	16	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM			89%	2.876.779.589					89%	2.876.779.589																																																				
							Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat			BB						BB		Diskominfo																																																			
							Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan			100%						100%		Diskominfo																																																			
2	16	01	2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.000.000						5.000.000																																																				
2	16	01	2,01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun			5 dokumen	5.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				5 dokumen	5.000.000	Diskominfo																																																			
2	16	01	2,02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.635.788.390						2.635.788.390																																																				
2	16	01	2,02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah TPP yang dibayarkan terbanyaknya gaji ASN dinas Komunikasi dan Informatika selama satu tahun			12 Bulan 14 Bulan	2.487.888.390	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bulan 14 Bulan	2.487.888.390	Diskominfo																																																			
2	16	01	2,02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan selama satu tahun			20 orang	147.900.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				20 orang	147.900.000	Diskominfo																																																			
2	16	01	2,06			Administrasi Umum Perangkat Daerah					79.500.024						79.500.024																																																				
2	16	01	2,06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia dalam satu tahun			6 jenis	1.500.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				6 jenis	1.500.000	Diskominfo																																																			
2	16	01	2,06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis bahan administrasi dan alat kebersihan yang disediakan dalam satu tahun			64 jenis	15.000.024	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				64 jenis	15.000.024	Diskominfo																																																			
2	16	01	2,06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan satu tahun			1 tahun	3.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 tahun	3.000.000	Diskominfo																																																			
2	16	01	2,06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat dan konsultasi yang dilakukan dalam satu tahun			1 tahun	60.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 tahun	60.000.000	Diskominfo																																																			
2	16	01	2,08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					35.240.000						35.240.000																																																				
2	16	01	2,08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah benda pos yang disediakan dalam satu tahun			200 lembar	1.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				200 lembar	1.000.000	Diskominfo																																																			
2	16	01	2,08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gaji jasa kebersihan yang dibayarkan dalam satu tahun			2 orang	34.240.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2 orang	34.240.000	Diskominfo																																																			
2	16	01	2,09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					121.251.175						121.251.175																																																				
2	16	01	2,09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah administrasi perizinan kendaraan roda empat dan roda dua dalam satu tahun terpeliharaanya kendaraan operasional roda dua dan roda empat dalam satu tahun			13 unit 13 unit	113.751.175	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				13 unit 13 unit	113.751.175	Diskominfo																																																			
2	16	01	2,09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor			6 jenis	7.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				6 jenis	7.500.000	Diskominfo																																																			
2	16	02				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik			85%	1.153.370.000					85%	1.153.370.000																																																				
2	16	02	2,01			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1.153.370.000						1.153.370.000																																																				

2	16	02	2,01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten yang dikelola pada media komunikasi publik selama satu tahun		30 konten	490.750.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			30 konten	490.750.000	Diskominfo
2	16	02	2,01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terkelolanya Media Komunikasi Publik Internal Pemko Pariaman		100 %	54.500.000				100 %	54.500.000	Diskominfo
2	16	02	2,01	06	Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya Pelayanan Informasi Publik		100 %	58.500.000				100 %	58.500.000	Diskominfo
2	16	02	2,01	07	Layanan Hubungan Media	jumlah media cetak yang bekerjasama dengan Pemko		30 media	226.620.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			30 media	226.620.000	Diskominfo
2	16	02	2,01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terkelolanya Media Center Pemko Pariaman		90 %	323.000.000				90 %	323.000.000	Diskominfo
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan yang terintegrasi		72%	1.829.865.320				72%	1.829.865.320	
						Persentase PD yang telah menerapkan aplikasi pemerintahan yg terintegrasi		55%					55%		Diskominfo
						Persentase ketersediaan sarana prasarana TIK PD		85%					85%		Diskominfo
2	16	03	2,01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.321.492.320					1.321.492.320	
2	16	03	2,01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya domain dan subdomain di Kota Pariaman		90 %	10.800.000				90 %	10.800.000	Diskominfo
2	16	03	2,01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Jaringan Internet dan Internet OPD Kota Pariaman, Puskesmas, UPT, SLTP		95 %	1.310.692.320				95 %	1.310.692.320	Diskominfo
2	16	03	2,02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				508.373.000					508.373.000	
2	16	03	2,02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Evaluasi Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik		1 dokumen	24.340.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	24.340.000	Diskominfo
2	16	03	2,02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Colocation Server Kota Pariaman Persentase Layanan Infrastruktur Pusat Data, Disaster Recovery Center dan Infrastruktur TIK Yang Terpelihara dan Colocation Server Kota Pariaman		12 Bulan 75 %	130.133.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan 75 %	130.133.000	Diskominfo
2	16	03	2,02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi e- Government yang dibangun/dikembangkan		10 aplikasi	242.500.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10 aplikasi	242.500.000	Diskominfo
2	16	03	2,02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas SDM Pemko Pariaman dalam Mengembangkan Informasi		90 %	111.400.000				90 %	111.400.000	Diskominfo
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase kebijakan penyelenggaraan statistik sektoral yang tersedi		80%	31.250.000				80%	31.250.000	
2	20	02	2,01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				31.250.000					31.250.000	
2	20	02	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terpublikasinya Data Profil Kota Pariaman Terpublikasinya Dokumen Kompilasi ke Masyarakat		1 kegiatan 8 dokumen	31.250.000				1 kegiatan 8 dokumen	31.250.000	Diskominfo
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			1%					1%	85.158.350	
2	21	02	2,02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				85.158.350					85.158.350	
2	21	02	2,02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah		1 Tahun	85.158.350	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	85.158.350	Diskominfo
TOTAL														5.976.423.259	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Pagu Indikatif			Nasional				
1					2	3	4	5	6	13	8	9	10	11	12	13	14
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM			90%	2.365.269.479					90%	2.365.269.479	
						Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat			BB						BB		Dispersip
						Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan			100%						100%		Dispersip
2	23	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.028.008.608						2.028.008.608	
2	23	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN			1 Tahun	1.910.908.608	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	1.910.908.608	Dispersip
2	23	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					107.100.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					107.100.000	Dispersip
2	23	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD					10.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					10.000.000	Dispersip
2	23	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					103.250.871						103.250.871	
2	23	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					20.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					20.000.000	Dispersip
2	23	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					14.994.871	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					14.994.871	Dispersip
2	23	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					8.256.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					8.256.000	Dispersip
2	23	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					60.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					60.000.000	Dispersip
2	23	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					179.060.000						179.060.000	
2	23	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.500.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1.500.000	Dispersip
2	23	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					72.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					72.000.000	Dispersip
2	23	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					105.560.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					105.560.000	Dispersip
2	23	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					54.950.000						54.950.000	
2	23	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan			1 Tahun	54.950.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	54.950.000	Dispersip
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Anggota Perpustakaan			1810 Org	162.169.000					3546 org	162.169.000	
2	23	02	2,01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					152.244.000						152.244.000	
2	23	02	2,01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Pustaka pendidikan dasar yang dibina			30 Unit	30.250.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				30 Unit	30.250.000	Dispersip
2	23	02	2,01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana layanan pustaka			1 Dokumen	101.600.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen	101.600.000	Dispersip
2	23	02	2,01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data yang akurat			1 Dokumen	20.394.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen	20.394.000	Dispersip
2	23	02	2,02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					9.925.000						9.925.000	
2	23	02	2,02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah peserta pelatihan bunda literasi			160 org	9.925.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				160 org	9.925.000	Dispersip

2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase PD dan kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku		74,19%	5.381.500				74,19%	5.381.500	
						Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis		100%					100%		Dispersip
2	24	02	2,01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				4.709.500					4.709.500	
2	24	02	2,01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah OPD yang mengelola arsip secara baik		5 OPD	1.884.500	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 OPD	1.884.500	Dispersip
2	24	02	2,01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah OPD yang didampingi dalam pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis		32 OPD	375.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			32 OPD	375.000	Dispersip
2	24	02	2,01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang didampingi dalam audit kearsipan internal		5 OPD	2.450.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 OPD	2.450.000	Dispersip
2	24	02	2,03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota				672.000					672.000	
2	24	02	2,03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi		104 OPD	672.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			104 OPD	672.000	Dispersip
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah dokumen/ arsip yang diakuisisi		760 Dok	2.630.000				1520 Dok	2.630.000	
2	24	03	2,01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun				2.630.000					2.630.000	
2	24	03	2,01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun				2.630.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2.630.000	Dispersip
2	24	03	2,01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun				2.630.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2.630.000	Dispersip
										TOTAL				119.192.037.039	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Pagu Indikatif			Nasional				
1					2	3	4	5	6	13	8	9	10	11	12	13	14
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM			89%	34.800.000					89%	34.800.000	
						Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat			BB						BB		Disparbud
						Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan			100%						100%		Disparbud
2	22	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					34.800.000						34.800.000	
2	22	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					34.800.000						34.800.000	Disparbud
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif			26%	992.735.000					28%	992.735.000	
						Jumlah pemangku adat yang aktif pada kegiatan adat dan budaya daerah			27%						27%		Disparbud
						Jumlah penyelenggaraan festival budaya			50%						50%		Disparbud
2	22	02	2,01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					890.585.000						890.585.000	
2	22	02	2,01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	terfasilitasinya festival budaya tabuik			1 Kegiatan	807.350.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Kegiatan	807.350.000	Disparbud
2	22	02	2,01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	jumlah duta budaya yang terpilih			3 Pasang	83.235.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				3 Pasang	83.235.000	Disparbud
2	22	02	2,02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					78.100.000						78.100.000	
2	22	02	2,02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	jumlah penampilan cerimonial dalam / luar daerah			50 Kali	78.100.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				50 Kali	78.100.000	Disparbud
2	22	02	2,03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota					24.050.000						24.050.000	
2	22	02	2,03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	terbinanya desa pemajuan kebudayaan			1 Desa	24.050.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Desa	24.050.000	Disparbud
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Kelompok Kesenian Tradisoial Yang Didampingi			70	420.000.000					70	420.000.000	
2	22	03	2,01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					420.000.000						420.000.000	
2	22	03	2,01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	jumlah kesenian tradisional			1000 orang	37.750.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1000 orang	37.750.000	Disparbud
2	22	03	2,01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	terfasilitasi senam pagi			2 Lokasi	64.900.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2 Lokasi	64.900.000	Disparbud
2	22	03	2,01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	jumlah ivent yang difasilitasi dalam dan luar daerah			1 Event	317.350.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Event	317.350.000	Disparbud
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					39.525.000						39.525.000	

2	22	04	2,01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					39.525.000						39.525.000	
2	22	04	2,01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota					17.900.000						17.900.000	Disparbud
2	22	04	2,01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah					21.625.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					21.625.000	Disparbud
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah benda cagar budaya yang dilindungi				44.700.000						44.700.000	
2	22	05	2,01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					22.000.000						22.000.000	
2	22	05	2,01	02	Penetapan Cagar Budaya	Tersedianya Tenaga ahli Penetapan Cagar Budaya			2 Orang	22.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2 Orang	22.000.000	Disparbud
2	22	05	2,02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					22.700.000						22.700.000	
2	22	05	2,02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi (Pemeliharaan dan Jupel)			40 Cagar Budaya	22.700.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				40 Cagar Budaya	22.700.000	Disparbud
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM			89%	3.917.236.093					89%	3.917.236.093	
						Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat			BB						BB		Disparbud
						Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan			100%						100%		Disparbud
3	26	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					19.800.000						19.800.000	
3	26	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang di Hasilkan			5 Dok	19.800.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				5 Dok	19.800.000	Disparbud
3	26	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.123.076.514						3.123.076.514	
3	26	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah belanja tambahan PNS yang disediakan Jumlah Gaji dan Tunjangan yang disediakan			14 bulan 14 bulan	2.960.607.234	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				14 bulan 14 bulan	2.960.607.234	Disparbud
3	26	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa adm keuangan yang dibayarkan			1 Tahun	162.469.280	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	162.469.280	Disparbud
3	26	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					381.194.229						381.194.229	
3	26	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan yang disediakan			8 Lokasi	41.331.594	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				8 Lokasi	41.331.594	Disparbud
3	26	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis ATK yang disediakan Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan			10 jenis 30 Kali	15.162.635	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				10 jenis 30 Kali	15.162.635	Disparbud
3	26	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah surat yg dicetak dan digandakan			1 Tahun	15.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	15.000.000	Disparbud
3	26	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yg disediakan			1 Tahun	309.700.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	309.700.000	Disparbud
3	26	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					277.838.150						277.838.150	
3	26	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat			1200 Surat	2.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1200 Surat	2.000.000	Disparbud
3	26	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biaya Rekening telepon dan listrik yang disediakan			12 Bulan	192.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bulan	192.000.000	Disparbud

3	26	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor dan Lokasi Destinasi Wisata Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan di Kantor dan Lokasi Destinasi Wisata			12 bulan 2 orang	83.838.150	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 bulan 2 orang	83.838.150	Disparbud
3	26	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					115.327.200						115.327.200	
3	26	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					74.327.200						74.327.200	Disparbud
3	26	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jml perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (AC) jml perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (mesin pompa air) jml perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (TV 70 inch) jum;ah peralatan gedung kantor yang dipelihara (Drone) jum;ah peralatan gedung kantor yang dipelihara (Komputer PC) jum;ah peralatan gedung kantor yang dipelihara (Leptop) jum;ah peralatan gedung kantor yang dipelihara (Printer) jum;ah peralatan gedung kantor yang dipelihara (Sound sistem)			15 Unit 3 Unit 2 Unit 2 Unit 10 Unit 10 Unit 14 Unit 2 set	41.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				15 Unit 3 Unit 2 Unit 2 Unit 10 Unit 10 Unit 14 Unit 2 set	41.000.000	Disparbud
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase objek wisata unggulan dengan kondisi baik			50%	1.872.094.060					50%	1.872.094.060	
						Jumlah Pengembangan Destinasi Pariwisata			1 Buah						1 Buah		Disparbud
3	26	02	2,01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					423.660.000						423.660.000	
3	26	02	2,01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring Objek wisata			1 Tahun	423.660.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	423.660.000	Disparbud
3	26	02	2,02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					730.000.060						730.000.060	
3	26	02	2,02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Kawasan Wisata			28 Lokasi	730.000.060	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				28 Lokasi	730.000.060	Disparbud
3	26	02	2,03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					718.434.000						718.434.000	
3	26	02	2,03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	pelatihan pengelolaan usaha homestay			1 kegiatan	718.434.000					1 kegiatan	718.434.000	Disparbud
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan			80%	404.511.760					80%	404.511.760	
						Rata-rata lama tinggal wisatawan			1,50%						1,50%		Disparbud
						Jumlah Kerjasama yang dilakukan dengan pelaku usaha jasa Pariwisata			7%						7%		Disparbud
3	26	03	2,01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					404.511.760						404.511.760	
3	26	03	2,01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	terpublikasinya promosi pariwisata di media massa, cetak, elektronik, youtube, medsos, flyer, spanduk, umbul-umbul, balihho, banner, brosur			1 Tahun	350.580.000					1 Tahun	350.580.000	Disparbud

3	26	03	2,01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan penyediaan Data dan penyebaran Informasi pariwisata			2 Dokumen	53.931.760	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2 Dokumen	53.931.760	Disparbud
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					36.860.000						36.860.000	
3	26	04	2,02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif					36.860.000						36.860.000	
3	26	04	2,02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	terbinanya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan (soisalisasi/workshop HAKI)			15 orang	36.860.000					15 orang	36.860.000	Disparbud
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah karya ekonomi kreatif yang difasilitasi			3%	491.044.165					3%	491.044.165	
3	26	05	2,01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					491.044.165						491.044.165	
3	26	05	2,01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	jumlah peserta peningkatan inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner yang dibina			50 pelaku usaha kuliner	278.000.000					50 pelaku usaha kuliner	278.000.000	Disparbud
3	26	05	2,01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Festival Ekraf Pelatihan digitalisasi branding pemasaran dan penjualan pada desa wisata, kuliner, souvenir, fotografi (DAK Non Fisik) pelatihan pengelolaan desa wisata (DAK Non Fisik)			3 kali 50 pelaku usaha 21 desa wisata	213.044.165	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				3 kali 50 pelaku usaha 21 desa wisata	213.044.165	Disparbud
TOTAL																8.253.506.078	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pe		
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi
1					2	3	4	5	6	13	8
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	% cadangan pangan yang tersedia			40%	645.405.090	
						% masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE			54%		
						%penurunan konsumsi beras			1%		
						Cakupan supply lemba-ga distribusi pangan			12%		
						Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan			50%		
2	09	03	2,01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					110.393.250	
2	09	03	2,01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	jumlah dokumen yang disusun pemantauan harga pasar pemantauan harga pasar			1 dokumen 12 jenis 365 hari	103.100.000	
2	09	03	2,01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	jumlah kelompok/ desa yang dibina			10 kelompok	1.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	03	2,01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kelompok/ desa yang dibina			10 Kelompok	500.000	
2	09	03	2,01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelompok yang dibina			10 kelompok	1.893.250	
2	09	03	2,01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Pendampingan Kelembagaan Toko Tani Indonesia Pengadaan PC+Printer			1 gapoktan 1 set	3.400.000	
2	09	03	2,04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi					535.011.840	

2	09	03	2,04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah dokumen laporan PPH jumlah KK yang didata sebagai pola pangan harapan (PPH)			1 dokumen 900 KK	2.159.280	
2	09	03	2,04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					532.852.560	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase bahan pangan yang telah memenuhi Angka Kecukupan Energi (AKE)			88%	36.823.900	
2	09	04	2,01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan					2.738.340	
2	09	04	2,01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	jumlah dokumen laporan bulan dan tahunan SKPG, FSVA jumlah dokumen SKPG, FSVA yang disusun jumlah peserta pelatihan penyusunan data ketersediaan pangan jumlah peserta sosialisasi ketersediaan pangan			2 dokumen 2 Dokumen 2 orang 50 Orang	2.738.340	
2	09	04	2,02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota					34.085.560	
2	09	04	2,02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	jumlah peserta rakor dewan ketahanan pangan daerah			100 orang	5.980.000	
2	09	04	2,02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah KK penanganan daerah rawan pangan jumlah peserta sosiaalisasi penaganan daerah rawan pangan			190 orang 40 orang	28.105.560	
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi			90%	7.188.240	
2	09	05	2,01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota					7.188.240	
2	09	05	2,01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah peserta sosialisasi penanganan daerah rawan pangan jumlah sampel pangan yang diuji pada laboratorium			240 orang 20 sampel	7.188.240	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap				1.080.972.000	

3	25	03	2,01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					1.044.000.000	
3	25	03	2,01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah monitoring sumberdaya ikan			12 bulan	54.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	25	03	2,01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah bibit ikan direstoking Jumlah pakan/pellet ikan			60000 ekor 400 Kg	990.000.000	
3	25	03	2,02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota					36.972.000	
3	25	03	2,02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Pembuatan/perbaikan kapal Fiber			6 Orang	36.972.000	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kelompok tani yg menerapkan anjuran teknologi budidaya perikanan			72%	45.792.000	
						Persentase Kematian Ikan			5%		
						Produksi ikan konsumsi			560%		
						Jumlah Angka konsumsi ikan			35%		
3	25	04	2,04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					45.792.000	
3	25	04	2,04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Beroperasinya Posikandu Honorarium PPT (Tenaga Kontrak SLTA ke bawah) Jumlah monitoring dan penyuluhan kesehatan ikan yang dilaksanakan Jumlah Uji labor air kolam perikanan Jumlah Uji labor pakan/pellet ikan Jumlah uji labor penyakit ikan			12 bulan 1 Orang 12 bulan 10 sampel 2 sampel 15 sampel	32.692.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	25	04	2,04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah buku administrasi kelompok dicetak Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi CPIB dan CBIB Jumlah Plang merek Pokdakan dan UPR yang dibuat			12 paket 25 Kelompok 15 buah	13.100.000	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah fasilitasi pemasaran hasil perikanan			2%	50.570.000	
3	25	06	2,02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil					50.570.000	

3	25	06	2,02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	jumlah lomba TIKTOK tema makan ikan yang diadakan			4 lomba	50.570.000	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM			89%	12.900.776.622	
						Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat			BB		
						Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan			100%		
3	27	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.400.000	
3	27	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan LAKIP			1 dokumen	10.400.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	27	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.381.867.872	
3	27	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					12.135.567.872	
3	27	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi dinas			1 tahun	246.300.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	27	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					88.000.000	
3	27	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Listrik			10 jenis	3.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	27	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan minum rapat Penyediaan Alat Tulis Kantor			345 Bungkus 1 tahun	15.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	27	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak Penggandaan			7 jenis 7448 lembar	10.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	27	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi			1 tahun	60.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	27	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					253.785.000	
3	27	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai			350 buah	3.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	27	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa air Jasa listrik			12 bulan 12 bulan	84.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

3	27	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Alat dan bahan kebersihan Honor penjaga kantor Honor sopir Honor tenaga kebersihan			12 bulan 1 orang 1 orang 7 orang	166.285.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	27	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					166.723.750	
3	27	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan bakar minyak Cek fisik kendaraan Pajak kendaraan roda 2 Pajak kendaraan roda 4 Pemeliharaan kendaraan roda 2 Pemeliharaan kendaraan roda 4			14349 liter 4 kali 36 unit 4 unit 36 unit 4 unit	166.723.750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas padi			5,18%	855.943.742	
						Produktivitas jagung			7,93%		
						populasi sapi			60,25%		
3	27	02	2,01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					729.950.000	
3	27	02	2,01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengembangan Jagung Penyediaan Benih Padi Unggul			15 Ha 150 Ha	641.560.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	27	02	2,01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Honorarium Petugas Pelaporan Brigade Alsintan jumlah pendampingan penyaluran pupuk bersubsidi berbasis Kartu Tani jumlah pendampingan penyusunan e-RDKK Tahun 2023 jumlah peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Alsintan			14 OB 4 kecamatan 4 Kecamatan 40 orang	88.390.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	27	02	2,02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota					105.129.742	
3	27	02	2,02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	ketersediaan n2 cair terlaksananya kegiatan AUTSK terlaksananya mengikuti livestock expo tersedianya bibit/straw tersedianya sarana dan prsarana IB			500 liter 200 ekor 1 kali 500 straw 1 tahun	105.129.742	
3	27	02	2,05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota					20.864.000	

3	27	02	2,05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak					20.864.000	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan prasarana pertanian			58,5	4.420.300.000	
3	27	03	2,01		Pengembangan Prasarana Pertanian					59.850.000	
3	27	03	2,01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah Peta LP2B Kota Pariaman yang dicetak			4 Buku	59.850.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	27	03	2,02		Pembangunan Prasarana Pertanian					4.360.450.000	
3	27	03	2,02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	jumlah irigasi yang dibangun/direhabilitasi			10 Paket	1.750.000.000	
3	27	03	2,02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani					200.000.000	
3	27	03	2,02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Tersedianya lahan RPH Kota Pariaman yang representatif Tersedianya Dokumen DED Tersedianya Dokumen Studi Kelayakan (FS) Tersedianya Dokumen UKL- UPL			1 Paket 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	2.410.450.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase angka kematian ternak			0,3%	68.940.000	
						Persentase fasilitas pemasaran hasil produksi peternakan					
3	27	04	2,01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota					33.325.000	
3	27	04	2,01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penurunan populasi HPR Terlaksananya sosialisasi penyakit rabies			4 kecamatan 4 kecamatan	33.325.000	
3	27	04	2,02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota					35.615.000	
3	27	04	2,02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan					35.615.000	
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi padi			41200	77.800.000	
						Produksi jagung			2950		
3	27	05	2,01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota					77.800.000	

3	27	05	2,01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	jumlah gerakan pengendalian OPT yang dilaksanakan jumlah hama tupai yang dikendalikan jumlah pengadaan Pestisida pengadaan sarana prasarana pengendalian premi AUTP			4 kali 2000 ekor 1 paket 1 Paket 600 Ha	77.800.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok tani yang menerapkan teknologi anjuran			60%	134.380.000	
3	27	07	2,01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					134.380.000	
3	27	07	2,01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Pembinaan kelembagaan penyuluh Penerbitan Majalah			4 Kec 2 Edisi	39.330.000	
3	27	07	2,01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	honorarium Petugas Penyelia Mitra Tani (PMT) jumlah Gapoktan/LKMA yang didampingi dalam pengelolaan dana PUAP jumlah koordinasi/rembug KTNA jumlah peserta pelatihan P3A dan GP3A jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan Pupuk Organik			28 OB 65 klp 1 tahun 50 orang 50 orang	95.050.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

ndanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
Nasional	Daerah				
9	10	11	12	13	14
			40%	645.405.090	DPPP
			54%		DPPP
			1%		DPPP
			12%		DPPP
			50%		DPPP
				110.393.250	
			1 dokumen 12 jenis 365 hari	103.100.000	DPPP
			10 kelompok	1.500.000	DPPP
			10 Kelompok	500.000	DPPP
			10 kelompok	1.893.250	DPPP
			1 gapoktan 1 set	3.400.000	DPPP
				535.011.840	

			1 dokumen 900 KK	2.159.280	DPPP
				532.852.560	DPPP
			88%	36.823.900	
				2.738.340	
			2 dokumen 2 Dokumen 2 orang 50 Orang	2.738.340	DPPP
				34.085.560	
			100 orang	5.980.000	DPPP
			190 orang 40 orang	28.105.560	DPPP
			90%	7.188.240	
				7.188.240	
			240 orang 20 sampel	7.188.240	DPPP
				1.080.972.000	

				1.044.000.000	
			12 bulan	54.000.000	DPPP
			60000 ekor 400 Kg	990.000.000	DPPP
				36.972.000	
			6 Orang	36.972.000	
			72%	45.792.000	
			5%		DPPP
			560%		DPPP
			35%		DPPP
				45.792.000	
			12 bulan 1 Orang 12 bulan 10 sampel 2 sampel 15 sampel	32.692.000	DPPP
			12 paket 25 Kelompok 15 buah	13.100.000	DPPP
			3%	50.570.000	
				50.570.000	

			4 lomba	50.570.000	DPPP
			89%	12.900.776.622	
			BB		DPPP
			100%		DPPP
				10.400.000	
			1 dokumen	10.400.000	DPPP
				12.381.867.872	
				12.135.567.872	DPPP
			1 tahun	246.300.000	DPPP
				88.000.000	
			10 jenis	3.000.000	DPPP
			345 Bungkus 1 tahun	15.000.000	DPPP
			7 jenis 7448 lembar	10.000.000	DPPP
			1 tahun	60.000.000	DPPP
				253.785.000	
			350 buah	3.500.000	DPPP
			12 bulan 12 bulan	84.000.000	DPPP

			12 bulan 1 orang 1 orang 7 orang	166.285.000	DPPP
				166.723.750	
			14349 liter 4 kali 36 unit 4 unit 36 unit 4 unit	166.723.750	DPPP
			5,18%	855.943.742	
			7,93%		DPPP
			60,25%		DPPP
				729.950.000	
			15 Ha 150 Ha	641.560.000	DPPP
			14 OB 4 kecamatan 4 Kecamatan 40 orang	88.390.000	DPPP
				105.129.742	
			500 liter 200 ekor 1 kali 500 straw 1 tahun	105.129.742	DPPP
				20.864.000	

				20.864.000	DPPP
			58,5	4.420.300.000	
				59.850.000	
			4 Buku	59.850.000	DPPP
				4.360.450.000	
			10 Paket	1.750.000.000	DPPP
				200.000.000	DPPP
			1 Paket 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	2.410.450.000	DPPP
			0,3%	68.940.000	
					DPPP
				33.325.000	
			4 kecamatan 4 kecamatan	33.325.000	DPPP
				35.615.000	
				35.615.000	DPPP
			41200	77.800.000	
			2950		DPPP
				77.800.000	

			4 kali 2000 ekor 1 paket 1 Paket 600 Ha	77.800.000	DPPP
			60%	134.380.000	
				134.380.000	
			4 Kec 2 Edisi	39.330.000	DPPP
			28 OB 65 klp 1 tahun 50 orang 50 orang	95.050.000	DPPP
TOTAL				20.324.891.594	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	13	8	9	10	11	12	13	14
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM			89%	3.085.164.608					89%	3.085.164.608	
						Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat			BB						BB		
						Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan			100%						100%		
2	17	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					6.160.000						6.160.000	
2	17	01	2,01	06	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja				3 Dokumen	6.160.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				3 Dokumen	6.160.000	
2	17	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.764.535.908						2.764.535.908	
2	17	01	2,02	01	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN				14 Bulan	2.533.785.908	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				14 Bulan	2.533.785.908	
2	17	01	2,02	02	Jumlah jasa administrasi dan keuangan yang dibayarkan Jumlah jasa administrasi perkantoran yang dibayarkan				12 Bulan 14 Bulan	230.750.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bulan 14 Bulan	230.750.000	
2	17	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					88.000.400						88.000.400	
2	17	01	2,06	01	Jumlah penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan	2.998.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bulan	2.998.000	
2	17	01	2,06	04	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Jumlah konsumsi untuk rapat-rapat dinas				12 Bulan 12 Bulan	15.002.400	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bulan 12 Bulan	15.002.400	
2	17	01	2,06	05	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan				12 Bulan	10.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bulan	10.000.000	
2	17	01	2,06	09	Jumlah rapat dan konsultasi yang dilakukan ke provinsi, pusat, lintas SKPD, dll				12 Bulan	60.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bulan	60.000.000	
2	17	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					160.520.000						160.520.000	
2	17	01	2,08	01	Jumlah materai yang tersedia				12 Bulan	2.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bulan	2.000.000	
2	17	01	2,08	02	Jumlah kwh listrik yang dibayarkan Jumlah menit telepon yang dibayarkan				12 Bulan 12 Bulan	75.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bulan 12 Bulan	75.000.000	
2	17	01	2,08	04	Jumlah jenis alat kebersihan kantor yang disediakan Jumlah tenaga kebersihan kantor yang disediakan				12 Bulan 12 Bulan	83.520.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bulan 12 Bulan	83.520.000	
2	17	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					65.948.300						65.948.300	

2	17	01	2,09	02	Jumlah perpanjangan izin surat kendaraan dinas/operasional				18 Unit	10.950.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				18 Unit	10.950.000	
2	17	01	2,09	06	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah perlengkapan kantor yang mendapat pemeliharaan				16 Unit 15 Jenis	49.998.300	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				16 Unit 15 Jenis	49.998.300	
2	17	01	2,09	09	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Jumlah gedung kantor yang direhap				1 Unit 1 Unit	5.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Unit 1 Unit	5.000.000	
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi sehat			11,90%	36.195.250					11,90%	36.195.250	
2	17	04	2,01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					36.195.250						36.195.250	
2	17	04	2,01	02	Jumlah koperasi yang diberi Penghargaan terhadap Penilaian Kesehatan Koperasi KSP/USP Jumlah koperasi yang dinilai dan diberi penghargaan Terhadap Koperasi Berprestasi Peringatan hari koperasi				25 Koperasi 30 Koperasi	36.195.250	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				25 Koperasi 30 Koperasi	36.195.250	
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase penambahan anggota baru kopers			0,75%	404.200.000					0,75%	404.200.000	
						Persentase peningkatan koperasi aktif			49%						49%		
2	17	05	2,01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					404.200.000						404.200.000	
2	17	05	2,01	01	Meningkatnya SDM pengurus koperasi dan pelaku UMKM				1 kegiatan	404.200.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 kegiatan	404.200.000	
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	persentase pertumbuhan Usaha Mikro			2%	37.742.250					2%	37.742.250	
2	17	07	2,01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					37.742.250						37.742.250	
2	17	07	2,01	01	Jumlah UMKM yang di update datanya				4 Kecamatan	37.742.250	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				4 Kecamatan	37.742.250	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan modal Usaha Mikro			3,5	73.832.500					3,5	73.832.500	
						Jumlah pertumbuhan volume penjualan Usaha Mikro di pasar modern			2,2						2,2		
2	17	08	2,01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					73.832.500						73.832.500	
2	17	08	2,01	01	Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan				50 UMKM Bidang Produksi	73.832.500	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				50 UMKM Bidang Produksi	73.832.500	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang mematuhi SOP			90%	378.460.900					90%	378.460.900	
						Persentase sarana prasarana pasar/pertokoan dalam kondisi baik			80%						80%		
3	30	03	2,01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					378.460.900						378.460.900	
3	30	03	2,01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan					378.460.900						378.460.900	
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase peningkatan jumlah komoditi yg diperdagangkan			5,5%	49.856.000					5,5%	49.856.000	
3	30	04	2,02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota					49.856.000						49.856.000	

3	30	04	2,02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan					49.856.000						49.856.000	
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah kerjasama perdagangan			4%	176.488.500					4%	176.488.500	
3	30	07	2,01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri					176.488.500						176.488.500	
3	30	07	2,01	01	Jumlah event yang diikuti di tingkat Kabupaten/Kota			14 Event		130.108.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				14 Event	130.108.500	
3	30	07	2,01	03	Terkelolanya Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan			13 Bulan		46.380.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				13 Bulan	46.380.000	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Industri Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna			3,35%	830.550.500					3,35%	830.550.500	
						Persentase Sentra/Klaster Industri Yang Tertata			60%						60%		
3	31	02	2,01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					830.550.500						830.550.500	
3	31	02	2,01	03	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan Jumlah klasifikasi industri yang dibina			60 IKM 4 Klasifikasi		192.090.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				60 IKM 4 Klasifikasi	192.090.000	
3	31	02	2,01	04	Jumlah IKM batik yang dibina Jumlah IKM rajutan yang dibina Laporan hasil monitoring dan evaluasi IKM Perwako sentra kerajinan			20 IKM 20 IKM 1 Laporan 1 Dokumen		120.720.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				20 IKM 20 IKM 1 Laporan 1 Dokumen	120.720.000	
3	31	02	2,01	05	Terbinanya IKM			50 IKM		517.740.500	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				50 IKM	517.740.500	
TOTAL																5.072.490.508	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD Kota Pariaman 1)			3,15						3,15	329.534.250	
						Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang baik			100						100		
						Persentase masalah kewilayahan yang ditangani			90						90		
						Persentase Organisasi Sosial Yang Aktif			80						80		
						Persentase MUI Kecamatan dan Lembaga Keagamaan Pendukung MUI yang aktif			77						77		
						Persentase Pegawai Negeri Sipil yang menyalurkan zakat/wakaf melalui lembaga badan zakat/wakaf			80						80		
						Jumlah sekolah/ madrasah yang meningkat strata UKS/M pada tahun			4 Sekolah						4 Sekolah		
						Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan			100						100		
						Persentase kasus bantuan hukum yang tertangani			75						75		
									80						80		
						Persentase peraturan perundangundangan yang dipublikasikan ke masyarakat			100						100		
4	01	02	2,01		Administrasi Tata Pemerintahan											276.634.250	
4	01	02	2,01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Kunker yang difasilitasi Jumlah Pengusulan Cuti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Pengusulan PAW Anggota DPRD Jumlah Rakor yang terselenggara Jumlah Rapat Kerja Nasional APEKSI			3 kali 1 cuti 1 kali 1 kali 4 kali	109.502.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				3 kali 1 cuti 1 kali 1 kali 4 kali	109.502.000	
4	01	02	2,01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Camat yang dinilai Jumlah Dokumen Data Rupabumi Unsur Buatan yang terdata Jumlah Kecamatan yang dievaluasi (PATEN) Jumlah Permasalahan batas- batas desa/kelurahan yang diselesaikan			4 camat 1 dokumen 4 kecamatan 2 kecamatan	83.260.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				4 camat 1 dokumen 4 kecamatan 2 kecamatan	83.260.000	
4	01	02	2,01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan dan dievaluasi (LKPJ, LPPD, RLPPD dan SPM)			4 dokumen	83.872.250	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				4 dokumen	83.872.250	
4	01	02	2,04		Fasilitasi Kerjasama Daerah											52.900.000	

4	01	02	2,04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Mou yang ditandatangani			5 MoU	52.900.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua				5 MoU	52.900.000	
																TOTAL	329.534.250

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keansasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas					
										Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target
1					2	3	4	5	6	13	8	9	10	11	12	13	14
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketepatan penyelesaian dokumen SAKIP Setdako sesuai pedoman			100%	20.743.503.361					100%	20.743.503.361	Bagian Umum
						Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja yang selaras dengan Renstra			100%						100%		Bagian Umum
						IKM Sekretariat Daerah			86%						86		Bagian Umum
						Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat			A						A		Bagian Umum
						Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja oleh KemenPan RB 1			10,01%						10,01		Bagian Umum
						Indeks Kematangan Perangkat Daerah			39,09%						39,09		Bagian Umum
						Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM dengan kategori BAIK pada tahun n			100%						100%		Bagian Umum
						Persentase Unit Pelayanan Publik dengan Kategori Baik			66,67%						66,67		Bagian Umum
						Persentase pemenuhan kebutuhan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			100%						100%		Bagian Umum
						Persentase layanan perkantoran yang terfasilitasi dengan baik			100%						100%		Bagian Umum
						Persentase sarana dan prasarana kantor serta rumah dinas yang terpelihara dengan baik			100%						100%		Bagian Umum
						Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang sesuai SOP			100%						100%		Bagian Umum
						Persentase pelayanan informasi kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang dipublikasikan			100%						100%		Bagian Umum
4	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7.159.013.345						7.159.013.345	
4	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji PNS Setdako Pariaman			1 Tahun	6.713.513.345	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	6.713.513.345	Bagian Umum
4	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya Pelayanan Aparatur1			1 Tahun	399.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	399.000.000	Bagian Umum
4	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan keuangan OPD			6 Bagian	36.500.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				6 Bagian	36.500.000	Bagian Umum
4	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terpenuhinya laporan keuangan			1 Dokumen	10.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen	10.000.000	Bagian Umum
4	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.987.855.000						2.987.855.000	

4	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen listrik yang disediakan			1 Tahun	80.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	80.000.000	Bagian Umum
4	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan Makan Minum yang disediakan			1 Tahun	604.050.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	604.050.000	Bagian Umum
4	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan yang tersedia			1 tahun	40.205.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 tahun	40.205.000	Bagian Umum
4	01	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan material			1 tahun	120.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 tahun	120.000.000	Bagian Umum
4	01	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya kunjungan tamu			1 Tahun	150.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	150.000.000	Bagian Umum
4	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi			1 tahun	1.993.600.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 tahun	1.993.600.000	Bagian Umum
4	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					2.736.711.300						2.736.711.300	
4	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya pengadaan kendaraan dinas atau kendaraan jabatan			5 unit	1.865.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				5 unit	1.865.000.000	Bagian Umum
4	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan			9 Jenis	871.711.300	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				9 Jenis	871.711.300	Bagian Umum
4	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.351.105.000						2.351.105.000	
4	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan			1 Tahun	25.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	25.000.000	Bagian Umum
4	01	01	2,08	02		Jumlah Kwh Listrik yang dibayarkan Jumlah Menit telepon yang dibayarkan Jumlah meter air yang dibayarkan			1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	700.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	700.000.000	Bagian Umum
4	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jumlah tenaga kebersihan			64 OB	1.626.105.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				64 OB	1.626.105.000	Bagian Umum
4	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					2.147.250.000						2.147.250.000	
4	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan jumlah pajak kendaraan dinas yang dibayarkan			1 tahun	1.000.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 tahun	1.000.000.000	Bagian Umum
4	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya			1 tahun	1.000.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 tahun	1.000.000.000	Bagian Umum
4	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya			1 Tahun	147.250.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	147.250.000	Bagian Umum
4	01	01	2,11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					816.549.236						816.549.236	
4	01	01	2,11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1 tahun	162.538.810	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 tahun	162.538.810	Bagian Umum
4	01	01	2,11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya pakaian dinas untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1 tahun	265.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 tahun	265.000.000	Bagian Umum
4	01	01	2,11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1 tahun	25.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 tahun	25.000.000	Bagian Umum
4	01	01	2,11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah			1 tahun	364.010.426	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 tahun	364.010.426	Bagian Umum

4	01	01	2,12		Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah					1.150.019.480					1.150.019.480	
4	01	01	2,12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan RT kepala Daerah			1 Tahun	600.019.480	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	600.019.480	Bagian Umum
4	01	01	2,12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan RT wakil Kepala Daerah			1 Tahun	400.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	400.000.000	Bagian Umum
4	01	01	2,12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya kebutuhan RT Sekretariat Daerah			1 Tahun	150.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	150.000.000	Bagian Umum
4	01	01	2,14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					1.395.000.000					1.395.000.000	
4	01	01	2,14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya fasilitas Keprotokolan			1 Tahun	500.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	500.000.000	Bagian Umum
4	01	01	2,14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Pimpinan			1 tahun	895.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	895.000.000	Bagian Umum
															TOTAL	20.743.503.361

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung					
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
1					2	3	4	5	6	13	8	9		10		11	12	13	14		
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD Kota Pariaman 1)			3,15			2.597.520.000						3,15		2.597.520.000	Bagian Perkesra
						Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang baik			100									100			Bagian Perkesra
						Persentase masalah kewilayahan yang ditangani			90									90			Bagian Perkesra
						Persentase Organisasi Sosial Yang Aktif			80									80			Bagian Perkesra
						Persentase MUI Kecamatan dan Lembaga Keagamaan Pendukung MUI yang aktif			77									77			Bagian Perkesra
						Persentase Pegawai Negeri Sipil yang menyalurkan zakat/wakaf melalui lembaga badan zakat/wakaf			80									80			Bagian Perkesra
						Jumlah sekolah/ madrasah yang meningkat strata UKS/M pada tahun			4 Sekolah									4 Sekolah			Bagian Perkesra
						Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan			100									100			Bagian Perkesra
						Persentase kasus bantuan hukum yang tertangani			75									75			Bagian Perkesra
						Persentase perda yang dibahas di DPRD setelah diusulkan pemrakarsa			80									80			Bagian Perkesra
						Persentase peraturan perundangundangan yang dipublikasikan ke masyarakat			100									100			Bagian Perkesra
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat							2.597.520.000								2.597.520.000	Bagian Perkesra
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah cabang lomba yang diselenggarakan dalam MTQ tingkat Kota Pariaman Jumlah guru MDTW/MDTU yang difasilitasi Jumlah Jemaah Haji Kota Pariaman Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dalam 1 tahun Jumlah kegiatan PHBI yang dilaksanakan dalam 1 tahun Jumlah Masjid/Mushalla yang dikunjungi Tim Safari Ramadhan Jumlah peserta Jambore Remaja Masjid yang mengikuti kegiatan Jumlah pondok Al-Qur'an yang dibina Persentase penyaluran zakat yang dikelola BAZNAS Kota Pariaman dalam 1 tahun			38 cabang 32 orang 120 orang 5 kegiatan 2 kegiatan 52 Masjid/M 450 orang 5 pondok 85 %	1.358.920.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					38 cabang 32 orang 120 orang 5 kegiatan 2 kegiatan 52 Masjid/M 450 orang 5 pondok 85 %	1.358.920.000			Bagian Perkesra	
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah penerima Beasiswa Saga Saja Jumlah peserta temu ramah Pemerintah Kota Pariaman dengan PWRI, PEPABRI dan Veteran/Cacat Veteran Jumlah peserta temu ramah Pemerintah Kota Pariaman dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Bundo Kandung Jumlah Sekolah yang dibina dalam 1 tahun			102 mahasiswa 350 orang 1000 orang 8 Sekolah	1.238.600.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					102 mahasisw 350 orang 1000 orang 8 Sekolah	1.238.600.000			Bagian Perkesra	

4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pengelolaan kegiatan yang tertib administrasi sesuai aturan			100%	327.610.000					100%	327.610.000	Bagian Perkesra
						Persentase tender/seleksi yang terselesaikan melalui UKPBJ			100%						100%		
						Persentase terlaksananya strategi pengendalian inflasi			100%						100%		
						Persentase terlaksananya penyajian data/ informasi bidang ekonomi			100%						100%		
						Persentase terlaksananya kebijakan ekonomi & SD energi dan mineral			100%						100%		
						Persentase BUMD dan BLUD yang sehat dan menguntungkan			100%						100%		
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					75.050.000						75.050.000	Bagian Perkesra
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD yang dibina			1 Badan	65.900.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Badan	65.900.000	Bagian Perkesra
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun			5 kali	9.150.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				5 kali	9.150.000	Bagian Perkesra
										TOTAL						2.672.570.000	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
																	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas						
																				Nasional	Daerah					
1					2					3					4	5	6	13	8	9	10	11	12	13	14	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									14.400.000										14.400.000	Bagian Adpem	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									14.400.000										14.400.000	Bagian Adpem	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Tersedianya Renstra dan Renja Perangkat Daerah							2 Laporan	6.950.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2 Laporan	6.950.000	Bagian Adpem	
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Tersedianya Dokumen Lakip SETDA							1 Dokumen	7.450.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen	7.450.000	Bagian Adpem	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					Persentase pengelolaan kegiatan yang tertib administrasi sesuai aturan							100%	327.610.000						100%	327.610.000	Bagian Adpem
										Persentase tender/seleksi yang terselesaikan melalui UKPBJ							100%							100%		Bagian Adpem
										Persentase terlaksananya strategi pengendalian inflasi							100%							100%		Bagian Adpem
										Persentase terlaksananya penyajian data/ informasi bidang ekonomi							100%							100%		Bagian Adpem
										Persentase terlaksananya kebijakan ekonomi & SD energi dan mineral							100%							100%		Bagian Adpem
										Persentase BUMD dan BLUD yang sehat dan menguntungkan							100%							100%		Bagian Adpem
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan									27.640.000										27.640.000	Bagian Adpem	
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan					Penyusunan PK dan IKU SETDA Terlaksananya Penerbitan Administasi Pembangunan							1 Tahun 1 Tahun	10.300.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun 1 Tahun	10.300.000	Bagian Adpem	
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan					Terlaksananya Advokasi Perizinan Integrasi Data Aplikasi Monitoring Pembangunan Terlaksananya Monitoring Kegiatan Pembangunan dan Sarpras Terlaksananya Rapat Evaluasi Kegiatan Pembangunan Tersedianya Sapras Operasional Aplikasi Monitoring Pembangunan							2 Kali 1 Tahun 2 Kali 1 Paket	7.440.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2 Kali 1 Tahun 2 Kali 1 Paket	7.440.000	Bagian Adpem	
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					Tersedianya Laporan Realisasi Fisik Pembangunan Daerah Online yang terupdate							1 Laporan	9.900.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Laporan	9.900.000	Bagian Adpem	
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa									299.970.000										299.970.000	Bagian Adpem	
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							1 Tahun	276.990.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	276.990.000	Bagian Adpem	
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Barang dan Jasa					Terlaksananya Pelayanan Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa							1 Tahun	4.350.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	4.350.000	Bagian Adpem	
														TOTAL										342.010.000		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
												Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											231.652.900	Bagian Organisasi
4	01	01	2,13		Penataan Organisasi					231.652.900						231.652.900	Bagian Organisasi
4	01	01	2,13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tersedianya data Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja OPD Kota Pariaman Tersedianya data Evaluasi Jabatan OPD Kota Pariaman Tersedianya data Standar Kompetensi Jabatan OPD Kota Pariaman Tertatanya Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran			28 OPD 28 OPD 28 OPD 28 OPD	75.160.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28 OPD 28 OPD 28 OPD 28 OPD	75.160.000	Bagian Organisasi	
4	01	01	2,13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya kegiatan forum konsultasi publik Terlaksananya kegiatan ketatalaksanaan (Pakaian Dinas, tata naskah dinas dan SOP) terlaksananya pembinaan pelayanan publik terhadap unit yang melakukan pelayanan terlaksananya rapat koordinasi pelayanan publik			28 OPD 28 OPD 28 OPD 28 OPD	82.068.900	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28 OPD 28 OPD 28 OPD 28 OPD	82.068.900	Bagian Organisasi	
4	01	01	2,13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Jumlah Dokumen Laporan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja			1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	74.424.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	74.424.000	Bagian Organisasi	
TOTAL															231.652.900		

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SEKRETARIAT DPRD
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung																																																					
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif																																																						
1					2					3					4					5					6					13					8					9					10					11					12					13					14				
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM				81,85%	16.964.845.000									11		81,85%	16.964.845.000				Sekretariat DPRD																																										
						Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat				BB												BB					Sekretariat DPRD																																										
						Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan				100%												100%					Sekretariat DPRD																																										
4	02	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					13.957.000										13.957.000					Sekretariat DPRD																																												
4	02	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercapainya dokumen renja yang diterbitkan tiap tahun tersusunya dokumen renja tiap tahun				1 dokumen 100 %	7.507.000				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								1 dokumen 100 %	7.507.000				Sekretariat DPRD																																									
4	02	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dana Jumlah laporan Terlaksananya penyusunan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja OPD				1 Tahun 100 % 1 Tahun	6.450.000				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								1 Tahun 100 % 1 Tahun	6.450.000				Sekretariat DPRD																																									
4	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.717.553.654										9.717.553.654					Sekretariat DPRD																																												
4	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji ASN Set DPRD beserta Pimpinan dan Anggota DPRD				14 Bulan	9.502.153.654												14 Bulan	9.502.153.654				Sekretariat DPRD																																									
4	02	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dana pembayaran honor pengelola keuangan terlaksananya pengelolaan administrasi daerah				1 Tahun 12 bulan 100 %	215.400.000				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								1 Tahun 12 bulan 100 %	215.400.000				Sekretariat DPRD																																									
4	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					774.128.796										774.128.796					Sekretariat DPRD																																												
4	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dana Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan rumah dinas Tersedianya komponen listrik kantor dan rumah dinas				1 Tahun 100 % 1 tahun	15.496.496				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								1 Tahun 100 % 1 tahun	15.496.496				Sekretariat DPRD																																									
4	02	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Dana Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga pimpinan Tersedianya alat rumah tangga pimpinan				1 Tahun 100 % 1 Tahun	180.063.000				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								1 Tahun 100 % 1 Tahun	180.063.000				Sekretariat DPRD																																									
4	02	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dana terlaksananya penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan minuman harian, rapat staf, tamu, buka puasa dan open house rumah dinas				1 Tahun 100 % 1 tahun	183.429.300				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								1 Tahun 100 % 1 tahun	183.429.300				Sekretariat DPRD																																									
4	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dana Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				1 Tahun 100 % 1 tahun	67.700.000				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								1 Tahun 100 % 1 tahun	67.700.000				Sekretariat DPRD																																									
4	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dana Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan				1 Tahun 1 Tahun	187.440.000				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								1 Tahun 1 Tahun	187.440.000				Sekretariat DPRD																																									
4	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dana Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah				1 Tahun 95 % 1 tahun	140.000.000				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								1 Tahun 95 % 1 tahun	140.000.000				Sekretariat DPRD																																									
4	02	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					22.500.000										22.500.000					Sekretariat DPRD																																												
4	02	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung Tersedianya penyediaan perlengkapan gedung kantor				100 % 1 tahun	22.500.000				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								100 % 1 tahun	22.500.000				Sekretariat DPRD																																									

4	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					721.591.300						721.591.300	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dana Surat masuk keluar serta mengarsipkan surat Terlaksananya kegiatan surat menyurat			1 Tahun 1 tahun 100 %	2.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun 1 tahun 100 %	2.500.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dana Terlaksananya pembayaran telfon, listrik dan air dikantor set DPRD dan Rumah Dinas Tersediannya pembayaran telfon, listrik dan air dikantor set DPRD dan Rumah Dinas			1 Tahun 100 % 1 Tahun	210.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun 100 % 1 Tahun	210.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya penyediaan alat dan bahan pembersih kantor dan rumah dinas Tersediannya tenaga kebersihan, peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor dan rumah dinas			100 % 1 tahun	509.091.300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				100 % 1 tahun	509.091.300	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.661.264.250						4.661.264.250	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Dana Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajak nya Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan			1 Tahun 1 tahun 100 %	747.574.250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun 1 tahun 100 %	747.574.250	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Dana Terlaksananya pemeliharaan mebel			1 Tahun 12 bulan	30.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun 12 bulan	30.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dana Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor			1 Tahun 100 % 1 Tahun	170.840.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun 100 % 1 Tahun	170.840.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Dana Terlaksananya perbaikan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor			1 Tahun 100 % 1 Tahun	3.405.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun 100 % 1 Tahun	3.405.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dana Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah dinas Terlaksananya perlengkapan rumah dinas			1 Tahun 100 % 1 Tahun	307.850.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun 100 % 1 Tahun	307.850.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					388.950.000						388.950.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Dana Terlaksananya pakaian dinas beserta kelengkapannya Tersediannya pakaian dinas beserta perlengkapannya			1 Tahun 100 % 1 Tahun	279.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun 100 % 1 Tahun	279.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD ikut medical check up Jumlah Dana Terlaksananya medical chek Up			20 Orang 1 Tahun 100 %	109.950.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				20 Orang 1 Tahun 100 %	109.950.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,16		Layanan Administrasi DPRD					664.900.000						664.900.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Dana Terlaksananya penyediaan staf fraksi Tersediannya staf fraksi			1 Tahun 100 % 1 Tahun	127.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun 100 % 1 Tahun	127.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Dana Terlaksananya Rapat-Rapat DPRD			1 Tahun 12 bulan	171.600.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun 12 bulan	171.600.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Dana Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah dinas Tersediannya perlengkapan rumah dinas			1 Tahun 100 % 1 tahun	366.300.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun 100 % 1 tahun	366.300.000	Sekretariat DPRD
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase fasilitasi rapat rapat dan persidangan DPRD tepat waktu				9.829.090.000						9.829.090.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2,01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD					931.380.000						931.380.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2,01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dana Terlaksananya pembahasan rancangan perda			1 Tahun 1 Tahun	931.380.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun 1 Tahun	931.380.000	Sekretariat DPRD

4	02	02	2,02		Pembahasan Kebijakan Anggaran					1.448.260.000						1.448.260.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2,02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dana Tercapainya fasilitasi pembahasan KUA dan PPAS Terlaksananya fasilitasi pembahasan KUA dan PPAS			1 Tahun 1 Tahun 100 %	324.550.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun 1 Tahun 100 %	324.550.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2,02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dana Tercapainya fasilitasi pembahasan KUA dan PPAS Perubahan Terlaksananya fasilitasi pembahasan KUA dan PPAS Perubahan			1 Tahun 100 % 100 %	326.820.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun 100 % 100 %	326.820.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2,02	03	Pembahasan APBD	Tercapainya fasilitasi pembahasan APBD Terlaksananya fasilitasi pembahasan APBD			100 % 100 %	165.920.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				100 % 100 %	165.920.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2,02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dana Tercapainya fasilitasi pembahasan APBD perubahan Terlaksananya fasilitasi pembahasan APBD perubahan			1 Tahun 100 % 100 %	150.620.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun 100 % 100 %	150.620.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2,02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dana Tercapainya fasilitasi pembahasan pertanggungjawaban APBD Terlaksananya fasilitasi pembahasan pertanggungjawaban APBD			1 Tahun 100 % 100 %	480.350.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun 100 % 100 %	480.350.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2,03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					328.950.000						328.950.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2,03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Dana Tercapainya pengawasan penyelenggaraan bidang infrastruktur Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan bidang infrastruktur			1 Tahun 1 tahun 100 %	15.350.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun 1 tahun 100 %	15.350.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2,03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dana Tercapainya fasilitasi pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Terlaksananya fasilitasi pembahasan laporan pertanggungjawaban LKPJ			1 Tahun 1 tahun 100 %	313.600.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun 1 tahun 100 %	313.600.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2,04		Peningkatan Kapasitas DPRD					1.527.800.000						1.527.800.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2,04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dana Penyediaan bimbingan teknis DPRD Terlaksananya Bimbingan Teknis DPRD			1 Tahun 1 tahun 100 %	919.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun 1 tahun 100 %	919.500.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2,04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dana Publikasi dan Dokumentasi kegiatan Terlaksananya dokumentasi dan publikasi kegiatan			1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	357.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	357.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2,04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Dana Terlaksananya tenaga ahli fraksi Tersedianya tenaga ahli fraksi			1 Tahun 100 % 1 Tahun	210.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun 100 % 1 Tahun	210.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2,04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dana Tercapainya pelaksanaan hearing dengan pemda, masyarakat dan tokoh masyarakat Terlaksananya pelaksanaan hearing dengan pemda, masyarakat dan tokoh masyarakat			1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	41.300.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	41.300.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2,05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					1.562.200.000						1.562.200.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2,05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Dana penyediaan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah			1 Tahun 1 Tahun 100 %	721.600.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun 1 Tahun 100 %	721.600.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2,05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dana Tercapainya pelaksanaan reses di Dapil Masing Masing Terlaksananya pelaksanaan reses di Dapil Masing-masing			1 Tahun 1 tahun 100 %	840.600.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun 1 tahun 100 %	840.600.000	Sekretariat DPRD

4	02	02	2,08		Fasilitasi Tugas DPRD					4.030.500.000						4.030.500.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2,08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dana Penyediaan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Luar Daerah Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah			1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	4.030.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	4.030.500.000	Sekretariat DPRD
TOTAL																26.793.935.000	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
												Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM			89%	3.652.183.772					89%	3.652.183.772	Bappeda
						Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat			BB						BB		Bappeda
						Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan			100%						100%		Bappeda
5	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					65.503.696						65.503.696	
5	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Bappeda Tahun 2022 yang disusun Jumlah Dokumen revisi renstra Bappeda Tahun 2018-2023 yang disusun			1 dok 1 dok	20.000.196	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 dok 1 dok	20.000.196	Bappeda
5	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bappeda 2020 yang disusun Jumlah laporan LLPD dan LKPJ serta laporan realisasi program dan kegiatan Bappeda Tahun 2020 yang disusun			1 dok 3 Laporan	11.003.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 dok 3 Laporan	11.003.500	Bappeda
5	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Lakip Bappeda Tahun 2021 yang disusun			1 dok	34.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 dok	34.500.000	Bappeda
5	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.719.823.702					2.719.823.702	
5	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pegawai yang diberikan gaji Realisasi Pembayaran Gaji PNS Bappeda			30 orang 14 bulan	2.519.723.702					30 orang 14 bulan	2.519.723.702	Bappeda
5	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah honorarium pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan			12 bulan	200.100.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 bulan	200.100.000	Bappeda
5	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						319.033.502					319.033.502	
5	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Penerangan Kantor Yang Disediakan			12 Bulan	2.402.052	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bulan	2.402.052	Bappeda
5	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan			12 Bulan	4.977.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bulan	4.977.500	Bappeda
5	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah alat tulis kantor yang disediakan jumlah makan dan snack yang disediakan			12 Bulan 12 Bulan	25.003.950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bulan 12 Bulan	25.003.950	Bappeda
5	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis cetakan dan yang disediakan			12 Bulan	11.750.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bulan	11.750.000	Bappeda
5	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilakukan			12 Bulan	274.900.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bulan	274.900.000	Bappeda
5	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						336.447.372					336.447.372	
5	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang dikelola			3 jenis	3.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				3 jenis	3.000.000	Bappeda
5	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jasa tagihan listrik dan telepon yang dibayar per bulan			12 Bulan	153.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bulan	153.000.000	Bappeda
5	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan jumlah tenaga/jasa kebersihan kantor dan sopir dan adm teknis kantor			1 tahun 6 orang	180.447.372	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 tahun 6 orang	180.447.372	Bappeda

5	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				211.375.500					211.375.500	
5	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		20 unit	132.925.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			20 unit	132.925.500	Bappeda
5	01	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	jumlah mobil kantor yang disediakan		5 jenis	10.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 jenis	10.000.000	Bappeda
5	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		6 jenis 7 jenis	19.950.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6 jenis 7 jenis	19.950.000	Bappeda
5	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhab		1 gedung	25.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 gedung	25.000.000	Bappeda
5	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara		1 unit	23.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 unit	23.500.000	Bappeda
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pagu Belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat 1)		18,00%	836.905.500				18,00%	836.905.500	
						Persentase indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target 1)		97,22%					97,22%		Bappeda
						Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan 1)		29,00%					29,00%		Bappeda
						Nilai evaluasi AKIP komponen capaian kinerja 1)		20,00%					20,00%		Bappeda
						Persentase usulan masyarakat dan stakeholder yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah		90,91%					90,91%		Bappeda
						Persentase tingkat ketersediaan data pembangunan daerah		98,50%					98,50%		Bappeda
						Tingkat aksesibilitas data		100%					100%		Bappeda
						Persentase Perangkat Daerah yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90 %		93,55%					93,55%		Bappeda
						Persentase data capaian kinerja PD yang akuntabel		96,84%					96,84%		Bappeda
5	01	02	2,01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				770.105.500					770.105.500	
5	01	02	2,01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase kehadiran stakeholder terkait pada acara forum konsultasi publik ranwal RKPD 2023 Persentase kehadiran stakeholder terkait pada acara forum konsultasi publik Revisi RPJMD 2018-2023		100 % 100 %	47.360.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 % 100 %	47.360.000	Bappeda
5	01	02	2,01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Rapat Forum SKPD/Lintas SKPD		4 Kali	58.810.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 Kali	58.810.000	Bappeda
5	01	02	2,01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase kehadiran stakeholder terkait pada acara Musrenbang Revisi RPJMD 2018-2023 Persentase kehadiran stakeholder terkait pada Musrenbang RKPD Tahun 2023		100 % 100 %	95.785.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 % 100 %	95.785.500	Bappeda
5	01	02	2,01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022 yang disusun Dokumen Perubahan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018- 2023 yang disusun Dokumen RKPD Tahun 2023 yang disusun		1 dok 1 dok 1 dok	568.150.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dok 1 dok 1 dok	568.150.000	Bappeda
5	01	02	2,03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				66.800.000					66.800.000	
5	01	02	2,03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Dokumen SDGs		1 Tahun	35.000.000				1 Tahun	35.000.000	Bappeda
5	01	02	2,03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Evaluasi RKPD per Triwulan		1 Tahun	31.800.000				1 Tahun	31.800.000	Bappeda
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD 1)		98,20%	1.431.377.655				98,20%	1.431.377.655	

						Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras			100%					100%		Bappeda
						Persentase kesesuaian prioritas pembangunan daerah dengan provinsi, nasional, kab/kota wilayah perbatasan kota.			100%					100%		Bappeda
						Persentase hasil koordinasi perencanaan pengembangan kotakota menengah dan besar yang			100%					100%		Bappeda
						Tingkat Kesesuaian Rencana Pembangunan Daerah Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah			100%					100%		Bappeda
5	01	03	2,01			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				235.843.630					235.843.630	
5	01	03	2,01	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen Laporan Penanggulangan Kemiskinan		1 dokumen	69.904.300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	69.904.300	Bappeda
5	01	03	2,01	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG		1 dokumen	39.799.330	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	39.799.330	Bappeda
5	01	03	2,01	05		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen Laporan Koordinasi Sosial dan Budaya		1 dokumen	61.940.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	61.940.000	Bappeda
5	01	03	2,01	07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Rapat Koordinasi Forum Kota Sehat		1 dokumen	64.200.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	64.200.000	Bappeda
5	01	03	2,02			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				66.720.000					66.720.000	
5	01	03	2,02	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen koordinasi ekonomi		1 dokumen	21.800.000				1 dokumen	21.800.000	Bappeda
5	01	03	2,02	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan Monev Bidang Perekonomian		1 dokumen	19.920.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	19.920.000	Bappeda
5	01	03	2,02	07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dokumen monev RAD-PG		1 dokumen	25.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	25.000.000	Bappeda
5	01	03	2,03			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				1.128.814.025					1.128.814.025	
5	01	03	2,03	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Masterplan Smart city Dokumen SPKP		5 kali rapat 1 dokumen	798.044.871	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 kali rapat 1 dokumen	798.044.871	Bappeda
5	01	03	2,03	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Laporan DAK per triwulan Dokumen Usulan DAK Rapat Koordinasi		4 dokumen 1 dokumen 10 kali rapat	20.205.450	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 dokumen 1 dokumen 10 kali rapat	20.205.450	Bappeda
5	01	03	2,03	04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Aplikasi Geoportal		1 Aplikasi	7.900.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Aplikasi	7.900.000	Bappeda
5	01	03	2,03	05		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sosialisasi Dokumen RTRW Terlaksananya Sosialisasi Perda RTRW 2021-2041		200 Orang 200 Orang	237.767.704	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			200 Orang 200 Orang	237.767.704	Bappeda
5	01	03	2,03	06		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan pelaksanaan asistensi dokumen perencanaan bidang kewilayahan		8 kali rakor	9.200.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8 kali rakor	9.200.000	Bappeda
5	01	03	2,03	07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Laporan Koordinasi Fisik Per Triwulan Dokumen Laporan Pengawasan RAD AMPL Dokumen RPLP/per desa Koordinasi Kotaku Koordinasi PKP		1 dokumen 1 dokumen 71 dokumen 10 kali rakor 8 kali rakor	55.696.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen 1 dokumen 71 dokumen 10 kali rakor 8 kali rakor	55.696.000	Bappeda
5	05	02				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan 1)		100%	492.621.750				100%	492.621.750	
						Indeks inovasi daerah 1)			4100					4100		Bappeda
						Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan			100%					100%		Bappeda

						Jumlah hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah			2					2		Bappeda
						Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah			100%					100%		Bappeda
5	05	02	2,01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				177.771.750					177.771.750		
5	05	02	2,01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Seminar Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi			1 Kali	60.901.750	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Kali	60.901.750	Bappeda
5	05	02	2,01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Terlaksananya Rakor Data Perencanaan Pembangunan Daerah			2 Dokumen	56.306.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 Dokumen	56.306.000	Bappeda
5	05	02	2,01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan					60.564.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				60.564.000	Bappeda
5	05	02	2,02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				157.999.500					157.999.500		
5	05	02	2,02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	dokumen kajian sejarah terbentuk nya pariaman			1 Dokumen	157.999.500				1 Dokumen	157.999.500	Bappeda
5	05	02	2,04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi				156.850.500					156.850.500		
5	05	02	2,04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya Lomba Inovasi Daerah Kota Pariaman			1 Kegiatan	156.850.500	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Kegiatan	156.850.500	Bappeda
TOTAL															6.413.088.677	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BPKPD
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
1					2							3	4			5	6	13	8	9	10
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM		85%		23.895.302.030					85%	23.895.302.030	BPKPD				
						Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat		BB							BB		BPKPD				
						Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan		100%							100%		BPKPD				
5	02	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					15.000.000						15.000.000					
5	02	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dibuat			3 dokumen	15.000.000	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Cimparuh				3 dokumen	15.000.000	BPKPD				
5	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											22.201.362.830					
5	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					21.888.392.830						21.888.392.830	BPKPD				
5	02	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai ASN yang dibayarkan			12 bulan	297.500.000	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Cimparuh				12 bulan	297.500.000	BPKPD				
5	02	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun OPD			1 dokumen	15.470.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 dokumen	15.470.000	BPKPD				
5	02	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						12.500.000						12.500.000				
5	02	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					12.500.000						12.500.000	BPKPD				
5	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						929.500.000						929.500.000				
5	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jneis komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			10 jenis	10.000.000	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Cimparuh				10 jenis	10.000.000	BPKPD				
5	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang diadakan			3 jenis	80.000.000	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Cimparuh				3 jenis	80.000.000	BPKPD				
5	02	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan Jumlah Makan Minum yang disediakan Jumlah penyediaan peralatan kebersihan dan alat pembersih			25 jenis 500 kotak 12 bulan	67.500.000	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Cimparuh				25 jenis 500 kotak 12 bulan	67.500.000	BPKPD				
5	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan			12 bulam	22.000.000	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Cimparuh				12 bulam	22.000.000	BPKPD				
5	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar dan dalam daerah yang dilaksanakan			12 bulan	750.000.000	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Cimparuh				12 bulan	750.000.000	BPKPD				
5	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan						217.875.000						217.875.000				
5	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat			500 lembar	4.500.000	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Cimparuh				500 lembar	4.500.000	BPKPD				
5	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi sumber listrik dan telepon			12 bulan	160.000.000	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Cimparuh				12 bulan	160.000.000	BPKPD				
5	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga kebersihan yang dibayar Jumlah tenaga sopir yang dibayar			26 bulan 13 bulan	53.375.000	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Cimparuh				26 bulan 13 bulan	53.375.000	BPKPD				
5	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang						519.064.200						519.064.200				
5	02	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang dibayar jumlah TNKB Rahasia kepala Daerah yang dibayarkan			26 unit 6 unit	31.800.000	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Cimparuh				26 unit 6 unit	31.800.000	BPKPD				
5	02	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang dipelihara			26 unit	224.434.200	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Cimparuh				26 unit	224.434.200	BPKPD				
5	02	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	jumlah Meubeler yang dipelihara			10 unit	5.000.000	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Cimparuh				10 unit	5.000.000	BPKPD				

5	02	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara PC, Laptop Printer dll Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara AC, TV dll			35 unit 30 unit	42.830.000	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Cimparuh			35 unit 30 unit	42.830.000	BPKPD
5	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara			1 unit	215.000.000	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Cimparuh			1 unit	215.000.000	BPKPD
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase realisasi belanja terhadap anggaran			95%	92.394.287.892				95%	92.394.287.892	
						Persentase sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu terhadap APBD			<10					<10		BPKPD
						Laporan Keuangan berbasis Akrua			ada					ada		BPKPD
5	02	02	2,01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					3.046.089.850					3.046.089.850	
5	02	02	2,01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya Dokumen Rancangan KUA Tahun 2022 Tersusunnya Dokumen Rancangan PPAS Tahun 2022			1 dokumen 1 Dokumen	814.589.950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen 1 Dokumen	814.589.950	BPKPD
5	02	02	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Dokumen Rancangan KUA Perubahan Tahun 2022 Tersusunnya Dokumen Rancangan PPAS Perubahan Tahun 2022			1 dokumen 1 Dokumen	184.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen 1 Dokumen	184.500.000	BPKPD
5	02	02	2,01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan dan Reviu RKA SKPD Terlaksananya Penyusunan dan Reviu Perubahan RKA SKPD			1 Dokumen 1 Dokumen	409.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen 1 Dokumen	409.000.000	BPKPD
5	02	02	2,01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA OPD Yang di Verifikasi			62 RKA	78.275.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			62 RKA	78.275.000	BPKPD
5	02	02	2,01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan dan Reviu DPA SKPD Terlaksananya Penyusunan dan Reviu Perubahan DPA SKPD			1 Dokumen 1 Dokumen	62.499.110	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen 1 Dokumen	62.499.110	BPKPD
5	02	02	2,01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD Terlaksananya Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD			1 Dokumen 1 Dokumen	62.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen 1 Dokumen	62.500.000	BPKPD
5	02	02	2,01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			1 dokumen 1 Dokumen	552.249.820	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen 1 Dokumen	552.249.820	BPKPD
5	02	02	2,01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya Penyusunan Perda APBD Terlaksananya Penyusunan Perda Perubahan APBD			1 dokumen 1 Dokumen	749.997.970	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen 1 Dokumen	749.997.970	BPKPD
5	02	02	2,01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi Bidang Anggaran yang disusun Terlaksananya Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD			6 Dokumen 1 dokumen	132.478.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6 Dokumen 1 dokumen	132.478.000	BPKPD
5	02	02	2,02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					2.604.645.000					2.604.645.000	
5	02	02	2,02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					2.131.850.000					2.131.850.000	BPKPD
5	02	02	2,02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					7.600.000					7.600.000	BPKPD
5	02	02	2,02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah					19.070.000					19.070.000	BPKPD
5	02	02	2,02	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					50.000.000					50.000.000	BPKPD
5	02	02	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					55.000.000					55.000.000	BPKPD

5	02	02	2,02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait					131.300.000						131.300.000	BPKPD
5	02	02	2,02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan					70.000.000						70.000.000	BPKPD
5	02	02	2,02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota					139.825.000						139.825.000	BPKPD
5	02	02	2,03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan						938.584.100							938.584.100
5	02	02	2,03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah					40.802.500						40.802.500	BPKPD
5	02	02	2,03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban			1 Tahun	32.372.400				1 Tahun		32.372.400	BPKPD
5	02	02	2,03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran			1 Tahun	34.650.000				1 Tahun		34.650.000	BPKPD
5	02	02	2,03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah					88.200.000						88.200.000	BPKPD
5	02	02	2,03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					40.757.000						40.757.000	BPKPD
5	02	02	2,03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					24.799.200						24.799.200	BPKPD
5	02	02	2,03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah					200.090.000						200.090.000	BPKPD
5	02	02	2,03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terlaksananya Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			1 Tahun	12.681.000				1 Tahun		12.681.000	BPKPD
5	02	02	2,03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah					92.365.000						92.365.000	BPKPD
5	02	02	2,03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah					68.512.000						68.512.000	BPKPD
5	02	02	2,03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota					303.355.000						303.355.000	BPKPD
5	02	02	2,04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah													85.720.316.057
5	02	02	2,04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					85.720.316.057						85.720.316.057	BPKPD
5	02	02	2,05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem						84.652.885							84.652.885
5	02	02	2,05	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah					21.115.685						21.115.685	BPKPD
5	02	02	2,05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah					18.298.500						18.298.500	BPKPD
5	02	02	2,05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					45.238.700						45.238.700	BPKPD
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Perangkat Daerah dengan laporan aset sesuai dengan peraturan pengelolaan BMD			93,54%	1.188.225.940				93,54%		1.188.225.940	
5	02	03	2,01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						1.188.225.940							1.188.225.940
5	02	03	2,01	01	Penyusunan Standar Harga	jumlah dokumen SHB yang disusun			1 Dokumen	85.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen		85.000.000	BPKPD

5	02	03	2,01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen yang disusun (Dokumen standar barang dan standar kebutuhan BMD)			2 Dokumen	40.801.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 Dokumen	40.801.500	BPKPD
5	02	03	2,01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen yang disusun (Dokumen RKBM, RPBMD, Dokumen pengadaan BMD)			4 Dokumen	29.857.260	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 Dokumen	29.857.260	BPKPD
5	02	03	2,01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen			4 Kegiatan	74.005.500	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 Kegiatan	74.005.500	BPKPD
5	02	03	2,01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya penatausahaan BMD			5 Kegiatan	157.604.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 Kegiatan	157.604.000	BPKPD
5	02	03	2,01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen			4 Dokumen	142.051.830	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 Dokumen	142.051.830	BPKPD
5	02	03	2,01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	jumlah aset yang diamankan			50 unit	54.682.600	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			50 unit	54.682.600	BPKPD
5	02	03	2,01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen			12 bulan	90.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	90.000.000	BPKPD
5	02	03	2,01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bulan			12 bulan	79.473.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	79.473.000	BPKPD
5	02	03	2,01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	kali			1 kali	373.034.500	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 kali	373.034.500	BPKPD
5	02	03	2,01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	periode			2 periode 8 dokumen	61.715.750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 periode 8 dokumen	61.715.750	BPKPD
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi PAD			100%	1.135.123.758				100%	1.135.123.758	
5	02	04	2,01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					1.135.123.758					1.135.123.758	
5	02	04	2,01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Tersusunnya aturan-aturan dan kebijakan daerah			1 tahun	12.766.000				1 tahun	12.766.000	BPKPD
5	02	04	2,01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					78.659.980	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				78.659.980	BPKPD
5	02	04	2,01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	SEPEDA MOTOR			3 unit	61.829.800	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Cimparuh			3 unit	61.829.800	BPKPD
5	02	04	2,01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terdatanya seluruh objek pajak daerah			1 tahun	40.993.000				1 tahun	40.993.000	BPKPD
5	02	04	2,01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	basis data yang terpelihara			600 op	64.200.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			600 op	64.200.000	BPKPD
5	02	04	2,01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terlaksananya administrasi dalam pelayanan PBB-P2 dan BPHTB dengan baik			1 tahun	131.725.000				1 tahun	131.725.000	BPKPD
5	02	04	2,01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang ditetapkan			100 Objek	124.250.000				100 Objek	124.250.000	BPKPD
5	02	04	2,01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya Pelayanan yang baik kepada masyarakat terkait pajak daerah			1 tahun	109.411.900				1 tahun	109.411.900	BPKPD
5	02	04	2,01	11	Penagihan Pajak Daerah					322.290.078	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				322.290.078	BPKPD
5	02	04	2,01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pajak daerah			1 tahun	98.998.000				1 tahun	98.998.000	BPKPD
5	02	04	2,01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan retribusi daerah			1 tahun	90.000.000				1 tahun	90.000.000	BPKPD
TOTAL															118.612.939.620	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BKPSDM
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif										
1					2					3					4	5	6	13	8	9	10	11	12	13	14
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM			84%	3.293.115.681					85%	3.293.115.681	BKPSDM								
						Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat			BB						BB		BKPSDM								
						Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan			100%						100%		BKPSDM								
5	03	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.480.000						3.480.000									
5	03	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun			4 dokumen	3.480.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 dokumen	3.480.000	BKPSDM									
5	03	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												2.817.891.608								
5	03	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan untuk Gaji PNS yang dibayarkan Jumlah Bulan untuk TPP PNS yang dibayarkan			14 Bulan 12 Bulan	2.675.991.608				14 Bulan 12 Bulan	2.675.991.608	BKPSDM									
5	03	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayarkan setiap bulannya			18 orang/bul	141.900.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			18 orang/bul	141.900.000	BKPSDM									
5	03	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												284.468.683								
5	03	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan			6 jenis	2.495.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6 jenis	2.495.600	BKPSDM									
5	03	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan Jumlah konsumsi pegawai pada rapat kedinasan			1 tahun 1 tahun	15.973.083	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun 1 tahun	15.973.083	BKPSDM									
5	03	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan			100 % 1 tahun	6.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 % 1 tahun	6.000.000	BKPSDM									
5	03	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan			12 bulan	260.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	260.000.000	BKPSDM									
5	03	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												109.612.840								
5	03	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan			200 lembar	1.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			200 lembar	1.000.000	BKPSDM									
5	03	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon yang dibayarkan setiap bulan			1 rekening/b	4.200.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 rekening/b	4.200.000	BKPSDM									
5	03	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan Jumlah tenaga/jasa administrasi perkantoran yang disediakan Jumlah tenaga/jasa kebersihan kantor yang disediakan Jumlah tenaga/jasa sopir yang disediakan			1 tahun 3 orang/bula 1 orang/hari 1 orang/hari	104.412.840	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun 3 orang/bula 1 orang/hari 1 orang/hari	104.412.840	BKPSDM									
5	03	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												77.662.550								

5	03	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan perpanjangan perizinan dalam 1 tahun Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara			7 unit 7 unit	67.662.550	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			7 unit 7 unit	67.662.550	BKPSDM
5	03	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara			2 jenis 5 unit	10.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 jenis 5 unit	10.000.000	BKPSDM
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase database kepegawaian yang tersedia secara lengkap			100	2.739.355.260				100	2.739.355.260	
						Persentase laporan kesalahan data kepegawaian yang ditindaklanjuti			100					100		BKPSDM
						Persentase penyelesaian produk			100					100		BKPSDM
						Persentase penerimaan PNS sesuai dengan formasi yang dibutuhkan			100					100		BKPSDM
						Persentase penyusunan formasi yang sesuai dengan analisis jabatan			100					100		BKPSDM
						Persentase prestasi kerja PNS yang bernilai baik			99,5					99,5		BKPSDM
5	03	02	2,01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					712.157.340					712.157.340	
5	03	02	2,01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen penyusunan rencana kebutuhan pegawai			1 dokumen	4.984.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	4.984.000	BKPSDM
5	03	02	2,01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah pelamar yang mengikuti pengadaan CPNS/PPPK			6000 pelama	690.223.340	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6000 pelama	690.223.340	BKPSDM
5	03	02	2,01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah ASN yang menerima SK PNS 100% Jumlah berkas pengurusan NIP dan penerbitan SK CPNS Jumlah pegawai yang diambil sumpah Jumlah pegawai yang menerima SK CPNS			100 % 100 % 100 % 100 %	11.200.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 % 100 % 100 % 100 %	11.200.000	BKPSDM
5	03	02	2,01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah pegawai yang menerima SK Pensiun (BUP dan Non BUP)			60 SK	5.750.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			60 SK	5.750.000	BKPSDM
5	03	02	2,02		Mutasi dan Promosi ASN										395.411.670	
5	03	02	2,02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti ujian pindah tugas ke pemerintah kota pariaman Jumlah SK pindah tugas ASN yang diterbitkan Jumlah surat rekomendasi pindah ASN yang diterbitkan			25 orang 250 SK 50 orang	18.810.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			25 orang 250 SK 50 orang	18.810.000	BKPSDM
5	03	02	2,02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah dokumen PAK ASN yang dievaluasi Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang diterbitkan			300 dokume 400 SK	5.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			300 dokume 400 SK	5.500.000	BKPSDM
5	03	02	2,02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah berita acara rapat baperjakat Jumlah pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratama Jumlah pelantikan dalam jabatan ASN yang dilaksanakan			12 dokumen 2 kali/kegiata 8 kali	371.101.670	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 dokumen 2 kali/kegiata 8 kali	371.101.670	BKPSDM
5	03	02	2,03		Pengembangan Kompetensi ASN										1.618.246.250	
5	03	02	2,03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah peserta yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah Jumlah usulan dokumen ASN dalam pengajuan pemakaian gelar dan peninjauan masa kerja			60 orang 30 dokumen	36.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			60 orang 30 dokumen	36.000.000	BKPSDM
5	03	02	2,03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah usulan ASN yang mengajukan permohonan izin dan tugas belajar			60 orang	5.190.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			60 orang	5.190.000	BKPSDM

5	03	02	2,03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah peserta diklat yang mengikuti latsar CPNS Golongan II dan III			192 orang	1.571.506.250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				192 orang	1.571.506.250	BKPSDM
5	03	02	2,03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah pegawai fungsional yang diberhentikan dari jabatan fungsionalnya Jumlah pegawai fungsional yang inpassing Jumlah pegawai yang diangkat menjadi jabatan fungsional			50 orang 50 orang 200 orang	5.550.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				50 orang 50 orang 200 orang	5.550.000	BKPSDM
5	03	02	2,04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur												13.540.000	
5	03	02	2,04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen kinerja ASN yang dievaluasi			2650 dokume	10.465.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2650 dokume	10.465.000	BKPSDM
5	03	02	2,04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah sidang AdHoc yang dilaksanakan Jumlah sidang dalam penanganan kasus disiplin ASN (MPP) yang dilaksanakan			3 kali 6 kali	3.075.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				3 kali 6 kali	3.075.000	BKPSDM
TOTAL																6.032.470.941	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
INSPEKTORAT
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif											
1					2					3					4	5	6	13	8		9	10	11	12	13	14
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM			81,85%	6.046.610.449					81,85%	6.046.610.449	Inspektorat									
						Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat			BB						BB		Inspektorat									
						Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan			100%						100%		Inspektorat									
6	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.030.000						3.030.000										
6	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan			2 dokumen	3.030.000	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Kampung Baru				2 dokumen	3.030.000	Inspektorat									
6	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.140.508.151						5.140.508.151										
6	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangan nya			528 OB	5.038.208.151					528 OB	5.038.208.151	Inspektorat									
6	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah honor pengelolaa keuangan yang dibayar			156 OB	102.300.000	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Kampung Baru				156 OB	102.300.000	Inspektorat									
6	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					91.400.000						91.400.000										
6	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah diklat yang dilaksanakan			42 diklat	91.400.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				42 diklat	91.400.000	Inspektorat									
6	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					440.109.418						440.109.418										
6	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat komponen listrik yang dibeli			5 jenis 1 paket	34.991.918	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Kampung Baru				5 jenis 1 paket	34.991.918	Inspektorat									
6	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK kantor yang disediakan			18 jenis 500 paket	27.000.000	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Kampung Baru				18 jenis 500 paket	27.000.000	Inspektorat									
6	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah fotocopy			25000 lemba 5 jenis	8.857.500	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			r	25000 lemba 5 jenis	8.857.500	Inspektorat									
6	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah paket perjalanan dinas yang disediakan			50 paket	369.260.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				50 paket	369.260.000	Inspektorat									
6	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					26.550.000						26.550.000										
6	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dibeli			5 jenis	26.550.000	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Kampung Baru				5 jenis	26.550.000	Inspektorat									
6	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					176.462.880						176.462.880										
6	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah matrai yang dibeli			350 lembar	1.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				350 lembar	1.500.000	Inspektorat									
6	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kwh listrik yang dibayarkan			62000 kwh 600 m2	98.088.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				62000 kwh 600 m2	98.088.000	Inspektorat									
6	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan yang dibayarkan			48 OB 21 jenis	76.874.880	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				48 OB 21 jenis	76.874.880	Inspektorat									
6	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					168.550.000						168.550.000										
6	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajaknya			8 unit	129.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				8 unit	129.000.000	Inspektorat									

6	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat			8 unit	4.550.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				8 unit	4.550.000	Inspektorat
6	01	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah meubuler yang dipelihara			5 jenis	3.000.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				5 jenis	3.000.000	Inspektorat
6	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara			50 unit	17.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				50 unit	17.000.000	Inspektorat
6	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruangan yang direhab			1 ruangan	15.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 ruangan	15.000.000	Inspektorat
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Eksternal yang ditindaklanjuti 1)			82%	391.852.769					82%	391.852.769	
						Presentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Internal yang ditindaklanjuti 1)			60%						60%		Inspektorat
						Tingkat/level kapabilitas APIP			3						3		Inspektorat
6	01	02	2,01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal					297.012.824						297.012.824	
6	01	02	2,01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi yang dihasilkan Jumlah laporan hasil pemeriksaan yang dihasilkan			30 LHE 3 LHP	38.950.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				30 LHE 3 LHP	38.950.000	Inspektorat
6	01	02	2,01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah aplikasi yang dikembangkan Jumlah laporan hasil pemeriksaan yang dihasilkan Laporan cash opname yang dihasilkan			1 aplikasi 18 LHP 1 laporan	66.850.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 aplikasi 18 LHP 1 laporan	66.850.000	Inspektorat
6	01	02	2,01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu yang diterbitkan			10 LHR	51.120.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				10 LHR	51.120.000	Inspektorat
6	01	02	2,01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu yang diterbitkan			12 LHR	25.552.824	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 LHR	25.552.824	Inspektorat
6	01	02	2,01	05	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pemeriksaan yang dihasilkan Jumlah laporan reviu yang dihasilkan			20 LHP 1 LHR	57.100.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				20 LHP 1 LHR	57.100.000	Inspektorat
6	01	02	2,01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah laporan monev dan pendampingan yang dihasilkan			8 Laporan	57.440.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				8 Laporan	57.440.000	Inspektorat
6	01	02	2,02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					94.839.945						94.839.945	
6	01	02	2,02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan yang dihasilkan			4 Laporan	49.999.945	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				4 Laporan	49.999.945	Inspektorat
6	01	02	2,02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan			5 LHP	44.840.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				5 LHP	44.840.000	Inspektorat
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penyelesaian Pengaduan Gratifikasi yang ditindaklanjuti di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman			100%	1.028.407.729					100%	1.028.407.729	
6	01	03	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					347.098.000						347.098.000	
6	01	03	2,01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen yang dihasilkan Jumlah PKS yang dilaksanakan			1 dokumen 10 PKS	60.050.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 dokumen 10 PKS	60.050.000	Inspektorat
6	01	03	2,01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen yang dihasilkan Jumlah pejabat fungsional yang dinilai			27 dokumen 37 orang	287.048.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				27 dokumen 37 orang	287.048.000	Inspektorat
6	01	03	2,02		Pendampingan dan Asistensi					681.309.729						681.309.729	
6	01	03	2,02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah asistensi dan pendampingan yang dilakukan			12 dokumen	217.240.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 dokumen	217.240.000	Inspektorat

6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan hasil self assment reformasi birokrasi			1 dokumen	35.569.729	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 dokumen	35.569.729	Inspektorat
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah aplikasi yang dikembangkan Jumlah laporan LHKASN dan LHKPN Jumlah laporan MCP yang dihasilkan Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan			1 aplikasi 2 laporan 4 laporan 12 kali	387.560.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 aplikasi 2 laporan 4 laporan 12 kali	387.560.000	Inspektorat
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas			1 OPD	40.940.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 OPD	40.940.000	Inspektorat
TOTAL																7.466.870.947	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
1				2		3		4	5	6	13	8	9	10	11	12	13	14
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM			90%	1.845.437.319						90%	1.845.437.319	Kecamatan Pariaman Timur
						Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat			BB							BB		Kecamatan Pariaman Timur
						Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan			100%							100%		Kecamatan Pariaman Timur
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.660.048.539							1.660.048.539	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah BOP yang dibayarkan Jumlah Gaji Pegawai PNS yang dibayarkan perbulannya Jumlah pegawai yang dibayarkan TPP perbulannya			12 Bulan 14 Bulan 12 Bulan	1.578.148.539	Kota Pariaman, Pariaman Timur, Semua Kelurahan					12 Bulan 14 Bulan 12 Bulan	1.578.148.539	Kecamatan Pariaman Timur
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa keuangan yang dibayarkan			12 bulan	81.900.000	Kota Pariaman, Pariaman Timur, Semua Kelurahan					12 bulan	81.900.000	Kecamatan Pariaman Timur
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					57.969.900					57.969.900			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bahan alat listrik dan elektrik yang disediakan			12 bulan	3.000.000	Kota Pariaman, Pariaman Timur, Semua Kelurahan					12 bulan	3.000.000	Kecamatan Pariaman Timur
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya makanan dan minuman			12 bulan 12 bulan	11.980.900	Kota Pariaman, Pariaman Timur, Semua Kelurahan					12 bulan 12 bulan	11.980.900	Kecamatan Pariaman Timur
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			12 bulan	2.989.000	Kota Pariaman, Pariaman Timur, Semua Kelurahan					12 bulan	2.989.000	Kecamatan Pariaman Timur
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan kinsultasi yang dilaksanakan			12 bulan	40.000.000	Kota Pariaman, Pariaman Timur, Semua Kelurahan					12 bulan	40.000.000	Kecamatan Pariaman Timur
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan					94.018.880					94.018.880			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai yang disediakan			12 bulan	1.000.000	Kota Pariaman, Pariaman Timur, Semua Kelurahan					12 bulan	1.000.000	Kecamatan Pariaman Timur
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	belanja tagihan listrik yang disediakan			12 bulan	24.000.000	Kota Pariaman, Pariaman Timur, Semua Kelurahan					12 bulan	24.000.000	Kecamatan Pariaman Timur
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah bahan kebersihan yang disediakan jumlah tenaga petugas pelayanan umum yang tersedia			12 bulan 4 orang	69.018.880	Kota Pariaman, Pariaman Timur, Semua Kelurahan					12 bulan 4 orang	69.018.880	Kecamatan Pariaman Timur
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					33.400.000					33.400.000			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas yang disediakan jumlah kendaraan dinas/operasional lapangan yang dipelihara			12 bulan 8 unit	33.400.000	Kota Pariaman, Pariaman Timur, Semua Kelurahan					12 bulan 8 unit	33.400.000	Kecamatan Pariaman Timur
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase masyarakat yang menyampaikan usulan dalam musrenbang kecamatan			70%	5.862.050						70%	5.862.050	
						Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti 1)			100%							100%		Kecamatan Pariaman Timur
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					5.862.050							5.862.050	

7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan PATEN yang dilaksanakan (perizinan dan non perizinan)		2 jenis	5.862.050	Kota Pariaman, Pariaman Timur, Semua Kelurahan				2 jenis	5.862.050	Kecamatan Pariaman Timur
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat yang menyampaikan usulan dalam musrenang kelurahan		70%	60.991.455					70%	60.991.455	
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif 1)		BB						BB		Kecamatan Pariaman Timur
						IKM Desa		100%						100%		
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				51.680.320						51.680.320	
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang mengikuti Musrenbang		16 desa	15.094.000	Kota Pariaman, Pariaman Timur, Semua Kelurahan				16 desa	15.094.000	Kecamatan Pariaman Timur
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa dan Organisasi yang Difasilitasi Jumlah desa yang dinilai dan dilombakan Terlaksananya kegiatan Padat Karya Tunai Kecamatan		1 Tahun 16 desa 4 kegiatan	36.586.320	Kota Pariaman, Pariaman Timur, Semua Kelurahan				1 Tahun 16 desa 4 kegiatan	36.586.320	Kecamatan Pariaman Timur
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat				9.311.135						9.311.135	
7	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya pendataan dan penataan penyanggah masalah sosial masyarakat, korban bencana, KK miskin, karang taruna dan PSM (PMKS) dan UKS		16 desa	9.311.135	Kota Pariaman, Pariaman Timur, Semua Kelurahan				16 desa	9.311.135	Kecamatan Pariaman Timur
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		70%	18.800.000					70%	18.800.000	
						Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti 1)		100%						100%		
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				18.800.000						18.800.000	
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	terlaksananya money IMB Terlaksananya rapat lintas sektor		1 tahun 1 tahun	18.800.000	Kota Pariaman, Pariaman Timur, Semua Kelurahan				1 tahun 1 tahun	18.800.000	Kecamatan Pariaman Timur
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan		55 Desa	34.446.500					55 Desa	34.446.500	
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan				34.446.500						34.446.500	
7	01	06	2,01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	terlaksananya pembinaan Adimintrasi Desa Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa		1 Tahun 3 Desa	11.196.500	Kota Pariaman, Pariaman Timur, Semua Kelurahan				1 Tahun 3 Desa	11.196.500	Kecamatan Pariaman Timur
7	01	06	2,01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah PKK Desa yang dibina		16 desa	23.250.000	Kota Pariaman, Pariaman Timur, Semua Kelurahan				16 desa	23.250.000	Kecamatan Pariaman Timur
TOTAL															1.984.083.824	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN PARIAMAN UTARA
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	13	8	9	10	11	12	13	14
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM			90%	2.147.738.560					90%	2.147.738.560	Kecamatan Pariaman Utara
						Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat			BB						BB		Kecamatan Pariaman Utara
						Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan			100%						100%		Kecamatan Pariaman Utara
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.752.063.000						1.752.063.000	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah BOP yang dibayarkan Jumlah Gaji Pegawai PNS yang dibayarkan perbulannya Jumlah pegawai yang dibayarkan TPP perbulannya			12 Bulan 14 Bulan 14 Bulan	1.668.963.000	Kota Pariaman, Pariaman Utara, Semua Kelurahan				12 Bulan 14 Bulan 14 Bulan	1.668.963.000	Kecamatan Pariaman Utara
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan			12 bulan	83.100.000	Kota Pariaman, Pariaman Utara, Semua Kelurahan				12 bulan	83.100.000	Kecamatan Pariaman Utara
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					58.801.000						58.801.000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor			12 buan	3.815.000	Kota Pariaman, Pariaman Utara, Semua Kelurahan				12 buan	3.815.000	Kecamatan Pariaman Utara
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya ATK Tersedianya makan minum rapat			12 Bulan 12 Bulan	12.000.000	Kota Pariaman, Pariaman Utara, Semua Kelurahan				12 Bulan 12 Bulan	12.000.000	Kecamatan Pariaman Utara
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan			12 bulan	3.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 bulan	3.000.000	Kecamatan Pariaman Utara
																	Kecamatan Pariaman Utara
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			12 bulan	39.986.000	Kota Pariaman, Pariaman Utara, Semua Kelurahan				12 bulan	39.986.000	Kecamatan Pariaman Utara
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					102.064.560						102.064.560	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya penyediaan Surat Menyurat			12 Bulan	2.000.000	Kota Pariaman, Pariaman Utara, Semua Kelurahan				12 Bulan	2.000.000	Kecamatan Pariaman Utara
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik			12 Bulan	45.000.000	Kota Pariaman, Pariaman Utara, Semua Kelurahan				12 Bulan	45.000.000	Kecamatan Pariaman Utara
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			12 Bulan	55.064.560	Kota Pariaman, Pariaman Utara, Semua Kelurahan				12 Bulan	55.064.560	Kecamatan Pariaman Utara
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					234.810.000						234.810.000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional terlaksananya pengurusan STNK yang sesuai Administrasi			5 unit 5 Unit	34.810.000	Kota Pariaman, Pariaman Utara, Semua Kelurahan				5 unit 5 Unit	34.810.000	Kecamatan Pariaman Utara
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Flafond dan Cat gedung Promosi terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan kanopi gedung promosi			1 Kegiatan 1 kegiatan 1 Kegiatan	200.000.000	Kota Pariaman, Pariaman Utara, Semua Kelurahan				1 Kegiatan 1 kegiatan 1 Kegiatan	200.000.000	Kecamatan Pariaman Utara
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenbang kecamatan			70%	15.175.000					70%	15.175.000	
						Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti 1)			100%						100%		Kecamatan Pariaman Utara
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					2.875.000						2.875.000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	terlaksananya penyusunan data dan pembuatan Profil Kecamatan			1 Dokumen	2.875.000	Kota Pariaman, Pariaman Utara, Semua Kelurahan				1 Dokumen	2.875.000	Kecamatan Pariaman Utara
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					12.300.000						12.300.000	
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	terlaksananya pelayanan terpadu / PATEN			1 Tahun	12.300.000	Kota Pariaman, Pariaman Utara, Semua Kelurahan				1 Tahun	12.300.000	Kecamatan Pariaman Utara
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenang kelurahan			70%	47.912.500					70%	47.912.500	
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif 1)			BB						BB		Kecamatan Pariaman Utara
						IKM Desa			100%						100%		Kecamatan Pariaman Utara

7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					47.912.500						47.912.500	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya pemanfaatan hasil musrenbang Desa dan Kecamatan			1 Kegiatan	21.212.500	Kota Pariaman, Pariaman Utara, Semua Kelurahan				1 Kegiatan	21.212.500	Kecamatan Pariaman Utara
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Lomba PKK tingkat Kecamatan Terwujudnya Monitoring Evaluasi dan Pembinaan PKK Kecamatan Terwujudnya PKK Kecamatan dan Desa Serta Pokjanel Posyandu yang Profesional			1 Kegiatan 12 Bulan 1 Kegiatan	26.700.000	Kota Pariaman, Pariaman Utara, Semua Kelurahan				1 Kegiatan 12 Bulan 1 Kegiatan	26.700.000	Kecamatan Pariaman Utara
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti			100%	13.600.000					100%	13.600.000	Kecamatan Pariaman Utara
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					13.600.000						13.600.000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi lintas sektor			1 Tahun	13.600.000	Kota Pariaman, Pariaman Utara, Semua Kelurahan				1 Tahun	13.600.000	Kecamatan Pariaman Utara
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan			55 Desa	9.600.000					55 Desa	9.600.000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					9.600.000						9.600.000	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Monitoring Pembinaan Aparatur dan Adm Pemerintahan Desa			17 Desa	4.800.000	Kota Pariaman, Pariaman Utara, Semua Kelurahan				17 Desa	4.800.000	Kecamatan Pariaman Utara
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Desa yang di Monitoring dan Evaluasi			17 Desa	4.800.000	Kota Pariaman, Pariaman Utara, Semua Kelurahan				17 Desa	4.800.000	Kecamatan Pariaman Utara
										TOTAL						2.271.976.060	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN PARIAMAN SELATAN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1				2	3	4	5	6	13	8	9	10	11	12	13	14
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM			91%	2.455.201.444						2.455.201.444	Kecamatan Pariaman Selatan
					Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat			BB						BB		
					Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan			100%						100%		
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.997.030						2.997.030	Kecamatan Pariaman Selatan
7	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Renja Kecamatan			1 Tahun	999.780	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	999.780	Kecamatan Pariaman Selatan
7	01	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Anjab, LPPD,LKPJ,RENJA, EVJAB,SKM			1 Tahun	1.997.250	Kota Pariaman, Pariaman Selatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	1.997.250	Kecamatan Pariaman Selatan
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.258.109.294						2.258.109.294	Kecamatan Pariaman Selatan
7	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah BOP yang dibayarkan Jumlah Gaji Pegawai PNS yang dibayarkan perbulannya Jumlah pegawai yang dibayarkan TPP perbulannya			12 Bulan 14 Bulan 12 Bulan	2.174.709.344					12 Bulan 14 Bulan 12 Bulan	2.174.709.344	Kecamatan Pariaman Selatan
7	01	01	2.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Jasa Pengelola Keuangan			1 Tahun	83.399.950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	83.399.950	Kecamatan Pariaman Selatan
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					47.920.120						47.920.120	Kecamatan Pariaman Selatan
7	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK dan Mami Rapat Kantor			1 Tahun	11.940.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pariaman, Pariaman Selatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	11.940.000	Kecamatan Pariaman Selatan
7	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan			1 Tahun	2.980.120	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	2.980.120	Kecamatan Pariaman Selatan
7	01	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi			1 Tahun	33.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	33.000.000	Kecamatan Pariaman Selatan
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					109.305.000						109.305.000	Kecamatan Pariaman Selatan
7	01	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Surat menyurat			1 Tahun	1.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	1.000.000	Kecamatan Pariaman Selatan
7	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			1 Tahun	45.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	45.000.000	Kecamatan Pariaman Selatan
7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor			1 Tahun	63.305.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	63.305.000	Kecamatan Pariaman Selatan
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					36.870.000						36.870.000	Kecamatan Pariaman Selatan
7	01	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pembayaran jasa perizinan kendaraan dinas			9 Unit	27.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				9 Unit	27.000.000	Kecamatan Pariaman Selatan
7	01	01	2.09	07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Kantor			1 Tahun	9.870.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	9.870.000	Kecamatan Pariaman Selatan
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase masyarakat yang menyampaikan usulan dalam musrenbang kecamatan			70%	9.634.000					70%	9.634.000	Kecamatan Pariaman Selatan
					Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti 1)			100%						100%		Kecamatan Pariaman Selatan
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					6.100.000						6.100.000	Kecamatan Pariaman Selatan
7	01	02	2.02	02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya PATEN			1 Tahun	6.100.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	6.100.000	Kecamatan Pariaman Selatan
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											3.534.000	Kecamatan Pariaman Selatan

7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Terlaksananya Monitoring, Monev Perizinan, IMB			1 Tahun	3.534.000					1 Tahun	3.534.000	Kecamatan Pariaman Selatan		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat yang menyampaikan usulan dalam musrenang kelurahan			70%	41.412.000					70%	41.412.000	Kecamatan Pariaman Selatan		
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif 1)			100%						100%		Kecamatan Pariaman Selatan		
						IKM Desa			91%						91%		Kecamatan Pariaman Selatan		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					41.412.000						41.412.000	Kecamatan Pariaman Selatan		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan			16 desa	14.472.000					16 desa	14.472.000	Kecamatan Pariaman Selatan		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan PKK Desa dan Kecamatan			1 Tahun	26.940.000					1 Tahun	26.940.000	Kecamatan Pariaman Selatan		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti			100%	11.176.500					100%	11.176.500	Kecamatan Pariaman Selatan		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					11.176.500						11.176.500	Kecamatan Pariaman Selatan		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi dengan muspika dan desa			4 kali	11.176.500					4 kali	11.176.500	Kecamatan Pariaman Selatan		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang berkualitas			100%	4.000.000					100%	4.000.000	Kecamatan Pariaman Selatan		
						Persentase santri yang berkualitas			80%						80%		Kecamatan Pariaman Selatan		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					4.000.000						4.000.000	Kecamatan Pariaman Selatan		
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Monev Sosial			1 Tahun	4.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	4.000.000	Kecamatan Pariaman Selatan		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan			55 Desa	10.064.000					55 Desa	10.064.000	Kecamatan Pariaman Selatan		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Monitoring Pembinaan Aparatur dan Adm Pemerintahan Desa				10.064.000						10.064.000	Kecamatan Pariaman Selatan		
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					10.064.000						10.064.000	Kecamatan Pariaman Selatan		
															TOTAL			2.554.027.944	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN PARIAMAN TENGAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Keterangan				
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
1					2	3	4	5	6	13	8		9	10	11	12	13	14		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM			91%	8.486.523.680						91%	8.486.523.680	Kecamatan Pariaman Tengah		
						Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat			BB							BB		Kecamatan Pariaman Tengah		
						Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan			100%							100%		Kecamatan Pariaman Tengah		
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.000.000							10.000.000	Kecamatan Pariaman Tengah		
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	terlaksananya laporan capaian kinerja kecamatan			12 bulan	10.000.000	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Semua Kelurahan					12 bulan	10.000.000	Kecamatan Pariaman Tengah		
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.216.286.521					8.216.286.521					Kecamatan Pariaman
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah BOP yang dibayarkan Jumlah Gaji Pegawai PNS yang dibayarkan perbulannya Jumlah pegawai yang dibayarkan TPP perbulannya			12 Bulan 14 Bulan 12 Bulan	8.128.686.521						12 Bulan 14 Bulan 12 Bulan	8.128.686.521	Kecamatan Pariaman Tengah		
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya honorarium pengelolaan keuangan			12 bulan	87.600.000	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					12 bulan	87.600.000	Kecamatan Pariaman Tengah		
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					59.204.777					59.204.777					Kecamatan Pariaman
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya anggaran untuk belanja alat listri dan penerangan kantor			12 bulan	4.004.000	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Semua Kelurahan					12 bulan	4.004.000	Kecamatan Pariaman Tengah		
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya belanja alat tulis kantor dan biaya belanja makanan dan minuman kantor an			12 bulan	12.000.777	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Semua Kelurahan					12 bulan	12.000.777	Kecamatan Pariaman Tengah		
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya belanja cetak dan penggandaan kecamatan			12 bulan	3.000.000	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Semua Kelurahan					12 bulan	3.000.000	Kecamatan Pariaman Tengah		
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koomidasi dan konsultasi SKPD			12 bulan	40.200.000	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Semua Kelurahan					12 bulan	40.200.000	Kecamatan Pariaman Tengah		
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					147.977.032					147.977.032					Kecamatan Pariaman Tengah
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyedian surat menyurat			12 bulan	1.000.000	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Semua Kelurahan					12 bulan	1.000.000	Kecamatan Pariaman Tengah		
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sumber daya air, listrik dan telekomunikasi			12 bulan	89.400.000	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Semua Kelurahan					12 bulan	89.400.000	Kecamatan Pariaman Tengah		
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan penjaga malam kantor dan belanja alat pembersih			12 bulan	57.577.032	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Semua Kelurahan					12 bulan	57.577.032	Kecamatan Pariaman Tengah		
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					40.055.350					40.055.350					Kecamatan Pariaman Tengah
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional R2 dan R4			12 bulan	36.455.350	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Semua Kelurahan					12 bulan	36.455.350	Kecamatan Pariaman Tengah		
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pengurusan STNK yang sesuai dengan ADM			12 bulan	3.600.000	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Semua Kelurahan					12 bulan	3.600.000	Kecamatan Pariaman Tengah		
7	01	01	2,13		Penataan Organisasi					13.000.000					13.000.000					Kecamatan Pariaman Tenga

7	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Kegiatan Monitoring Masalah Sosial Terlaksananya Monitoring Keamanan, Ketertiban dan Perizinan			1 tahun 1 tahun	13.000.000					1 tahun 1 tahun	13.000.000	Kecamatan Pariaman Tengah
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase masyarakat yang menyampaikan usulan dalam musrenbang kecamatan			70%	8.680.000					70%	8.680.000	Kecamatan Pariaman Tengah
						Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti 1)			100%						100%		Kecamatan Pariaman Tengah
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					8.680.000						8.680.000	Kecamatan Pariaman Tengah
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat			12 bulan	8.680.000	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Semua Kelurahan				12 bulan	8.680.000	Kecamatan Pariaman Tengah
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat yang menyampaikan usulan dalam musrenbang kelurahan			70%	24.935.000					70%	24.935.000	Kecamatan Pariaman Tengah
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif 1)			100%						100%		Kecamatan Pariaman Tengah
						IKM Kelurahan			95%						98%		Kecamatan Pariaman Tengah
						IKM Desa			97%						98%		Kecamatan Pariaman Tengah
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					6.000.000						6.000.000	Kecamatan Pariaman Tengah
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya pembinaan UKS			12 bulan	6.000.000	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Semua Kelurahan				12 bulan	6.000.000	Kecamatan Pariaman Tengah
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					18.935.000						18.935.000	Kecamatan Pariaman Tengah
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya musrenbang kecamatan			12 bulan	18.935.000	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Semua Kelurahan				12 bulan	18.935.000	Kecamatan Pariaman Tengah
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dilakukan pembinaan			100%	20.200.000					100%	20.200.000	Kecamatan Pariaman Tengah
						Persentase Kelurahan yang dilakukan pembinaan			100%						100%		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					20.200.000						20.200.000	Kecamatan Pariaman Tengah
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan			12 bulan	20.200.000					12 bulan	20.200.000	Kecamatan Pariaman Tengah
																TOTAL	8.581.098.680

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target 2022	Pagu Indikatif		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM			100%	1.663.083.201					100%	1.663.083.201	KesbangPol
							Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat			BB						BB		KesbangPol
							Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan			100%						100%		KesbangPol
8	01	01	2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.500.000						5.500.000	KesbangPol
8	01	01	2,01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan kesbangpol 2021 yang disusun Realisasi program dan kegiatan kesbangpol tahun 2021 yang disusun			1 dokumen 4 laporan	5.500.000					1 dokumen 4 laporan	5.500.000	KesbangPol
8	01	01	2,02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.541.335.751						1.541.335.751	KesbangPol
8	01	01	2,02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang dibayarkan gajinya perbulan Jumlah Pegawai yang dibayarkan TPP perbulan			14 Bulan 12 Bulan	1.483.435.751					14 Bulan 12 Bulan	1.483.435.751	KesbangPol
8	01	01	2,02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Honorarium pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan			12 bulan	57.900.000					12 bulan	57.900.000	KesbangPol
8	01	01	2,06			Administrasi Umum Perangkat Daerah					65.000.000						65.000.000	KesbangPol
8	01	01	2,06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan yang disediakan			12 bulan	5.000.000					12 bulan	5.000.000	KesbangPol
8	01	01	2,06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang di ikuti			12 bulan	60.000.000					12 bulan	60.000.000	KesbangPol
8	01	01	2,08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan					18.480.000						18.480.000	KesbangPol
8	01	01	2,08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola			3 jenis	400.000					3 jenis	400.000	KesbangPol
8	01	01	2,08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa, peralatan dan bahan kebersihan kantor			1 tahun	18.080.000					1 tahun	18.080.000	KesbangPol
8	01	01	2,09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah					32.767.450						32.767.450	KesbangPol
8	01	01	2,09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara			5 unit	25.947.450					5 unit	25.947.450	KesbangPol
8	01	01	2,09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara			7 unit	4.380.000					7 unit	4.380.000	KesbangPol
8	01	01	2,09	07		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara			5 unit	2.440.000					5 unit	2.440.000	KesbangPol

8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					49.200.000						49.200.000	KesbangPol
8	01	02	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					49.200.000						49.200.000	KesbangPol
8	01	02	2,01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti diklat bela negara		100 Orang		49.200.000				100 Orang		49.200.000	KesbangPol
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partai Politik dan Ormas Yang aktif 1)		90,64%		76.865.000					90,64%	76.865.000	KesbangPol
8	01	03	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan					76.865.000						76.865.000	KesbangPol
8	01	03	2,01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Jumlah Partai politik yang difasilitasi Jumlah peserta diklat		1 kegiatan 9 Partai politik 27 orang		76.865.000				1 kegiatan 9 Partai politik 27 orang		76.865.000	KesbangPol
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA					17.500.000						17.500.000	KesbangPol
8	01	05	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					17.500.000						17.500.000	KesbangPol
8	01	05	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Jumlah Promosi anti narkoba Pengurus FKUB yang mengikuti		2 kegiatan 4 buah 20 Orang		17.500.000				2 kegiatan 4 buah 20 Orang		17.500.000	KesbangPol
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik yang terjadi di tengah masyarakat 1)		100%		314.295.000					100%	314.295.000	KesbangPol
8	01	06	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					314.295.000						314.295.000	KesbangPol

8	01	06	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Jumlah peserta TOT			2 kegiatan 50 Orang	314.295.000					2 kegiatan 50 Orang	314.295.000	KesbangPol
TOTAL																2.120.943.201	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari setiap aspek dan fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota sesuai dengan kewenangan yang ada.

6.1 Indikator Kinerja Utama Kota Pariaman Tahun 2022

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2022, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022
Pemerintah Kota Pariaman

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian 2022
1	2	3	4
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	78,46
2	Angka Pertumbuhan Ekonomi	%	4 %
3	Angka Kemiskinan	%	3,90
4	Indeks Gini (Gini Ratio)	Nilai	0,290

6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 6.2.



Tabel 6.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Pariaman Tahun 2022

No	Aspek/fokus/bidang urusan/ indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Tahun 2022
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,0
2	PDRB (ADHB) Perkapita (2010=100)	(Rp/Juta)	62,00
3	Indeks Gini	Nilai	0,280
4	Indeks Daya Beli Masyarakat	(Rp/Juta)	13,6
5	Presentase Pertumbuhan Spending Of Money	%	4,5
	Fokus Kesejahteraan Sosial		
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	78,46
2	Tingkat Kemiskinan	%	3,90
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,0
4	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,60
5	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,68
6	Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,50
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	86,65 (Baik)
8	Opini WTP BPK Terhadap LKPD	Opini	WTP
9	Indeks Ketentraman dan ketertiban	%	64,6
	Fokus Seni Budaya dan Olah Raga		
1	-	-	-
I	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	Urusan Pendidikan		
a	Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	14,68
b	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	11,60
c	Rata – rata nilai Ujian Nasional SMP	%	60
d	Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	%	100
e	Angka Kelulusan (AL) SMP/ MTs	%	99,7
f	Jumlah Sekolah Berakreditasi A	Sekolah	39
2	Urusan Kesehatan		
a	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,50
b	Indeks Keluarga Sehat	Nilai	0,175
3	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		
a	Persentase panjang jalan kondisi mantap	%	68,10
b	Persentase jalan yang memiliki saluran drainase/gorong-gorong yang berfungsi baik	%	38,69



c	Presentase Jaringan Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik	%	78,60
d	Persentase kecukupan luasan Lahan RTH publik	%	35,10
e	Persentase Ketersediaan Bangunan Utama Pemerintah	%	93,40
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
a	Jumlah Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	200
b	Presentase Penurunan Lingkungan Permukiman Kukum	%	1 Ha (75 %)
c	Persentase Akses Sanitasi	%	20 %
d	Persentase Penduduk Berakses Air Mlnum	%	80
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
a	Indeks Ketahanan Daerah	%	65
b	Indeks Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	64
c	Indeks Penanganan Gangguan dan Ancaman Trantibum	%	63
d	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	95
e	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	Menit	15
f	Proporsi sarana prasarana yang tersedia sesuai standard	%	80
g	Proporsi personil penanggulangan kebakaran yang terlatih dan kompeten	%	95
6	Sosial		
a	Persentasi Penurunan Angka PMKS	%	65
b	Persentase KK sangat miskin mendapatkan Jaminan Perlindungan Sosial melalui PKH dan bentuk lainnya	%	48
II	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	Urusan Ketenagakerjaan		
a	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,0
b	Persentase Peningkatan Kesempatan Kerja	%	13
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
a	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	55,00
3	Urusan Pangan		
a	Skor PPH	%	89
b	Tingkat Keamanan Pangan	Indeks	Tinggi
4	Urusan Pertanahan		
a	Persentase sertifikasi aset tanah & bangunan	%	68,50



	pemko		
5	Urusan Lingkungan Hidup		
a	Penurunan luas permukiman kumuh	Ha	0
b	Jumlah Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	200
c	Persentase Ketersediaan Jalan Pedesaan	%	83
d	Persentase Ketersediaan Drainase Pedesaan	%	45
e	Persentase akses sanitasi layak	%	23
f.	Persentase penduduk berakses air minum	%	80
g.	Indeks Kualitas Udara	%	92
h.	Indeks Kualitas Air	%	50
i.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	%	33
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
a	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan)	Nilai	86 (Baik)
b	Presentase Cakupan kepemilikan KTP	%	98
c	Prosentase Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP – Elektronik)	%	97
d	Persentase Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	80
e	Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	%	92
F	Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Kematian	%	79
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
a	Persentase kelembagaan Desa Yang berkualitas	%	80
b	Tingkat Swadaya Masyarakat	%	65
C	Jumlah Desa Maju	Desa	46
8	Urusan Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana		
a	Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR	%	66,20
b	Cakupan PUS yang ingin yang ber-KB tidak terpenuhi (Unmmet Need)	%	15,80
9	Perhubungan		
a	Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Skala	0,00129
b	Nilai survey IKM Pelayanan transportasi	Angka	80,15 (Baik)
10	Urusan Komunikasi dan Informatika		
a	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,0
b	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	80
11	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		
a	Persentase UMKM Terhadap UKM	%	24,5



b	Presentase Koperasi Berkualitas	%	62,25
c	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	79
12	Urusan Penanaman Modal		
a	IKM Pelayanan Perizinan	Nilai	88,50 (Sangat Baik)
b	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	1,4
13	Urusan Kepemudaan dan Olahraga		
a	Jumlah Medali Yang Diperoleh Pada Event Tingkat Propinsi	Medali	150
b	Jumlah Medali Yang Diperoleh Pada Event Tingkat Nasional	Medali	8
c	Jumlah Pemuda Berprestasi Tk. Provinsi	Orang	4
d	Jumlah Pemuda Berprestasi Tk. Nasional	Orang	2
14	Urusan Statistik		
a	Persentase ketersediaan Data Sektoral	%	70
15	Urusan Persandian		
a	Indek Keamanan Informasi (KAMI)	Level	2
16	Urusan Kebudayaan		
a	Jumlah budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata	Jenis	13
16	Urusan Perpustakaan		
a	Jumlah pengunjung perpustakaan	orang	8.500
17	Urusan Kearsipan		
a	Presentase Perangkat Daerah Yang Menata Arsip Dengan Baik dan sesuai dengan SOP	%	50
b	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	%	45
III	URUSAN PILIHAN		
1	Urusan Kelautan Dan Perikanan		
a	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	6.660
2	Urusan Pariwisata		
a	Jumlah Kunjungan wisatawan	Orang	5, 5 (Juta)
b	Rata-rata lama Tinggal	Hari	1,9
3	Urusan Pertanian		
a	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	17,00
b	Jumlah Produksi Pertanian (padi)	Ton	21.527
c	Jumlah Populasi Ternak	Ekor	2.466
d	Jumlah Produksi Peternakan	Ton	691.404



4	Urusan Perdagangan		
a	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (2010=100)	%	14,00
b	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	2,5
5	Urusan Perindustrian		
a	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	9,2
b	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	%	1,4
IV	FUNGSI PENUNJANG URUSAN		
1	Perencanaan		
a.	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen Perencanaan	%	83
b.	Persentase OPD yang kinerja tercapai	%	76
c.	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan	%	82
d.	Persentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan	%	65
2	Pengawasan		
a	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3
b	Nilai Maturitas SPIP Kota Pariaman	Level	3,70 (Level)
c	Jumlah OPD/unit kerja yang ditetapkan sebagai zona integritas WBK/WBBM di Kota Pariaman	OPD/Unit Kerja	4
d	Persentase temuan yang ditindak lanjuti	%	88
e	Persentase Penyelesaian Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	%	100
3	Keuangan		
a	Opini laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP
b	Kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah	%	14,30
4	Kepegawaian		
a	Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi	%	75
b	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai	%	0,4
c	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi manajerial	%	50
d	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi teknis	%	45
e	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	88,35 (Amat Baik)
5	Penelitian dan Pengembangan		
a	Persentase pemanfaatan dokumen penelitian dan	%	65



	pengembangan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan		
V	FUNGSI PENDUKUNG URUSAN		
1	Kesekretariat Daerah		
a	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai	BB
b	Indeks RB	Kategori	60
c	Peringkat LPPD	Kategori	Sangat Tinggi
d	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori	86,65 (Baik)
2	Kesekretariat DPRD		
a	Indeks kepuasan pimpinan & anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Skor	86
b	Persentase Ranperda Yang Disahkan Tepat Waktu dan Sesuai Aturan	%	100
VI	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
1	Kesatuan Bangsa dan Politik		
a	Persentase penanganan konflik yg terjadi di tengah masyarakat	%	100
b	Indeks Demokrasi	%	69,10
c	Persentase ormas yang aktif	%	93,40
2	Penanggulangan Bencana Daerah		
a	Indeks Ketahanan Daerah	%	65
VII	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
1	Kecamatan Utara		
a	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	86,10
b	Tingkat Swadaya Masyarakat	%	75
c	Indeks Desa tenteram dan tertib	%	73,35
2	Kecamatan Tengah		
a	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	86,40
b	Tingkat Swadaya Masyarakat	Desa	4
c	Jumlah Desa Mandiri	Desa	2
d	Jumlah Kelurahan dengan Nilai Pelayanan Gabungan > 80	Kelurahan	9
e	Indeks Desa tenteram dan tertib	%	72,95
3	Kecamatan Selatan		
a	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	86,80
b	Tingkat Swadaya Masyarakat	Desa	4
c	Indeks Desa tenteram dan tertib	%	73,55
4	Kecamatan Timur		
a	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	86,80
b	Jumlah Desa Mandiri	Desa	4



c	Indeks Desa tenteram dan tertib	%	73,55
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH		
1	Produktivitas Total Daerah	Rp.Juta	86,80
2	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp. Ribu	1,92
3	Nilai Tukar Petani	%	100,73
4	Rasio Ketergantungan	%	56,48
5	Daya Beli Masyarakat	(Juta/Rp)	13,6



BAB VII

PENUTUP



BAB VII PENUTUP

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pariaman tahun 2022 merupakan arahan program dan kegiatan prioritas yang disusun untuk mencapai target tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. RKPD Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 yang bertema **“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah.”** Program dan kegiatan prioritas pada RKPD tahun 2022 disusun mengikuti prinsip money follow program dengan orientasi pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Penyusunan RKPD tahun 2022 dilakukan dengan melihat keserasiannya dengan prioritas nasional dan prioritas Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya RKPD ini menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah di tahun 2022.

Pariaman, Juli 2021
WALIKOTA PARIAMAN



DR. GENIUS UMAR, S.Sos.M.Si





PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

BAPPEDA

TAHUN 2021